



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026





Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 195 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 akan berakhir masa berlakunya dan RPJMD berikutnya belum dapat disusun sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru pada pilkada serentak tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Bupati yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bekasi 2011-2031.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra-PD Tahun 2023-2026 adalah dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun, terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
15. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD atau RPD.
22. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
23. Proyek strategis adalah penjabaran lebih detail dari program prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2

RPD merupakan:

- a. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, perkiraan pendanaan, dan program perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.
- b. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPD adalah sebagai pedoman dalam:
 - a. penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan RKPD.
- (2) Tujuan penetapan RPD adalah untuk:
 - a. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota lain yang berdekatan;
 - b. memberikan fokus dan target pembangunan dalam rangka optimalisasi kinerja daerah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih terukur, terarah, efektif, dan efisien serta dapat menyelesaikan permasalahan utama daerah;
 - c. untuk menjamin keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana strategis perangkat daerah.

BAB II
ISI DAN URAIAN RPD

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian RPD sebagaimana dimaksud pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM
Memuat gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
 - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Memuat kinerja dan kebijakan keuangan masa lalu serta perkiraan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk 4 (empat) tahun ke depan.

- b. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Memuat penjelasan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis nasional dan regional serta isu strategis daerah yang perlu diselesaikan.
 - c. BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan.
 - d. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
Memuat dan menjelaskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan misi pembangunan
 - e. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan kebijakan umum pendanaan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja program perangkat daerah.
 - f. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Menjelaskan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah serta indikator makro yang menjadi target dan capaian.
 - g. BAB IX : PENUTUP
Menjelaskan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut.
 - h. Lampiran
Menjelaskan informasi tambahan yang tidak dapat dicantumkan pada Bab I-IX.
- (2) Isi dan uraian RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengendalian dan evaluasi atas perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian dan evaluasi atas pencapaian target tujuan, sasaran, program, serta efektivitas kebijakan terhadap capaian pembangunan dan penyelesaian permasalahan daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERUBAHAN RPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain: bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di: Cikarang Pusat

Pada tanggal : 20 Juni 2022


Pj. BUPATI BEKASI
DANI RAMDAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR..... vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 3

1.3 Hubungan Antardokumen..... 7

1.4 Maksud dan tujuan..... 8

1.5 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Aspek Geografi dan Demografi..... 12

2.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi..... 12

2.1.2 Kerawanan Bencana..... 17

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah..... 21

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... 24

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.... 24

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial..... 38

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... 46

2.3 Aspek Pelayanan Umum..... 47

2.3.1 Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib..... 64

2.3.2 Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan..... 100

2.4 Aspek Daya Saing Daerah..... 109

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... 109

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur..... 116

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi..... 121

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia..... 124

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu..... 126

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2017-2020..... 126

3.1.2 Neraca Daerah Tahun 2017-2020..... 136

3.2 Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu..... 142

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Tahun 2017-2020.. 144

3.2.2 Analisis Pembiayaan Tahun 2017-2020..... 150

3.3 Kerangka Pendanaan..... 153

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2023-2026..... 153

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan..... 158



| | | |
|-----------------|--|-----|
| BAB IV | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS | |
| 4.1 | Permasalahan Pembangunan..... | 160 |
| 4.1.1 | Permasalahan Berdasarkan Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah..... | 160 |
| 4.1.2 | Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah..... | 169 |
| 4.2 | Isu Strategis..... | 175 |
| 4.2.1 | Isu Strategis Nasional..... | 175 |
| 4.2.2 | Isu Strategis Jawa Barat..... | 196 |
| 4.2.3 | Isu Strategis Kabupaten Bekasi..... | 200 |
| BAB V | TUJUAN DAN SASARAN | |
| 5.1 | Tujuan..... | 204 |
| 5.2 | Sasaran..... | 205 |
| BAB VI | STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS | |
| 6.1 | Strategi dan Arah Kebijakan..... | 211 |
| 6.2 | Program Prioritas..... | 218 |
| BAB VII | KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | |
| 7.1 | Kerangka Pendanaan..... | 307 |
| 7.2 | Program Perangkat Daerah..... | 306 |
| BAB VIII | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | |
| 8.1 | Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Makro Daerah Tahun 2017-2021..... | 316 |
| 8.2 | Indikator Kinerja Tahun 2023-2026..... | 334 |
| BAB IX | PENUTUP..... | 341 |
| LAMPIRAN | | |
| I | Rencana Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 | |
| II | Rumus Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 | |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------|---|----|
| 2.1 | Luas, Tinggi Wilayah, dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2021..... | 13 |
| 2.2 | Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2020-2021..... | 16 |
| 2.3 | Jumlah Bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 18 |
| 2.4 | Jumlah Korban dan Kerusakan Akibat Bencana di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 19 |
| 2.5 | Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi, 2018–2021..... | 19 |
| 2.6 | Target dan Realisasi PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 27 |
| 2.7 | Distribusi Presentasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 28 |
| 2.8 | Rata–Rata Pengeluaran per Kapita Seminggu menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021 (Rupiah/Kapita/Minggu)..... | 35 |
| 2.9 | Target dan Realisasi Komponen IPM Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 40 |
| 2.10 | Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten dan Jawa Barat beserta Komponennya Tahun 2017-2020..... | 41 |
| 2.11 | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021..... | 41 |
| 2.12 | Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan berdasarkan Jenis Jaminan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021..... | 43 |
| 2.13 | Indeks Desa Membangun Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021..... | 45 |
| 2.14 | Jumlah Seniman berdasarkan Bidang Kesenian di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 46 |
| 2.15 | Jumlah Organisasi Kesenian Berdasarkan Bidang Kesenian di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 47 |
| 2.16 | Rekapitulasi Nilai IKM Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021..... | 50 |
| 2.17 | Capaian SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021..... | 52 |
| 2.18 | Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Target SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2021..... | 58 |
| 2.19 | Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Taman Kanak-Kanak atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022..... | 64 |
| 2.20 | Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Dasar atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022..... | 65 |
| 2.21 | Jumlah Fasilitas pada SD Negeri dan Swasta berdasarkan Kondisinya di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021..... | 66 |



| | | |
|------|--|-----|
| 2.22 | Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Menengah Pertama atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022..... | 70 |
| 2.23 | Jumlah Fasilitas pada SMP Negeri dan Swasta berdasarkan Kondisinya di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021..... | 71 |
| 2.24 | Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Menengah Atas atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022..... | 73 |
| 2.25 | Jumlah Fasilitas pada SMA dan SMK Negeri dan Swasta berdasarkan Kondisinya di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021..... | 74 |
| 2.26 | Jumlah SMA dan SMK Negeri dan Swasta menurut Ketersediaan Air di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021..... | 76 |
| 2.27 | Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang Mengulang dan Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021..... | 79 |
| 2.28 | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta yang Mengulang di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021..... | 80 |
| 2.29 | Jumlah Siswa SMP Negeri dan Swasta yang Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021..... | 82 |
| 2.30 | Jumlah Siswa SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang Mengulang di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021..... | 83 |
| 2.31 | Jumlah Siswa SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021..... | 84 |
| 2.32 | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019–2021..... | 86 |
| 2.33 | Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dan 2021..... | 87 |
| 2.34 | Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021.... | 88 |
| 2.35 | Distribusi Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan..... | 88 |
| 2.36 | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 89 |
| 2.37 | Sarana Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 89 |
| 2.38 | Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021..... | 95 |
| 2.39 | Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2021..... | 96 |
| 2.40 | Keadaan Keuangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021..... | 97 |
| 2.41 | Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri serta Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 98 |
| 2.42 | Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021..... | 102 |



| | | |
|------|--|-----|
| 2.43 | Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021..... | 102 |
| 2.44 | Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021..... | 103 |
| 2.45 | Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020..... | 104 |
| 2.46 | Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020..... | 104 |
| 2.47 | Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya dan Komoditas Utama di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020..... | 105 |
| 2.48 | Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 105 |
| 2.49 | Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Akomodasi di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 106 |
| 2.50 | Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi..... | 107 |
| 2.51 | Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran dan Pendapatan Pada Industri Besar dan Sedang serta Industri Mikro dan Kecil di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 109 |
| 2.52 | Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama (Rupiah) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021..... | 110 |
| 2.53 | Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi Tahun 2021..... | 111 |
| 2.54 | Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, serta Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021.. | 113 |
| 2.55 | Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021..... | 117 |
| 2.56 | Jumlah Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Rombongan Belajar, dan Ruang Kelas pada SD dan SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Ajaran 2019/2020..... | 118 |
| 2.57 | Jumlah Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Rombongan Belajar, dan Ruang Kelas pada SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Ajaran 2019/2020..... | 119 |
| 2.58 | Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, Posyandu, dan Polindes menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021..... | 120 |
| 2.59 | Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri selama Tahun 2017-2021 berdasarkan 12 Kabupaten/Kota dengan Nilai Investasi Terbesar di Jawa Barat Tahun 2021..... | 122 |
| 2.60 | Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017-2021..... | 123 |
| 3.1 | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2020..... | 127 |
| 3.2 | Persentase Realisasi Pengeluaran Daerah Tahun 2017-2020..... | 129 |
| 3.3 | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 130 |
| 3.4 | Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2017-2020..... | 137 |



| | | |
|------|--|-----|
| 3.5 | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 146 |
| 3.6 | Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 147 |
| 3.7 | Pengeluaran Wajib dan Mengikat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 149 |
| 3.8 | Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 151 |
| 3.9 | Komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018-2020..... | 152 |
| 3.10 | Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026..... | 155 |
| 3.11 | Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026..... | 156 |
| 3.12 | Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026..... | 157 |
| 3.13 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026..... | 158 |
| 4.1 | Kelemahan dan Ancaman yang Dihadapi oleh Kabupaten Bekasi.... | 160 |
| 4.2 | Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dengan Isu Strategis Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi..... | 202 |
| 5.1 | Indikator dan Target Tujuan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026..... | 205 |
| 5.2 | Indikator dan Target Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026..... | 207 |
| 5.3 | Keterkaitan antara Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi dengan Sasaran RPJMN dan RPJMD Jawa Barat..... | 208 |
| 6.1 | Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026..... | 211 |
| 6.2 | Program Prioritas Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026..... | 219 |
| 6.3 | Program Penunjang Proyek Strategis Daerah Tahun 2023-2026..... | 305 |
| 7.1 | Proporsi Pendanaan Program Prioritas dan Rutin Tahun 2023-2026... | 307 |
| 7.2 | Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026..... | 308 |
| 8.1 | Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 317 |
| 8.2 | Target dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 333 |
| 8.3 | Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023-2026..... | 333 |
| 8.4 | Indikator Kinerja Kunci Kabupaten bekasi Tahun 2023-2026..... | 335 |
| 8.5 | Indikator Makro Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026..... | 340 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------|---|----|
| 1.1 | Hubungan Antardokumen RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026..... | 7 |
| 2.1 | Peta Administrasi Kabupaten Bekasi..... | 12 |
| 2.2 | Suhu Udara Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020... | 14 |
| 2.3 | Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bekasi Menurut Penggunaan Lahan Utama Tahun 2020..... | 14 |
| 2.4 | Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2021..... | 15 |
| 2.5 | Piramida Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2021..... | 17 |
| 2.6 | Indeks Resiko Bencana Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2020..... | 18 |
| 2.7 | Jumlah Rumah Terendam yang Akibat Bencana Alam di Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dan 2021..... | 20 |
| 2.8 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan (Milyar Rupiah) serta Laju PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021 | 25 |
| 2.9 | PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)..... | 26 |
| 2.10 | Inflasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2015-2020..... | 30 |
| 2.11 | Gini Ratio Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021..... | 31 |
| 2.12 | Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021 (Ribu Jiwa)..... | 32 |
| 2.13 | 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Jawa Barat Tahun 2017-2021..... | 33 |
| 2.14 | Target dan Realisasi Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 33 |
| 2.15 | Garis Kemiskinan serta Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 34 |
| 2.16 | Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2019-2021..... | 35 |
| 2.17 | Rata-Rata Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional Menurut Sub Sektor Tahun 2020 (2018=100)..... | 36 |
| 2.18 | Indeks yang Diterima, Indeks yang Dibayar dan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (2018=100)..... | 37 |
| 2.19 | Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (2018=100)..... | 38 |
| 2.20 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2017-2021..... | 39 |
| 2.21 | Komponen IPM Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 39 |
| 2.22 | Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Kabupaten Bekasi Tahun 2017–2021..... | 42 |
| 2.23 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Bekasi, 2017–2021..... | 44 |
| 2.24 | Distribusi Persentase Rumah Tangga dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Bekasi Tahun 2021..... | 44 |



| | | |
|------|---|-----|
| 2.25 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021..... | 45 |
| 2.26 | Jumlah SD Negeri dan Swasta menurut Kepemilikan Toilet Siswa di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021..... | 68 |
| 2.27 | Jumlah SD Negeri dan Swasta menurut Ketersediaan Air di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021..... | 69 |
| 2.28 | Jumlah SMP Negeri dan Swasta menurut Kepemilikan Toilet Siswa di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021..... | 72 |
| 2.29 | Jumlah SMP Negeri dan Swasta menurut Ketersediaan Air di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021..... | 73 |
| 2.30 | Angka Partisipasi Murni dan Kasar Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021..... | 77 |
| 2.31 | Selisih Angka Partisipasi Murni dan Kasar Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021..... | 78 |
| 2.32 | Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019–2021 (km)..... | 90 |
| 2.33 | Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bekasi Tahun 2017–2021 (km)..... | 90 |
| 2.34 | Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 91 |
| 2.35 | Target dan Realisasi Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021..... | 92 |
| 2.36 | Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021..... | 93 |
| 2.37 | Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bekasi Tahun 2021..... | 94 |
| 2.38 | Kontribusi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021... | 99 |
| 2.39 | Jumlah produksi sampah dan sampah yang ditangani di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021..... | 99 |
| 2.40 | Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020..... | 100 |
| 2.41 | Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, serta Produksi Beras di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021..... | 101 |
| 2.42 | Jumlah Pasar Tradisional Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021..... | 107 |
| 2.43 | Distribusi Persentase PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Seri 2010 Tahun 2017-2021 (Persen)..... | 109 |
| 2.44 | Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran dan Pendapatan pada Industri Besar dan Sedang pada 10 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Perusahaan terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019... | 113 |
| 2.45 | Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2018-2020..... | 114 |
| 2.46 | Rata-Rata Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional Menurut Sub Sektor Tahun 2020 (2018=100)..... | 115 |
| 2.47 | Persentase Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Kondisi Baik Terbesar Tahun 2021..... | 116 |



| | | |
|------|--|-----|
| 2.48 | Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021..... | 121 |
| 2.49 | IPM Kabupaten/Kota dengan Peringkat Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2021..... | 124 |
| 2.50 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin pada 11 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Jawa Barat Tahun 2021..... | 125 |
| 2.51 | Jumlah Angkatan Kerja pada 8 Kabupaten/Kota dengan Angkatan Kerja Terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021..... | 125 |
| 3.1 | Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 132 |
| 3.2 | Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 133 |
| 3.3 | Solvabilitas Operasional Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 133 |
| 3.4 | Solvabilitas Jangka Pendek dan Layanan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 135 |
| 3.5 | Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Otonom..... | 136 |
| 3.6 | Rasio Lancar dan Cepat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 141 |
| 3.7 | Rasio Utang terhadap Aset dan Rasio Utang terhadap Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 142 |
| 3.8 | Proporsi Anggaran Belanja, Transfer, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 145 |
| 3.9 | Proporsi Realisasi Pengeluaran Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 146 |
| 3.10 | Proporsi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 150 |
| 3.11 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020..... | 151 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950. Secara singkat, terbentuknya Kabupaten Bekasi diawali dengan pembentukan Panitia Amanat Rakyat Bekasi yang dipelopori KH. Noer Alie, R. Supardi, Mayor Madnuin Hasibuan, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmayni yang menentang keberadaan RIS-Pasundan serta menuntut berdirinya kembali Negara Kesatuan RI. Kemudian rapat akbar yang dihadiri oleh puluhan ribu rakyat Bekasi, Tambun dan Cikarang diselenggarakan di Alun-Alun Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950. Rapat tersebut menyampaikan 4 tuntutan rakyat yang dikenal sebagai Resolusi Rakyat Bekasi, antara lain:

1. Penyerahan kekuasaan Pemerintah Federal kepada Republik Indonesia.
2. Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada Negara Republik Indonesia.
3. Tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain Pemerintahan Republik Indonesia.
4. Menuntut kepada pemerintah agar nama Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi.

Selain rapat akbar, upaya memperoleh dukungan dari berbagai pihak terus dilakukan oleh para pemimpin Panitia Amanat Rakyat Bekasi, diantaranya yaitu mendekati para pemimpin Masyumi dan tokoh militer, seperti: Mayor Lukas Kustaryo dan Moh. Moefreini Mukmin di Jakarta. Pengajuan usulan dilakukan tiga kali antara Bulan Februari sampai dengan Bulan Juni 1950 hingga akhirnya setelah dibicarakan dengan DPR RIS, Perdana Menteri Mohammad Hatta menyetujui penggantian nama Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi. Persetujuan pembentukan Kabupaten Bekasi semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.

Dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2023 serta dampak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur bahwa pemilu kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada

tahun 2024, maka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bekasi untuk periode selanjutnya tidak dapat dilaksanakan akibat kosongnya kursi kepala daerah terpilih. Untuk menjembatani kekosongan tersebut, maka kemudian dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang menginstruksikan kepada daerah tersebut untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPD Kabupaten Tahun 2023-2026 antara lain:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota sampai dengan tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten/kota tahun 2017-2022;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Pada Kabupaten Bekasi, penyusunan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 berjalan beriringan dengan penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023. Tahapan yang telah dilewati terkait penyusunan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 antara lain:

1. Penyusunan pemetaan permasalahan berdasarkan urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, yang telah dibahas bersama oleh Bappeda dengan perangkat daerah yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 23 Februari 2022 yang dilaksanakan untuk menjaring saran dan masukan atas rancangan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 sekaligus Rancangan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023.
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 2-15 Maret yang dilaksanakan sebagai sarana sinkronisasi antara usulan musrenbang desa/kelurahan dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sekaligus sarana sinkronisasi antara

rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bekasi pada tanggal 22-29 Maret 2022 sebagai sarana untuk memfinalisasi rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
5. Review Inspektorat atas Rancangan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026;
6. Fasilitasi Provinsi Jawa Barat atas Rancangan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026;
7. Rekomendasi penandatanganan Peraturan Bupati tentang RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Penetapan Peraturan Bupati tentang RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026.

Meski ditetapkan dengan peraturan bupati, namun kedudukan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 sejajar dengan RPJMD. RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan rancangan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 serta tahun-tahun berikutnya sampai disusunnya RPJMD yang baru.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);



10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;



19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);



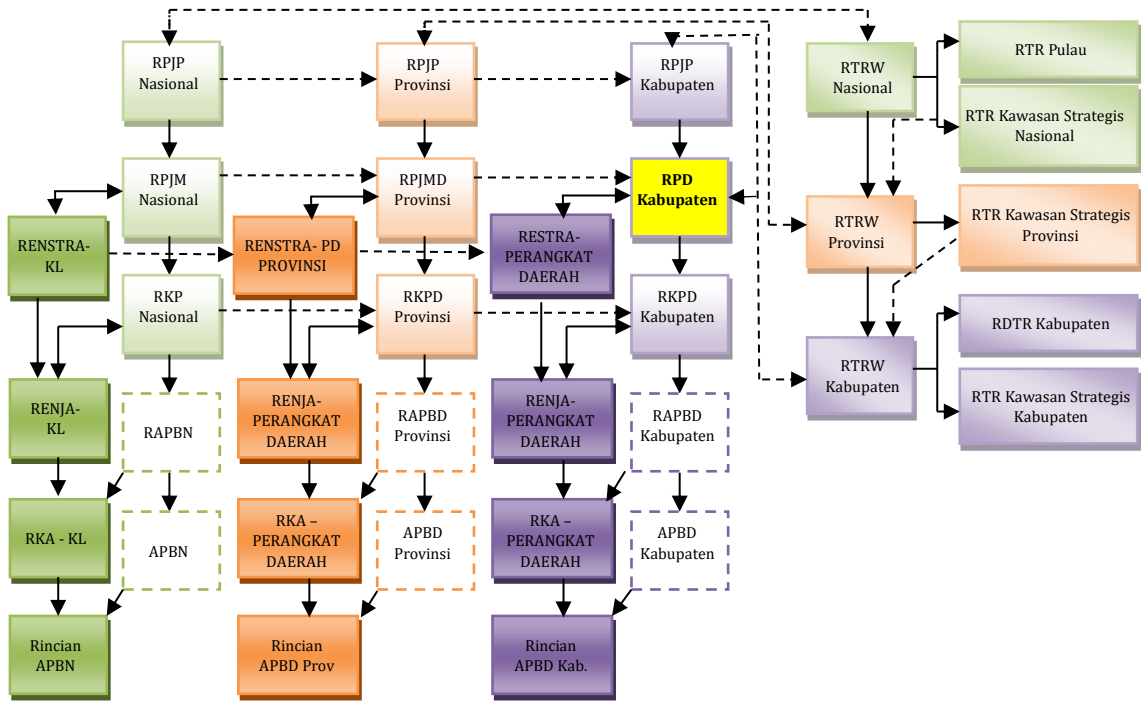
24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25).

1.3 Hubungan Antardokumen

RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 merupakan pengganti kekosongan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 yang tidak dapat disusun akibat berakhirnya masa jabatan Bupati Bekasi di tahun 2022 dan belum dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah yang baru akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Meski demikian, sebagaimana halnya RPJMD, penyusunan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, RPD juga disusun bersamaan dengan penyusunan Renstra perangkat daerah, dimana rancangan Renstra perangkat daerah akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPD, dan RPD yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Walau begitu, berbeda dengan RPJMD, perumusan kebijakan rencana pembangunan pada RPD Kabupaten Bekasi tidak diintegrasikan dengan kajian lingkungan hidup strategis. Dengan demikian, maka hubungan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dengan dokumen rencana lainnya digambarkan dengan sistematika sebagai berikut:

Gambar 1.1
Hubungan Antardokumen RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026





1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan arahan, panduan, atau pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 hingga dipilihnya kepala daerah yang baru.

Tujuannya adalah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi selama tahun 2023-2026 dapat tetap terarah, tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah, serta akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5 Sistematika Penulisan

RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPD, proses penyusunan RPD, kedudukan RPD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antardokumen

Menjelaskan hubungan RPD dengan dokumen lain yang relevan antara lain: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten, serta dokumen terkait lainnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

Bab II Gambaran Umum**2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Bagian ini menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut juga dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Selain itu, juga akan dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Juga akan dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah**3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu****3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2017-2020**

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah selama tahun 2017-2020.

3.1.2 Neraca Daerah Tahun 2017-2020

Bagian ini menguraikan perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio

solvabilitas dan analisis rasio aktivitas selama tahun 2017-2020.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Tahun 2017-2020

Bagian ini menguraikan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja selama tahun 2017-2020.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Tahun 2017-2020

Bagian menguraikan analisis pembiayaan selama tahun 2017-2020.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Bagian ini menguraikan proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Bagian ini menguraikan penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis

4.1 Permasalahan Pembangunan

Bagian ini menyajikan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPD.

4.2 Isu Strategis

Bagian ini menyajikan isu strategis yang disusun berdasarkan permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan.



Bab V Tujuan dan Sasaran

5.1 Tujuan

Bagian ini menjelaskan tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui program-program yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026.

5.2 Sasaran

Bagian ini menjelaskan sasaran pembangunan dari program-program yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Di samping itu, juga dijelaskan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan, sasaran, serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menjelaskan indikator kinerja daerah yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab IX Penutup

Menjelaskan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut.

Lampiran

Menjelaskan informasi tambahan yang tidak dapat dicantumkan pada Bab I-IX.

BAB II GAMBARAN UMUM

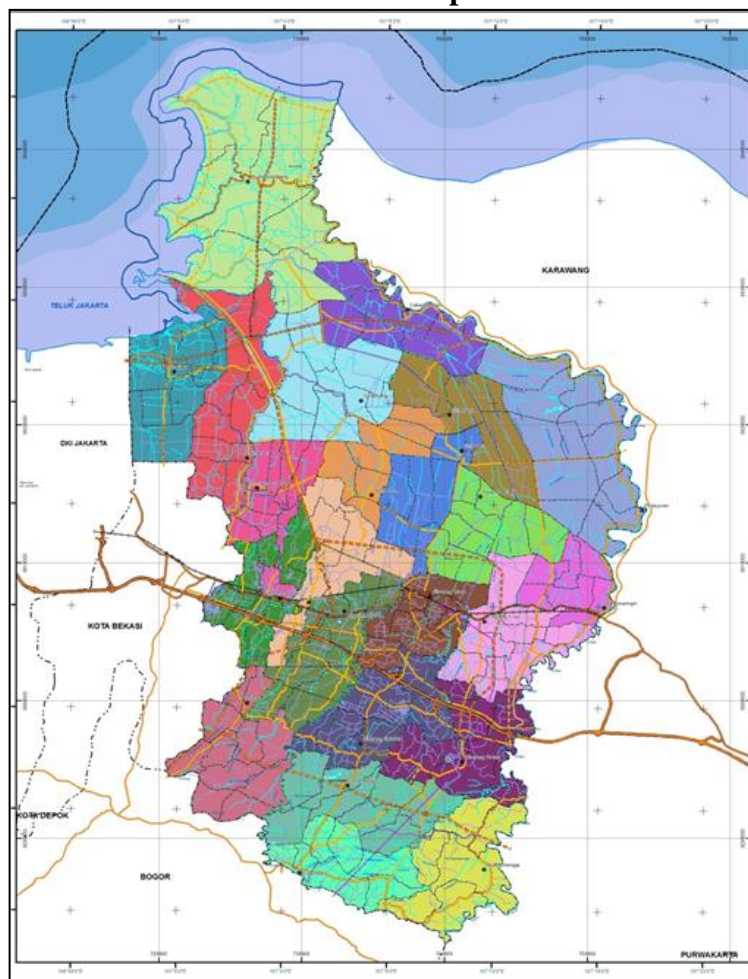
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Bekasi terletak pada posisi 6°10'53"-6°30'6" Lintang Selatan dan 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur. Kabupaten Bekasi memiliki wilayah seluas 1.273,88 km² yang terbagi ke dalam 23 kecamatan, 7 kelurahan (Bahagia, Kebalen, Wanasari, Telaga Asih, Sertajaya, Jatimulya, Kertasari) dan 180 desa. Secara administratif, Kabupaten Bekasi berbatasan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya, antara lain sebagai berikut:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Kabupaten Bogor
- Barat : Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi
- Timur : Kabupaten Karawang

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Bekasi



Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031



Dari 23 kecamatan yang ada, kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Bekasi adalah Kecamatan Muaragembong dengan luas wilayah sebesar 140,09 km², dan terkecil yaitu Kecamatan Kedungwaringin dengan luas wilayah sebesar 31,53 km². Topografi Kabupaten Bekasi terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan dengan ketinggian lokasi antara 6-115 meter dan kemiringan 0-25°. Kecamatan dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah Kecamatan Bojongmangu dengan ketinggian 95 mdpl, dan terendah Kecamatan Muaragembong dengan ketinggian 3 mdpl. Sedangkan untuk kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Muaragembong dan Cabangbungin, dan terdekat adalah Kecamatan Cikarang Pusat.

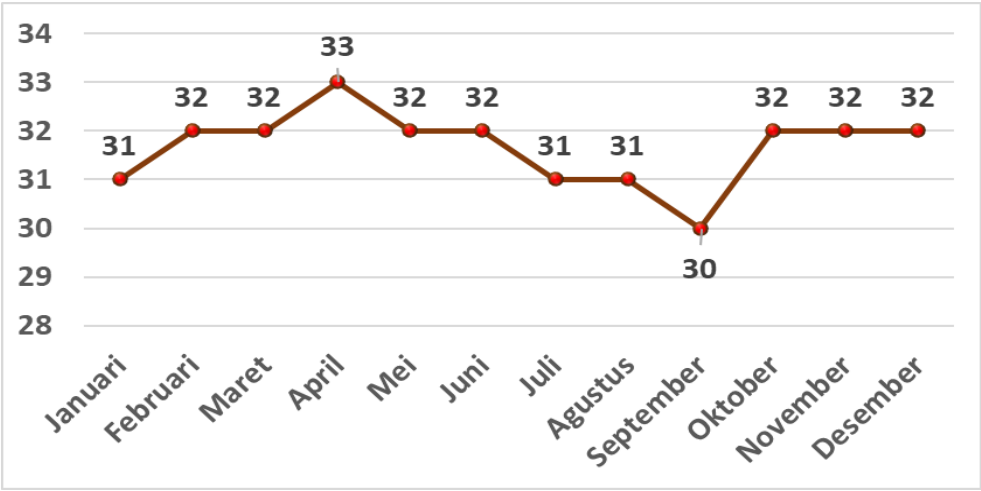
Tabel 2.1
Luas, Tinggi Wilayah, dan Jarak Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

| No. | Kecamatan | Luas (Km2) | Tinggi Wilayah (mdpl) | Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km) |
|-----|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. | Setu | 62,16 | 40 | 25 |
| 2. | Serang Baru | 63,8 | 59 | 12 |
| 3. | Cikarang Pusat | 47,6 | 46 | 1 |
| 4. | Cikarang Selatan | 51,74 | 15 | 8 |
| 5. | Cibarusah | 50,39 | 65 | 15 |
| 6. | Bojongmangu | 60,06 | 95 | 15 |
| 7. | Cikarang Timur | 51,31 | 16 | 13 |
| 8. | Kedungwaringin | 31,53 | 15 | 20 |
| 9. | Cikarang Utara | 43,3 | 16 | 4 |
| 10. | Karangbahagia | 46,1 | 4 | 30 |
| 11. | Cibitung | 45,3 | 41 | 15 |
| 12. | Cikarang Barat | 53,69 | 35 | 20 |
| 13. | Tambun Selatan | 43,1 | 19 | 26 |
| 14. | Tambun Utara | 34,42 | 16 | 47 |
| 15. | Babelan | 63,6 | 7 | 45 |
| 16. | Tarumajaya | 54,63 | 5 | 58 |
| 17. | Tambelang | 37,91 | 6 | 23 |
| 18. | Sukawangi | 67,19 | 4 | 40 |
| 19. | Sukatani | 37,52 | 11 | 24 |
| 20. | Sukakarya | 42,4 | 8 | 30 |
| 21. | Pebayuran | 96,34 | 7 | 30 |
| 22. | Cabangbungin | 49,7 | 4 | 65 |
| 23. | Muaragembong | 140,09 | 3 | 65 |
| | JUMLAH | 1.273,88 | | |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Suhu udara rata-rata bulanan di Kabupaten Bekasi berkisar antara 28°-32°C. Namun di tahun 2020, suhu udara terendah selama setahun tercatat sebesar 30°C yang terjadi di bulan September dan tertinggi mencapai 33°C yang terjadi di bulan April. Selain kedua bulan tersebut, suhu udara rata-rata bulanan di Kabupaten Bekasi berkisar antara 31-32°C.

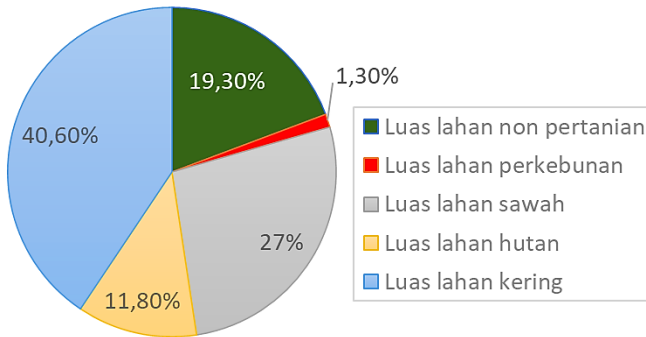
Gambar 2.2
Suhu Udara Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020



Sumber: <https://dataalam.menlhk.go.id/udara/terbaru>

Untuk tahun 2020, penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 40,6% lahan kering, 27% lahan sawah, 19,3% lahan non pertanian, 11,8% lahan hutan, dan 1,3%. Di tahun ini terjadi perubahan luas penggunaan lahan, dimana luas permukiman dan perkebunan masing-masing meningkat sebesar 5,81% dan 2,14%. Di sisi lain, luas lahan perikanan dan sawah justru berkurang sebesar 11,92% dan 14,37%. Sedangkan lahan hutan di Kabupaten Bekasi pada tahun yang sama berdasarkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat terdiri dari hutan rakyat seluas 915 Ha dan kawasan hutan negara seluas 9.666,91 Ha, yang terbagi kembali menjadi hutan lindung seluas 4.772,11 Ha dan hutan produksi terbatas seluas 4.894,81 Ha.

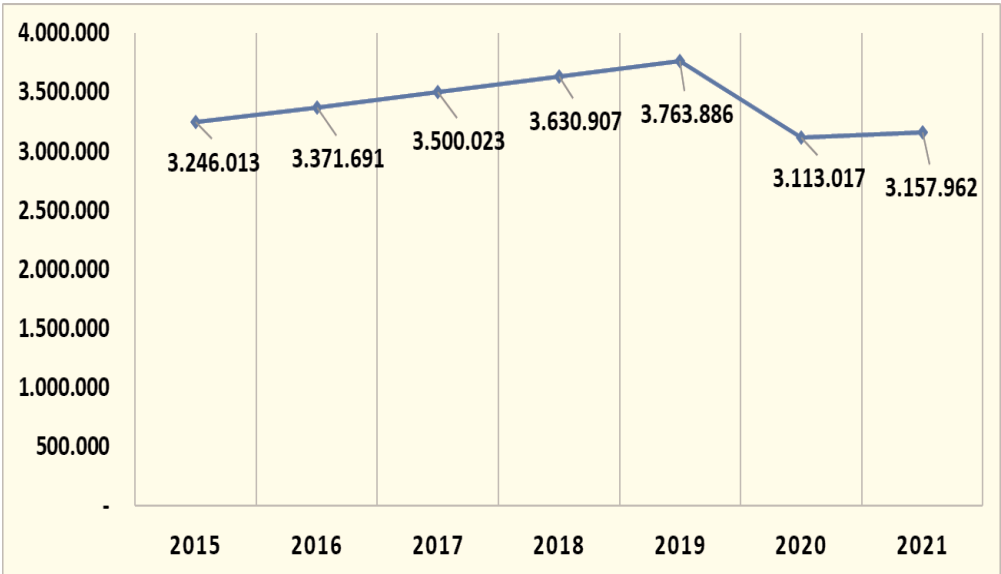
Gambar 2.3
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bekasi Menurut Penggunaan Lahan Utama Tahun 2020



Sumber: <https://dataalam.menlhk.go.id/luaskawasan/2020/jawa-barat/kabupaten-bekasi>

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan, dari 3.246.013 jiwa ke angka 3.763.886 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2020 dengan merebaknya Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Penurunan ini diperkirakan terjadi akibat arus penduduk keluar yang disebabkan oleh pekerja yang kembali ke kampung halamannya karena kebijakan *work from home* maupun PHK karena kondisi perusahaan yang tidak stabil atau gulung tikar, juga yang meninggal akibat terpapar Covid-19. Seiring dengan membaiknya perekonomian daerah di tahun 2021, penduduk di Kabupaten Bekasi kembali mengalami peningkatan dengan jumlah sebanyak 3.157.962 jiwa.

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id> dan Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Penyebaran penduduk di Kabupaten Bekasi tidak merata dan cenderung menumpuk di wilayah yang berdekatan dengan industri dan Kota Bekasi yang lebih dahulu berkembang. Selain karena motif ekonomi, ketersediaan infrastruktur publik dan konektivitas wilayah merupakan penyebab wilayah-wilayah tersebut lebih diminati dibandingkan wilayah sepi penduduk yang sebagian besar didominasi oleh wilayah pertanian. Untuk tahun 2021, wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Tambun Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 430.565 jiwa dan kepadatan sebesar 9.990 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu dengan jumlah penduduk sebanyak 27.986 jiwa. Adapun kecamatan dengan kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Muaragembong dengan kepadatan 290 jiwa/km² akibat wilayahnya yang luas.



Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi
berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2020-2021

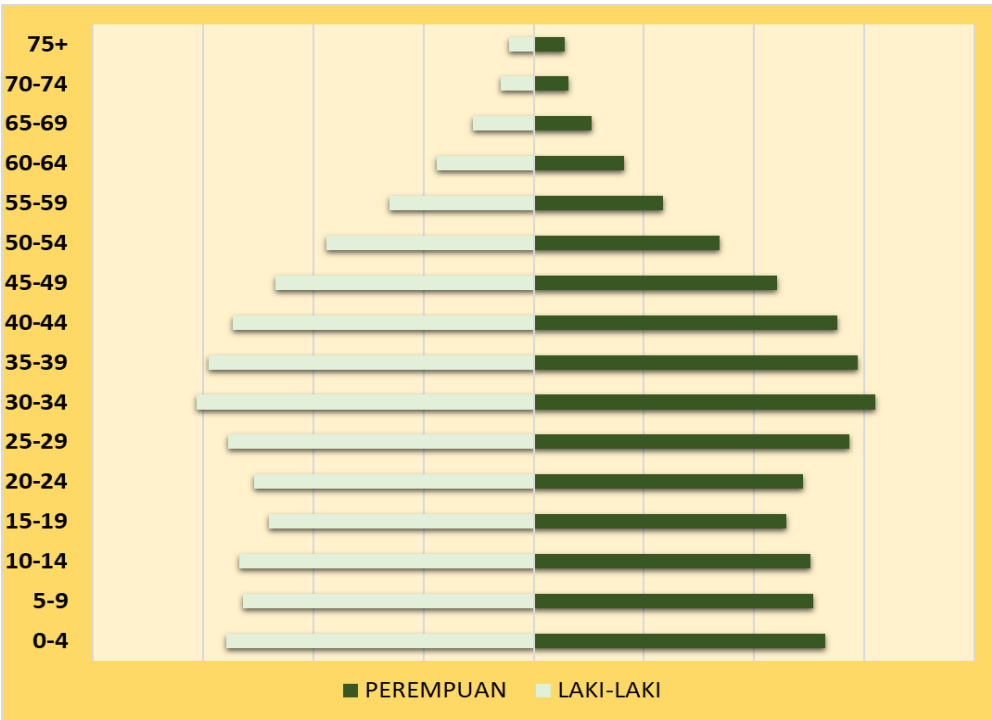
| NO. | KECAMATAN | LUAS (Km2) | PENDUDUK (ribu) | | KEPADATAN PENDUDUK (per km2) | |
|-----|------------------|---------------|-----------------|-----------|------------------------------------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 1. | Tambun Selatan | 43,1 | 431,038 | 430,565 | 10.001 | 9.990 |
| 2. | Babelan | 63,6 | 270,050 | 275,572 | 4.246 | 4.333 |
| 3. | Cibitung | 45,3 | 242,557 | 246,602 | 5.354 | 5.444 |
| 4. | Cikarang Utara | 43,3 | 228,937 | 230,645 | 5.287 | 5.327 |
| 5. | Cikarang Barat | 53,69 | 205,333 | 205,372 | 3.824 | 3.825 |
| 6. | Tambun Utara | 34,42 | 194,405 | 200,225 | 5.648 | 5.817 |
| 7. | Setu | 62,16 | 173,656 | 180,460 | 2.794 | 2.903 |
| 8. | Cikarang Selatan | 51,74 | 161,534 | 162,746 | 3.122 | 3.145 |
| 9. | Serang Baru | 63,8 | 149,527 | 154,270 | 2.344 | 2.418 |
| 10. | Tarumajaya | 54,63 | 132,756 | 134,698 | 2.430 | 2.466 |
| 11. | Karangbahagia | 46,1 | 123,238 | 126,411 | 2.673 | 2.742 |
| 12. | Cikarang Timur | 51,31 | 106,478 | 107,608 | 2.075 | 2.097 |
| 13. | Pebayuran | 96,34 | 102,285 | 102,808 | 1.062 | 1.067 |
| 14. | Cibarusah | 50,39 | 94,802 | 96,612 | 1.881 | 1.917 |
| 15. | Sukatani | 37,52 | 93,491 | 95,694 | 2.492 | 2.550 |
| 16. | Kedungwaringin | 31,53 | 69,437 | 70,636 | 2.202 | 2.240 |
| 17. | Cikarang Pusat | 47,6 | 67,336 | 68,166 | 1.415 | 1.432 |
| 18. | Cabangbungin | 49,7 | 55,488 | 56,048 | 1.116 | 1.128 |
| 19. | Sukakarya | 42,4 | 52,016 | 52,819 | 1.227 | 1.246 |
| 20. | Sukawangi | 67,19 | 49,649 | 50,115 | 739 | 746 |
| 21. | Tambelang | 37,91 | 40,862 | 41,258 | 1.078 | 1.088 |
| 22. | Muaragembong | 140,09 | 40,321 | 40,646 | 288 | 290 |
| 23. | Bojongmangu | 60,06 | 27,821 | 27,986 | 463 | 466 |
| | JUMLAH | 1.230,78 | 3.113,017 | 3.157,962 | 2.444 | 1.644 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Dilihat dari proporsi antara penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bekasi untuk tahun 2021 adalah sebesar 103,14, turun dari angka 103,2 di tahun 2020. Rasio ini menunjukkan bahwa di setiap 100 orang penduduk wanita, terdapat 103 orang penduduk laki-laki atau secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bekasi lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Walaupun lebih besar, namun jumlah antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bekasi tidak terpaut terlalu jauh atau cukup seimbang. Sementara apabila dilihat dari kelompok usia, penduduk Kabupaten Bekasi didominasi oleh penduduk usia produktif dengan jumlah sebanyak 2.258.518 jiwa atau sebanyak 72% dan non produktif sebanyak 899.444 jiwa atau sebanyak 28% dengan rasio ketergantungan sebesar 39,82% atau setiap 100 orang usia produktif menanggung 39-40 orang usia non produktif. Banyaknya usia

produktif tersebut dapat menjadi potensi bila dimanfaatkan secara optimal mengingat Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah industri masih membutuhkan banyak sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Namun di sisi lain, bila tidak termanfaatkan maka akan menjadi beban dalam pengangguran dan kemiskinan. Dengan rasio ketergantungan yang masih masuk ke dalam kategori rendah, penduduk usia produktif di Kabupaten Bekasi seyogyanya memiliki kesempatan yang lebih besar dalam upaya pengembangan dirinya untuk meningkatkan status ekonomi dan sosialnya di masyarakat.

Gambar 2.5
Piramida Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2021

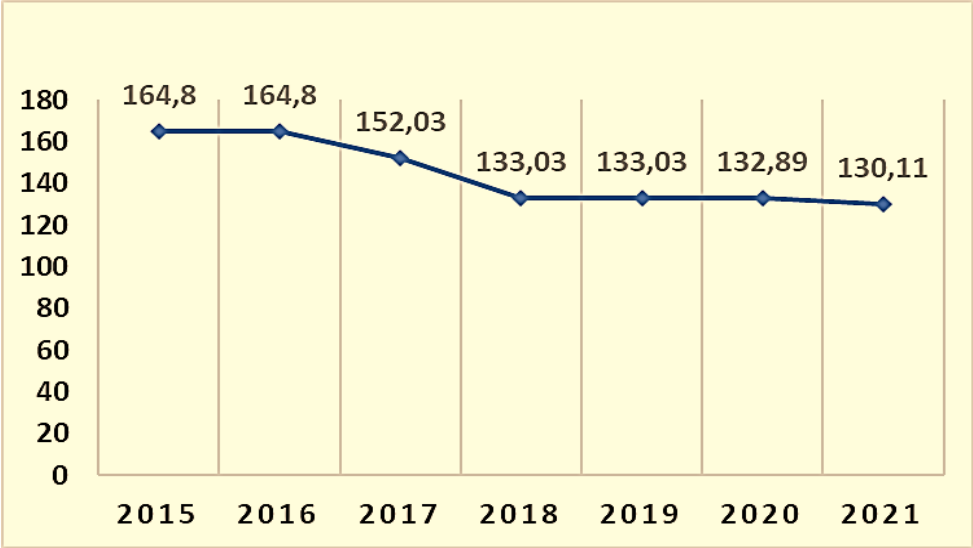


Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022

2.1.2 Kerawanan Bencana

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Bekasi selama tahun 2015 hingga 2020 menunjukkan kemajuan yang positif. Hingga tahun 2017, Kabupaten Bekasi masih masuk ke dalam kelas wilayah dengan resiko bencana tinggi dengan nilai sebesar 152,03. Resiko tersebut turun di tahun 2018 dan memasukkan Kabupaten Bekasi ke kelas resiko sedang dengan nilai resiko sebesar 133,03. Resiko tersebut semakin menurun di tahun 2021 dengan nilai resiko sebesar 130,11.

Gambar 2.6
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2021



Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2021

Selama tahun 2017 hingga 2021, jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi berfluktuasi, yakni 5 kejadian di tahun 2017, 13 kejadian di tahun 2018 dan 2019, 22 kejadian di tahun 2020, dan 15 kejadian di tahun 2021. Selama kurun waktu tersebut, bencana yang dominan terjadi di Kabupaten Bekasi adalah banjir dengan jumlah kejadian terbanyak terjadi di tahun 2020, yaitu sebanyak 17 kejadian dan berkurang menjadi 9 kejadian di tahun 2021. Terjadinya intensitas hujan yang tinggi, meluapnya daerah aliran sungai, drainase yang tidak berfungsi dengan baik, serta pasang air laut. Selain banjir, bencana yang kerap terjadi setiap tahun adalah angin puting beliung. Sementara kekeringan yang juga kerap terjadi setiap tahun, tidak terjadi di tahun 2021. Bencana lainnya yang terjadi di tahun 2021 adalah tanah longsor yang terjadi sebanyak 2 kejadian, serta banjir dan tanah longsor sebanyak 1 kejadian.

Tabel 2.3
Jumlah Bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2021

| No. | Bencana | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|--------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Banjir | 1 | 6 | 8 | 17 | 9 |
| 2. | Tanah Longsor | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 3. | Banjir dan Tanah Longsor | - | - | - | - | 1 |
| 4. | Puting Beliung | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Kekeringan | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| 6. | Abrasi | - | - | 1 | - | - |
| | Jumlah | 5 | 13 | 13 | 22 | 15 |

Sumber: <https://dibi.bnrb.go.id/kwilayah>



Kejadian bencana sebagaimana dijelaskan di atas telah menimbulkan korban meninggal sebanyak 11 orang, 3 orang hilang, 272 orang terluka, 573.967 orang menderita, serta memaksa 43.758 orang untuk mengungsi. Disamping itu, juga tercatat 565 rumah, 1 fasilitas pendidikan, dan 22 kios warga mengalami kerusakan.

Tabel 2.4
Jumlah Korban dan Kerusakan Akibat Bencana
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

| No. | Tahun | Korban | | | | | Kerusakan | | |
|-----|--------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| | | Meninggal | Hilang | Terluka | Menderita | Mengungsi | Rumah | Pendidikan | Kios |
| 1. | 2017 | 2 | - | 5 | 6.178 | 2.200 | 24 | - | - |
| 2. | 2018 | - | - | - | 71.285 | 254 | 80 | - | 13 |
| 3. | 2019 | - | - | - | 31.450 | 25 | 195 | 1 | 9 |
| 4. | 2020 | 1 | 1 | - | 102.557 | 3.660 | 94 | - | - |
| 5. | 2021 | 8 | 2 | 267 | 362.497 | 37.619 | 172 | - | - |
| | Jumlah | 11 | 3 | 272 | 573.967 | 43.758 | 565 | 1 | 22 |

Sumber: <https://dibi.bnpb.go.id/kwilayah>

Jumlah desa/kelurahan yang terkena banjir semakin meningkat di tahun 2021, yakni dari 53 desa/kelurahan di tahun 2018 menjadi 115 desa/kelurahan di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa titik-titik wilayah yang mengalami banjir semakin meluas di beberapa tempat. Sementara untuk tanah longsor di tahun 2021 hanya terjadi di 5 desa/kelurahan sebagaimana tahun sebelumnya.

Tabel 2.5
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi, 2018–2021

| No. | Kecamatan | Banjir | | | | Tanah Longsor | | | |
|-----|------------------|--------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Cikarang Utara | 3 | 6 | 10 | 11 | - | - | - | - |
| 2. | Tambun Selatan | 3 | 1 | 8 | 10 | - | - | - | - |
| 3. | Babelan | 8 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - |
| 4. | Tambun Utara | 2 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 5. | Setu | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - |
| 6. | Tarumajaya | 7 | - | 8 | 7 | - | - | - | - |
| 7. | Cikarang Selatan | 2 | - | 4 | 6 | - | - | 2 | 1 |
| 8. | Cikarang Timur | - | 1 | 6 | 6 | - | - | - | 2 |
| 9. | Kedungwaringin | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 10. | Karangbahagia | 1 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 11. | Sukakarya | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | - |

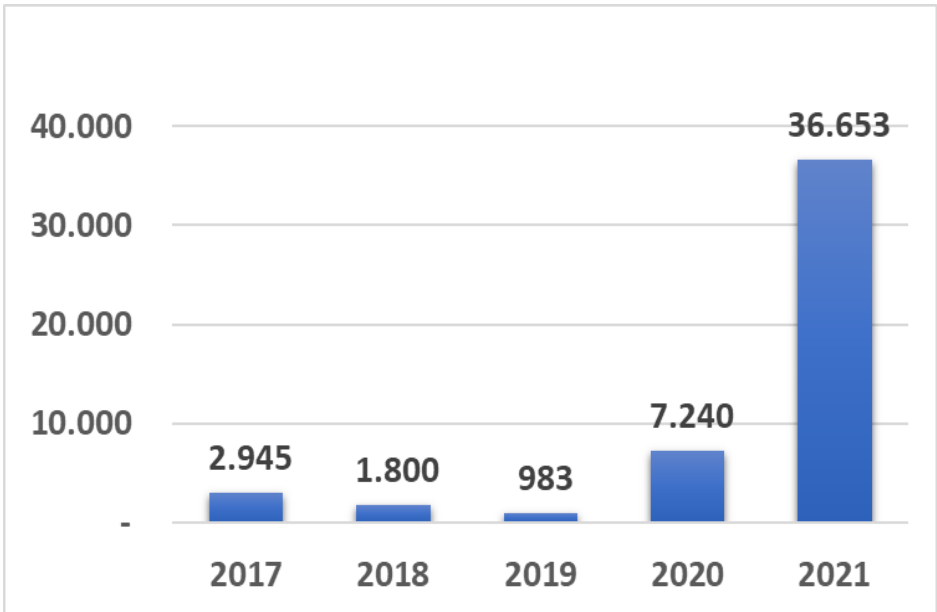


| No. | Kecamatan | Banjir | | | | Tanah Longsor | | | |
|-----|------------------|--------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12. | Muaragembong | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 13. | Cikarang Pusat | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 1 |
| 14. | Cibitung | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | 1 | - |
| 15. | Cikarang Barat | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 16. | Pebayuran | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | 1 | - |
| 17. | Serang Baru | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 18. | Cabangbungin | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 19. | Sukawangi | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 20. | Cibarusah | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| 21. | Tambelang | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 22. | Bojongmangu | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| 23. | Sukatani | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| | Kabupaten Bekasi | 53 | 32 | 104 | 115 | 5 | 2 | 5 | 5 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2021 dan 2022

Meluasnya titik-titik banjir telah meningkatkan jumlah rumah warga yang terendam. Tercatat jumlah rumah yang terendam di tahun 2021 sebanyak 36.653 unit, meningkat lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 7.240 unit. Meski resiko bencana di Kabupaten Bekasi semakin menurun di tahun 2021, namun kerusakan yang ditimbulkan oleh kejadian bencana di Kabupaten Bekasi justru semakin besar.

Gambar 2.7
Jumlah Rumah Terendam yang Akibat Bencana Alam
di Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dan 2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2017-2022

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031 membagi kawasan rawan bencana di Kabupaten Bekasi ke dalam 3 kawasan, yaitu:

1. Kawasan rawan bencana gelombang pasang di Kecamatan Muaragembong;
2. Kawasan rawan bencana banjir, antara lain: Kecamatan Tambun Utara, Tambun Selatan, Tarumajaya, Cibitung, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Cabangbungin, Kedungwaringin, Pebayuran, Sukakarya, Sukatani, Sukawangi, Tambelang, dan Babelan; serta
3. Kawasan rawan bencana longsor di Kecamatan Bojongmangu.

Namun bila melihat data kejadian bencana yang terjadi antara tahun 2018-2021, dapat dilihat bahwa kerawanan bencana khususnya banjir dan tanah longsor telah meluas ke kecamatan lainnya. Untuk bencana banjir misalnya Kecamatan Setu yang selama tahun 2018 dan 2019 tidak mengalami banjir dan tidak termasuk ke dalam kawasan rawan bencana banjir, di tahun 2020 dan 2021 ikut terdampak banjir. Sama halnya dengan Kecamatan Cikarang Selatan yang selama 2 tahun berturut-turut, yakni 2020 dan 2021 mengalami bencana tanah longsor meski tidak masuk ke dalam kawasan rawan bencana longsor.

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031 meliputi:

1. Rencana sistem perkotaan, yang terdiri atas: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); serta
2. Sistem jaringan prasarana wilayah, yaitu rencana jaringan transportasi yang meliputi: rencana pengembangan sistem transportasi darat, jaringan perkeretaapian, serta prasarana transportasi laut.

Rencana pengembangan wilayah perkotaan Kabupaten Bekasi dibagi ke dalam 4 (empat) bagian, antara lain:

1. Wilayah Pengembangan (WP) I, yang diarahkan dengan fungsi utama pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perumahan dan permukiman, pariwisata dan pendukung kegiatan industri, antara lain meliputi: Bekasi bagian tengah dengan pusat di perkotaan Tambun, serta

wilayah pelayanan Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Timur, dan Cikarang Selatan;

2. Wilayah Pengembangan (WP) II, yang diarahkan dengan fungsi utama pengembangan pusat pemerintahan kabupaten, industri, perumahan dan permukiman skala besar, pertanian dan pariwisata, antara lain meliputi: Bekasi bagian selatan dengan pusat di perkotaan Sukamahi, serta wilayah pelayanan Cikarang Pusat, Setu, Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu;
3. Wilayah Pengembangan (WP) III, yang diarahkan dengan fungsi utama pengembangan pertanian lahan basah, perumahan dan permukiman, antara lain meliputi: Bekasi bagian timur, dengan pusat di perkotaan Sukamulya, serta wilayah pelayanan Sukatani, Karangbahagia, Pebayuran, Sukakarya, Kedungwaringin, Tambelang, Sukawangi, dan Cabangbungin;
4. Wilayah Pengembangan (WP) IV, yang diarahkan dengan fungsi utama pengembangan wilayah, simpul transportasi laut dan udara, pertambangan, industri, perumahan dan permukiman, pertanian lahan basah dan pelestarian kawasan hutan lindung, antara lain meliputi: Bekasi bagian utara dengan pusat di perkotaan Pantai Makmur, serta wilayah pelayanan Tarumajaya, Muaragembong, Babelan, dan Tambun Utara.

Adapun pembagian pusat kegiatan dan pelayanan sistem perkotaan Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

1. PKN, yang meliputi: Kecamatan Setu dan Tambun Selatan.
2. PKL, yang meliputi: Kecamatan Cikarang Pusat, Tarumajaya, Cibarusah, Sukatani, dan Cibitung.
3. PKLp, yang meliputi: Kecamatan Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Timur.
4. PPK, yang meliputi: Kecamatan Serang Baru, Bojongmangu, Kedungwaringin, Karangbahagia, Tambelang, Pebayuran, Babelan, Tambun Utara, Sukakarya, Cabangbungin, Muaragembong, Sukawangi.

Selain sistem perkotaan, juga direncanakan pengembangan sistem perdesaan dalam bentuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang meliputi: PPL Nagasari, Hegarmukti, Sukabungah, Cibarusah Kota, Serang, Sukaragam, Cibening, Tamansari, Tanjungbaru, Karang Satria, Bahagia, Pusaka Rakyat, Pantai Bahagia, Sindang Jaya, Sukamantri, Karanghaur, Karang Mukti, Karang Mekar, Sukatenang, Sukamulya.

Sementara untuk pengembangan sistem transportasi darat dalam sistem jaringan prasarana wilayah, rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Bekasi meliputi:

1. Pembangunan jalan bebas hambatan Jatiasih - Purwakarta melintasi Setu - Cikarang Selatan - Serang Baru - Bojongmangu - Karawang - Purwakarta;
2. Pembangunan jalan bebas hambatan Cimanggis - Cibitung, Cibitung - Tanjung Priok, Cikarang-Cibitung, Bekasi - Cikarang-Kampung Melayu;
3. Pengembangan jalan nasional lintas Utara;
4. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis;
5. Peningkatan jalan arteri primer menghubungkan Tambun Selatan - Cibitung - Cikarang Barat - Cikarang Utara - Cikarang Timur;
6. Peningkatan jalan arteri primer (Jl.KH. Noer Ali) jalan menghubungkan Tambun Selatan - Cibitung - Cikarang Barat - Cikarang Utara - Cikarang Selatan - Cikarang Pusat - Karawang;
7. Pembangunan jalan arteri primer menghubungkan jalan lintas utara ruas Bunibakti menuju Desa Huripjaya (pelabuhan);
8. Pembangunan jalan arteri primer yang menghubungkan jalan lintas Utara ruas Muarabakti menuju Desa Pantai Bakti;
9. Peningkatan jalan arteri sekunder merupakan jaringan jalan khusus menghubungkan antar kawasan industri di Kecamatan Cikarang Barat - Cikarang Selatan - Cikarang Pusat;
10. Peningkatan jembatan dan jalan kolektor primer menghubungkan Marunda - Taruma Jaya - Babelan - Sukawangi - Cabang Bungin - Batujaya;
11. Pembangunan jalan kolektor primer menghubungkan Kecamatan Babelan - Kecamatan Muaragembong;
12. Pengembangan Jalan Trans Yogi menghubungkan Kabupaten Bogor (Ds. Weninggalih) - Kabupaten Bekasi (Ridogalih/Sirnajati-Ridomanah-Nagacipta-Nagasari-Delta Mas);
13. Peningkatan jalan lintas Timur (Selatan - Utara) melalui Pasir Tanjung - Cipayung - Bojong - Kedungwaringin - Pebayuran - Cabang Bungin;
14. Rencana pengembangan terminal penumpang regional tipe A dengan alternatif lokasi antara lain: Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Barat, dan Cikarang Selatan;

15. Rencana pengembangan terminal penumpang lokal tipe C yang meliputi: Kecamatan Tambun Utara, Tarumajaya, Sukatani, Cibarusah, dan/atau di lokasi lainnya sesuai dengan kebutuhan;
16. Rencana pembangunan terminal Agro di Kecamatan Cikarang Utara;
17. Pembangunan *Dry Port* di Cikarang Utara;
18. Rencana pengembangan sarana angkutan umum massa sebagai bagian dari sistem angkutan umum massa Jabodetabek; dan
19. Peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas jalan.

Terkait dengan jaringan perkeretaapian, pengembangan yang direncanakan di Kabupaten Bekasi antara lain:

1. Peningkatan jaringan rel kereta api 4 (empat) lajur (*double-double track*) Manggarai – Cikarang;
2. Pembangunan jaringan rel kereta api lintas cabang menghubungkan Cikarang Timur – Cikarang Pusat – Serang Baru – Cibarusah – Kabupaten Bogor.
3. Peningkatan stasiun Tambun Selatan – Cibitung – Cikarang Utara – Cikarang Timur – Kedungwaringin menjadi stasiun pengumpan; dan
4. Pembangunan stasiun baru/shelter di Kecamatan Cibitung.

Adapun dalam rangka memperlancar transportasi melalui laut, pengembangan transportasi laut yang direncanakan adalah pembangunan Terminal Tarumanegara di Kecamatan Babelan - Kecamatan Tarumajaya - Kecamatan Muaragembong dengan luas kurang lebih 740 Ha. Selain itu, rencana pengembangan lainnya yang juga diatur antara lain: rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air; dan rencana jaringan prasarana lingkungan. Meski demikian, rencana pembangunan dan pengembangan tersebut tentunya akan bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

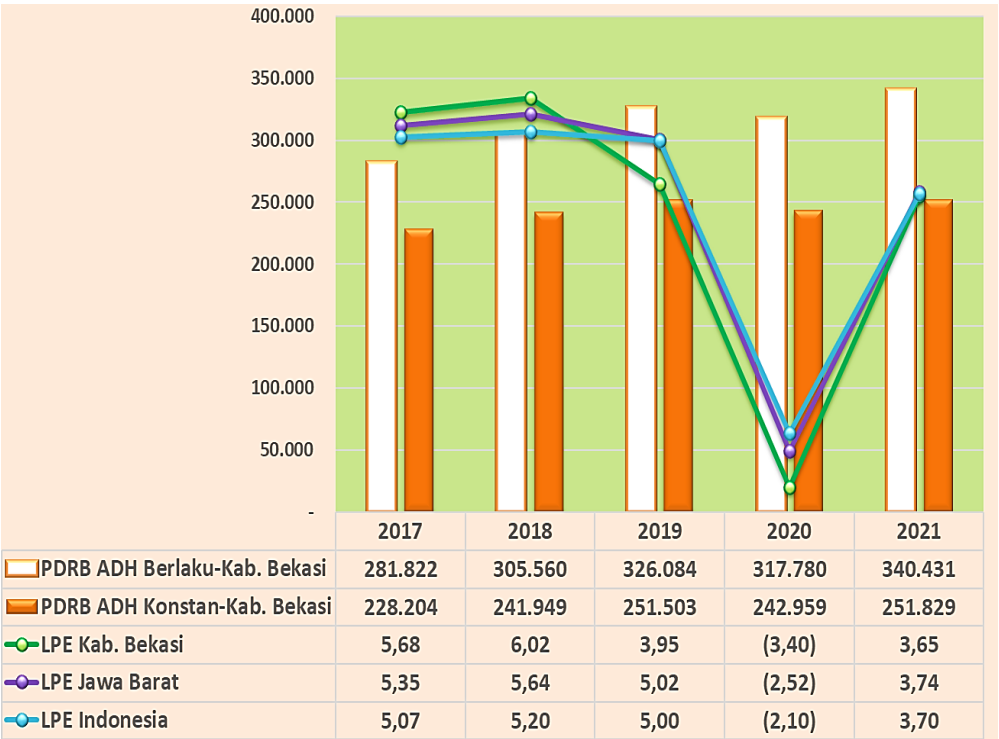
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan, dimana untuk harga berlaku meningkat ke angka Rp.326.084 milyar dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp.281.822 milyar, serta harga konstan yang meningkat dari Rp.228.204 milyar menjadi Rp.251.503 milyar. Namun penyebaran Covid-19 di awal tahun 2020 serta kebijakan pembatasan kegiatan dan berkumpul masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memerangi penyebaran Covid-19



telah menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya mendorong PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan Kabupaten Bekasi mengalami penurunan di tahun 2020. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjukkan melalui laju PDRB atas dasar harga konstan telah mengalami penurunan sejak tahun 2019, dimana puncaknya terjadi di tahun 2020 dengan pertumbuhan negatif sebesar -3,3%. Seiring dengan inovasi yang dilakukan oleh dunia usaha, mulai terbiasa dan menurunnya ketakutan masyarakat terhadap Covid-19, serta program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, perekonomian Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik di tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang positif di angka 3,65%, dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp.340.431 milyar dan atas dasar harga konstan sebesar Rp.251.829 milyar. Meski begitu, laju pertumbuhan ekonomi tersebut masih di bawah capaian Jawa Barat dan Nasional, serta belum mampu kembali pada pencapaian tahun 2017 dan 2018 yang berhasil berada di atas 5%.

Gambar 2.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan (Milyar Rupiah) serta Laju PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

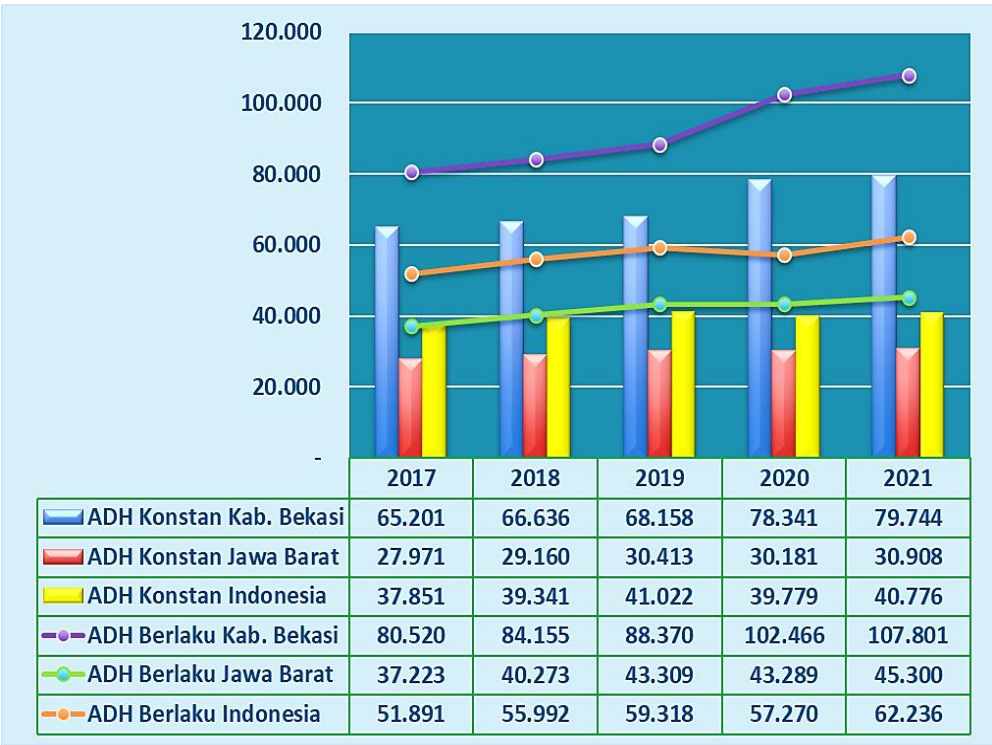


Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Sementara berbanding terbalik dengan data di atas, PDRB per kapita Kabupaten Bekasi di tahun 2020 justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan adanya migrasi penduduk ke luar akibat tidak optimalnya aktivitas ekonomi dan perusahaan yang gulung tikar. Selama tahun 2017-

2021, PDRB per Kapita Kabupaten Bekasi berada di atas capaian Jawa Barat dan Nasional dengan nilai capaian tahun 2021 merupakan terbesar ke-2 di Jawa Barat setelah Kota Bandung, mengalahkan Kabupaten Karawang yang pada tahun 2017-2019 berada di urutan ke-2 terbesar untuk nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku. Pada tahun 2021, PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Bekasi adalah sebesar Rp.107.801.000,- dan Rp.79.744.000,-. Meski meningkat dibandingkan tahun 2020, pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Bekasi lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kembali meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bekasi, sejalan dengan kondisi ekonomi daerah yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya, PDRB per kapita Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.9
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)



Sumber: <https://jabar.bps.go.id> dan <https://www.bps.go.id/>

Bila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, capaian PDRB, PDRB per kapita, dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2021 berfluktuasi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku hanya mampu melebihi target pada tahun 2018-2019 sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan atau rill selama tahun 2017-2021 tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan. PDRB per Kapita

Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2018 realisasinya telah melebihi target, sedangkan pada harga konstan atau rill baru mampu melebihi target di tahun 2020 dan 2021, yang tentunya hal ini disebabkan akibat menurunnya jumlah penduduk Kabupaten Bekasi. Terakhir pada laju pertumbuhan ekonomi, realisasi melebihi target hanya terjadi di tahun 2017-2018. Sedangkan untuk selanjutnya terus menurun ke angka 67,15% di tahun 2019, jatuh bebas di tahun 2020 dengan capaian -56,62% dan meski meningkat ke angka 58,88% namun capaiannya masih berada di bawah capaian tahun 2019.

Perekonomian Kabupaten Bekasi didorong oleh keberadaan kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Pembukaan lapangan kerja yang cukup besar tidak hanya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat saja, melainkan juga menarik angkatan kerja dari daerah lain untuk masuk, pembukaan usaha baru di bidang restoran, akomodasi, dan usaha lainnya yang mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah sehingga target laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercapai. Namun seiring dengan pembukaan usaha baru yang semakin sedikit dengan semakin tingginya persaingan usaha, kenaikan permintaan terhadap barang/jasa yang melambat sehingga peningkatan produksi semakin berkurang, dan faktor lainnya pada akhirnya menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi mengalami perlambatan dan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut diperburuk dengan penyebaran Covid-19 di awal tahun 2020 yang telah menghambat proses produksi barang/jasa, menurunkan daya beli masyarakat, dan menghambat aktivitas ekonomi daerah secara keseluruhan. Meski telah lebih baik di tahun 2021, namun belum pulihnya kondisi ekonomi daerah akibat Covid-19 juga menghambat pencapaian target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi di tahun 2021

Tabel 2.6
Target dan Realisasi PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

| NO | INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | PDRB atas dasar Harga Berlaku (dalam juta Rp) | | | | | |
| | TARGET RPJMD | 282.930.058 | 301.387.145 | 319.844.231 | 338.301.317 | 356.758.404 |
| | REALISASI | 281.821.530 | 305.559.640 | 326.083.640 | 317.779.740 | 340.431.180 |
| | % CAPAIAN | 99,61 | 101,38 | 101,95 | 93,93 | 95,42 |
| 2. | PDRB atas dasar Harga Riil (dalam juta Rp) | | | | | |
| | TARGET RPJMD | 239.506.401 | 251.328.179 | 263.146.560 | 274.537.727 | 286.169.581 |
| | REALISASI | 228.203.600 | 241.949.380 | 251.502.790 | 242.959.090 | 251.828.570 |
| | % CAPAIAN | 95,28 | 96,27 | 95,58 | 88,50 | 88,00 |
| 3. | PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (dalam rupiah) | | | | | |
| | TARGET RPJMD | 81.231.364 | 83.662.590 | 85.937.827 | 88.071.620 | 90.076.762 |
| | REALISASI | 80.520.000 | 84.155.000 | 88.370.000 | 102.466.000 | 107.801.000 |
| | % CAPAIAN | 99,12 | 100,59 | 102,83 | 116,34 | 119,68 |



| NO | INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | PDRB per Kapita atas dasar Harga Riil (dalam rupiah) | | | | | |
| | TARGET RPJMD | 68.764.103 | 69.766.633 | 70.703.928 | 71.471.736 | 72.254.021 |
| | REALISASI | 65.201.000 | 66.636.000 | 68.158.000 | 78.341.000 | 79.744.000 |
| | % CAPAIAN | 94,82 | 95,51 | 96,40 | 109,61 | 110,37 |
| 5. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen) | | | | | |
| | TARGET RPJMD | 5,23 | 5,57 | 5,88 | 6 | 6,2 |
| | REALISASI | 5,68 | 6,02 | 3,95 | -3,4 | 3,65 |
| | % CAPAIAN | 108,60 | 108,14 | 67,15 | -56,62 | 58,88 |

Sumber: RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan BPS, diolah

Dilihat menurut lapangan usaha, PDRB Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2021 ditopang oleh industri pengolahan dengan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bekasi selama kurun waktu tersebut berkisar antara 77-78%. Meski menurun di tahun 2020 dan 2021 dengan adanya Covid-19, namun industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama dalam PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2020 dan 2021. Tingginya kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bekasi tersebut di satu sisi sangat baik karena dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Namun di sisi lain, mengingat kebijakan atas industri besar diatur oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi industri tersebut bagi daerah.

Tabel 2.7
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Bekasi Tahun 2017–2021

| Lapangan Usaha | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|---|-------|-------|-------|------|------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ATAS DASAR HARGA BERLAKU | | | | | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,24 | 1,21 | 1,2 | 1,28 | 1,28 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,54 | 0,5 | 0,46 | 0,45 | 0,43 |
| C | Industri Pengolahan | 78,27 | 78,28 | 77,74 | 77,2 | 77,2 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 1,02 | 0,91 | 0,87 | 0,78 | 0,81 |
| E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| F | Konstruksi | 6,57 | 6,6 | 6,76 | 6,49 | 6,35 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,47 | 5,43 | 5,64 | 5,71 | 5,74 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,3 | 1,33 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,5 | 0,51 | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1,43 | 1,32 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,18 | 1,18 |
| L | Real Estat | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,55 | 0,6 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |



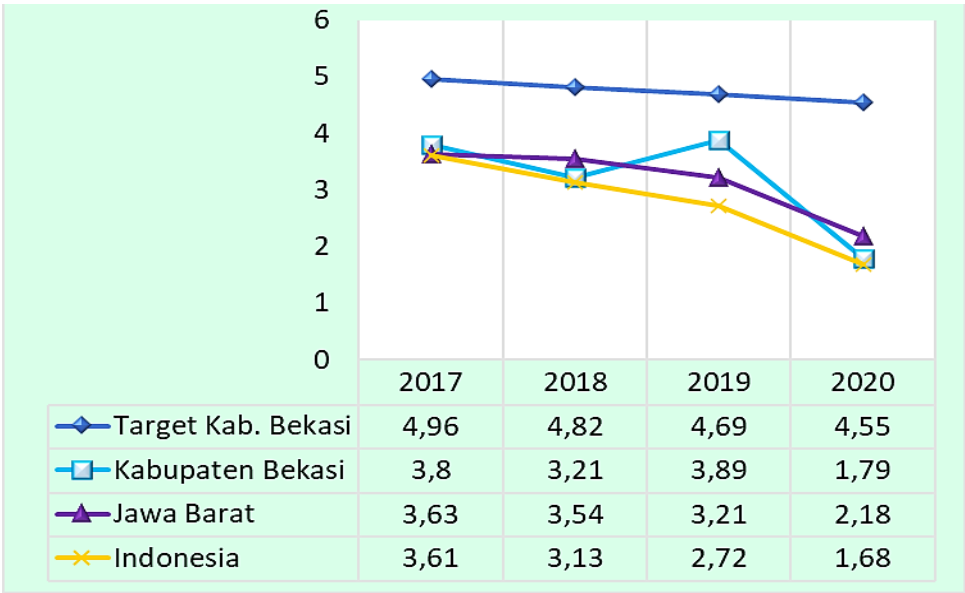
| Lapangan Usaha | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0,76 | 0,91 |
| P | Jasa Pendidikan | 0,96 | 1,01 | 1,05 | 1,21 | 1,19 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,26 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | 0,64 |
| ATAS DASAR HARGA KONSTAN | | | | | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,02 | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 1,01 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 1,05 | 0,96 | 0,89 | 0,87 | 0,79 |
| C | Industri Pengolahan | 78,69 | 78,83 | 78,22 | 77,74 | 77,62 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,54 | 0,48 | 0,47 | 0,43 | 0,46 |
| E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| F | Konstruksi | 6,43 | 6,51 | 6,69 | 6,44 | 6,39 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,78 | 5,65 | 5,96 | 5,80 | 5,87 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,11 | 1,10 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,53 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1,18 | 1,22 | 1,32 | 1,92 | 1,96 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,94 | 0,92 |
| L | Real Estat | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,56 | 0,63 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 0,63 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,65 |
| P | Jasa Pendidikan | 0,89 | 0,90 | 0,94 | 1,05 | 1,05 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,26 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | 0,62 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Sejalan dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja, pemotongan dan keterlambatan pemberian gaji akibat keadaan perusahaan yang memburuk karena Covid-19 menyebabkan permintaan masyarakat akan barang dan jasa di Kabupaten Bekasi ikut menurun yang pada akhirnya menurunkan inflasi di Kabupaten Bekasi. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bekasi saja, tetapi juga terjadi di regional Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2020, inflasi di Kabupaten Bekasi menurun dari angka 3,89 di tahun 2019 menjadi 1,79 di tahun 2020. Di tingkat regional Jawa Barat, nilai inflasi menurun dari angka 3,21 ke angka 2,18. Sedangkan di tingkat nasional, inflasi menurun ke angka 1,68 dari sebelumnya sebesar 2,72. Adapun bila disandingkan dengan target

RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, inflasi Kabupaten Bekasi di tahun 2017-2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian yang berfluktuasi yakni sebesar 76,61% di tahun 2017, 66,6% di tahun 2018, 82,94% di tahun 2019, dan 39,34% di tahun 2020. Sulitnya mencapai target tersebut salah satunya dikarenakan pemerintah kabupaten tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan kebijakan moneter dan keuangan. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah hanya melakukan stabilisasi harga terhadap beberapa barang kebutuhan pokok yang efeknya tidak terlalu signifikan, terutama ketika pemerintah pusat tiba-tiba mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan lonjakan harga seperti kenaikan BBM atau kebijakan yang menurunkan permintaan masyarakat terhadap barang/jasa seperti kebijakan menaikkan suku bunga simpanan bank sehingga masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya daripada berbelanja. Adapun pengambilan kebijakan lainnya yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah daerah namun belum diatur di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya dampak hukum di kemudian hari sehingga intervensi yang dilakukan pada akhirnya lebih berdasarkan pada kebiasaan atau yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Gambar 2.10
Inflasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2017-2020



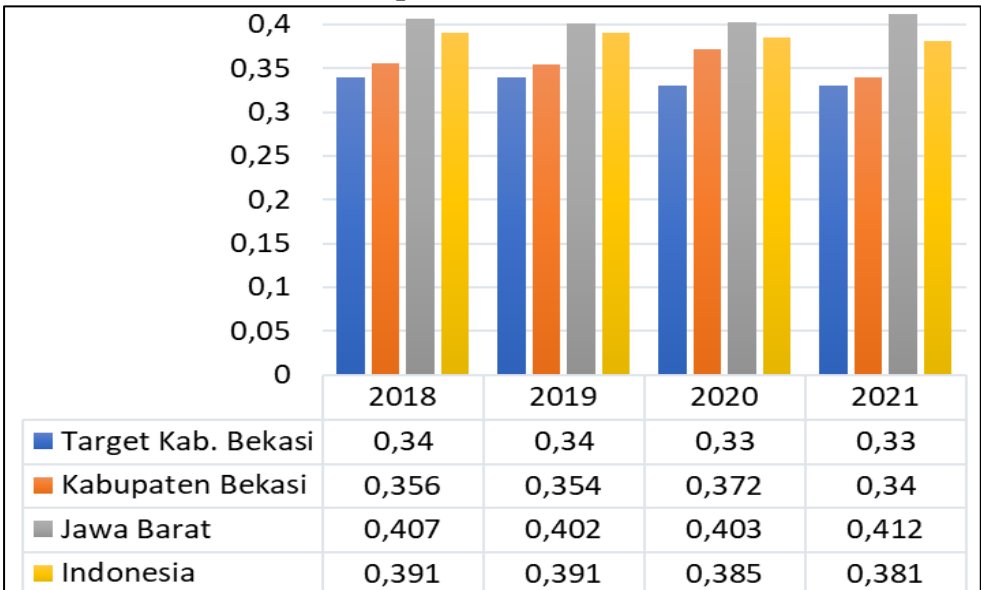
Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

Selama tahun 2018-2021, nilai gini ratio Kabupaten Bekasi berada pada kisaran 0,34 sampai dengan 0,37 atau dalam kategori sedang, masih di bawah gini ratio Provinsi Jawa Barat yang mencapai 0,4 dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran masyarakat di Kabupaten

Bekasi lebih kecil bila dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan nasional secara keseluruhan. Bahkan ketika Covid-19 melanda Kabupaten Bekasi dan Indonesia di tahun 2020, gini ratio Kabupaten Bekasi hanya naik 0,018 poin ke angka 0,372 dari sebelumnya sebesar 0,354 di tahun 2019 dengan posisi masih di bawah gini ratio Provinsi Jawa Barat dan nasional. Ketika kondisi ekonomi sedikit membaik di tahun 2021, gini ratio Kabupaten Bekasi pun ikut menurun ke angka 0,34 yang menunjukkan bahwa ketimpangan ikut berkurang sejalan dengan membaik perekonomian daerah.

Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, realisasi gini ratio Kabupaten Bekasi hanya mampu mencapai target di tahun 2017 dengan realisasi sebesar 0,34. Sementara untuk tahun 2018 hingga 2021 tidak mencapai target dengan nilai capaian sebesar 95,51% di tahun 2018, 96,05% di tahun 2019, 88,71% di tahun 2020, dan 97,06% di tahun 2021. Ketimpangan pendapatan di antara penduduk menyebabkan sulitnya untuk menurunkan gini ratio daerah. Adapun yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengurangi beban penduduk adalah dengan mendorong peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dengan memberikan bantuan anggaran tambahan untuk kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah negeri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak masuk ke dalam program jaminan kesehatan masyarakat, memberikan bantuan bibit, pupuk, alat kepada petani, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, serta upaya lainnya yang dapat mengurangi ketimpangan di antara masyarakat, khususnya pada masyarakat miskin.

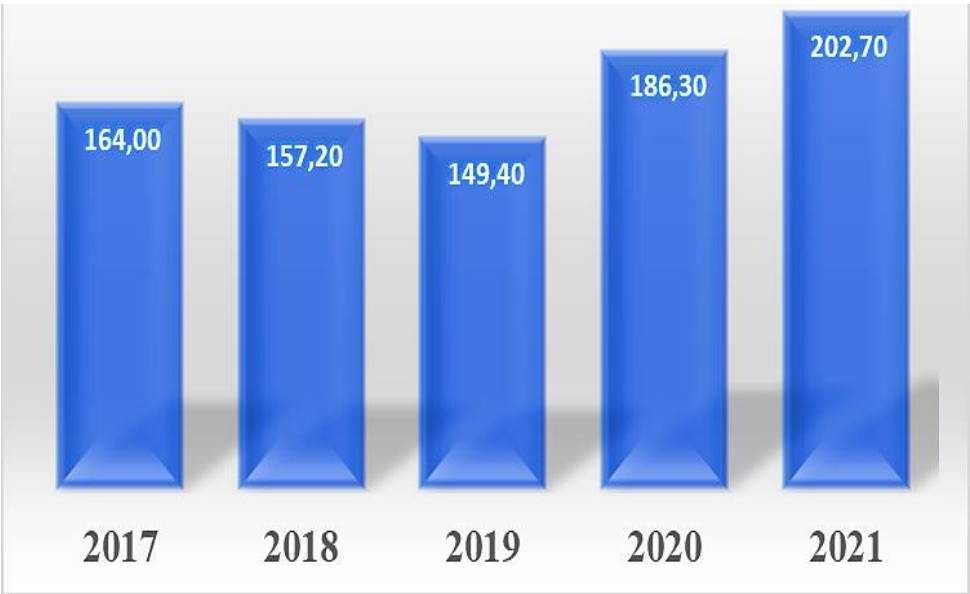
Gambar 2.11
Gini Ratio Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Adapun terkait dengan kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 masuk ke urutan ke-8 dari kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Barat, setelah Kabupaten Bogor, Garut, Cirebon, Bandung, Cianjur, Indramayu, Karawang. Di tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi yang selama tahun 2017-2019 mengalami penurunan, mengalami peningkatan dari 186.300 jiwa di tahun 2020 menjadi 202.700 jiwa. Peningkatan ini merupakan salah satu dampak dari perekonomian daerah Kabupaten Bekasi yang melambat akibat Covid-19 dan kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan industri maupun usaha lainnya tidak dapat beroperasi secara normal.

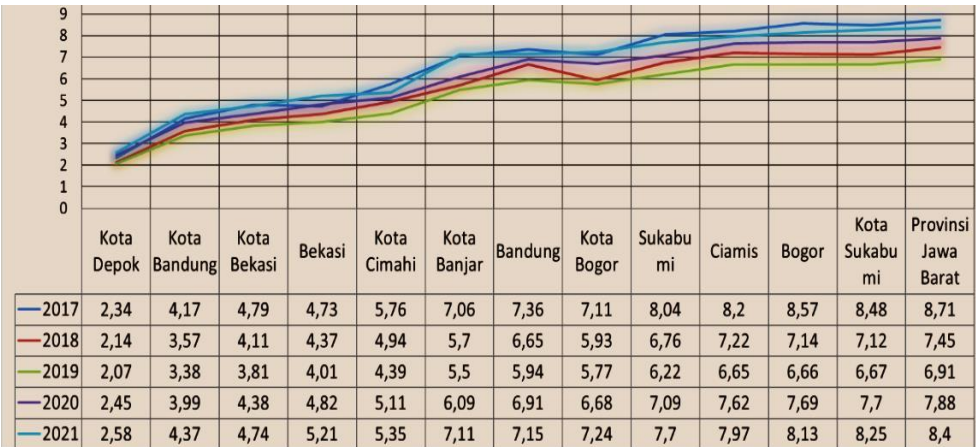
Gambar 2.12
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2021 (Ribuan Jiwa)



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Meski demikian, bila dilihat dari persentase penduduknya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 berada pada posisi ke-4 terendah di antara kabupaten/kota di Jawa Barat setelah Kota Depok, Kota Bandung, dan Kota Bekasi, turun dari posisi ke-3 pada tahun 2017.

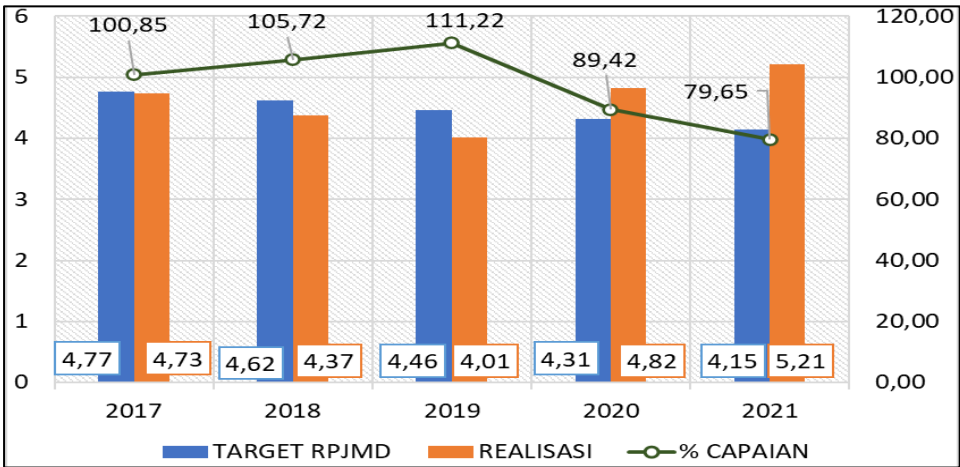
Gambar 2.13
12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Jawa Barat Tahun 2017-2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Bila disandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, pencapaian terhadap target RPJMD pada indikator persentase penduduk miskin telah cukup baik dengan capaian tahun 2017-2019 di atas 100%. Tidak tercapainya target terjadi di tahun 2020 dan 2021 akibat meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi dengan adanya Covid-19 yang menurunkan pendapatan masyarakat serta pemutusan hubungan kerja. Capaian indikator persentase penduduk miskin Kabupaten Bekasi di tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 89,42% dan 79,65%. Peningkatan persentase penduduk miskin di tahun 2021 diperkirakan terjadi akibat meningkatnya kembali jumlah penduduk Kabupaten Bekasi dengan adanya arus masuk angkatan kerja dari luar ke Kabupaten Bekasi untuk bekerja atau mencari kerja di Kabupaten Bekasi dengan mulai pulihnya aktivitas produksi dan ekonomi Kabupaten Bekasi.

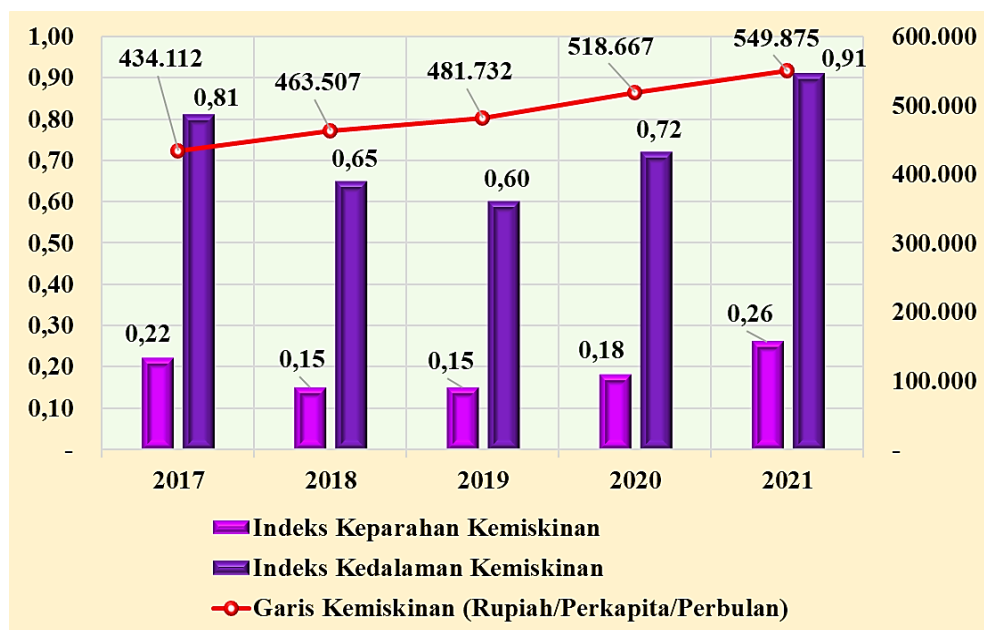
Gambar 2.14
Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021



Sumber: RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan BPS, diolah

Sementara itu, garis kemiskinan di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan dari sebesar Rp.434.112/kapita/bulan menjadi Rp.549.875/kapita per bulan dengan terus meningkatnya harga komoditi makanan. Sementara indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang telah menurun di tahun 2019 kembali meningkat di tahun 2020 akibat menurunnya perekonomian daerah yang disebabkan oleh Covid-19.

Gambar 2.15
Garis Kemiskinan serta Indeks Keparah dan Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021



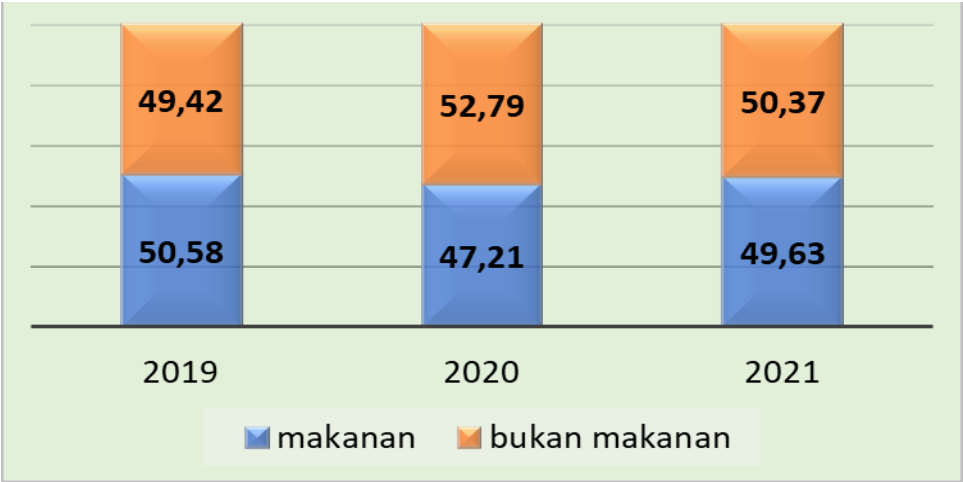
Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, pengeluaran untuk produk makanan semakin menurun, atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan sebuah rumah tangga, maka pengeluaran untuk konsumsi makanan akan semakin menurun dan pengeluaran untuk konsumsi non makanan akan semakin meningkat.

Selama tahun 2019-2021 pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Kabupaten Bekasi yang dipisahkan menjadi kelompok makanan dan bukan makanan berfluktuasi. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan adalah sebesar 49,42%, jumlahnya meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 52,79% untuk turun kembali menjadi 50,37% di tahun 2021. Sementara pengeluaran untuk kelompok non makanan adalah sebesar 50,58% di tahun 2019, turun menjadi 47,21% di tahun 2020 akibat meningkatnya pengeluaran untuk makanan, dan naik kembali menjadi 49,63% di tahun 2021 dengan menurunnya pengeluaran untuk makanan. Berdasarkan proporsi pengeluaran per kapita sebulan masyarakat untuk

makanan dan bukan makanan yang hampir seimbang dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bekasi berada pada kelompok menengah.

Gambar 2.16
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2019-2021



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2020-2022

Bila dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok makanan di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021, terjadi perubahan pola konsumsi makanan akibat di tahun 2020 yang kemungkinan disebabkan oleh Covid-19. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan konsumsi untuk makanan dan minuman jadi, rokok dan tembakau, sayur-sayuran, telur dan susu, bahan minuman, serta bahan makanan lainnya. Sedangkan di tahun berikutnya, kecuali sayur-sayuran, bahan minuman dan bahan makanan lainnya, seluruhnya kembali mengalami penurunan di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat berubah ketika Covid-19 melanda, yakni masyarakat lebih menyukai makanan dan minuman jadi yang lebih murah dan mudah didapat serta rokok dan tembakau, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat. Sementara dengan semakin baiknya perekonomian dan pendapatan masyarakat, makanan dan minuman jadi serta rokok dan tembakau mulai kembali dikurangi yang dapat dilihat melalui peningkatan bahan makanan pokok seperti padi, sayur, ikan, daging, dan lainnya.

Tabel 2.8
Rata–Rata Pengeluaran per Kapita Seminggu menurut Kelompok
Makanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021
(Rupiah/Kapita/Minggu)

| No. | Kelompok Komoditas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Makanan dan Minuman Jadi | 71.735 | 75.366 | 85.936 | 71.740 |
| 2. | Rokok dan Tembakau | 17.642 | 17.617 | 20.589 | 19.203 |
| 3. | Sayur-Sayuran | 10.685 | 11.838 | 11.941 | 17.126 |

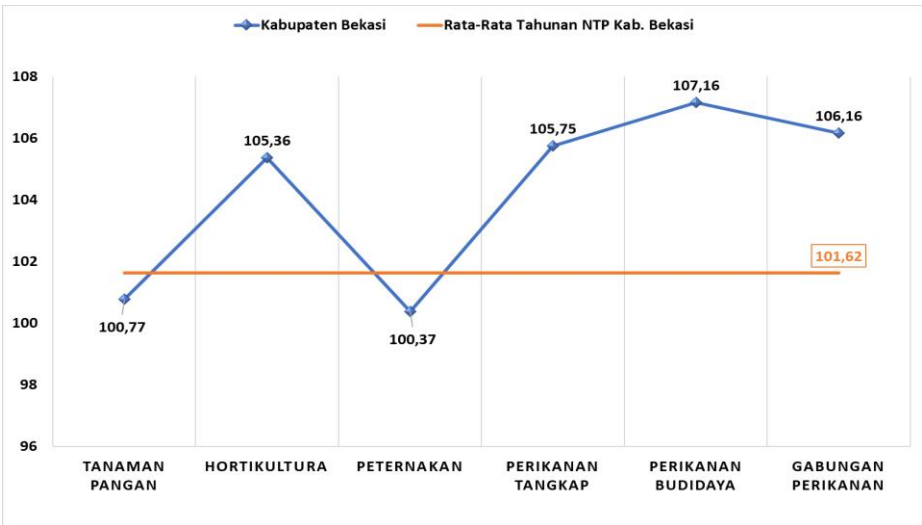


| No. | Kelompok Komoditas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|
| 4. | Padi-Padian | 14.627 | 15.283 | 14.355 | 15.663 |
| 5. | Ikan | 9.241 | 13.236 | 10.612 | 12.717 |
| 6. | Telur dan Susu | 8.549 | 12.015 | 12.084 | 11.010 |
| 7. | Buah-Buahan | 7.652 | 7.966 | 8.258 | 7.380 |
| 8. | Daging | 6.149 | 8.157 | 6.808 | 6.971 |
| 9. | Bahan Minuman (Gula, Teh, Kopi dan Lainnya) | 3.843 | 4.106 | 4.179 | 4.899 |
| 10. | Bahan Makanan Lainnya | 2.615 | 2.989 | 3.451 | 4.199 |
| 11. | Bumbu-Bumbuan | 2.763 | 2.967 | 2.963 | 4.109 |
| 12. | Minyak dan Kelapa | 2.760 | 3.258 | 3.082 | 3.905 |
| 13. | Kacang-Kacangan | 3.109 | 3.181 | 2.965 | 3.655 |
| 14. | Umbi-Umbian | 942 | 1.364 | 926 | 1.392 |

Sumber: <https://www.bps.go.id>

Khusus untuk petani di Kabupaten Bekasi, nilai tukar petani di Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani menunjukkan angka positif di atas 100 selama tahun 2018-2020, yang menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh petani di Kabupaten Bekasi masih lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk biaya konsumsi dan produksi. Meskipun begitu, untuk tahun 2020 nilai tukar petani Kabupaten Bekasi turun ke angka 101,62, yaitu turun sebesar 2,7 poin dibandingkan tahun 2019, dan turun sebesar 3,77 poin dibandingkan tahun 2018 akibat lesunya perekonomian daerah yang disebabkan oleh Covid-19. Diantara sub sektor pertanian, petani yang menerima keuntungan terendah di tahun 2020 adalah peternak dengan nilai tukar petani sebesar 100,37 dan petani tanaman pangan dengan nilai sebesar 100,77.

Gambar 2.17
Rata-Rata Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional Menurut Sub Sektor Tahun 2020 (2018=100)

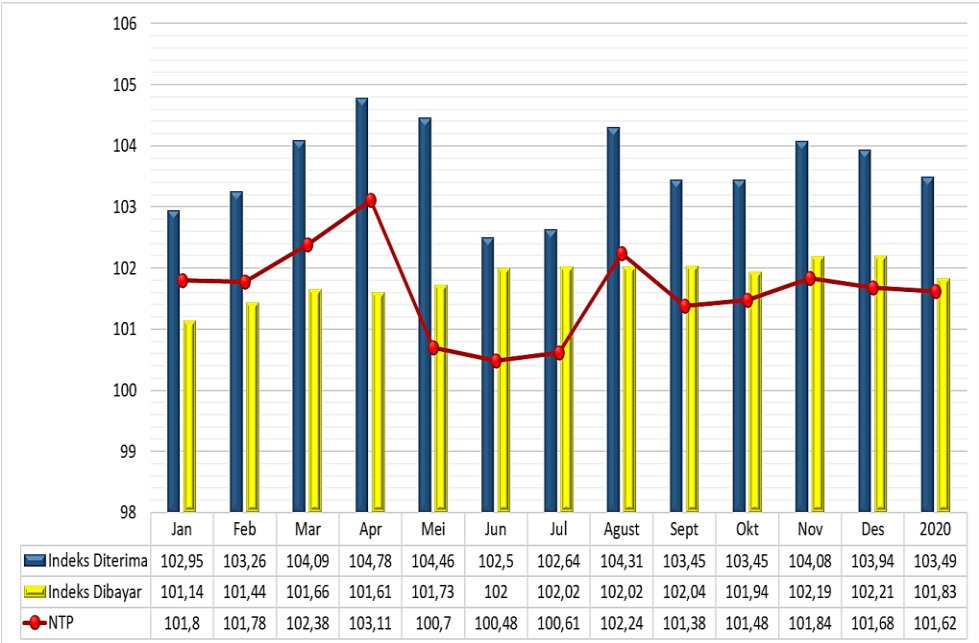


Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

Sementara bila dilihat dari perkembangan bulanan di tahun 2020, dapat dilihat bahwa nilai tukar petani berfluktuasi setiap bulannya yang menandakan bahwa pendapatan yang diterima oleh petani tidak tetap setiap bulannya. Pendapatan tertinggi petani diterima di bulan April dengan nilai tukar petani sebesar 103,11, dan terendah di bulan Juni dengan nilai tukar petani sebesar 100,48. Fluktuasi nilai tukar petani salah satunya dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti musim kemarau misalnya, serta hari-hari besar keagamaan yang menyebabkan permintaan terhadap komoditas hasil pertanian, peternakan, dan perikanan meningkat.

Pada momen seperti Ramadhan dan Idul Fitri, kebiasaan masyarakat Indonesia untuk berkumpul meski di tengah terjangkit Covid-19 telah membuat permintaan terhadap komoditas bahan makanan pokok meningkat meski tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan harga bahan makanan pokok dan sandang di bulan Ramadhan dan lebaran juga menyebabkan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas terbiasa untuk membeli bahan kebutuhan pokok sebelum momen-momen tersebut yang menyebabkan permintaan ikut meningkat dan menaikkan harga-harga barang bahkan sebelum Ramadhan dan Idul Fitri, yang pada akhirnya ikut menaikkan indeks yang diterima oleh petani. Untuk lebih jelasnya, indeks yang diterima, indeks yang dibayar, dan nilai tukar petani bulanan di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 dapat dilihat melalui gambar berikut:

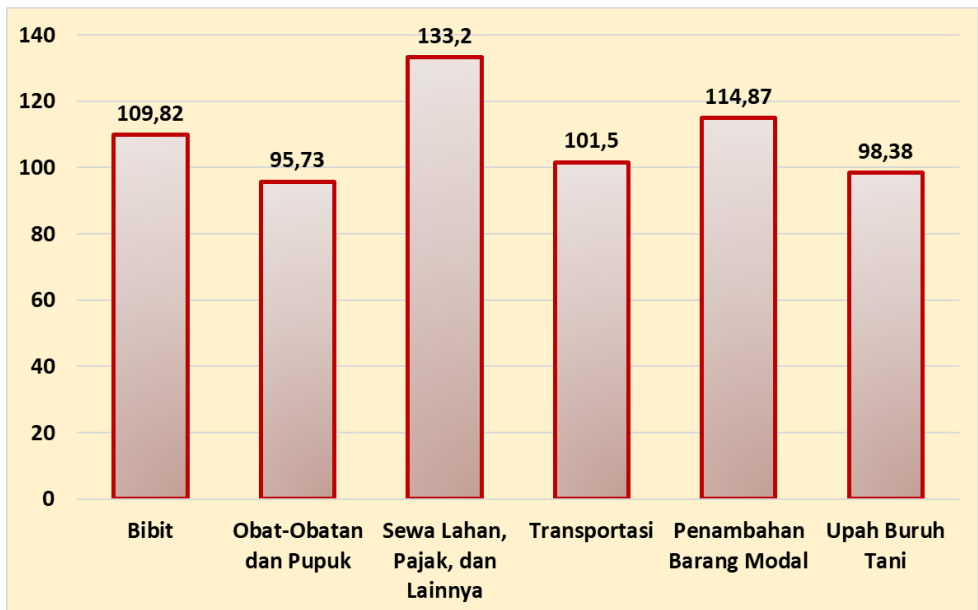
Gambar 2.18
Indeks yang Diterima, Indeks yang Dibayar dan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (2018=100)



Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

Pada sisi pengeluaran, pengeluaran petani di tahun 2020 berdasarkan data BPS didominasi oleh biaya sewa lahan, pajak dan lainnya. Selanjutnya, pengeluaran tertinggi lainnya didominasi oleh penambahan barang modal, bibit, dan transportasi. Sedangkan pengeluaran terendah yang dikeluarkan petani adalah pengeluaran untuk obat-obatan dan pupuk dengan besar masing-masing indeks sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 2.19
Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal
Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (2018=100)

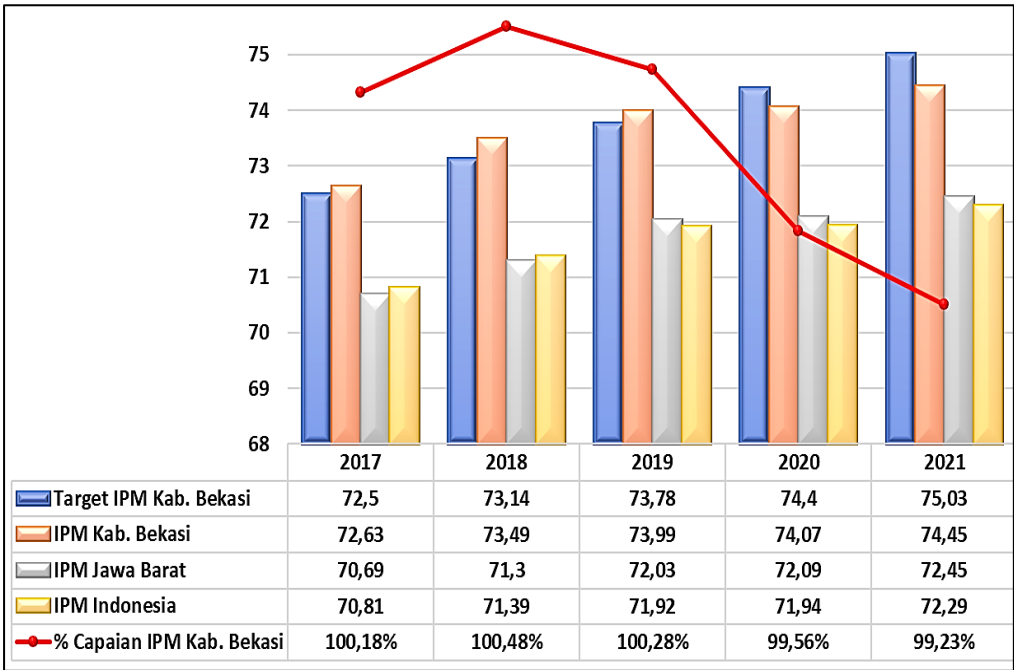


Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang terus meningkat, yaitu dari 72,63 di tahun 2017 menjadi sebesar 74,45 di tahun 2021. Dibandingkan dengan IPM Jawa Barat dan Indonesia, nilai IPM Kabupaten Bekasi selama kurun waktu tersebut juga berada di atas Jawa Barat dan Indonesia. Meskipun perekonomian daerah melambat di tahun 2020 akibat Covid-19, namun pembangunan manusia di Kabupaten Bekasi masih tetap berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui nilai IPM Kabupaten Bekasi yang tetap meningkat ke angka 74,07 di tahun 2020, dari sebelumnya sebesar 73,99 di tahun 2019. Meski secara capaian terhadap target menurun akibat Covid-19, nilai IPM Kabupaten Bekasi masih tetap berada di atas nilai IPM Jawa Barat dan nasional selama tahun 2020 dan 2021, dimana nilai IPM Jawa Barat pada tahun tersebut adalah sebesar 72,09 dan 72,45, serta Indonesia sebesar 71,94 dan 72,29.

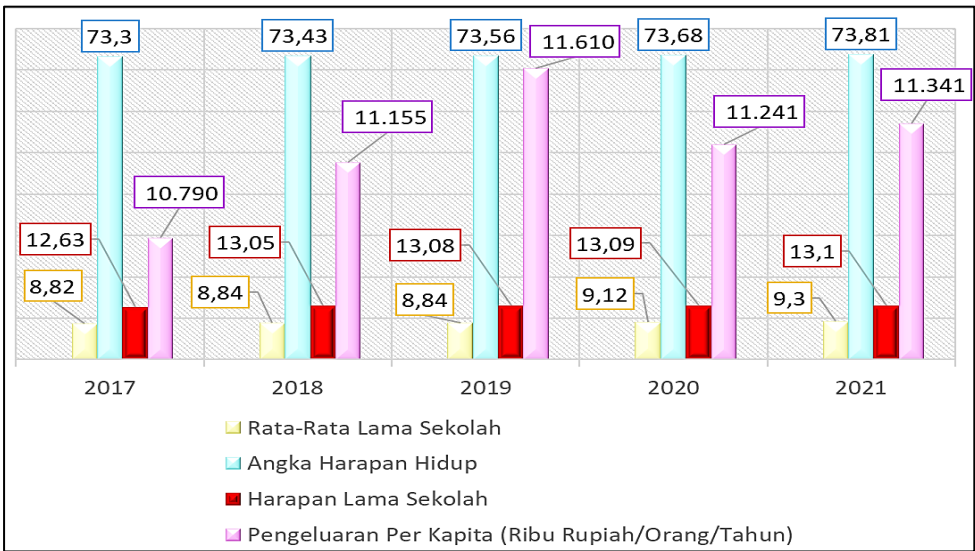
Gambar 2.20
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2017-2021



Sumber: RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan BPS, diolah

Dari seluruh komponen IPM, komponen yang mengalami penurunan di tahun 2020 adalah pengeluaran per kapita masyarakat, yang menurun dari Rp.11.610.000,-/orang/tahun menjadi Rp.11.241.000,-/orang/tahun dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah akibat Covid-19, sementara yang lainnya tetap mengalami peningkatan meski di tengah kondisi Covid-19. Dengan semakin membaiknya ekonomi daerah di tahun 2021, seluruh komponen IPM kembali meningkat, termasuk pengeluaran per kapita masyarakat yang naik sebesar Rp.100.000/orang/tahun.

Gambar 2.21
Komponen IPM Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>



Sementara itu, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, RLS merupakan satu-satunya komponen IPM yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan meski nilainya terus mengalami peningkatan. Sedangkan pada HLS, capaiannya mengalami penurunan sejak tahun 2019 meski secara nilai juga terus mengalami kenaikan. Tidak mampu tercapainya kedua komponen IPM tersebut disebabkan oleh masih adanya siswa yang putus sekolah akibat kemiskinan maupun faktor lainnya. Sementara posisi Kabupaten Bekasi yang dekat dengan DKI Jakarta dan kabupaten/kota besar lainnya seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Karawang telah membantu Kabupaten Bekasi dalam memenuhi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Kawasan industri yang besar juga telah membantu perekonomian masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja dan usaha sehingga target indikator makro yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik meski belum seluruhnya optimal.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Komponen IPM Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2021

| NO | INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) - Tahun | | | | | |
| | TARGET RPJMD | 9,01 | 9,2 | 9,39 | 9,58 | 9,78 |
| | REALISASI | 8,82 | 8,84 | 8,84 | 9,12 | 9,3 |
| | % CAPAIAN | 97,89 | 96,09 | 94,14 | 95,20 | 95,09 |
| 2. | Harapan Lama Sekolah (HLS) - Tahun | | | | | |
| | TARGET RPJMD | 12,52 | 12,8 | 13,09 | 13,93 | 13,65 |
| | REALISASI | 12,63 | 13,05 | 13,08 | 13,09 | 13,1 |
| | % CAPAIAN | 100,88 | 101,95 | 99,92 | 93,97 | 95,97 |
| 3. | Angka Harapan Hidup (AHH) - Tahun | | | | | |
| | TARGET RPJMD | 73,29 | 73,34 | 73,39 | 73,54 | 73,49 |
| | REALISASI | 73,30 | 73,43 | 73,56 | 73,68 | 73,81 |
| | % CAPAIAN | 100,01 | 100,12 | 100,23 | 100,19 | 100,44 |
| 4. | Pengeluaran per Kapita per Tahun (dalam ribu rupiah) | | | | | |
| | TARGET RPJMD | 10.532,76 | 10.790 | 10.719 | 10.812,09 | 10.905 |
| | REALISASI | 10.790,00 | 11.155 | 11.610 | 11.241 | 11.341 |
| | % CAPAIAN | 102,44 | 103,38 | 108,31 | 103,97 | 104,00 |

Sumber: RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan BPS, diolah

Khusus perempuan, nilai indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Bekasi selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan tipis dari 88 di tahun 2017 menjadi 88,28 di tahun 2018 dan 88,68 di tahun 2019, menurun menjadi 88,58 di tahun 2020, dan meningkat kembali menjadi 88,88 di tahun 2021. Sedangkan pada indeks pemberdayaan gender (IDG), nilainya yang sempat turun dari 57,16 menjadi 57,02 di tahun 2018 naik kembali di tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 60,83 di tahun 2019 dan 62,46 di tahun 2020. Meski



demikian, nilai indeks tersebut masih jauh di bawah IDG Jawa Barat dengan nilai sebesar 70,24 di tahun 2020. Komponen IDG yang menyebabkan IDG Kabupaten Bekasi kesulitan untuk tumbuh adalah komponen perempuan sebagai tenaga ahli profesional yang nilainya justru turun di tahun 2019 dan 2020, dari sebesar 43,22 di tahun 2017 menjadi sebesar 37,77 di tahun 2020. Sedangkan komponen lainnya, yakni keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan juga tidak dapat mendongkrak terlalu tinggi nilai IDG Kabupaten Bekasi dengan kenaikannya yang juga tipis.

Tabel 2.10
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten dan Jawa Barat
beserta Komponennya Tahun 2017-2020

| Tahun | Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) | | Perempuan Sebagai Tenaga Profesional | | Sumbangan Pendapatan Perempuan | | IDG | |
|-------|--|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|------------|--------|
| | Jawa Barat | Bekasi | Jawa Barat | Bekasi | Jawa Barat | Bekasi | Jawa Barat | Bekasi |
| 2017 | 22 | 12 | 41,6 | 43,22 | 29,45 | 24,18 | 70,04 | 57,16 |
| 2018 | 22 | 12 | 41,38 | 41,33 | 29,51 | 24,26 | 70,2 | 57,02 |
| 2019 | 20 | 16 | 41,55 | 37,44 | 29,94 | 24,39 | 69,48 | 60,83 |
| 2020 | 20,83 | 18 | 43,02 | 37,77 | 30,1 | 24,56 | 70,24 | 62,46 |

Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>

Pada indikator kesejahteraan sosial lainnya, beberapa kelompok umur 15 tahun ke atas yang melek huruf, yang persentasenya meningkat di tahun 2019 ternyata kembali mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Kelompok umur 50+ menurun ke angka 89,6% di tahun 2020 dan 88,13% di tahun 2021. Sementara itu, kelompok umur 30-34, 35-39, 40-44 tahun yang sebelumnya bertahan di tahun 2020 juga mengalami penurunan dengan persentase masing-masing sebesar 99,75%, 99,59%, dan 99,98% di tahun 2021.

Tabel 2.11
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf
menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

| Kelompok Umur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 15–19 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20–24 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25–29 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30–34 | 99,67 | 100 | 100 | 99,75 |
| 35–39 | 99,17 | 100 | 100 | 99,59 |
| 40–44 | 99,47 | 100 | 100 | 99,98 |
| 45–49 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50+ | 84,55 | 91,67 | 89,6 | 88,13 |
| Jumlah/Total | | | | |
| 15–24 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15–44 | 99,73 | 100 | 100 | 99,88 |

| Kelompok Umur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 15+ | 97,12 | 98,48 | 98,08 | 97,6 |
| 45+ | 89,26 | 94,16 | 92,69 | 91,71 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2019-2022

Meski derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bekasi bila dilihat berdasarkan angka harapan hidup selama tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan, dimana di tahun 2017 berada pada angka 73,3 tahun dan pada tahun 2021 berada pada angka 73,81 tahun, namun jumlah balita stunting masih pula mengalami peningkatan dari 7.436 balita di tahun 2019 menjadi sebanyak 9.373 balita di tahun 2020, atau naik dari 3,42% menjadi 4,27%. Selain itu, kasus kematian bayi juga masih terjadi di Kabupaten Bekasi meski jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan angka kelahiran bayi seluruhnya. Dari 77.402 kelahiran bayi di tahun 2020, 77.386 bayi lahir hidup dan sisanya sebanyak 16 bayi mengalami kematian. Jumlah kematian bayi sebagaimana kelahiran bayi hidup jumlahnya berfluktuasi setiap tahunnya, yakni dari 24 bayi mati di tahun 2017 menjadi 19 bayi di tahun 2018, 35 bayi di tahun 2019, dan 16 bayi di tahun 2020. Sedangkan pada bayi lahir hidup adalah sebanyak 74.907 bayi di tahun 2017, 72.867 bayi di tahun 2018, 79.734 bayi di tahun 2019, dan 77.386 bayi di tahun 2020.

Di samping itu, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama tahun 2017-2021 juga mengalami peningkatan. Di tahun 2017, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Kabupaten Bekasi hanya sebanyak 18,49%. Sedangkan di tahun berikutnya, persentase tersebut tumbuh menjadi 24,68 persen dan terus meningkat menjadi 38,6% di tahun 2021.

Gambar 2.22
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Kabupaten Bekasi Tahun 2017–2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Meningkatnya jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk yang dijamin dengan bantuan iuran kesehatan dari pemerintah. Pada tahun 2021, persentase penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan meningkat sebesar 5,66% menjadi 30,26%. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan bantuan PBI, maka jumlah penerima jaminan kesehatan daerah pun berkurang dari 32,37% menjadi 24,25% untuk mencegah terjadinya bantuan ganda kepada orang yang sama. Sayangnya persentase peserta jaminan kesehatan lainnya, yaitu non-PBI dan asuransi swasta juga mengalami penurunan di tahun 2021, yang diperkirakan disebabkan akibat kenaikan tarif BPJS di awal Januari serta *saving* yang dilakukan oleh masyarakat dengan menurunnya pendapatan masyarakat dan pengalihan dana untuk membiayai pengeluaran lainnya yang meningkat akibat Covid-19.

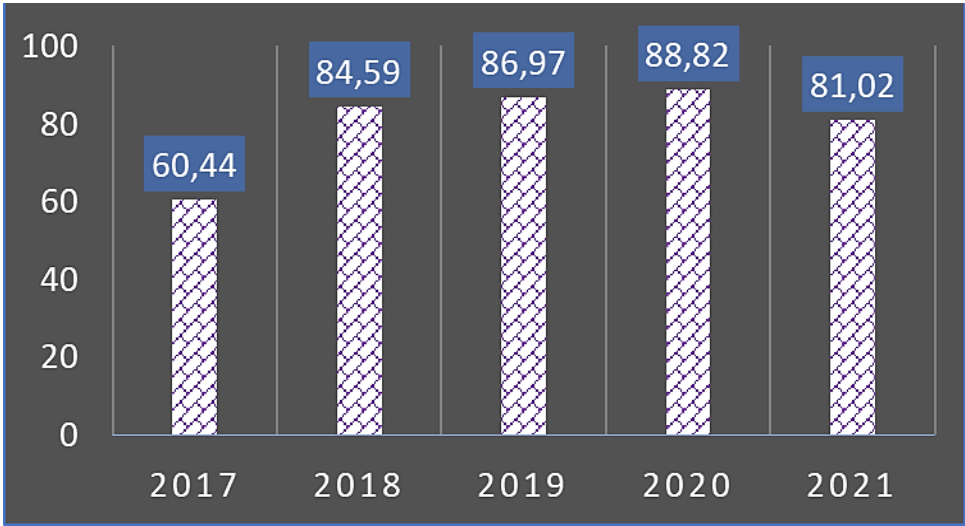
Tabel 2.12
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan berdasarkan Jenis Jaminan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020–2021

| NO. | JENIS JAMINAN | 2020 | 2021 |
|-----|---|-------|-------|
| 1. | BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 24,6 | 30,26 |
| 2. | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | 34,08 | 34,02 |
| 3. | Jamkesda | 32,37 | 24,25 |
| 4. | Asuransi Swasta | 5,82 | 1,93 |
| 5. | Perusahaan/Kantor | 8,38 | 8,38 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Sementara pada indikator penunjang kesehatan masyarakat lainnya, yakni sanitasi layak, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Bekasi yang selama tahun 2017-2020 mengalami peningkatan, yaitu dari 60,44% di tahun 2017 menjadi 88,82% di tahun 2020, justru mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 81,02%

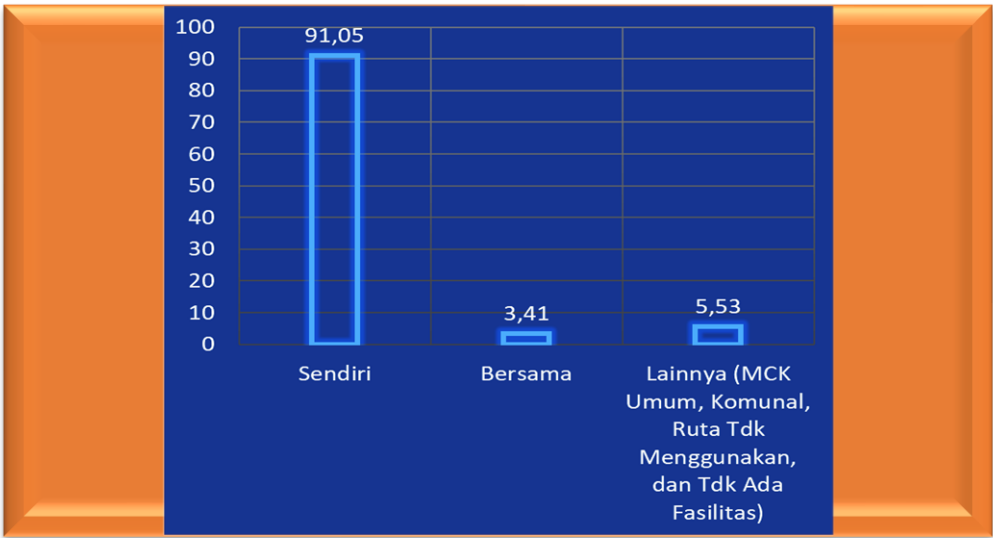
Gambar 2.23
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Bekasi, 2017–2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Meski persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami penurunan di tahun 2021, namun kesadaran masyarakat Kabupaten Bekasi akan pentingnya fasilitas tempat buang air besar sudah sangat baik, sebagaimana ditunjukkan pada persentase rumah tangga yang telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri sebesar 91,05%.

Gambar 2.24
Distribusi Persentase Rumah Tangga dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

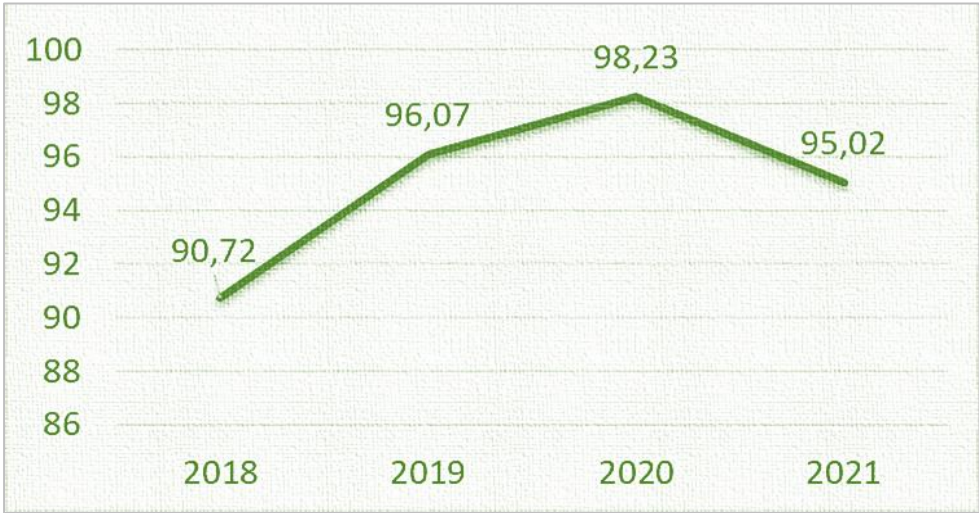


Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Penurunan yang sama terjadi pada akses terhadap sumber air minum layak. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Bekasi yang selama tahun 2018-2020 telah

meningkat dari 90,72% menjadi 98,23% di tahun 2020, di tahun 2021 kembali mengalami penurunan ke angka 95,02%.

Gambar 2.25
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Adapun pada fokus kesejahteraan masyarakat desa yang diukur melalui indeks desa membangun (IDM), Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori berkembang dengan nilai IDM sebesar 0,7419, naik dibandingkan tahun 2019 dengan nilai sebesar 0,6806. Di antara 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, hanya 1 kecamatan yang masuk ke dalam kategori mandiri, yaitu Kecamatan Tambun Selatan dengan nilai IDM sebesar 0,8668. Sisanya yaitu sebanyak 8 kecamatan masuk ke kategori maju, dan 14 kecamatan masuk ke dalam kategori berkembang. Untuk lebih jelasnya, IDM per kecamatan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.13
Indeks Desa Membangun Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021

| No. | Kecamatan | Capaian IDM | | | Status IDM 2021 |
|-----|------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | Tambun Selatan | 0,8066 | 0,8474 | 0,8668 | mandiri |
| 2. | Cikarang Selatan | 0,7574 | 0,7476 | 0,7971 | maju |
| 3. | Cikarang Barat | 0,7084 | 0,7104 | 0,7898 | maju |
| 4. | Cikarang Pusat | 0,7075 | 0,7049 | 0,7666 | maju |
| 5. | Babelan | 0,7489 | 0,6957 | 0,7207 | maju |
| 6. | Serang Baru | 0,6937 | 0,7145 | 0,715 | maju |
| 7. | Tarumajaya | 0,689 | 0,6997 | 0,7135 | maju |
| 8. | Cikarang Utara | 0,6734 | 0,6885 | 0,713 | maju |
| 9. | Cibarusah | 0,7377 | 0,7026 | 0,7105 | maju |
| 10. | Tambun Utara | 0,6534 | 0,6867 | 0,7038 | berkembang |
| 11. | Sukakarya | 0,6416 | 0,6798 | 0,6958 | berkembang |



| No. | Kecamatan | Capaian IDM | | | Status IDM 2021 |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 12. | Karangbahagia | 0,6781 | 0,6724 | 0,6916 | berkembang |
| 13. | Sukatani | 0,6523 | 0,6814 | 0,6915 | berkembang |
| 14. | Kedungwaringin | 0,6764 | 0,6704 | 0,6914 | berkembang |
| 15. | Cibitung | 0,6189 | 0,6674 | 0,688 | berkembang |
| 16. | Setu | 0,6315 | 0,656 | 0,6776 | berkembang |
| 17. | Bojongmangu | 0,6615 | 0,6638 | 0,6647 | berkembang |
| 18. | Cabangbungin | 0,6526 | 0,6551 | 0,6635 | berkembang |
| 19. | Muaragembong | 0,6575 | 0,6564 | 0,6608 | berkembang |
| 20. | Tambelang | 0,6361 | 0,659 | 0,659 | berkembang |
| 21. | Cikarang Timur | 0,6653 | 0,6558 | 0,6558 | berkembang |
| 22. | Pebayuran | 0,6667 | 0,6567 | 0,653 | berkembang |
| 23. | Sukawangi | 0,6954 | 0,6342 | 0,6419 | berkembang |
| | Kabupaten Bekasi | 0,6806 | 0,6881 | 0,7063 | berkembang |

Sumber: Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2021

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pada seni dan budaya, jumlah bidang kesenian yang tercatat ada atau pernah ada selama tahun 2017-2020 adalah sebanyak 11 bidang kesenian, yakni karawitan, kontemporer, lukis, pedalang, pertunjukan, pertunjukan lainnya, rupa, sastra, tari, teater, dan musik. Pada tahun 2020, jumlah seniman terbanyak di Kabupaten Bekasi adalah seniman pertunjukan lainnya dengan jumlah sebanyak 2.813 orang. Sedangkan seniman terbanyak selanjutnya adalah seniman musik dengan jumlah sebanyak 1.590 orang. Adapun seniman yang menghilang di tahun 2020 adalah seniman kontemporer, lukis, pertunjukan, dan rupa. Dibandingkan tahun 2017, jumlah seniman di Kabupaten Bekasi naik 2 kali lipatnya dari hanya sebanyak 2.360 orang menjadi sebanyak 5.366 orang.

Tabel 2.14
Jumlah Seniman berdasarkan Bidang Kesenian
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

| No. | Bidang Kesenian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---------------------|-------|------|------|-------|
| 1. | Karawitan | 55 | N/A | N/A | 80 |
| 2. | Kontemporer | 300 | N/A | N/A | - |
| 3. | Lukis | 10 | N/A | N/A | - |
| 4. | Pedalang | 300 | N/A | N/A | 503 |
| 5. | Pertunjukan | 1.530 | N/A | N/A | - |
| 6. | Pertunjukan Lainnya | - | N/A | N/A | 2.813 |
| 7. | Rupa | 10 | N/A | N/A | - |
| 8. | Sastra | 25 | N/A | N/A | 20 |
| 9. | Tari | 100 | N/A | N/A | 330 |
| 10. | Teater | 30 | N/A | N/A | 30 |



| No. | Bidang Kesenian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------------|-------|------|------|-------|
| 11. | Musik | - | N/A | N/A | 1.590 |
| | Jumlah | 2.360 | N/A | N/A | 5.366 |

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id/id>

Sejalan dengan penambahan jumlah seniman di Kabupaten Bekasi, jumlah organisasi kesenian di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 juga mengalami penambahan dari 198 organisasi di tahun 2017 menjadi 216 organisasi di tahun 2020. Organisasi terbanyak adalah organisasi musik dengan jumlah sebanyak 159 organisasi, sedangkan bidang pertunjukan lainnya dengan jumlah seniman terbanyak justru tidak memiliki organisasi.

Tabel 2.15
Jumlah Organisasi Kesenian Berdasarkan Bidang Kesenian di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

| No. | Bidang Kesenian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------------|------|------|------|------|
| 1. | Karawitan | 11 | N/A | N/A | 4 |
| 2. | Musik | 47 | N/A | N/A | 159 |
| 3. | Pedalangan | 15 | N/A | N/A | 17 |
| 4. | Pertunjukan | 102 | N/A | N/A | 0 |
| 5. | Rupa | 5 | N/A | N/A | 0 |
| 6. | Sastra | 5 | N/A | N/A | 2 |
| 7. | Tari | 10 | N/A | N/A | 33 |
| 8. | Teater | 3 | N/A | N/A | 1 |
| | Jumlah | 198 | N/A | N/A | 216 |

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id/id>

Di bidang sejarah, tercatat hanya terdapat 1 organisasi sejarah di Kabupaten Bekasi di tahun 2020, tidak bertambah bila dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan pada bidang olahraga, jumlah sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 menurun menjadi sebanyak 23 unit dari sebelumnya di tahun 2018 sebanyak 99 unit. Jumlah lembaga pengelola olahraga juga sejak tahun 2017 tidak mengalami penambahan yaitu sebanyak 1 lembaga.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui mutu pelayanan administrasi pemerintahan digunakan indikator indeks kepuasan masyarakat. Pengukuran capaian indeks kepuasan masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mana terdapat 14 (empat belas) unsur yang menjadi indikator kepuasan masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan publik. Mutu pelayanan di Kabupaten Bekasi dikategorikan baik bila indeks kepuasan masyarakat berada pada interval nilai 76,61 – 88,30. Indikator-indikator kepuasan masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan publik tersebut antara lain:

- a) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- c) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
- d) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- f) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- g) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
- h) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
- i) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- j) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

- k) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- l) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- m) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi saran dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- n) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Selama tahun 2018-2021, mutu pelayanan perangkat daerah di Kabupaten Bekasi secara umum dikategorikan baik dengan nilai indeks kepuasan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun mutu pelayanan umum di Kabupaten Bekasi sedikit terhambat karena penyebaran Covid-19, namun mutu pelayanan yang diberikan oleh sebagian besar perangkat daerah yang menjadi sampel di tahun 2021 menunjukkan hasil yang cukup baik walaupun hingga tahun 2021 belum seluruh perangkat daerah dijadikan sampel dan beberapa perangkat daerah belum diukur secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2018, nilai yang tercapai sebesar 76,7 meningkat menjadi 79,78 di tahun 2019, 80,03 di tahun 2020, dan 83,04 di tahun 2021.

Dari sampel perangkat daerah yang dinilai pada tahun 2021, hanya Dinas Perhubungan yang masih berada dalam kategori kurang baik dengan nilai di bawah standar minimal interval yang ditetapkan dengan nilai sebesar 73,74. Dari 9 unsur pelayanan yang dinilai, 8 diantaranya masuk ke dalam kategori kurang baik dengan nilai interval di bawah 3,064 antara lain: prosedur pelayanan, persyaratan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, dan keadilan mendapatkan pelayanan. Sedangkan untuk unsur kesopanan dan keramahan petugas telah dianggap baik dengan nilai sebesar 3,082 atau di atas batas bawah interval untuk mutu pelayanan kategori baik. Adapun untuk Dinas Pendidikan, meski masih masuk ke dalam kategori baik namun mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menurun dibandingkan tahun 2020, sebagaimana dapat dilihat dari nilai indeks-nya yang mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Selain Dinas Pendidikan, RSUD Cabangbungin juga mengalami hal yang



sama di tahun 2019. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.16
Rekapitulasi Nilai IKM Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

| No. | Perangkat Daerah | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-----|---|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | IKM | Ket. | IKM | Ket. | IKM | Ket. | IKM | Ket. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Dinas Perdagangan | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 84,57 | Baik | 87,68 | Baik |
| 2 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 86,29 | Baik |
| 3 | Dinas Ketenagakerjaan | 80,97 | Baik | 80,69 | Baik | 79,18 | Baik | 86,17 | Baik |
| 4 | Dinas Arsip dan Perpustakaan | - | Tidak dihitung | 83,53 | Baik | 79,54 | Baik | 85,84 | Baik |
| 5 | Dinas Kesehatan | 80,97 | Baik | - | Tidak dihitung | 82,14 | Baik | 85,35 | Baik |
| 6 | Dinas Pemadam Kebakaran | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 80,56 | Baik | 81,26 | Baik |
| 7 | Dinas Pendidikan | 63,08 | tidak Baik | - | Tidak dihitung | 82,74 | Baik | 77,94 | Baik |
| 8 | Dinas Perhubungan | - | Tidak dihitung | 69,81 | Kurang Baik | 70,78 | Kurang Baik | 73,74 | Kurang Baik |
| 9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 74,25 | Kurang Baik | - | Tidak dihitung |
| 10 | Badan Pendapatan Daerah | 79,24 | Baik | 82,47 | Baik | 83,24 | Baik | - | Tidak dihitung |
| 11 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 83,26 | Baik | - | Tidak dihitung |
| 12 | Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 74,94 | Kurang Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 77,03 | Baik | 78,19 | Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 76,67 | Baik | 81,01 | Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung |
| 15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 77,67 | Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 81,39 | Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 78,56 | Baik | 83,22 | Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung |
| 18 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 74,92 | Kurang Baik | 76,92 | Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung |
| 19 | Dinas Sosial | 82,22 | Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung |
| 20 | RSUD Cabangbungin | 89,44 | sangat Baik | 79,86 | Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung |
| 21 | RSUD Cibitung | 81,22 | Baik | 82,08 | Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung |
| 22 | Kecamatan Bojongmangu | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 95,19 | Sangat Baik |
| 23 | Kecamatan Setu | 70,39 | Kurang Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 87,83 | Baik |



| No. | Perangkat Daerah | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-----|----------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | IKM | Ket. | IKM | Ket. | IKM | Ket. | IKM | Ket. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 24 | Kecamatan Sukatani | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 87,78 | Baik |
| 25 | Kecamatan Tarumajaya | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 86,34 | Baik |
| 26 | Kecamatan Cabangbungin | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 85,62 | Baik |
| 27 | Kecamatan Tambun Selatan | 73,86 | Kurang Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 85,44 | Baik |
| 28 | Kecamatan Cikarang Utara | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 83,73 | Baik |
| 29 | Kecamatan Serang Baru | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 83,69 | Baik |
| 30 | Kecamatan Kedungwaringin | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 81,8 | Baik |
| 31 | Kecamatan Cikarang Selatan | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 81,59 | Baik |
| 32 | Kecamatan Cibarusah | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 81,54 | Baik |
| 33 | Kecamatan Tambun Utara | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 81,08 | Baik |
| 34 | Kecamatan Muaragembong | 67,5 | Kurang Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 80,56 | Baik |
| 35 | Kecamatan Cikarang Barat | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 80,46 | Baik |
| 36 | Kecamatan Karangbahagia | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 80,22 | Baik |
| 37 | Kecamatan Sukawangi | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 80,22 | Baik |
| 38 | Kecamatan Cikarang Pusat | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 79,96 | Baik |
| 39 | Kecamatan Cikarang Timur | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 79,72 | Baik |
| 40 | Kecamatan Babelan | 70,5 | Kurang Baik | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 79,67 | Baik |
| 41 | Kecamatan Cibitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 79,66 | Baik |
| 42 | Kecamatan Sukakarya | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | 78,35 | Baik |
| 43 | Kecamatan Pebayuran | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung |
| 44 | Kecamatan Tambelang | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung | - | Tidak dihitung |
| | IKM | 76,7 | Baik | 79,78 | Baik | 80,03 | Baik | 83,04 | Baik |

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bekasi

Selain indeks kepuasan masyarakat, juga telah dilakukan pengukuran terhadap pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun capaian target standar pelayanan minimal Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:



Tabel 2.17
Capaian SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | KET. |
|-------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|---------|-----|-----------|---------|------|-----------|---------|------|-----------|---------|------|------|
| | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | |
| URUSAN PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar | Seluruh WNI Usia 7- 15 tahun | 344.307 | 382.026 | 90% | 509.761 | 509.761 | 100% | 534.035 | 486.761 | 110% | 530.779 | 516.276 | 103% | |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Seluruh WNI Usia 7- 18 tahun | - | - | 0% | 4.777 | 486.195 | 1% | 4.956 | 65.925 | 8% | 2.877 | 20.768 | 14% | |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD | Seluruh WNI Usia 5-6 tahun | 130.101 | 188.007 | 69% | 97.268 | 97.268 | 100% | 58.168 | 106.646 | 55% | 76.788 | 113.492 | 68% | |
| URUSAN KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta | Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama swasta | 75.278 | 81.869 | 92% | 83.495 | 83.495 | 100% | 81.956 | 85.125 | 96% | 80.437 | 80.374 | 100% | |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan | Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun | 75.278 | 78.148 | 96% | 79.700 | 79.700 | 100% | 78.956 | 81.255 | 97% | 76.721 | 76.720 | 100% | |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah bayi baru lahir usia 0- 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar | Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun | 75.278 | 78.148 | 96% | 78.677 | 78.677 | 100% | 78.014 | 77.386 | 101% | 76.801 | 73.067 | 105% | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | KET. |
|-----|--|--|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|------|------|
| | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 308.272 | 274.681 | 112% | 375.959 | 375.959 | 100% | 270.988 | 383.886 | 71% | 280.587 | 271.420 | 103% | |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1, 7 dan 10 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar | Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1, 7 dan 10 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran | 70.225 | 74.681 | 94% | 109.535 | 109.535 | 100% | 79.090 | 109.535 | 72% | 463.161 | 478.449 | 97% | |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 422.494 | 1.736.626 | 24% | 1.434.711 | 1.434.711 | 100% | 377.667 | 1.727.486 | 22% | 546.161 | 1.921.655 | 28% | |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun | Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan | 87.057 | 106.287 | 82% | 215.118 | 215.118 | 100% | 179.116 | 232.477 | 77% | 243.508 | 251.690 | 97% | |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah penderita hipertensi yang datang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | Estimasi jumlah penderita hipertensi yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 49.296 | 767.771 | 6% | 529.954 | 529.954 | 100% | 53.994 | 484.801 | 11% | 62.507 | 658.978 | 9% | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | KET. |
|--------------------------------------|---|--|--|-----------|------------|------|------------|------------|------|----------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------|------|------|
| | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama | 16.901 | 36.561 | 46% | 129.108 | 129.108 | 100% | 20.173 | 180.655 | 11% | 25.171 | 37.185 | 68% | |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 1.042 | 1.102 | 95% | 8.845 | 8.845 | 100% | 2.567 | 5.267 | 49% | 2.520 | 4.032 | 63% | |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB) | Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | Jumlah orang terduga TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama | 23.381 | 23.381 | 100% | 4.932 | 4.932 | 100% | 8.366 | 42.648 | 20% | 8.247 | 37.909 | 22% | |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun | Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama | 4.746 | 5.173 | 92% | 13.039 | 13.039 | 100% | 10.352 | 16.795 | 62% | 9.280 | 9.303 | 100% | |
| URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah rumah tangga yang memperoleh pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah total warga negara yang terlayani | jumlah total warga negara yang harus terlayani | 594.364KK | 707.600 KK | 84% | 972.549K K | 972.549K K | 100% | 714.342ru mahtangg a | 860.321ru mahtangg a | 83% | 417.596ru mahtangg a | 958.401ru mah | 44% | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | KET. |
|---|--|---|---|-----------|------------|-----|-----------|------------|------|--------------|--------------|------|-------------------|-----------------------|------|----------------|
| | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | |
| 2 | Penyediaan Pelayanan | Jumlah rumah tangga yang memperoleh Pelayanan Pengolahan air limbah domestik | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengolahan air limbah domestik | Jumlah total warga negara yang terlayani | jumlah total warga negara yang harus terlayani | 559.354KK | 707.600 KK | 79% | 324KK | 972.549 KK | 0% | 40.431ru mah | 72.771ru mah | 56% | 19.448warganegara | 3.022.787 warganegara | 1% | |
| URUSAN PERUMAHAN RAKYAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana | Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana | Jumlah rumah korban bencana | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah | Jumlah fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah | Jumlah rumah yang direhabilitasi | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | |
| URUSAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara | 2.640.570 | 2.750.000 | 96% | 1.750 | 1.750 | 100% | 2.880.280 | 2.880.280 | 100% | 3.022.787 | 3.022.787 | 100% | |
| 2 | Pelayanan Perda dalam semua aktivitas | Warga negara yang berhak mendapatkan layanan Perda dalam semua aktivitas | Jumlah warga terlayani | 2.640.570 | 2.998.000 | 88% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | Indikator Lama |
| 3 | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara Kabupaten Bekasi Tahun 2021 | - | - | 0% | 2.640.570 | 2.640.570 | 100% | 2.880.280 | 2.880.280 | 100% | 3.022.787 | 3.022.787 | 100% | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | KET. |
|---------------|--|--|---|--------------|--------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|----------------|
| | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | |
| 4 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara Kabupaten Bekasi yang berada di kawasan rawan bencana | - | - | 0% | 2.640.570 | 2.640.570 | 100% | 2.880.280 | 2.880.280 | 100% | 3.022.787 | 3.022.787 | 100% | |
| 5 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah keseluruhan korban bencana di kabupaten Bekasi | - | - | 0% | 711.063 | 711.063 | 100% | 266.948 | 266.948 | 100% | 102.134 | 102.134 | 100% | |
| 6 | Layanan Respon Cepat Penanggulangan Kejadian Kebakaran | Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran | Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran dalam 12 Bulan | 27Menit | 30Menit | 90% | - | - | 0% | - | - | 0% | 18menit | 18menit | 100% | |
| 7 | Layanan pelaksanaan pemadaman, pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi | Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten/Kota | Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota | - | - | 0% | 1.920 | 1.920 | 100% | 588 | 588 | 100% | 446 | 446 | 100% | |
| 8 | Penanggulangan Bahaya Kebakaran | Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten | Jumlah wilayah bencana kebakaran | 307 Kejadian | 192 Kejadian | 160% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | Indikator Lama |
| | | Jumlah Aparatur yang memenuhi standar kualifikasi | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran | 281 | 286 | 98% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | Indikator Lama |
| | | Jumlah mobil pemadam | Jumlah mobil pemadam kebakaran pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) | 22 | 106 | 21% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | Indikator Lama |
| URUSAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas | Jumlah penyandang Disabilitas terlanter yang mendapatkan rehabilitasi sosial | Jumlah penyandang Disabilitas terlanter yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial | 1.865 | 2.213 | 84% | 895 | 895 | 100% | 669 | 669 | 100% | 664 | 664 | 100% | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | KET. |
|-----|---|---|---|-----------|--------|------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|-----------|---------|------|----------------|
| | | Pembilang | Penyebut | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | Realisasi | Target | % | |
| | terlantar di luar panti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial | Jumlah anak terlantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial | 624 | 7.202 | 9% | 543 | 543 | 100% | 522 | 522 | 100% | 1.173 | 1.173 | 100% | |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial | Jumlah lanjut usia terlantar yang berhak Mendapatkan rehabilitasi sosial | 470 | 20.744 | 2% | 310 | 310 | 100% | 350 | 350 | 100% | 3.644 | 3.644 | 100% | |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | Jumlah tunasosial yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial | 456 | 1.621 | 28% | 75 | 75 | 100% | 50 | 50 | 100% | 226 | 226 | 100% | |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana | Jumlah korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana | Jumlah korban bencana yang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | 1.600 | 1.600 | 100% | - | - | 0% | 1.566 | 1.566 | 100% | 168.333 | 168.333 | 100% | |
| 6 | Rehabilitasi psikososial korban tindak kekerasan dan bencana sosial | Jumlah korban tindak kekerasan dan bencana sosial yang mendapatkan layanan dukungan psikososial | Jumlah korban tindak kekerasan dan bencana sosial berhak mendapatkan rehabilitasi | 825 | 870 | 95% | 975 | 975 | 100% | - | - | 0% | - | - | 0% | Indikator Lama |

Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021



Dari 6 urusan dengan standar pelayanan minimal, urusan perumahan rakyat merupakan urusan dengan capaian paling rendah karena tidak pernah menganggarkan kebutuhan untuk penerapan standar pelayanan minimal. Hanya urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial yang secara konsisten menerapkan standar pelayanan minimal dengan rata-rata capaian selama tahun 2019-2021 sebesar 100%. Sementara urusan pendidikan capaiannya berkisar antara 50-60%. Urusan kesehatan dan pekerjaan umum capaiannya berfluktuasi setiap tahunnya, yang menandakan belum konsistennya perangkat daerah pemangku dalam menerapkan standar pelayanan minimal.

Dalam penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Bekasi hingga tahun 2021 masih ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan capaian target tidak maksimal. Meski demikian, perangkat daerah pelaksana telah melakukan solusi upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.18
Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Target SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2021

| URUSAN | | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|--------|-------------------|--|---|
| I. | Urusan Pendidikan | Pendidikan Kesetaraan | |
| | | Latar belakang sosial ekonomi warga belajar lemah sehingga frekuensi kehadirannya masih rendah | Menyediakan kebutuhan anggaran yang mencukupi untuk operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sehingga tidak ada pungutan lain yang dibebankan kepada peserta didik |
| | | Keberadaan tempat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang masih belum dikenal masyarakat | Menyediakan spanduk, brosur dan alat komunikasi lainnya yang mudah dilihat oleh masyarakat terutama pada saat tahun ajaran baru/penerimaan peserta didik |
| | | Kurangnya informasi masyarakat mengenai pendidikan kesetaraan | Adanya sosialisasi akan pentingnya pendidikan bagi warga belajar yang tidak dapat terlayani oleh pendidikan formal |
| | | Pendidikan Dasar | |
| | | Masih kurangnya fasilitas yang memadai untuk belajar seperti meja kursi, peralatan laboratorium, dan alat peraga lainnya | Pengadaan mebelair dan alat peraga dianggarkan secara bertahap setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas siswa di sekolah |



| URUSAN | | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|--------|------------------|---|---|
| II. | Urusan Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | |
| | | Adanya penurunan Covid-19 sehingga posyandu di beberapa puskesmas sudah aktif kembali dan melaksanakan posyandu dan meningkatnya cakupan di puskesmas | Masing-masing puskesmas mempunyai inovasi untuk meningkatkan cakupannya |
| | | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | |
| | | Adanya penurunan Covid-19 sehingga posyandu di beberapa puskesmas sudah aktif kembali dan melaksanakan posyandu dan meningkatnya cakupan di puskesmas | Masing-masing puskesmas mempunyai inovasi untuk meningkatkan cakupannya |
| | | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | |
| | | Adanya penurunan Covid-19 sehingga posyandu di beberapa puskesmas sudah aktif kembali dan melaksanakan posyandu dan meningkatnya cakupan di puskesmas | Masing-masing puskesmas mempunyai inovasi untuk meningkatkan cakupannya |
| | | Pelayanan Kesehatan Balita | |
| | | Adanya penurunan Covid-19 sehingga posyandu di beberapa puskesmas sudah aktif kembali dan melaksanakan posyandu dan meningkatnya cakupan di puskesmas | Masing-masing puskesmas mempunyai inovasi untuk meningkatkan cakupannya |
| | | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | |
| | | Sekolah masih pembatasan tatap muka terbatas akibat pandemi sehingga petugas sulit untuk pemeriksaan kesehatan, banyak orang tua yang melarang anaknya untuk diperiksa karena khawatir tertular | Pemeriksaan kesehatan dengan metode google form |
| | | | Edukasi kesehatan dengan media aplikasi WhatsApp wali murid |
| | | | Melakukan penjangkaran berbarengan dengan pelaksanaan vaksinasi |
| | | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | |
| | | Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan <i>medical check up</i> secara mandiri | Meningkatkan sosialisasi skrining kesehatan pada semua instansi/perusahaan |
| | | Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan luar gedung belum terkoordinir dengan baik, selain itu data yang diperoleh juga belum mencakup dari semua fasilitas kesehatan yang ada | Meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan skrining kesehatan |



| URUSAN | | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|--------|--|---|--|
| | | Berkurangnya kunjungan sehubungan dengan masa pandemi Covid 19 | Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat |
| | | Merasa sehat | Perbaikan pencatatan dan pelaporan terutama pada kegiatan luar gedung |
| | | | Peningkatan kualitas data terutama di tingkat Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta (Rumah Sakit, Klinik, Bidan Praktek Mandiri, Praktek Dokter Perorangan) |
| | | | Meningkatkan pencegahan dan pengendalian berbasis masyarakat /pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini dan monitoring faktor resiko |
| | | | Kompetensi / kemampuan petugas dalam deteksi dini |
| | | | Penambahan pelayanan kesehatan di masyarakat / Posbindu PTM |
| | | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | |
| | | Pada masa pandemi ini, lansia adalah bagian masyarakat yang sangat beresiko untuk terpapar Covid-19 sehingga beberapa Posyandu tidak dilakukan di zona merah, dan pelayanan di Puskesmas dibatasi, hanya yang bermasalah dan beresiko, untuk menghindari penyebaran terhadap lansia sebagai komunitas beresiko tinggi. Adanya kekhawatiran lansia untuk berkunjung ke Posyandu Lansia. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga berdampak pada Posyandu yang dibatasi | Melakukan Posyandu Lansia pada zona hijau dan kuning dengan prokes dan pembagian jadwal kelompok sehingga tidak terjadi kerumunan |
| | | | Melakukan kunjungan rumah pada lansia resiko tinggi sehingga lansia tetap terlayani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan |
| | | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | |
| | | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi | Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat |



| URUSAN | | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|--------|--|--|--|
| | | Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin | Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor, misalnya dengan perusahaan, organisasi profesi, kantor pemerintah dan swasta untuk melakukan pelayanan skrining di tempat kerja |
| | | Masih terbatasnya ketersediaan posbindu | Meningkatkan kualitas data terutama di tingkat puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta (rumah sakit, klinik, bidan praktek mandiri, dokter praktek perorangan) dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada serta meningkatkan koordinasi dan pertemuan dengan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta |
| | | Data dari fasilitas kesehatan swasta belum dilaporkan semua | |
| | | Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum terkoordinir dengan baik mengakibatkan data yang dihimpun masih minim | |
| | | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM) | |
| | | Adanya pandemi Covid-19 sehingga program tidak berjalan dengan optimal | Melaksanakan pelayanan menggunakan pro kesehatan |
| | | Kurangnya kesadaran penderita untuk melakukan kontrol secara berkala | KIE tentang pentingnya pola hidup sehat, Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), dan CERDIK |
| | | Masyarakat atau penderita tidak menyadari jika dirinya menderita penyakit diabetes sehingga tidak melakukan skrining secara berkala. | Memberikan penyuluhan kesadaran tentang pentingnya skrining di Posbindu |
| | | Terbatasnya ketersediaan Posbindu | Membentuk Posbindu baru |
| | | Gaya dan pola hidup yang kurang sehat | KIE tentang pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan |
| | | Masyarakat kurang peduli | Ikut sertakan masyarakat dalam kegiatan Posbindu |
| | | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | |
| | | Orang terlantar dan gangguan jiwa yang berada di luar wilayah Kabupaten Bekasi tidak bisa terdata karena tidak ada laporan dari luar wilayah | Melaksanakan kunjungan dengan menggunakan pro kesehatan |
| | | Karena adanya pandemi Covid-19 | Mengadakan kegiatan penyuluhan di masyarakat tentang jiwa |
| | | Karena stigma ODGJ di masyarakat masih buruk sehingga masyarakat kurang terbuka untuk datang berkunjung melakukan pengobatan | Meningkatkan kerjasama dan pendekatan dengan keluarga |



| URUSAN | | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|--------|--------------------------------------|---|--|
| | | Menganggap aib keluarga sehingga ditutupi keluarga | Melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk tenaga kesehatan |
| | | Kurangnya SDM petugas pengelola | Meningkatkan koordinasi dengan membentuk TPKJM |
| | | Kurangnya koordinasi antara program dengan lintas sektor | Penyuluhan dan pembinaan kader untuk ikut peran serta dan penanganan ODGJ dengan ikut aktif di Pos Konseling Edukasi dan Monitoring Kesehatan Jiwa (Pokemon Keswa) |
| | | Kurangnya peran serta masyarakat | |
| | | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB) | |
| | | Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC di Kabupaten Bekasi | Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dianggarkan tahun 2022 |
| | | Belum optimalnya pencatatan pelaporan kasus TBC di DPM/Klinik swasta | Sosialisasi ke DPM/Klinik swasta |
| | | Minimnya anggaran untuk program TB | Membuat surat edaran penekanan MOU Klinik dan Puskesmas wilayah setempat |
| | | | Anggaran untuk P2TB agar tidak di refocusing |
| | | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | |
| | | Adanya pandemi Covid 19 sehingga program HIV tidak bisa berjalan optimal | Pelayanan PDP di 3 puskesmas mulai diefektifkan di tahun 2022 |
| | | Jumlah layanan PDP di Kabupaten Bekasi masih sedikit (1 Rumah Sakit, 3 Puskesmas) | Penambahan anggaran untuk program HIV |
| | | Puskesmas layanan PDP yang saat ini ada belum berjalan secara efektif | Bekerja sama dengan LSM untuk memberikan pendampingan dan pelatihan pencatatan dan pelaporan terhadap layanan PDP |
| | | Minimnya anggaran untuk program HIV | |
| | | Pencatatan dan pelaporan di layanan PDP saat ini belum berjalan secara efektif, sehingga berpengaruh terhadap capaian Dinas Kesehatan | |
| | | | |
| III. | Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Keterbatasan SDM | Peningkatan jumlah dan pengembangan kapasitas SDM |
| | | Keterbatasan kapasitas pengelolaan air limbah | Peningkatan kapasitas pengelolaan air limbah |
| | | Keterbatasan prasarana pengolahan lumpur tinja | Penambahan jumlah prasarana pengolahan lumpur tinja |
| | | Keterbatasan sarana pengangkutan lumpur tinja | Penambahan jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja |



| URUSAN | | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|--------|---|--|--|
| IV. | Urusan Perumahan Rakyat | Tidak dianggarkannya penerapan dan pencapaian SPM bidang/urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga tidak dapat melaksanakan dan menerapkan SPM bidang/urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Perlunya dianggarkan program dan kegiatan penerapan dan pencapaian SPM bidang/urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| V. | Urusan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah personil yang tidak memadai | Pemenuhan sumber daya manusia yang memadai |
| | | Jumlah personil yang terlatih khusus di bidang penanggulangan bencana masih sangat minim | Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani bencana |
| | | Anggaran yang belum sesuai kebutuhan | Pemenuhan anggaran yang sesuai kebutuhan |
| | | Dukungan stakeholder terkait penanggulangan bencana masih belum optimal | Dukungan stakeholder dalam menangani bencana perlu dilibatkan dan berkontribusi |
| | | Kurangnya sarana dan prasana, terutama dalam mobilitas serta jumlah personil untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan polisi pamong praja | Mengajukan alokasi anggaran berkaitan dengan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait dan merencanakan penambahan personil satuan polisi pamong praja, serta merencanakan pembinaan dan peningkatan personil PPNS |
| | | Jauhnya lokasi kejadian kebakaran dari pos pelayanan pemadam kebakaran yang pada sampai saat ini baru memiliki 6 pos pemadam kebakaran selain dari kantor pemadam kebakaran | telah dilakukan upaya untuk menambah pos pemadam kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya. Dengan dibangunnya tambahan pos pelayanan pemadam kebakaran, diharapkan respon time dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. |
| | | Traffic line yang sulit dikendalikan | |
| | | Kecilnya jalan-jalan yang dilalui oleh kendaran pemadam kebakaran | |
| VI. | Urusan Sosial | Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS dapat tertangani | Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PPKS |



| URUSAN | | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|--------|--|---|--|
| | | SDM dan sarana prasarana pelayanan terhadap PPKS kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal | Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial |
| | | | Meningkatkan pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial |
| | | | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS |

Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bekasi Tahun 2021

2.3.1 Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib

Pada fokus urusan pendidikan, jumlah taman kanak-kanak (TK) dan fasilitas pendidikan yang setara di Kabupaten Bekasi untuk tahun ajaran 2021/2022 adalah sebanyak 992 sekolah, dengan jumlah TK negeri sebanyak 3 sekolah, TK swasta sebanyak 658 sekolah, raudatul athfal (RA) sebanyak 331 sekolah. Sementara jumlah guru untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dan mengajar adalah sebanyak 4.311 orang, dengan guru TK negeri sebanyak 32 orang, guru TK swasta sebanyak 2.602 orang, dan guru RA sebanyak 1.677 orang. Keberadaan fasilitas pendidikan tersebut pada tahun ajaran 2021/2022 dapat menampung total murid sebanyak 37.195 orang, dengan murid TK negeri sebanyak 277 orang, TK swasta sebanyak 24.599 orang, dan RA sebanyak 12.319 orang. Adapun jumlah TK dan fasilitas pendidikan yang setara terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu sebanyak 150 sekolah, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu, yang tidak memiliki TK atau fasilitas pendidikan yang setara sama sekali.

Tabel 2.19
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Taman Kanak-Kanak atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022

| NO. | KECAMATAN | TAMAN KANAK-KANAK (TK) | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------------------|-----------|----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-------|
| | | 2021/2022 | | | | | | | | | | | |
| | | SEKOLAH | | | | GURU | | | | MURID | | | |
| | | TK NEGERI | TK SWASTA | RA | JML | TK NEGERI | TK SWASTA | RA | JML | TK NEGERI | TK SWASTA | RA | JML |
| 1. | Setu | - | 36 | 13 | 49 | - | 166 | 54 | 220 | - | 1.638 | 370 | 2.008 |
| 2. | Serang Baru | - | 34 | 6 | 40 | - | 144 | 27 | 171 | - | 1.455 | 360 | 1.815 |
| 3. | Cikarang Pusat | - | 22 | 1 | 23 | - | 78 | 4 | 82 | - | 745 | 10 | 755 |
| 4. | Cikarang Selatan | 1 | 43 | 15 | 59 | 14 | 178 | 153 | 345 | 103 | 1.805 | 784 | 2.692 |



| NO. | KECAMATAN | TAMAN KANAK-KANAK (TK) | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | 2021/2022 | | | | | | | | | | | |
| | | SEKOLAH | | | | GURU | | | | MURID | | | |
| | | TK NEGERI | TK SWASTA | RA | JML | TK NEGERI | TK SWASTA | RA | JML | TK NEGERI | TK SWASTA | RA | JML |
| 5. | Cibarusah | - | 18 | 6 | 24 | - | 62 | 35 | 97 | - | 646 | 333 | 979 |
| 6. | Bojongmangu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Cikarang Timur | - | 14 | 7 | 21 | - | 62 | 38 | 100 | - | 602 | 281 | 883 |
| 8. | Kedungwaringin | - | 9 | 4 | 13 | - | 30 | 25 | 55 | - | 255 | 112 | 367 |
| 9. | Cikarang Utara | 1 | 58 | 23 | 82 | 16 | 249 | 123 | 388 | 165 | 2.278 | 793 | 3.236 |
| 10. | Karangbahagia | - | 16 | 10 | 26 | - | 64 | 60 | 124 | - | 638 | 477 | 1.115 |
| 11. | Cibitung | - | 68 | 29 | 97 | - | 258 | 163 | 421 | - | 2.449 | 1425 | 3.874 |
| 12. | Cikarang Barat | - | 27 | 28 | 55 | - | 107 | 160 | 267 | - | 1.075 | 1248 | 2.323 |
| 13. | Tambun Selatan | - | 111 | 39 | 150 | - | 437 | 193 | 630 | - | 4.204 | 1044 | 5.248 |
| 14. | Tambun Utara | - | 58 | 21 | 79 | - | 219 | 108 | 327 | - | 1.699 | 915 | 2.614 |
| 15. | Babelan | - | 64 | 42 | 106 | - | 261 | 178 | 439 | - | 2.248 | 1523 | 3.771 |
| 16. | Tarumajaya | - | 43 | 30 | 73 | - | 159 | 150 | 309 | - | 1.424 | 1107 | 2.531 |
| 17. | Tambelang | - | 2 | 3 | 5 | - | 8 | 16 | 24 | - | 79 | 79 | 158 |
| 18. | Sukawangi | - | 3 | 5 | 8 | - | 11 | 20 | 31 | - | 203 | 274 | 477 |
| 19. | Sukatani | - | 13 | 13 | 26 | - | 42 | 65 | 107 | - | 451 | 442 | 893 |
| 20. | Sukakarya | - | 5 | 7 | 12 | - | 20 | 43 | 63 | - | 176 | 304 | 480 |
| 21. | Pebayuran | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 18 | 32 | 52 | 9 | 203 | 275 | 487 |
| 22. | Cabangbungin | - | 7 | 2 | 9 | - | 24 | 8 | 32 | - | 302 | 92 | 394 |
| 23. | Muaragembong | - | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 4 | 9 | - | 24 | 61 | 85 |
| | JUMLAH | 3 | 658 | 331 | 992 | 32 | 2.602 | 1.677 | 4.311 | 277 | 24.599 | 12.319 | 37.195 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Pada tingkat sekolah dasar, jumlah sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) pada tahun ajaran 2021/2022 adalah sebanyak 1.235 sekolah dengan jumlah SD negeri sebanyak 710 sekolah, SD swasta sebanyak 305 sekolah, MI negeri sebanyak 1 sekolah, dan MI swasta sebanyak 219 sekolah. Adapun jumlah guru yang tersedia adalah sebanyak 9.583 guru SD negeri, 4.939 guru SD swasta, 31 guru MI negeri, dan 3.046 guru MI swasta dengan total guru secara keseluruhan sebanyak 17.599 orang. Sementara jumlah murid yang tertampung adalah sebanyak 242.083 murid SD negeri, 83.178 murid SD swasta, 643 murid MI negeri, dan 53.015 murid MI swasta dengan total jumlah murid sebanyak 378.919 orang. Adapun jumlah SD dan fasilitas pendidikan yang setara terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu sebanyak 112 sekolah, dan paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu dengan 20 sekolah.

Tabel 2.20
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Dasar atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022

| NO. | KECAMATAN | 2021/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|--------|---------------------|--------|-----|---------------|--------|---------------------|--------|-----|---------------|--------|---------------------|--------|--------|
| | | SEKOLAH | | | | | GURU | | | | | MURID | | | | |
| | | SEKOLAH DASAR | | MADRASAH IBTIDAIYAH | | JML | SEKOLAH DASAR | | MADRASAH IBTIDAIYAH | | JML | SEKOLAH DASAR | | MADRASAH IBTIDAIYAH | | JML |
| | | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |
| 1. | Setu | 34 | 23 | - | 9 | 66 | 365 | 323 | - | 115 | 803 | 11.288 | 6.207 | - | 2.070 | 19.565 |
| 2. | Serang Baru | 24 | 29 | - | 6 | 59 | 295 | 414 | - | 95 | 804 | 11.218 | 8.224 | - | 2.166 | 21.608 |
| 3. | Cikarang Pusat | 20 | 12 | - | 1 | 33 | 207 | 176 | - | 11 | 394 | 4.982 | 2.348 | - | 67 | 7.397 |
| 4. | Cikarang Selatan | 24 | 26 | - | 2 | 52 | 361 | 442 | - | 36 | 839 | 12.957 | 8.138 | - | 630 | 21.725 |
| 5. | Cibarusah | 27 | 10 | - | 5 | 42 | 312 | 175 | - | 40 | 527 | 8.786 | 2.964 | - | 599 | 12.349 |
| 6. | Bojongmangu | 15 | - | - | 5 | 20 | 134 | - | - | 44 | 178 | 2.426 | - | - | 533 | 2.959 |



| NO. | KECAMATAN | 2021/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|--------|---------------------|--------|-------|---------------|--------|---------------------|--------|--------|---------------|--------|---------------------|--------|---------|
| | | SEKOLAH | | | | | GURU | | | | | MURID | | | | |
| | | SEKOLAH DASAR | | MADRASAH IBTIDAIYAH | | JML | SEKOLAH DASAR | | MADRASAH IBTIDAIYAH | | JML | SEKOLAH DASAR | | MADRASAH IBTIDAIYAH | | JML |
| | | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |
| 7. | Cikarang Timur | 30 | 7 | - | 3 | 40 | 298 | 91 | - | 26 | 415 | 8.380 | 1.419 | - | 687 | 10.486 |
| 8. | Kedungwaringin | 26 | 3 | - | 3 | 32 | 278 | 33 | - | 32 | 343 | 7.477 | 737 | - | 794 | 9.008 |
| 9. | Cikarang Utara | 57 | 32 | - | 8 | 97 | 851 | 597 | - | 151 | 1.599 | 23.411 | 9.755 | - | 3.167 | 36.333 |
| 10. | Karangbahagia | 28 | 8 | - | 6 | 42 | 373 | 73 | - | 57 | 503 | 9.415 | 1.858 | - | 1.123 | 12.396 |
| 11. | Cibitung | 38 | 12 | - | 10 | 60 | 636 | 194 | - | 256 | 1.086 | 18.092 | 2.832 | - | 4.520 | 25.444 |
| 12. | Cikarang Barat | 45 | 23 | - | 12 | 80 | 610 | 420 | - | 192 | 1.222 | 15.581 | 6.712 | - | 3.186 | 25.479 |
| 13. | Tambun Selatan | 65 | 37 | - | 10 | 112 | 1.223 | 824 | - | 226 | 2.273 | 30.058 | 12.314 | - | 5.132 | 47.504 |
| 14. | Tambun Utara | 28 | 17 | - | 8 | 53 | 497 | 334 | - | 119 | 950 | 12.747 | 5.566 | - | 2.209 | 20.522 |
| 15. | Babelan | 45 | 16 | - | 35 | 96 | 819 | 291 | - | 548 | 1.658 | 17.127 | 5.749 | - | 10.456 | 33.332 |
| 16. | Tarumajaya | 26 | 20 | - | 23 | 69 | 428 | 231 | - | 333 | 992 | 9.541 | 3.074 | - | 5.660 | 18.275 |
| 17. | Tambelang | 16 | 3 | - | 7 | 26 | 184 | 24 | - | 74 | 282 | 3.476 | 409 | - | 327 | 4.212 |
| 18. | Sukawangi | 19 | 3 | - | 9 | 31 | 216 | 23 | - | 99 | 338 | 4.311 | 290 | - | 1.327 | 5.928 |
| 19. | Sukatani | 25 | 12 | 1 | 15 | 53 | 309 | 133 | 31 | 183 | 656 | 8.051 | 2.342 | 643 | 2.998 | 14.034 |
| 20. | Sukakarya | 21 | 2 | - | 10 | 33 | 248 | 23 | - | 130 | 401 | 4.321 | 169 | - | 1.833 | 6.323 |
| 21. | Pebayuran | 50 | 5 | - | 9 | 64 | 448 | 78 | - | 80 | 606 | 9.835 | 1.475 | - | 1.109 | 12.419 |
| 22. | Cabangbungin | 26 | 3 | - | 9 | 38 | 254 | 25 | - | 81 | 360 | 4.840 | 476 | - | 1.046 | 6.362 |
| 23. | Muaragembong | 21 | 2 | - | 14 | 37 | 237 | 15 | - | 118 | 370 | 3.763 | 120 | - | 1.376 | 5.259 |
| | JUMLAH | 710 | 305 | 1 | 219 | 1.235 | 9.583 | 4.939 | 31 | 3.046 | 17.599 | 242.083 | 83.178 | 643 | 53.015 | 378.919 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Sejak tahun 2017 hingga 2021 jumlah fasilitas pendidikan pada SD negeri dan swasta terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Kendati demikian, kualitas maupun kuantitas sarana prasarana khususnya pada SD negeri di semua sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya memenuhi standar nasional sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga. Namun bila dilihat dari jumlah laboratorium IPA, perpustakaan, dan usaha kesehatan di SD negeri dan swasta yang tidak sebanding dengan jumlah SD negeri dan swasta yang ada menunjukkan bahwa masih ada SD negeri atau swasta yang tidak memiliki fasilitas dimaksud.

Tabel 2.21
Jumlah Fasilitas pada SD Negeri dan Swasta berdasarkan Kondisinya di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021

| No. | Uraian | Tahun | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | Jumlah |
|-----|-------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 1. | Ruang Kelas | 2017/2018 | 2.555 | 4.332 | 553 | 362 | 365 | 8.167 |
| | | 2018/2019 | 2.693 | 4.510 | 607 | 597 | - | 8.407 |
| | | 2019/2020 | 1.688 | 5.789 | 1.025 | 519 | - | 9.021 |
| | | 2020/2021 | 8.976 | 634 | - | - | - | 9.610 |



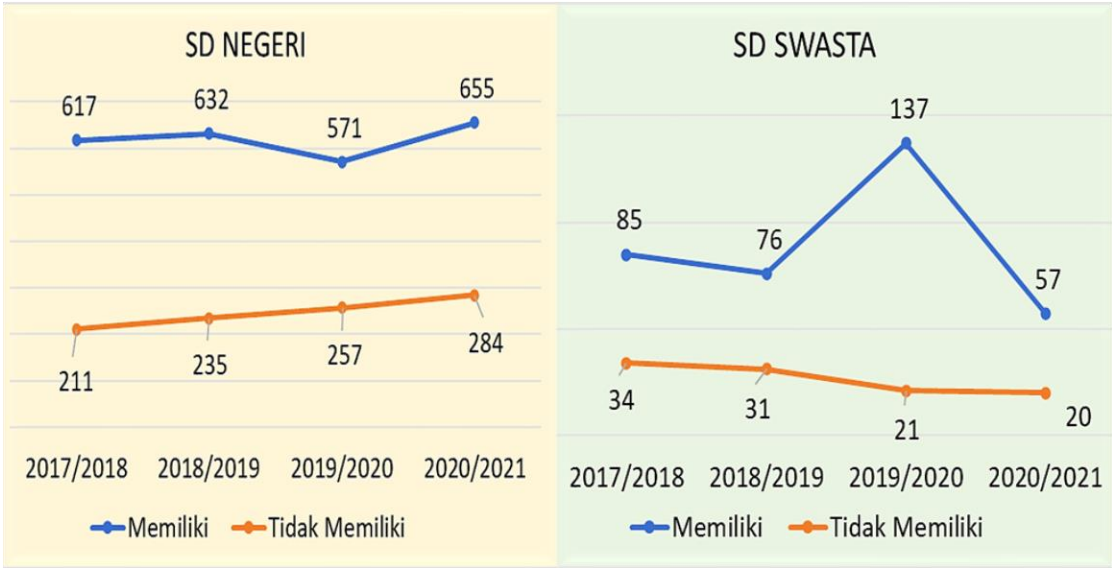
| No. | Uraian | Tahun | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | Jumlah |
|-----|-------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 2. | Laboratorium IPA | 2017/2018 | 21 | 10 | - | 1 | 1 | 33 |
| | | 2018/2019 | 49 | 31 | 1 | 1 | 1 | 83 |
| | | 2019/2020 | 37 | 83 | 7 | 2 | - | 129 |
| | | 2020/2021 | 140 | 7 | - | - | - | 147 |
| 3. | Perpustakaan | 2017/2018 | 125 | 169 | 15 | 19 | 15 | 343 |
| | | 2018/2019 | 155 | 211 | 13 | 18 | 17 | 414 |
| | | 2019/2020 | 94 | 324 | 48 | 30 | - | 496 |
| | | 2020/2021 | 509 | 35 | - | - | - | 544 |
| 4. | Usaha Kesehatan Sekolah | 2017/2018 | 71 | 75 | 10 | 3 | 4 | 163 |
| | | 2018/2019 | 106 | 103 | 12 | 8 | 6 | 235 |
| | | 2019/2020 | 71 | 200 | 14 | 15 | - | 300 |
| | | 2020/2021 | 499 | 165 | - | - | - | 664 |
| 5. | Toilet Siswa Laki-Laki | 2017/2018 | 228 | 445 | 70 | 53 | 41 | 837 |
| | | 2018/2019 | 253 | 454 | 75 | 60 | 48 | 890 |
| | | 2019/2020 | 171 | 606 | 117 | 81 | - | 975 |
| | | 2020/2021 | 1.549 | 647 | - | - | - | 2.196 |
| 6. | Toilet Siswa Perempuan | 2017/2018 | 204 | 349 | 44 | 26 | 32 | 655 |
| | | 2018/2019 | 212 | 389 | 50 | 29 | 30 | 710 |
| | | 2019/2020 | 164 | 487 | 85 | 52 | - | 788 |
| | | 2020/2021 | 1.300 | 497 | - | - | - | 1.797 |
| 7. | Toilet Guru Laki-Laki | 2017/2018 | 166 | 376 | 49 | 38 | 34 | 663 |
| | | 2018/2019 | 193 | 389 | 48 | 45 | 35 | 710 |
| | | 2019/2020 | 110 | 495 | 85 | 69 | - | 759 |
| | | 2020/2021 | 1.225 | 515 | - | - | - | 1.740 |
| 8. | Toilet Guru Perempuan | 2017/2018 | 145 | 300 | 22 | 35 | 22 | 524 |
| | | 2018/2019 | 166 | 317 | 29 | 38 | 21 | 571 |
| | | 2019/2020 | 105 | 389 | 72 | 45 | - | 611 |
| | | 2020/2021 | 1.016 | 399 | - | - | - | 1.415 |

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Sementara untuk toilet, khususnya toilet siswa. Meski secara jumlah sudah banyak, tetapi ternyata masih ada sekolah, baik negeri maupun swasta yang belum memiliki toilet siswa. Untuk tahun ajaran 2020/2021, sebanyak 284 SD negeri dan 20 SD swasta yang tidak memiliki toilet. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penambahan dan perbaikan telah

dilaksanakan secara lebih masif di tahun ajaran 2020/2021, khususnya pada fasilitas ruang kelas serta toilet siswa dan guru.

Gambar 2.26
Jumlah SD Negeri dan Swasta menurut Kepemilikan Toilet Siswa di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021

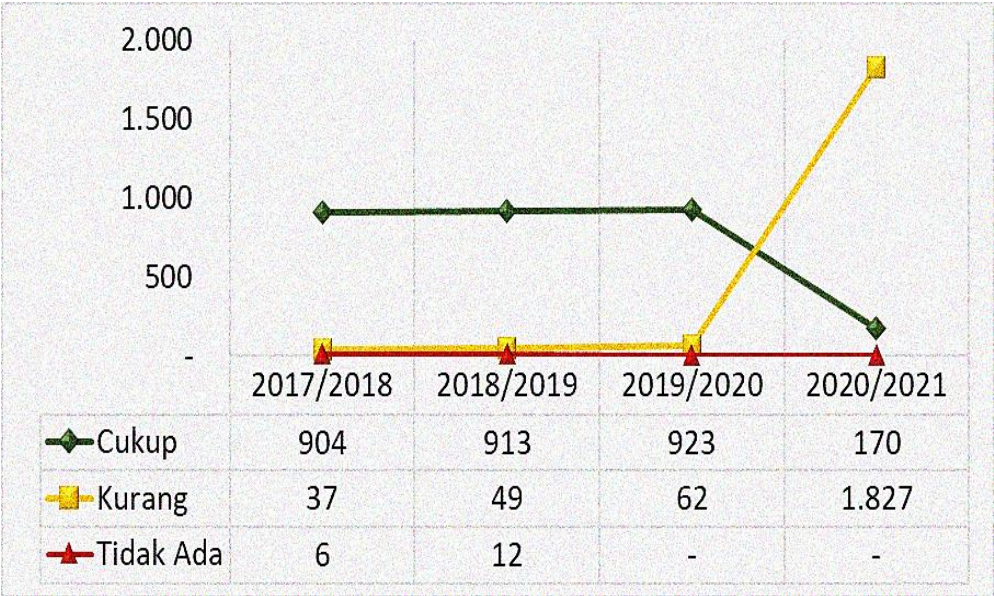


Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Selain yang telah disebutkan di atas, fasilitas lainnya di SD negeri dan swasta yang masih harus ditingkatkan adalah sumber air bersih. Sampai dengan tahun 2020/2021, jumlah ketersediaan air pada SD negeri dan swasta masih sangat kurang. Berdasarkan data Dapodik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, masih terdapat 1.827 SD negeri dan swasta yang kekurangan air di tahun ajaran tersebut, meningkat dari tahun ajaran sebelumnya yang hanya sebanyak 62 sekolah. Sedangkan sekolah yang pada tahun 2019/2020 cukup air, pada tahun ajaran 2020/2021 juga ikut kekurangan air sebagaimana dapat dilihat dari jumlah sekolah cukup air yang sebelumnya sebanyak 923 sekolah, berkurang menjadi 170 sekolah. Di samping itu, untuk menjamin kesehatan para siswa, tenaga pendidik dan kependidikan di SD negeri serta swasta, juga harus diperhatikan sumber air pada sekolah tersebut. Hingga tahun ajaran 2020/2021 masih terdapat 4 sekolah yang mendapatkan air dari sumur tidak terlindungi, 1 sekolah dari mata air tidak terlindungi, 4 sekolah dari sungai, dan 8 sekolah dari air hujan. Sumber air tersebut meski dapat digunakan namun tidak cukup higienis dan sehat karena kemungkinan tercemar dengan zat berbahaya dari luar lebih besar daripada air yang sumbernya terlindungi atau telah diolah. Pada tahun ajaran 2020/2021, jumlah SD negeri dan swasta yang sumber airnya berasal dari air kemasan adalah sebanyak 7 sekolah, 671

sekolah berasal dari PAM, 918 sekolah berasal dari pompa, 326 sekolah berasal dari sumur terlindungi, 28 sekolah berasal dari mata air terlindungi, dan 30 sekolah berasal dari sumber air lainnya. Jumlah sekolah yang menggunakan PAM, pompa, dan sumur terlindungi pada tahun 2020/2021 meningkat kurang lebih 2 kali lipatnya dibandingkan tahun ajaran 2019/2020, dimana jumlah sekolah yang menggunakan PAM sebelumnya hanya sebanyak 303 sekolah, pompa sebanyak 438 sekolah, dan sumur terlindungi sebanyak 166 sekolah. Ketersediaan air dan toilet siswa tentunya saling berkorelasi karena toilet membutuhkan ketersediaan air yang memadai.

Gambar 2.27
Jumlah SD Negeri dan Swasta menurut Ketersediaan Air di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021



Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Pada tingkat menengah pertama, jumlah sekolah dan guru di sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) untuk tahun ajaran 2021/2022 adalah sebanyak 507 sekolah dengan 9.035 orang guru, yang terbagi menjadi 98 SMP negeri dengan 3.421 guru, 266 SMP swasta dengan 2.768 guru, 4 MTs negeri dengan 262 guru, dan 139 MTs swasta dengan 2.584 guru. Adapun jumlah murid pada tahun ajaran 2021/2022 adalah sebanyak 153.080 orang, dengan murid SMP negeri dan swasta masing-masing sebanyak 81.114 dan 40.260 orang, serta murid MTs negeri dan swasta sebanyak 2.870 dan 28.836 orang. Adapun sebagaimana pada tingkat TK dan SD, jumlah SMP dan fasilitas pendidikan yang setara terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu sebanyak 64 sekolah, dan paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu dengan 4 sekolah.



Tabel 2.22
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Menengah Pertama atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022

| NO. | KEC. | 2021/2022 | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | SEKOLAH | | | | GURU | | | | MURID | | | |
| | | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) | | MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) | | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) | | MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) | | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) | | MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) | |
| | | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA |
| 1. | Setu | 6 | 23 | 1 | 9 | 166 | 193 | 105 | 153 | 4.229 | 2.541 | 1.083 | 2.112 |
| 2. | Serang Baru | 2 | 17 | - | 4 | 75 | 159 | - | 93 | 1.813 | 3.053 | - | 937 |
| 3. | Cikarang Pusat | 3 | 7 | - | - | 56 | 77 | - | - | 1.048 | 1.230 | - | - |
| 4. | Cikarang Selatan | 5 | 14 | 1 | 1 | 190 | 148 | 72 | 21 | 4.564 | 1.845 | 808 | 410 |
| 5. | Cibarusah | 6 | 10 | - | 3 | 164 | 100 | - | 62 | 3.663 | 1.788 | - | 1.031 |
| 6. | Bojongmangu | 2 | - | - | 2 | 41 | - | - | 19 | 608 | - | - | 393 |
| 7. | Cikarang Timur | 5 | 4 | - | 5 | 148 | 55 | - | 65 | 3.127 | 714 | - | 589 |
| 8. | Kedungwaringin | 2 | 5 | - | 3 | 76 | 43 | - | 59 | 1.607 | 1.292 | - | 529 |
| 9. | Cikarang Utara | 6 | 28 | - | 10 | 277 | 272 | - | 225 | 7.492 | 3.543 | - | 2.068 |
| 10. | Karangbahagia | 3 | 7 | 1 | 9 | 85 | 49 | 39 | 150 | 2.180 | 651 | 507 | 1.467 |
| 11. | Cibitung | 8 | 11 | - | 7 | 273 | 90 | - | 128 | 7.050 | 1.081 | - | 1.420 |
| 12. | Cikarang Barat | 5 | 14 | - | 7 | 192 | 142 | - | 137 | 4.535 | 2.232 | - | 1.771 |
| 13. | Tambun Selatan | 13 | 41 | - | 10 | 615 | 562 | - | 185 | 14.860 | 7.203 | - | 2.373 |
| 14. | Tambun Utara | 7 | 10 | - | 2 | 232 | 89 | - | 31 | 5.607 | 1.388 | - | 407 |
| 15. | Babelan | 5 | 25 | - | 14 | 230 | 249 | - | 340 | 5.412 | 4.393 | - | 4.917 |
| 16. | Tarumajaya | 3 | 13 | - | 10 | 102 | 130 | - | 175 | 2.696 | 1.653 | - | 1.712 |
| 17. | Tambelang | 3 | 2 | - | 4 | 71 | 17 | - | 49 | 1.550 | 263 | - | 484 |
| 18. | Sukawangi | 2 | 6 | - | 7 | 61 | 51 | - | 109 | 1.357 | 757 | - | 732 |
| 19. | Sukatani | 2 | 6 | - | 11 | 99 | 59 | - | 198 | 2.346 | 1.063 | - | 1.414 |
| 20. | Sukakarya | 1 | 8 | 1 | 5 | 29 | 84 | 46 | 83 | 556 | 1.229 | 472 | 543 |
| 21. | Pebayuran | 3 | 3 | - | 7 | 110 | 77 | - | 140 | 2.741 | 1.071 | - | 2.022 |
| 22. | Cabangbungin | 3 | 9 | - | 6 | 72 | 94 | - | 118 | 1.153 | 942 | - | 1.090 |
| 23. | Muaragembong | 3 | 3 | - | 3 | 57 | 28 | - | 44 | 920 | 328 | - | 415 |
| | JUMLAH | 98 | 266 | 4 | 139 | 3.421 | 2.768 | 262 | 2.584 | 81.114 | 40.260 | 2.870 | 28.836 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Sementara itu, terkait dengan fasilitas sekolah pada SMP negeri dan swasta, jumlah ruang kelas, laboratorium IPA, perpustakaan, usaha kesehatan sekolah, dan toilet pada tahun ajaran 2020/2021, menunjukkan penambahan secara kuantitas maupun kualitasnya. Pada ruang kelas, jumlah dalam kondisi baik meningkat dari 763 menjadi 3.787 unit. Laboratorium IPA dalam kondisi baik meningkat dari 74 menjadi 249 unit. Perpustakaan meningkat dari 74 menjadi 249 unit. Usaha kesehatan sekolah juga meningkat dari 51 menjadi 321 unit. Begitu pula toilet siswa perempuan dan laki-laki yang juga masing-masing mengalami penambahan jumlah dalam kondisi baik menjadi sebanyak 607 dan 631 unit. Toilet guru perempuan dan laki-laki juga mengalami penambahan dengan toilet dalam kondisi baik masing-masing bertambah menjadi 477 dan 520 unit.



Tabel 2.23
Jumlah Fasilitas pada SMP Negeri dan Swasta berdasarkan Kondisinya
di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021

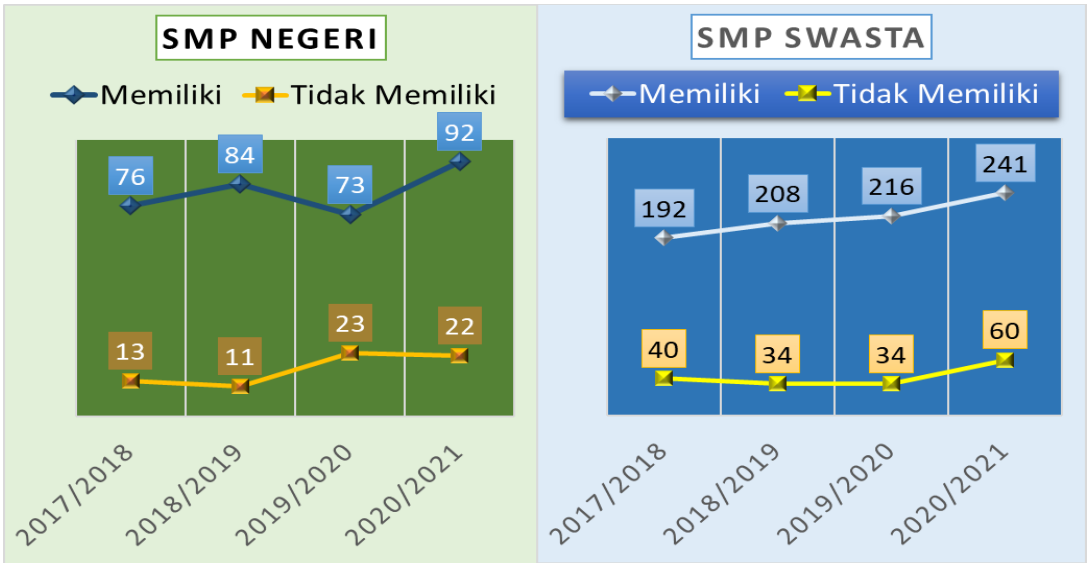
| No. | Uraian | Tahun | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | Jumlah |
|-----|-------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 1. | Ruang Kelas | 2017/2018 | 994 | 1.869 | 177 | 130 | 123 | 3.293 |
| | | 2018/2019 | 1.198 | 1.868 | 180 | 168 | - | 3.414 |
| | | 2019/2020 | 763 | 2.408 | 331 | 216 | - | 3.718 |
| | | 2020/2021 | 3.787 | 229 | - | - | - | 4.016 |
| 2. | Laboratorium IPA | 2017/2018 | 63 | 66 | 8 | 6 | 6 | 149 |
| | | 2018/2019 | 78 | 73 | 6 | 9 | 9 | 175 |
| | | 2019/2020 | 74 | 139 | 18 | 15 | - | 246 |
| | | 2020/2021 | 249 | 19 | - | - | - | 268 |
| 3. | Perpustakaan | 2017/2018 | 80 | 110 | 10 | 19 | 10 | 229 |
| | | 2018/2019 | 105 | 106 | 13 | 18 | 10 | 252 |
| | | 2019/2020 | 72 | 183 | 29 | 19 | - | 303 |
| | | 2020/2021 | 304 | 23 | - | - | - | 327 |
| 4. | Usaha Kesehatan Sekolah | 2017/2018 | 56 | 64 | 5 | 3 | 3 | 131 |
| | | 2018/2019 | 86 | 65 | 5 | 8 | 3 | 167 |
| | | 2019/2020 | 51 | 124 | 11 | 7 | - | 193 |
| | | 2020/2021 | 321 | 101 | - | - | - | 422 |
| 5. | Toilet Siswa Laki-Laki | 2017/2018 | 98 | 159 | 14 | 6 | 11 | 288 |
| | | 2018/2019 | 113 | 168 | 14 | 10 | 14 | 319 |
| | | 2019/2020 | 85 | 217 | 36 | 27 | - | 365 |
| | | 2020/2021 | 631 | 200 | - | - | - | 831 |
| 6. | Toilet Siswa Perempuan | 2017/2018 | 88 | 153 | 12 | 6 | 9 | 268 |
| | | 2018/2019 | 104 | 163 | 12 | 8 | 11 | 298 |
| | | 2019/2020 | 79 | 205 | 36 | 20 | - | 340 |
| | | 2020/2021 | 607 | 189 | - | - | - | 796 |
| 7. | Toilet Guru Laki-Laki | 2017/2018 | 88 | 128 | 12 | 8 | 8 | 244 |
| | | 2018/2019 | 101 | 131 | 13 | 11 | 8 | 264 |
| | | 2019/2020 | 70 | 187 | 23 | 16 | - | 296 |
| | | 2020/2021 | 520 | 162 | - | - | - | 682 |
| 8. | Toilet Guru Perempuan | 2017/2018 | 70 | 111 | 12 | 6 | 5 | 204 |
| | | 2018/2019 | 91 | 121 | 12 | 6 | 5 | 235 |
| | | 2019/2020 | 64 | 165 | 21 | 13 | - | 263 |
| | | 2020/2021 | 477 | 139 | - | - | - | 616 |

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Penambahan jumlah tersebut, sebagaimana pada jenjang SD tidak berarti bahwa semua sekolah telah memiliki fasilitas tersebut. Untuk toilet misalnya, meski jumlah SMP negeri dan swasta yang memiliki toilet siswa sampai dengan tahun ajaran 2020/2021 bertambah dibandingkan tahun ajaran sebelumnya, namun masih terdapat 22 SMP negeri yang tidak memiliki toilet, sementara SMP swasta yang juga tidak memiliki toilet jumlahnya sebanyak 60 sekolah, bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak

34 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap perlunya toilet siswa masih kurang atau dapat pula disebabkan oleh kurangnya ketersediaan air bersih pada sekolah tersebut.

Gambar 2.28
Jumlah SMP Negeri dan Swasta menurut Kepemilikan Toilet Siswa di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021



Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

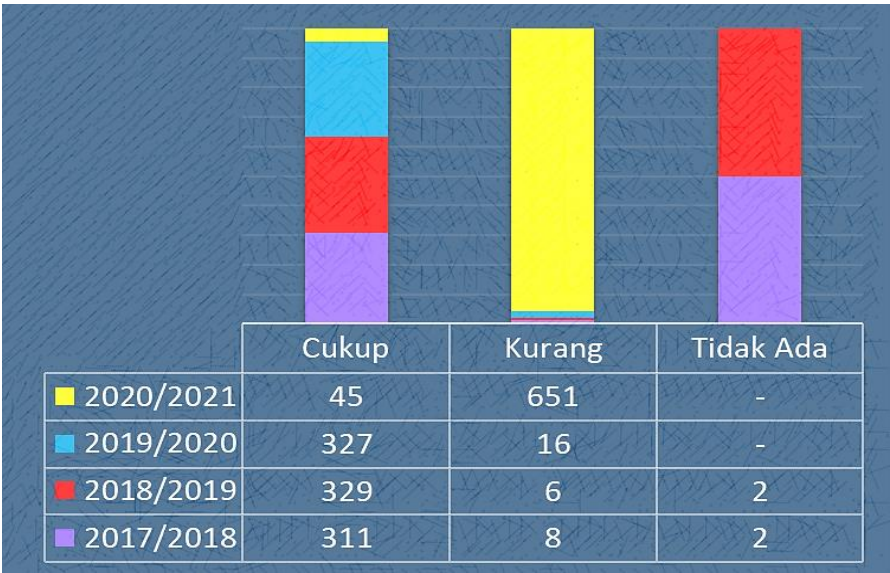
Sampai dengan tahun ajaran 2020/2021, jumlah SMP negeri dan swasta yang memiliki ketersediaan air cukup menurun dari 327 sekolah menjadi hanya sebanyak 45 sekolah. Di sisi lain, jumlah sekolah yang memiliki air namun kurang bertambah menjadi 651 sekolah dari sebelumnya yang hanya berjumlah 16 sekolah. Meski begitu, tidak ada satu sekolah pun yang tidak memiliki air sama sekali pada tahun ajaran tersebut, dapat dipertahankan sebagaimana tahun sebelumnya.

Sedangkan bila dilihat melalui sumbernya, jumlah SMP negeri dan swasta yang menggunakan pompa di tahun ajaran 2020/2021 jumlahnya semakin banyak, dari hanya sebanyak 159 sekolah menjadi 306 sekolah. Begitu pula yang menggunakan PAM, dari 100 sekolah menjadi 228 sekolah. Hal yang sama juga terjadi pada sumur terlindungi dan mata air terlindungi yang jumlahnya meningkat dari 54 menjadi 133 untuk sumur terlindungi, dan 7 menjadi 8 untuk mata air terlindungi. Selain itu, sekolah yang menggunakan air kemasan juga sudah tidak ada sama sekali di tahun ajaran tersebut. Sayangnya, masih ditemukan adanya sekolah menggunakan air hujan, sumur tidak terlindungi, mata air tidak terlindungi, dan sungai sebagai sumber mata airnya, yaitu sebanyak 2 sekolah yang menggunakan air hujan, 1 sekolah menggunakan sumur tidak terlindungi, 2 sekolah menggunakan mata air tidak



terlindungi, serta 2 sekolah menggunakan air sungai. Sedangkan untuk 14 sekolah sisanya menggunakan sumber air lainnya disamping yang sudah disebutkan di atas.

Gambar 2.29
Jumlah SMP Negeri dan Swasta menurut Ketersediaan Air di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021



Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Di tingkat menengah atas, jumlah total sekolah yang tersedia adalah sebanyak 359 sekolah dengan 6.548 guru dan 135.142 murid. Total tersebut terbagi menjadi 44 sekolah menengah atas (SMA) negeri dengan 1.729 guru dan 42.488 murid, 78 SMA swasta dengan 897 guru dan 12.288 murid, 15 sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri dengan 750 guru dan 18.317 murid, 176 SMK swasta dengan 2.308 guru dan 53.847 murid, 4 madrasah Aliyah (MA) negeri dengan 180 guru dan 1.810 murid, serta 42 MA swasta dengan 684 guru dan 6.392 murid. Sebagaimana halnya sekolah pada tingkat di bawahnya, jumlah SMA dan fasilitas pendidikan yang setara terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan dengan 56 sekolah, dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Bojongmangu dengan 3 sekolah.

Tabel 2.24
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Menengah Atas atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022

| NO. | KECAMATAN | 2021/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------|---|-----|----|----|---|-----|------|----|-----|-----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
| | | SEKOLAH | | | | | | | GURU | | | | | | | MURID | | | | | | |
| | | SMA | | SMK | | MA | | JML | SMA | | SMK | | MA | | JML | SMA | | SMK | | MA | | JML |
| | | N | S | N | S | N | S | | N | S | N | S | N | S | | N | S | N | S | N | S | |
| 1. | Setu | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 24 | 59 | 18 | 80 | 139 | 33 | 46 | 375 | 1.642 | 273 | 1.890 | 2.506 | 365 | 664 | 7.340 |
| 2. | Serang Baru | 1 | 4 | - | 4 | - | 1 | 10 | 38 | 33 | - | 54 | - | 21 | 146 | 1.036 | 505 | - | 1.183 | - | 38 | 2.762 |
| 3. | Cikarang Pusat | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 8 | 77 | 10 | 32 | 78 | - | - | 197 | 1.974 | 153 | 1.089 | 1.540 | - | - | 4.756 |
| 4. | Cikarang Selatan | 2 | 7 | 1 | 7 | - | 1 | 18 | 78 | 89 | 59 | 101 | - | 12 | 339 | 2.037 | 733 | 2.019 | 3.497 | - | 60 | 8.346 |
| 5. | Cibarusah | 2 | 5 | 1 | 9 | - | 1 | 18 | 57 | 42 | 54 | 103 | - | 10 | 266 | 1.563 | 1.126 | 1.325 | 3.103 | - | 178 | 7.295 |
| 6. | Bojongmangu | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 29 | 11 | - | 7 | - | - | 47 | 456 | 108 | - | 182 | - | - | 746 |
| 7. | Cikarang Timur | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 7 | 32 | 15 | - | 48 | - | 15 | 110 | 941 | 165 | - | 1.076 | - | 24 | 2.206 |



| NO. | KECAMATAN | 2021/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|-----------|----|-----|-----|----|----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|--|
| | | SEKOLAH | | | | | | | GURU | | | | | | | MURID | | | | | | | |
| | | SMA | | SMK | | MA | | JML | SMA | | SMK | | MA | | JML | SMA | | SMK | | MA | | JML | |
| | | N | S | N | S | N | S | | N | S | N | S | N | S | | N | S | N | S | N | S | | |
| 8. | Kedungwaringin | 1 | 1 | - | 9 | - | - | 11 | 42 | 3 | - | 95 | - | - | 140 | 913 | 188 | - | 1.745 | - | - | 2.846 | |
| 9. | Cikarang Utara | 3 | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | 30 | 161 | 97 | 43 | 165 | 87 | 27 | 580 | 3.737 | 1.033 | 1.152 | 3.893 | 1.075 | 226 | 1.116 | |
| 10. | Karangbahagia | 1 | 1 | - | 6 | - | 2 | 10 | 38 | 5 | - | 121 | - | 44 | 208 | 988 | 20 | - | 3.202 | - | 296 | 4.506 | |
| 11. | Cibitung | 2 | 1 | - | 10 | - | 2 | 15 | 66 | 1 | - | 111 | - | 30 | 208 | 1.730 | 33 | - | 2.299 | - | 165 | 4.227 | |
| 12. | Cikarang Barat | 2 | 5 | 3 | 11 | - | 1 | 22 | 65 | 60 | 193 | 150 | - | 32 | 500 | 1.656 | 782 | 4.269 | 4.327 | - | 494 | 1.528 | |
| 13. | Tambun Selatan | 9 | 17 | 1 | 26 | - | 3 | 56 | 372 | 256 | 46 | 392 | - | 59 | 1.125 | 9.454 | 3.312 | 960 | 9.453 | - | 473 | 23.652 | |
| 14. | Tambun Utara | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | 14 | 82 | 36 | 57 | 125 | - | - | 300 | 1.919 | 657 | 1.209 | 1.970 | - | - | 5.755 | |
| 15. | Babelan | 4 | 6 | 1 | 17 | - | 7 | 35 | 139 | 59 | 45 | 234 | - | 143 | 620 | 3.576 | 1.075 | 925 | 5.334 | - | 1.564 | 2.474 | |
| 16. | Tarumajaya | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 15 | 38 | 42 | 44 | 96 | 35 | 70 | 325 | 1.210 | 491 | 984 | 1.918 | 196 | 463 | 5.262 | |
| 17. | Tambelang | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 44 | 7 | 50 | - | - | 14 | 115 | 878 | 91 | 1.250 | - | - | 174 | 2.393 | |
| 18. | Sukawangi | 1 | 3 | - | 3 | - | 2 | 9 | 35 | 30 | - | 35 | - | 15 | 115 | 645 | 215 | - | 569 | - | 115 | 1.544 | |
| 19. | Sukatani | 2 | 2 | - | 7 | - | 5 | 16 | 97 | 15 | - | 92 | - | 78 | 282 | 2.068 | 142 | - | 2.496 | - | 505 | 5.211 | |
| 20. | Sukakarya | 1 | - | - | 5 | - | 1 | 7 | 36 | - | - | 32 | - | 9 | 77 | 1.040 | - | - | 1.081 | - | 59 | 2.180 | |
| 21. | Pebayuran | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 10 | 46 | 52 | 47 | 40 | - | 25 | 210 | 964 | 795 | 1.245 | 581 | - | 685 | 4.270 | |
| 22. | Cabangbungin | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 9 | 54 | 4 | - | 61 | 25 | 18 | 162 | 1.142 | 65 | - | 1.519 | 174 | 113 | 3.013 | |
| 23. | Muaragembong | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 7 | 44 | 12 | - | 29 | - | 16 | 101 | 919 | 326 | - | 373 | - | 96 | 1.714 | |
| | JUMLAH | 44 | 78 | 15 | 176 | 4 | 42 | 359 | 1.729 | 897 | 750 | 2.308 | 180 | 684 | 6.548 | 42.488 | 12.288 | 18.317 | 53.847 | 1.810 | 6.392 | 135.142 | |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan fasilitasnya, ruang kelas, laboratorium IPA, perpustakaan, usaha kesehatan sekolah, dan toilet guru pada SMA dan SMK negeri serta swasta mengalami kenaikan yang cukup berarti di tahun ajaran 2020/2021, secara kuantitas maupun kualitas. Ruang kelas SMA dalam kondisi baik, naik hampir 3 kali lipat dibanding tahun ajaran sebelumnya menjadi sebanyak 1.668 ruang kelas. Begitu pula pada SMK yang bertambah dari 543 menjadi 2.508 ruang kelas dalam kondisi baik. Laboratorium IPA dalam kondisi baik juga bertambah dari 94 menjadi 231 unit pada SMA, dan dari 12 menjadi 27 unit pada SMK. Perpustakaan dalam kondisi baik juga bertambah dari 50 menjadi 124 unit pada SMA dan dari 39 menjadi 172 unit pada SMK. Usaha kesehatan sekolah dalam kondisi baik juga bertambah dari 31 menjadi 134 pada SMA, dan dari 18 menjadi 178 pada SMK. Toilet guru laki-laki dan perempuan dalam kondisi baik juga bertambah menjadi 262 dan 201 unit pada SMA, serta 453 dan 356 pada SMK.

Tabel 2.25
Jumlah Fasilitas pada SMA dan SMK Negeri dan Swasta
berdasarkan Kondisinya di Kabupaten Bekasi
Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021

| No. | Uraian | Tahun | SMA | | | | | SMK | | | | |
|-----|-------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total |
| 1. | Ruang Kelas | 2017/2018 | 743 | 575 | 39 | 21 | 69 | 831 | 1.012 | 70 | 52 | 17 |
| | | 2018/2019 | 826 | 583 | 51 | 22 | - | 900 | 1.008 | 65 | 57 | - |
| | | 2019/2020 | 636 | 950 | 79 | 17 | - | 543 | 1.563 | 161 | 92 | - |
| | | 2020/2021 | 1.668 | 236 | - | - | - | 2.508 | 128 | - | - | - |



| No. | Uraian | Tahun | SMA | | | | | SMK | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total |
| 2. | Laboratorium IPA | 2017/2018 | 12 | 17 | - | - | 1 | 7 | 2 | - | - | 1 |
| | | 2018/2019 | 16 | 12 | - | 2 | - | 9 | 5 | - | - | - |
| | | 2019/2020 | 94 | 102 | 8 | 8 | - | 12 | 13 | 2 | - | - |
| | | 2020/2021 | 231 | 31 | - | - | - | 27 | 2 | - | - | - |
| 3. | Perpustakaan | 2017/2018 | 37 | 41 | 2 | - | 2 | 37 | 54 | 4 | 2 | 3 |
| | | 2018/2019 | 53 | 43 | 2 | 2 | - | 53 | 67 | 6 | 4 | 1 |
| | | 2019/2020 | 50 | 66 | 3 | 4 | - | 39 | 114 | 10 | 6 | - |
| | | 2020/2021 | 124 | 13 | - | - | - | 172 | 12 | - | - | - |
| 4. | Usaha Kesehatan Sekolah | 2017/2018 | 24 | 18 | - | 1 | 1 | 16 | 23 | 2 | 1 | 2 |
| | | 2018/2019 | 36 | 22 | - | 1 | 1 | 24 | 20 | - | 3 | 1 |
| | | 2019/2020 | 31 | 40 | 1 | 1 | - | 18 | 30 | 3 | 1 | - |
| | | 2020/2021 | 134 | 32 | - | - | - | 178 | 25 | - | - | - |
| 5. | Toilet Guru Laki-Laki | 2017/2018 | 50 | 47 | 3 | 1 | 3 | 48 | 70 | 7 | 4 | 3 |
| | | 2018/2019 | 62 | 45 | 3 | 2 | 1 | 52 | 85 | 4 | 5 | 2 |
| | | 2019/2020 | 52 | 76 | 4 | 6 | - | 37 | 113 | 7 | 4 | - |
| | | 2020/2021 | 262 | 63 | - | - | - | 453 | 97 | - | - | - |
| 6. | Toilet Guru Perempuan | 2017/2018 | 31 | 30 | 1 | 1 | 2 | 46 | 60 | 4 | 4 | 3 |
| | | 2018/2019 | 45 | 29 | 1 | 1 | 1 | 54 | 67 | 2 | 5 | 2 |
| | | 2019/2020 | 43 | 57 | 3 | 3 | - | 32 | 94 | 6 | 2 | - |
| | | 2020/2021 | 201 | 53 | - | - | - | 356 | 79 | - | - | - |

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Meski di atas telah disebutkan bahwa pada tahun ajaran 2020/2021 terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan yang cukup krusial di satuan pendidikan, namun seperti yang terjadi pada jenjang di bawahnya, penambahan tersebut tidak berarti bahwa jumlah fasilitas yang ada pada sekolah menengah di Kabupaten Bekasi telah sesuai dengan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan. Hingga tahun ajaran 2020/2021, jumlah SMA dan SMK baik negeri maupun swasta yang kekurangan air jumlahnya masih cukup banyak. Pada SMA, sebanyak 230 sekolah kekurangan air, sedangkan pada SMK jumlahnya lebih banyak yaitu 345 sekolah. Hanya 13 SMA dan 31 SMK yang memiliki ketersediaan air yang cukup, menurun drastis dibandingkan tahun ajaran sebelumnya.

Sedangkan berdasarkan sumbernya, SMA dan SMK yang menggunakan PAM dan pompa jumlahnya semakin banyak di tahun ajaran 2020/2021. Pada SMA, yang menggunakan PAM naik dari 43 menjadi 100 sekolah, dan pompa naik dari 56 menjadi 91 sekolah. Sementara pada SMK, yang menggunakan PAM jumlahnya naik dari 46 menjadi 105 sekolah, dan pompa naik dari 95 menjadi 187 sekolah. Yang menggunakan sumur



terlindungi dan mata air terlindungi juga bertambah banyak, dimana SMA yang menggunakan sumur terlindungi bertambah dari 21 menjadi 36 sekolah dan mata air terlindungi dari 0 menjadi 5 sekolah. Pada SMK jumlahnya juga bertambah banyak, dimana SMK yang menggunakan sumur terlindungi adalah sebanyak 66 sekolah dari sebelumnya yang hanya sebanyak 31 sekolah, serta mata air terlindungi dari 3 menjadi 6 sekolah. Pada tahun ajaran tersebut, sudah tidak lagi ditemukan adanya SMA yang menggunakan sumur tidak terlindungi, air hujan, ataupun air kemasan. Namun yang menggunakan mata air tidak terlindungi masih ditemukan adanya 2 sekolah, sungai 3 sekolah, dan sumber air lainnya sebanyak 6 sekolah. Pada SMK, sekolah yang menggunakan air kemasan adalah sebanyak 2 sekolah, air hujan 2 sekolah, sumur tidak terlindungi 2 sekolah, mata air tidak terlindungi 1 sekolah, sungai 1 sekolah, dan sumber air lainnya 4 sekolah.

Tabel 2.26
Jumlah SMA dan SMK Negeri dan Swasta menurut Ketersediaan Air di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021

| Status Sekolah | Tahun Ajaran | Cukup | Kurang | Tidak Ada | Jumlah |
|----------------|--------------|-------|--------|-----------|--------|
| SMA | 2017/2018 | 109 | 4 | - | 113 |
| | 2018/2019 | 109 | 5 | - | 114 |
| | 2019/2020 | 122 | 4 | - | 126 |
| | 2020/2021 | 13 | 230 | - | 243 |
| SMK | 2017/2018 | 171 | 8 | 1 | 180 |
| | 2018/2019 | 174 | 9 | 1 | 184 |
| | 2019/2020 | 180 | 7 | - | 187 |
| | 2020/2021 | 31 | 345 | - | 376 |

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarpov.go.id>

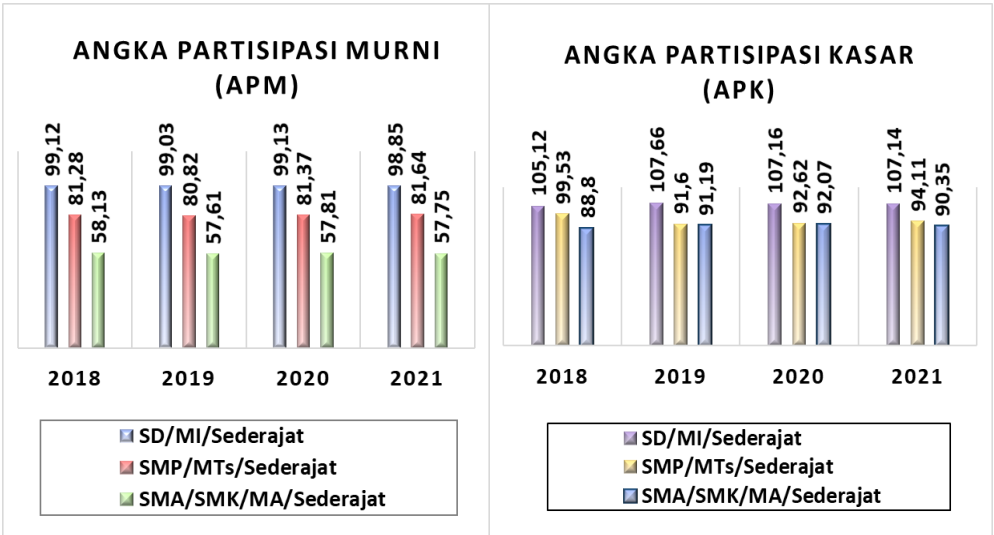
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa meski sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah dasar dan menengah mengalami penambahan dan perbaikan yang cukup signifikan di tahun 2020/2021, namun masih ditemukan adanya fasilitas yang rusak, kurang, bahkan tidak dimiliki oleh sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi. Oleh karenanya, sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi salah satu perhatian dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk diselesaikan.

Selain sarana dan prasarana pendidikan, hal lain yang masih menjadi perhatian adalah angka partisipasi siswa. Angka partisipasi murni (APM) dan kasar (APK) siswa di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 menunjukkan angka yang berfluktuasi. APM SD/MI/ sederajat menurun dari angka 99,12% di tahun 2018 menjadi 99,03% di tahun 2019. Kembali

mengalami peningkatan ke angka 99,13% di tahun 2020, dan menurun lagi di tahun 2021 ke angka 98,85%. APM SMP/MTs/ sederajat juga mengalami penurunan ke angka 80,82% di tahun 2019, namun kembali meningkat di tahun 2020 dan 2021 ke angka 81,37% dan 81,64%. APM SMA/SMK/MA/ sederajat juga mengalami penurunan ke angka 57,61% di tahun 2019, meningkat ke angka 57,81% di 2020, dan kembali menurun ke angka 57,75% di tahun 2021.

Demikian halnya pada APK, nilai APK siswa di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 berfluktuasi, dimana APK SD/MI/ sederajat di tahun 2019 berbanding terbalik dengan APMnya mengalami peningkatan ke angka 107,66%, meski kemudian kembali mengalami penurunan di 2 tahun berikutnya ke angka 107,16% dan 107,14%. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat, sebagaimana dengan APMnya mengalami penurunan ke angka 91,6% di tahun 2019 untuk kemudian kembali meningkat di tahun 2020 dan 2021 dengan nilai sebesar 92,62% dan 94,11%. Lebih lanjut di jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat, APK tingkat pendidikan tersebut mengalami peningkatan selama tahun 2018-2020, dari 88,8% di tahun 2018 menjadi 92,07% di tahun 2020, untuk kembali menurun di tahun 2021 dengan nilai sebesar 90,35%.

Gambar 2.30
Angka Partisipasi Murni dan Kasar Kabupaten Bekasi
Tahun 2018-2021

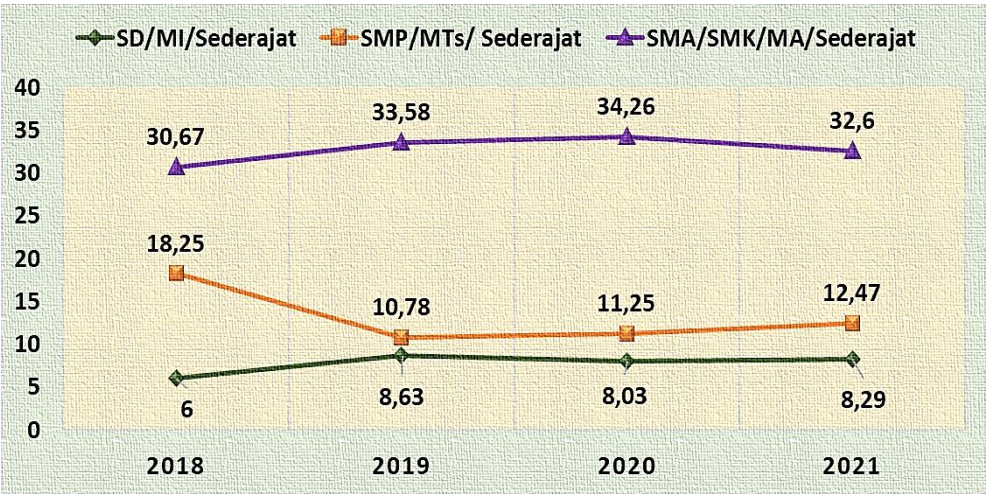


Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2019-2021

Selisih antara APK dan APM merupakan jumlah siswa yang usianya belum mencukupi atau melebihi usia sekolah yang seharusnya yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Selama tahun 2018-2021, jumlah siswa yang usianya belum mencukupi atau melebihi usia sekolah yang

seharusnya yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat adalah sebanyak 6% di tahun 2018, 8,63% di tahun 2019, 8,03% di tahun 2020, dan 8,29% di tahun 2021. Sementara pada SMP/MTs/ sederajat, jumlahnya adalah sebanyak 18,25% di tahun 2018, menurun menjadi 10,78% di tahun 2019, dan kembali meningkat di tahun 2020 dan 2021 ke angka 11,25% dan 12,47%. Persentase jumlah siswa yang bersekolah namun usianya belum mencukupi atau melebihi usia sekolah yang seharusnya, semakin tinggi tingkat pendidikannya jumlahnya semakin besar. Pada jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat, jumlah tiap tahunnya kurang lebih hampir 2 kali lipat dari jenjang SMP/MTs/ sederajat. Untuk tahun 2018, jumlahnya adalah sebanyak 30,67%. Jumlah tersebut semakin meningkat di tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah sebanyak 33,58% dan 34,26%. Adapun untuk tahun 2021, jumlahnya kembali menurun ke angka 32,6%.

Gambar 2.31
Selisih Angka Partisipasi Murni dan Kasar Kabupaten Bekasi
Tahun 2018-2021



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2019-2021, diolah

Hingga saat ini, masalah terkait pendidikan yang masih terjadi di Kabupaten Bekasi adalah masih adanya siswa yang harus mengulang dan putus sekolah. Pada jenjang SD, jumlah siswa SD negeri yang harus mengulang tercatat sebanyak 1.004 orang di tahun ajaran 2018/2019, sementara di SD swasta tercatat hanya sebanyak 46 orang. Jumlah siswa yang harus mengulang tersebut berkurang di tahun ajaran 2019/2020, dimana untuk siswa SD negeri yang harus mengulang menjadi sebanyak 738 orang dan SD swasta menjadi 20 orang. Diantara kecamatan di Kabupaten Bekasi, jumlah siswa SD negeri yang harus mengulang di tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020 terbanyak berada di Kecamatan Tambun Selatan, serta paling sedikit di Kecamatan Tambelang dan Bojongmangu. Hal ini sebanding



dengan total jumlah siswa di kecamatan tersebut, dimana jumlah siswa SD negeri terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan, dan paling sedikit berada di Kecamatan Tambelang dan Bojongmangu.

Sama halnya terjadi pada angka putus sekolah. Untuk tahun ajaran 2018/2019, jumlah siswa SD negeri yang putus sekolah sebanyak 324 orang dan menurun di tahun ajaran berikutnya menjadi sebanyak 222 orang. Sedangkan siswa SD swasta yang putus sekolah di tahun ajaran 2018/2019 adalah sebanyak 126 orang, dan menurun di tahun ajaran berikutnya menjadi sebanyak 101 orang. Adapun kecamatan dengan jumlah siswa SD negeri yang paling banyak putus sekolah di tahun ajaran 2018/2019 adalah Kecamatan Tambun Utara dengan jumlah siswa yang putus sekolah sebanyak 37 orang, dan paling sedikit adalah Kecamatan Tarumajaya dan Bojongmangu yang mencatat tidak ada satu siswa pun yang putus sekolah. Di tahun ajaran berikutnya, jumlah kecamatan dengan siswa SD negeri putus sekolah terbanyak adalah Kecamatan Babelan dengan jumlah sebanyak 25 orang dan paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu yang sebagaimana tahun ajaran sebelumnya tidak ada satu pun siswanya yang putus sekolah.

Untuk tahun ajaran 2020/2021, baik jumlah siswa SD negeri dan swasta yang mengulang maupun yang putus sekolah turun drastis. Untuk SD negeri, jumlah siswa yang mengulang menjadi sebanyak 15 orang, sedangkan untuk swasta menjadi sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk siswa yang putus sekolah di SD negeri menjadi sebanyak 67 orang, dan 6 orang di SD swasta. Kecamatan yang tercatat masih terdapat siswa SD negerinya harus mengulang adalah Kecamatan Babelan, Tarumajaya, Tambun Utara, Cikarang Utara, dan Serang Baru. Sementara untuk SD swasta adalah Kecamatan Sukawangi dan Serang Baru. Adapun pada angka putus sekolah, tercatat masih terdapat 15 kecamatan yang siswa SD negeri di wilayahnya putus sekolah, yaitu tertinggi di Kecamatan Cibitung. Sementara pada SD swasta hanya 5 kecamatan, terbanyak di Kecamatan Tarumajaya dengan 2 siswa.

Tabel 2.27
Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang Mengulang dan Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021

| NO. | KECAMATAN | MENGULANG | | | | | | PUTUS SEKOLAH | | | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | NEGERI | | | SWASTA | | | NEGERI | | | SWASTA | | |
| | | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
| 1. | Setu | 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 3 | 13 | 0 |
| 2. | Cibarusah | 23 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 3. | Kedungwaringin | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Cibitung | 48 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 |



| NO. | KECAMATAN | MENGULANG | | | | | | PUTUS SEKOLAH | | | | | |
|-----|------------------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | NEGERI | | | SWASTA | | | NEGERI | | | SWASTA | | |
| | | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
| 5. | Babelan | 79 | 62 | 2 | - | 1 | 0 | 13 | 25 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| 6. | Taruma Jaya | 30 | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 13 | 2 |
| 7. | Tambelang | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Sukatani | 54 | 35 | 4 | - | 1 | 0 | 16 | 23 | 2 | 21 | 5 | 0 |
| 9. | Pebayuran | 63 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 10. | Cabangbungin | 62 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 11. | Muaragembong | 42 | 29 | 0 | 21 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Tambun Selatan | 177 | 152 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 7 | 1 |
| 13. | Tambun Utara | 77 | 70 | 1 | - | 1 | 0 | 37 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 14. | Cikarang Barat | 20 | 77 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 15. | Karangbahagia | 16 | 28 | 0 | - | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16. | Cikarang Utara | 121 | 48 | 5 | - | 2 | 0 | 8 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| 17. | Cikarang Selatan | 16 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| 18. | Cikarang Timur | 10 | 19 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Bojongmangu | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Cikarang Pusat | 6 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 21. | Sukakarya | 32 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 35 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Sukawangi | 28 | 8 | 0 | - | 0 | 1 | 29 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23. | Serang Baru | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0 | 28 | 17 | 0 |
| | Jumlah | 1.004 | 738 | 15 | 46 | 20 | 2 | 324 | 222 | 67 | 126 | 101 | 6 |

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Sementara pada tingkat menengah pertama, jumlah siswa SMP negeri dan swasta yang harus mengulang selama tahun ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021 adalah sebanyak 189 orang di tahun ajaran 2018/2019, 307 orang di tahun 2019/2020, dan 2 orang di tahun 2020/2021. Jumlah siswa SMP yang harus mengulang pada tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020 terbanyak terjadi di grade VIII atau kelas 2 dan terendah di grade IX atau kelas 3. Untuk tahun ajaran 2020/2021, terjadi kemajuan yang signifikan untuk grade VII dan VIII dimana tidak ada satupun siswa yang harus mengulang di tahun tersebut. Meski demikian, masih terdapat 2 orang siswa di grade IX yang harus mengulang di tahun ajaran tersebut.

Tabel 2.28
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta yang Mengulang di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021

| NO. | KECAMATAN | MENGULANG | | | | | | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | VII | | | VIII | | | IX | | |
| | | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
| 1. | Setu | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cibarusah | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kedungwaringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Cibitung | 5 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Babelan | 21 | 10 | 0 | 24 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Taruma Jaya | 4 | 6 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tambelang | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sukatani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pebayuran | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Cabangbungin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| NO. | KECAMATAN | MENGULANG | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | VII | | | VIII | | | IX | | |
| | | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
| 11. | Muaragembong | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Tambun Selatan | 12 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Tambun Utara | 6 | 8 | 0 | 18 | 56 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 14. | Cikarang Barat | 5 | 5 | 0 | 20 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Karangbahagia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Cikarang Utara | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Cikarang Selatan | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Cikarang Timur | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Bojongmangu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Cikarang Pusat | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Sukakarya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Sukawangi | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Serang Baru | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 68 | 57 | 0 | 119 | 241 | 0 | 2 | 9 | 2 |

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Pada angka putus sekolah siswa SMP, jumlah siswa SMP yang putus sekolah selama tahun 2018/2019 sampai dengan tahun ajaran 2020/2021 tercatat sebanyak 662 orang di tahun ajaran 2018/2019, 206 orang di 2019/2020 dan 29 orang di 2020/2021. Jumlah siswa SMP yang putus sekolah selama tahun ajaran tersebut terbanyak berada di grade IX, yaitu sebanyak 398 orang di tahun ajaran 2018/2019. Jumlah tersebut terus menurun di tahun ajaran berikutnya menjadi sebanyak 121 orang di tahun ajaran 2019/2020 dan 19 orang di tahun ajaran 2020/2021. Sebagaimana halnya yang terjadi pada jenjang SD serta jumlah siswa SMP yang harus mengulang, terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah siswa yang putus sekolah di tahun ajaran 2020/2021 di semua tingkatan, yakni dari 44 orang menjadi 7 orang di grade VII, dari 41 orang menjadi 3 orang di grade VIII, dan dari 121 orang menjadi 19 orang di grade IX. Adapun kecamatan dengan jumlah siswa SMP putus sekolah terbanyak di tahun ajaran 2018/2019 adalah Kecamatan Tambun Selatan dengan 72 orang siswa, dan paling sedikit adalah Kecamatan Cikarang Selatan dengan 3 orang siswa. Sementara di tahun ajaran berikutnya, yang terbanyak adalah Kecamatan Cibitung dengan 27 orang siswa, dan paling sedikit adalah Kecamatan Cikarang Selatan, Bojongmangu, Kedungwaringin, dan Karangbahagia yang mencatat tidak ada satupun siswanya yang putus sekolah. Di tahun ajaran 2020/2021, Kecamatan Cikarang Utara merupakan kecamatan dengan jumlah siswa SMP yang putus sekolah walaupun jumlah tersebut sesungguhnya telah menurun bila dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, yaitu sebanyak 17 orang siswa.



Tabel 2.29
Jumlah Siswa SMP Negeri dan Swasta yang Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi
Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021

| NO. | KECAMATAN | PUTUS SEKOLAH | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | VII | | | VIII | | | IX | | |
| | | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 |
| 1. | Setu | 11 | 5 | - | 15 | 7 | - | 14 | 6 | - |
| 2. | Cibarusah | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - |
| 3. | Kedungwaringin | 4 | - | - | 2 | - | - | 15 | - | - |
| 4. | Cibitung | 4 | 6 | - | 26 | 7 | - | 7 | 14 | - |
| 5. | Babelan | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | - | 38 | 16 | 1 |
| 6. | Taruma Jaya | 13 | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 12 | - |
| 7. | Tambelang | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - |
| 8. | Sukatani | 4 | - | - | 14 | 4 | - | 33 | 10 | 3 |
| 9. | Pebayuran | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 5 | - | - |
| 10. | Cabangbungin | 8 | 2 | - | 12 | 1 | - | 18 | 2 | 2 |
| 11. | Muaragembong | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 12. | Tambun Selatan | 10 | 10 | - | 24 | 5 | 2 | 38 | 9 | 1 |
| 13. | Tambun Utara | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | - |
| 14. | Cikarang Barat | 3 | - | - | 4 | 3 | - | 39 | 5 | - |
| 15. | Karangbahagia | - | - | - | 6 | - | - | 21 | - | - |
| 16. | Cikarang Utara | 12 | 6 | 2 | 7 | 4 | - | 41 | 7 | 5 |
| 17. | Cikarang Selatan | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 18. | Cikarang Timur | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 | 15 | 1 |
| 19. | Bojongmangu | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 20. | Cikarang Pusat | 5 | - | - | 8 | 2 | - | 6 | - | - |
| 21. | Sukakarya | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 28 | 4 | 6 |
| 22. | Sukawangi | 3 | - | - | 2 | 3 | - | 40 | 12 | - |
| 23. | Serang Baru | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | 19 | 2 | - |
| | Jumlah | 94 | 44 | 7 | 170 | 41 | 3 | 398 | 121 | 19 |

Sumber: <http://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Pada jenjang pendidikan selanjutnya, jumlah siswa SMA negeri dan swasta yang harus mengulang selama tahun ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021 adalah sebanyak 15 orang di tahun 2018/2019 dengan jumlah terbanyak terjadi di Kecamatan Cabangbungin, yaitu sebanyak 4 orang siswa. Kemudian 40 orang siswa di tahun 2019/2020 dengan jumlah terbanyak terjadi di Kecamatan Tambelang, yaitu sebanyak 7 orang siswa. Terakhir di tahun ajaran 2020/2021, tercatat tidak ada satu pun siswa yang harus mengulang. Adapun apabila dilihat berdasarkan tingkatannya, jumlah yang harus mengulang terbanyak berada di grade XI dengan jumlah sebanyak 8 orang di tahun ajaran 2018/2019 dan meningkat di tahun ajaran berikutnya menjadi 26 orang siswa. Sedangkan di grade XII, selama tahun ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021 tercatat tidak ada satu pun siswa di tingkat ini yang harus mengulang.

Dibandingkan dengan SMA, jumlah siswa SMK yang mengulang di tahun ajaran yang sama lebih banyak. Di tahun ajaran 2018/2019, jumlah siswa SMK negeri dan swasta yang mengulang adalah sebanyak 174 orang



siswa dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Sukakarya dengan 33 orang siswa. Jumlah tersebut meningkat di tahun berikutnya menjadi 274 orang siswa dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Babelan. Jumlah tersebut menurun sebanyak 80% di 2020/2021 menjadi 55 orang siswa dengan jumlah terbanyak masih di Kecamatan Babelan. Pada tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020, jumlah siswa terbanyak yang harus mengulang berada di grade XI dengan jumlah 128 dan 240 orang siswa. Sedangkan di tahun ajaran berikutnya, jumlah terbanyak berada di grade X dengan jumlah 37 orang. Sementara di grade XI dan XII tercatat sebanyak 17 dan 1 orang siswa.

Tabel 2.30
Jumlah Siswa SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang Mengulang
di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021

| NO. | KECAMATAN | SMA NEGERI + SWASTA | | | | | | | | | SMK NEGERI + SWASTA | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | X | | | XI | | | XII | | | X | | | XI | | | XII | | |
| | | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 18/19 | 19/20 | 20/21 |
| 1. | Setu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cibarusah | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kedungwaringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Cibitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Babelan | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | 102 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Taruma Jaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tambelang | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sukatani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pebayuran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Cabangbungin | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Muaragempong | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Tambun Selatan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Tambun Utara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Cikarang Barat | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 15. | Karangbahagia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Cikarang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Cikarang Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Cikarang Timur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Bojongmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Cikarang Pusat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Sukakarya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Sukawangi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Serang Baru | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | 7 | 14 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 37 | 128 | 240 | 17 | 13 | 0 | 1 |

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Pada masalah putus sekolah, jumlah siswa SMA negeri dan swasta yang putus sekolah selama tahun 2018/2019 tercatat sebanyak 283 orang siswa di tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Babelan, yaitu sebanyak 36 orang siswa. Di tahun ajaran berikutnya, terdapat 148 orang siswa yang putus sekolah dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Karangbahagia. Sementara di tahun ajaran 2020/2021, jumlahnya



menurun drastis menjadi hanya 3 orang siswa dengan kecamatan penyumbang angka tersebut adalah Kecamatan Muaragembong dengan 3 orang siswa di wilayahnya yang putus sekolah.

Pada SMK negeri dan swasta, siswa yang putus sekolah di tahun ajaran 2018/2019 jumlahnya 4 kali lipat dari SMA negeri dan swasta, yaitu sebanyak 1.180 orang siswa. Di tahun ajaran berikutnya, jumlahnya menurun signifikan menjadi sebanyak 134 orang siswa, dan kembali menurun di tahun ajaran 2020/2021 menjadi 45 orang siswa. Pada tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020, jumlah terbanyak siswa SMK yang putus sekolah terdapat di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu sebanyak 192 dan 22 orang siswa. Tahun ajaran berikutnya, posisinya digantikan oleh Kecamatan Sukatani dengan 16 orang siswa, sementara di Kecamatan Tambun Selatan sendiri mampu membuat rekor dengan mencatat tidak ada siswa yang putus sekolah di tahun ajaran tersebut.

Dilihat dari tingkatnya, jumlah siswa putus sekolah di SMA negeri dan swasta, terbanyak merupakan siswa yang berada di grade XII dengan jumlah sebanyak 139 orang siswa di tahun ajaran 2018/2019, 120 orang siswa di 2019/2020, dan 2 orang siswa di 2020/2021. Pada SMK negeri dan swasta, hal yang sama terjadi sebagaimana SMA negeri dan swasta, dimana jumlah siswa terbanyak berada grade XII dengan jumlah sebanyak 755, 68, dan 22 orang siswa.

Tabel 2.31
Jumlah Siswa SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021

| NO. | KECAMATAN | SMA NEGERI + SWASTA | | | | | | | | | SMK NEGERI + SWASTA | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | X | | | XI | | | XII | | | X | | | XI | | | XII | | |
| | | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 |
| 1. | Setu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| 2. | Cibarusah | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 25 | 2 | 1 |
| 3. | Kedungwaringin | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 |
| 4. | Cibitung | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 5. | Babelan | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 0 | 49 | 1 | 0 |
| 6. | Taruma Jaya | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 47 | 3 | 0 |
| 7. | Tambelang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Sukatani | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 55 | 5 | 14 |
| 9. | Pebayuran | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 10. | Cabangbungin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| 11. | Muaragembong | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 12. | Tambun Selatan | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 25 | 17 | 0 | 72 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 |
| 13. | Tambun Utara | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 14. | Cikarang Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 |
| 15. | Karangbahagia | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 102 | 0 | 5 | 3 | 2 | 51 | 5 | 0 | 51 | 2 | 1 |
| 16. | Cikarang Utara | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 17 | 3 | 4 | 57 | 12 | 4 |
| 17. | Cikarang Selatan | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 89 | 5 | 0 |
| 18. | Cikarang Timur | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 19. | Bojongmangu | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| NO. | KECAMATAN | SMA NEGERI + SWASTA | | | | | | | | | SMK NEGERI + SWASTA | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | X | | | XI | | | XII | | | X | | | XI | | | XII | | |
| | | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 | 18/ 19 | 19/ 20 | 20/ 21 |
| 20. | Cikarang Pusat | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 21. | Sukakarya | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 8 | 0 |
| 22. | Sukawangi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
| 23. | Serang Baru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 64 | 12 | 0 | 80 | 16 | 1 | 139 | 120 | 2 | 129 | 43 | 16 | 296 | 23 | 7 | 755 | 68 | 22 |

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarpov.go.id>

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah siswa SD sampai dengan SMA/SMK yang mengulang atau putus sekolah mengalami penurunan yang signifikan di hampir semua jenjang dan tingkatan pada tahun ajaran 2020/2021. Berkurangnya jumlah siswa yang harus mengulang dapat bermakna bahwa pembelajaran online yang dilaksanakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 berjalan efektif, atau sebaliknya, dengan kurangnya pengawasan akibat tidak dilaksanakannya pembelajaran maupun ujian secara tatap muka dan begitu mudahnya para siswa menemukan informasi secara online, kesempatan bagi para siswa untuk melakukan kecurangan menjadi lebih besar.

Sementara pada putus sekolah yang disinyalir disebabkan oleh faktor kemiskinan, penyebaran narkoba, dan pergaulan bebas, dapat bermakna bahwa pembelajaran online lebih efisien bila dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka, dan dengan berkurangnya interaksi antar-siswa serta terbatasnya kegiatan yang dilakukan masyarakat akibat kebijakan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 telah menyebabkan penyebaran narkoba dan pergaulan bebas menjadi ikut terhambat juga. Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui pembelajaran online para orang tua harus mengeluarkan biaya untuk membeli akses internet, namun dengan dilaksanakannya pembelajaran melalui rumah masing-masing juga telah membantu para orang tua menghemat biaya transportasi dan jajan siswa yang mungkin jauh lebih besar daripada biaya internet setiap bulannya. Adapun untuk membantu para siswa, selain memberikan bantuan melalui DAK non fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, Pemerintah Kabupaten Bekasi setiap tahunnya juga mengeluarkan bantuan tambahan yang dikenal dengan sebutan BOS Daerah untuk membantu agar biaya pendidikan yang dikeluarkan dapat menjadi lebih murah.

Pada urusan kesehatan, desa/kelurahan dengan rumah sakit di wilayahnya pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 40 desa/kelurahan,



bertambah dari 37 dan 33 desa/kelurahan di tahun 2020 dan 2019. Sementara untuk puskesmas, jumlahnya sebanyak 50 desa/kelurahan, bertambah dari 47 desa/kelurahan. Sementara desa/kelurahan dengan apotek di wilayahnya juga bertambah dari 75 menjadi 87 di 2020, dan 92 di tahun 2021. Adapun untuk rumah sakit bersalin, poliklinik, dan puskesmas pembantu jumlahnya justru berkurang di tahun 2021, yaitu rumah sakit bersalin dari 19 menjadi 17 desa/kelurahan, poliklinik dari 156 menjadi 149 desa/kelurahan, serta puskesmas pembantu dari 61 menjadi 51 desa/kelurahan. Jumlah kecamatan dengan desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan terbanyak adalah Kecamatan Cikarang Barat, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu.

Tabel 2.32
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019–2021

| No. | Kecamatan | Rumah Sakit | | | Rumah Sakit Bersalin | | | Poliklinik | | | Puskesmas | | | Puskesmas Pembantu | | | Apotek | | | Jml |
|-----|------------------|-------------|----|----|----------------------|----|----|------------|-----|-----|-----------|----|----|--------------------|----|----|--------|----|----|-----|
| | | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | |
| 1. | Cikarang Barat | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | 11 | 38 |
| 2. | Tambun Selatan | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 10 | 36 |
| 3. | Setu | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 31 |
| 4. | Cikarang Utara | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 8 | 30 |
| 5. | Cikarang Selatan | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 5 | 6 | 6 | 25 |
| 6. | Babelan | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 21 |
| 7. | Tambun Utara | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 20 |
| 8. | Tarumajaya | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 20 |
| 9. | Cibitung | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 10. | Pebayuran | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
| 11. | Karangbahagia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| 12. | Cikarang Pusat | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14 |
| 13. | Kedungwaringin | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 14. | Serang Baru | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 15. | Cibarusah | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 16. | Sukakarya | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 17. | Cikarang Timur | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 18. | Sukawangi | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 10 |
| 19. | Sukatani | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 20. | Tambelang | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 21. | Cabangbungin | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 22. | Muaragembong | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 23. | Bojongmangu | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 5 |
| | JUMLAH | 33 | 37 | 40 | 20 | 19 | 17 | 133 | 156 | 149 | 47 | 47 | 50 | 56 | 61 | 51 | 75 | 87 | 92 | 399 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Sementara untuk posyandu, jumlahnya di tahun 2021 tidak mengalami penambahan bila dibandingkan tahun sebelumnya, yakni masih sebanyak



2.864 posyandu, dengan jumlah terbanyak terdapat di wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu Kecamatan Tambun Selatan, dan paling sedikit terdapat di kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu Kecamatan Bojongmangu.

Tabel 2.33
Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dan 2021

| No. | Kecamatan | Posyandu | |
|--------|------------------|----------|-------|
| | | 2020 | 2021 |
| 1. | Tambun Selatan | 318 | 318 |
| 2. | Babelan | 236 | 236 |
| 3. | Setu | 214 | 214 |
| 4. | Cibitung | 214 | 214 |
| 5. | Cikarang Utara | 203 | 203 |
| 6. | Cikarang Barat | 184 | 184 |
| 7. | Tambun Utara | 150 | 150 |
| 8. | Tarumajaya | 141 | 141 |
| 9. | Cikarang Selatan | 128 | 128 |
| 10. | Cibarusah | 124 | 124 |
| 11. | Serang Baru | 123 | 123 |
| 12. | Cikarang Timur | 104 | 104 |
| 13. | Karangbahagia | 99 | 99 |
| 14. | Pebayuran | 90 | 90 |
| 15. | Sukatani | 85 | 85 |
| 16. | Cikarang Pusat | 83 | 83 |
| 17. | Cabangbungin | 71 | 71 |
| 18. | Sukakarya | 65 | 65 |
| 19. | Kedungwaringin | 59 | 59 |
| 20. | Sukawangi | 55 | 55 |
| 21. | Tambelang | 41 | 41 |
| 22. | Muaragembong | 40 | 40 |
| 23. | Bojongmangu | 37 | 37 |
| Jumlah | | 2.864 | 2.864 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Untuk tenaga kesehatan, jumlahnya sejak tahun 2019 terus meningkat. Di tahun 2020 jumlah dokter yang ada sebanyak 1.173 orang, naik lebih dari 2 kali lipat nya dari hanya sebanyak 507 orang. Di tahun 2021 jumlahnya kembali meningkat menjadi 1.681 orang. Begitu pula pada perawat, bidan, dan tenaga gizi. Jumlah perawat di tahun 2021 adalah sebanyak 3.662 orang, meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya, yakni 1.249 orang di tahun 2019 dan 3.365 orang di tahun 2020. Jumlah bidan juga bertambah banyak dari 489 di tahun 2019 menjadi 1.343 orang di tahun 2020 dan 2.083 orang di tahun 2021. Tenaga gizi bertambah dari 42 orang di tahun 2019 menjadi 96 orang dan 169 orang di tahun 2020 dan 2021. Namun di sisi lain, jumlah tenaga kefarmasian yang tadinya sebanyak 502 orang di tahun 2019 berkurang di tahun berikutnya menjadi 461 orang, meski di tahun berikutnya kembali bertambah menjadi 474 orang. Sedangkan dokter gigi di tahun 2021



adalah sebanyak 156 orang, meski tidak diketahui apakah jumlah tersebut bertambah atau berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.34
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021

| Tahun | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Tenaga Kefarmasian | Tenaga Gizi |
|-------|--------|-------------|---------|-------|--------------------|-------------|
| 2021 | 1.681 | 156 | 3.662 | 2.083 | 474 | 169 |
| 2020 | 1.173 | N/A | 3.365 | 1.343 | 461 | 96 |
| 2019 | 507 | N/A | 1.249 | 489 | 502 | 42 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2020-2022

Selanjutnya, dengan meningkatnya jumlah wanita berumur 15-49 tahun yang menggunakan jasa dokter untuk membantu persalinan di tahun 2021, jumlah yang menggunakan jasa bidan menjadi berkurang. Di tahun 2021, wanita yang menggunakan jasa dokter dalam persalinan adalah sebanyak 41,65% atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 39,5% di tahun 2020 dan 37,68% di tahun 2019. Sementara yang menggunakan jasa bidan adalah sebanyak 52,66% atau menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebelumnya adalah sebanyak 58,10%. Di tahun 2021 juga ditemukan adanya wanita yang menggunakan jasa tenaga kesehatan lain dan lainnya, yaitu sebanyak 0,36% dan 0,54%. Sayangnya, jumlah wanita yang menggunakan jasa dukun yang di tahun 2020 telah menurun menjadi 2,41% kembali meningkat di tahun 2021 menjadi sebanyak 4,79%.

Tabel 2.35
Distribusi Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan

| Penolong Persalinan | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Dokter | 37,68 | 39,50 | 41,65 |
| Bidan | 57,44 | 58,10 | 52,66 |
| Tenaga Kesehatan Lain | - | - | 0,36 |
| Dukun | 4,87 | 2,41 | 4,79 |
| lainnya | - | - | 0,54 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2020-2022

Di sisi lain, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) jumlahnya meningkat di tahun 2019 menjadi sebanyak 643.594 orang dibandingkan tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah sebanyak 607.404 orang. Di tahun 2020, jumlahnya sebagaimana tahun 2019 masih sebanyak 643.594 orang. PPKS terbanyak di Kabupaten Bekasi selama 5 tahun terakhir ditempati oleh golongan fakir miskin/rumah tangga miskin, disusul oleh



perempuan rawan sosial ekonomi dan lanjut usia terlantar. Sedangkan PPKS paling sedikit adalah bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, yakni sebanyak 3 orang.

Tabel 2.36
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

| No. | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Anak Balita Terlantar | 985 | 985 | 559 | 559 |
| 2. | Anak Jalanan | 80 | 80 | 6.290 | 6.290 |
| 3. | Anak Terlantar | 8.878 | 8.878 | 7.906 | 7.906 |
| 4. | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Fakir Miskin/Rumah Tangga Miskin | 542.318 | 542.318 | 578.922 | 578.922 |
| 6. | Gelandangan | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 7. | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 367 | 367 | 367 | 367 |
| 8. | Korban Bencana Alam | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 9. | Lanjut Usia Terlantar | 26.150 | 26.150 | 20.796 | 20.796 |
| 10. | Pemulung | 697 | 697 | 697 | 697 |
| 11. | Pengemis | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 12. | Penyandang disabilitas | 981 | 981 | 1.309 | 1.309 |
| 13. | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 26.482 | 26.482 | 26.282 | 26.282 |
| 14. | Tuna Susila | 181 | 181 | 181 | 181 |
| | JUMLAH | 607.404 | 607.404 | 643.594 | 643.594 |

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Sementara itu, sarana sosial yang ada di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2020 tidak mengalami penambahan, dimana sejak tahun 2017 jumlah panti sosial asuhan anak adalah sebanyak 71 unit, panti sosial penyandang disabilitas sebanyak 2 unit, dan panti sosial tresna wedha sebanyak 69 unit dengan total sarana sosial sebanyak 142 unit.

Tabel 2.37
Sarana Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

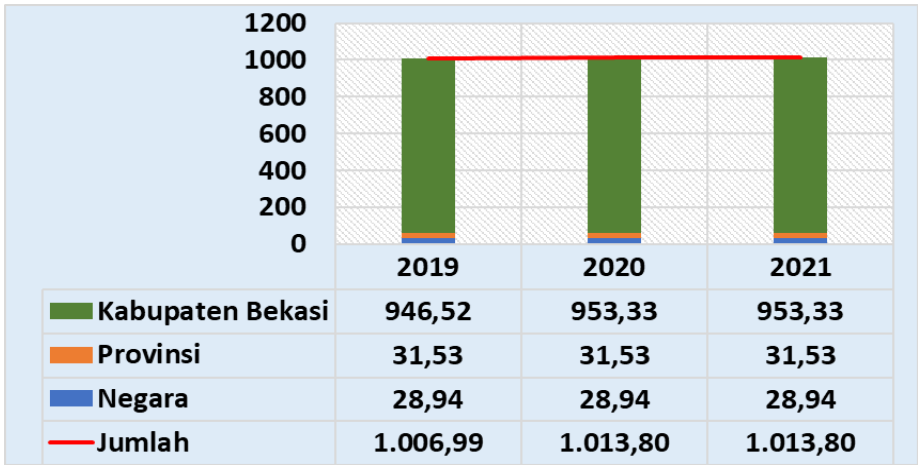
| No. | Sarana Sosial | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-------------------------------------|------|------|------|------|
| 1. | Panti Sosial Asuhan Anak | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 2. | Panti Sosial Penyandang Disabilitas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Panti Sosial Tresna Werdha | 69 | 69 | 69 | 69 |
| | Jumlah | 142 | 142 | 142 | 142 |

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Terkait dengan infrastruktur wilayah, jalan di Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam 4 kewenangan, yakni desa, kabupaten, provinsi, dan nasional atau negara. Untuk tahun 2019, panjang jalan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sejauh 946,52 km untuk kemudian meningkat menjadi 953,33 km di tahun 2020 dan 2021. Sedangkan untuk jalan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sejauh 28,94 km. Untuk jalan negara, panjangnya adalah sejauh 1.013,8 km di tahun 2020 dan 2021, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebelumnya sepanjang 1.006,99 km.

Gambar 2.32
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019–2021 (km)



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan kondisinya, jalan kabupaten di Kabupaten Bekasi yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2021 adalah sejauh 874,71 km, sedang 19,21 km, rusak 11,73 km, dan rusak berat 47,68. Jalan yang rusak sedang dan rusak berat mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara jalan yang kondisinya baik dan rusak mengalami penurunan.

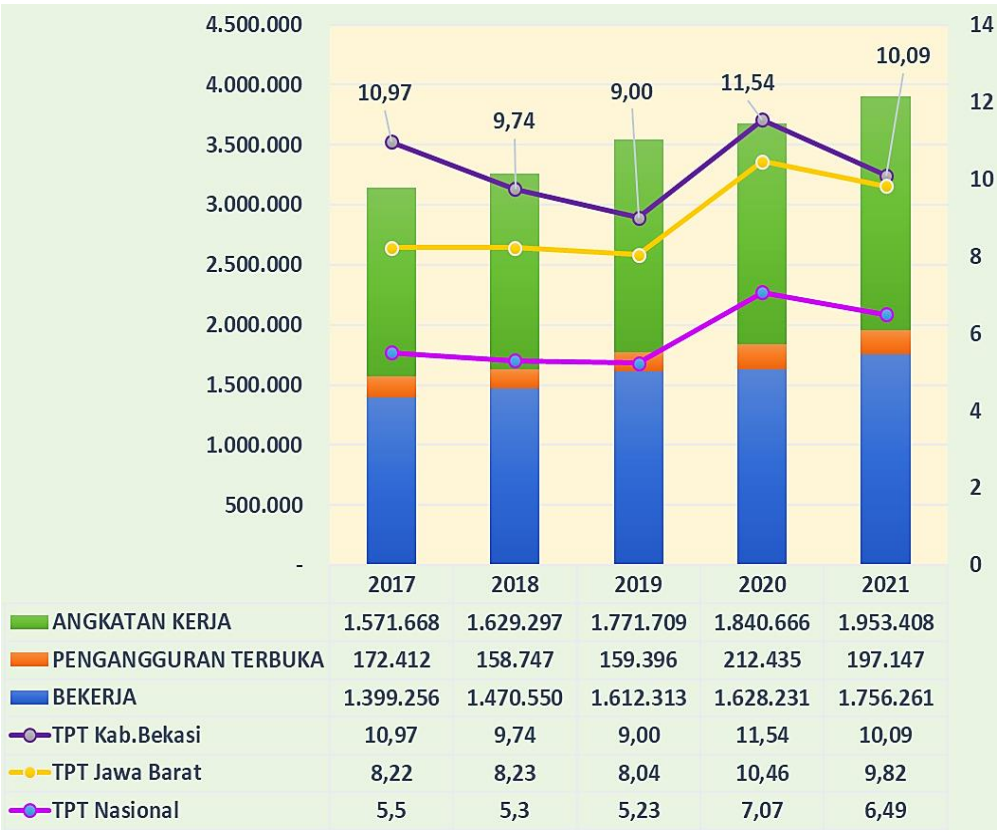
Gambar 2.33
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bekasi Tahun 2017–2021 (km)



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2018-2022

Adapun pada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bekasi. Di tahun 2021, dari 1.953.408 orang angkatan kerja, 197.147 orang diantaranya tidak bekerja atau menganggur. Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-13 dari kabupaten/kota di Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbesar di Jawa Barat dengan tingkat pengangguran sebesar 10,09%. Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Bekasi menduduki peringkat ke-6 dengan tingkat pengangguran sebesar 11,54%. Tingkat pengangguran yang terus menurun selama tahun 2017-2019 kembali meningkat di tahun 2020 akibat Covid-19. Penurunan di tahun 2021 menunjukkan bahwa telah terjadi kemajuan yang cukup baik, yang mungkin disebabkan oleh semakin membaiknya perekonomian di Kabupaten Bekasi dengan semakin longgarnya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga industri kecil, menengah, maupun besar yang sebelumnya tidak dapat beroperasi dengan normal sekarang dapat bangkit kembali. Walaupun begitu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi masih lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat dan nasional sehingga perlu untuk dijadikan perhatian karena dapat berkaitan dengan kemiskinan dan kondusivitas wilayah.

Gambar 2.34
Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, capaian target indikator tingkat pengangguran Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu indikator makro daerah masih cukup rendah. Dalam kondisi normal di tahun 2017 hingga tahun 2019, capaian terhadap target hanya mampu mencapai 63,9% di tahun 2017, 66,02% di tahun 2018, dan 65% di tahun 2019. Capaian ini semakin menurun dengan banyaknya perusahaan yang gulung tikar akibat Covid-19 di tahun 2020 sehingga tingkat pengangguran ikut meningkat dan capaian terhadap target semakin menurun menjadi sebesar 45,58% di tahun 2020 dan 46,38% di tahun 2021. Sulitnya menurunkan pengangguran di Kabupaten Bekasi bukan hanya dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan tingkat pendidikan angkatan kerja yang masih rendah saja, tapi juga karena banyaknya angkatan kerja dari daerah lain yang juga masuk ke Kabupaten Bekasi untuk mencari pekerjaan sehingga tingkat persaingan menjadi cukup tinggi, tidak semua berhasil mendapat pekerjaan, dan data penganggur yang dihitung tidak dibedakan apakah merupakan penduduk asli Kabupaten Bekasi atau pendatang dari luar.

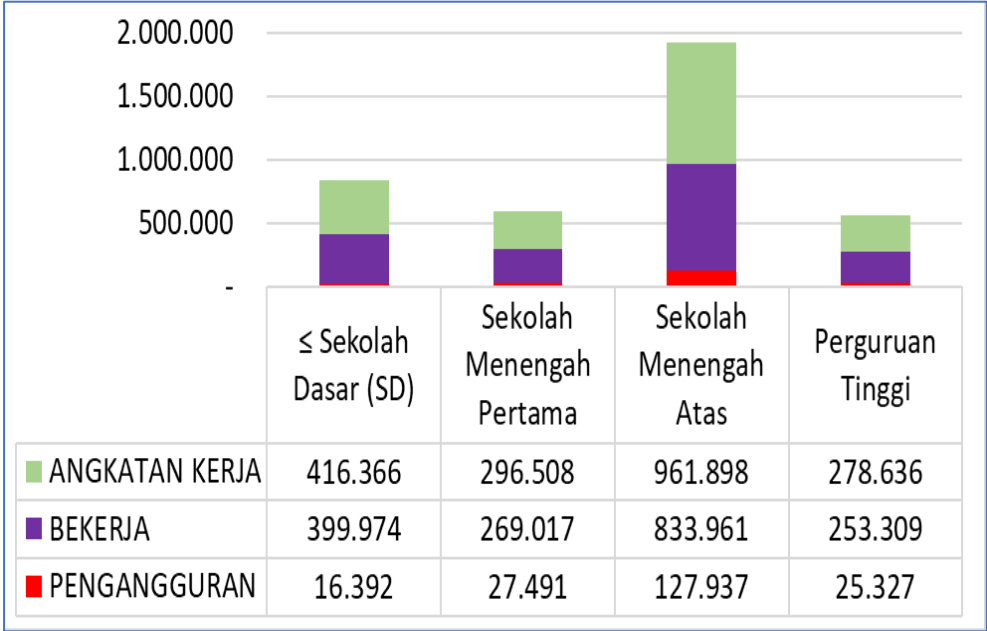
Gambar 2.35
Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021



Sumber: RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan BPS, diolah

Bila dilihat dari latar belakang pendidikannya, angkatan kerja di Kabupaten Bekasi didominasi dengan penduduk berlatar belakang Pendidikan SMA dengan proporsi sebesar 49%. Sedangkan terbesar ke-2 adalah penduduk dengan latar belakang pendidikan SD dengan jumlah sebesar 21%. Proporsi terbesar lainnya diduduki oleh penduduk dengan latar pendidikan SMP dengan jumlah sebesar 15%, dan terakhir adalah perguruan tinggi dengan jumlah sebesar 14%. Sebagaimana halnya dengan proporsinya, jumlah angkatan kerja yang menganggur didominasi oleh angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan SMA, yaitu sebesar 64,89%. Sedangkan pengangguran dengan latar belakang pendidikan SD, SMP, dan perguruan tinggi, masing-masing adalah sebesar 8,31%, 13,94%, dan 12,85%.

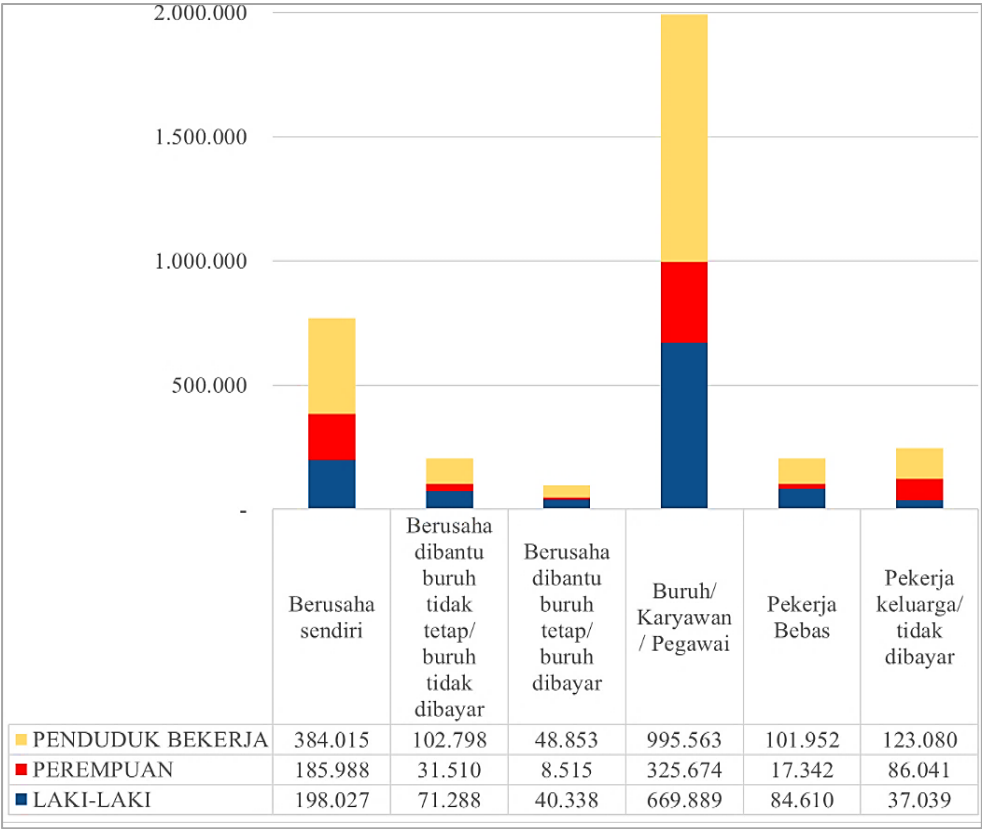
Gambar 2.36
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022

Menurut status pekerjaan utamanya, 57% pekerja atau sebanyak 995.563 orang di Kabupaten Bekasi bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu, 22% lainnya atau sebanyak 384.015 orang berusaha sendiri, 7% atau sebanyak 123.080 orang tidak dibayar karena bekerja dengan keluarga, 6% atau sebanyak 101.952 orang pekerja bebas, 6% berikutnya atau sebanyak 102.798 orang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, serta 3% atau sebanyak 48.853 orang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar.

Gambar 2.37
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bekasi Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022

Dengan semakin tingginya standar yang diterapkan di dunia kerja, dimana sebagian besar perusahaan saat ini mensyaratkan pegawai dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana, maka akan sulit bagi angkatan kerja di Kabupaten Bekasi untuk bersaing di dunia kerja. Apalagi dengan kemudahan akses informasi dan transportasi saat ini, siapa saja dari mana saja, baik dari daerah lain maupun negara lain dengan latar pendidikan yang lebih baik dapat masuk ke Kabupaten Bekasi dan bersaing dengan angkatan kerja lokal yang secara kualifikasi pendidikan dan keahlian mungkin tidak sesuai atau memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Oleh karenanya, pendidikan dan keahlian merupakan salah satu yang harus dijadikan perhatian dalam pembangunan manusia ke depannya. Alternatif lainnya adalah dengan mendorong kewirausahaan atau berusaha sendiri. Dengan tingginya persaingan dan kualifikasi pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Bekasi saat ini, menjadi wirausaha merupakan pilihan terbaik untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pembukaan lapangan kerja baru meskipun bila dilihat dari data sebelumnya, masyarakat yang memiliki usaha

sendiri cenderung untuk memperkerjakan anggota keluarganya yang tidak dibayar untuk mengurangi biaya produksi. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa usaha mandiri yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi hingga tahun 2021 masih berskala kecil sehingga tidak membutuhkan banyak pegawai untuk membantu pekerjaannya.

Selain wirausaha, koperasi merupakan salah satu alternatif kemandirian ekonomi masyarakat lainnya. Pada tahun 2021, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Bekasi tercatat sebanyak 1.321 unit, meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 1.282 unit serta tahun 2018 dan 2019 yaitu sebanyak 1.232 unit. Kecamatan dengan koperasi aktif terbanyak adalah Kecamatan Cikarang Barat dengan 209 unit, dan paling sedikit Kecamatan Bojongmangu dengan 7 unit koperasi aktif.

Tabel 2.38
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021

| No. | Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Cikarang Barat | 201 | 201 | 207 | 209 |
| 2. | Tambun Selatan | 192 | 192 | 194 | 198 |
| 3. | Cikarang Selatan | 159 | 159 | 157 | 161 |
| 4. | Cikarang Utara | 138 | 138 | 148 | 149 |
| 5. | Babelan | 61 | 61 | 63 | 63 |
| 6. | Cibitung | 54 | 54 | 56 | 62 |
| 7. | Cikarang Pusat | 45 | 45 | 50 | 53 |
| 8. | Muaragembong | 38 | 38 | 44 | 47 |
| 9. | Setu | 36 | 36 | 39 | 40 |
| 10. | Tambun Utara | 32 | 32 | 33 | 35 |
| 11. | Sukatani | 33 | 33 | 33 | 35 |
| 12. | Cikarang Timur | 30 | 30 | 32 | 33 |
| 13. | Cabangbungin | 24 | 24 | 27 | 29 |
| 14. | Sukawangi | 27 | 27 | 27 | 28 |
| 15. | Serang Baru | 21 | 21 | 23 | 24 |
| 16. | Karangbahagia | 22 | 22 | 22 | 24 |
| 17. | Tambelang | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 18. | Pebayuran | 20 | 20 | 22 | 24 |
| 19. | Cibarusah | 18 | 18 | 20 | 21 |
| 20. | Kedungwaringin | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21. | Sukakarya | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 22. | Tarumajaya | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 23. | Bojongmangu | 6 | 6 | 7 | 7 |
| | Kabupaten Bekasi | 1.232 | 1.232 | 1.282 | 1.321 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 16 unit, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) sebanyak 51 unit, Koperasi Karyawan (Kopkar) sebanyak



190 unit, Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) sebanyak 25 unit, dan lainnya sebanyak 1.039 unit. Dilihat dari jumlahnya, koperasi yang dimiliki oleh desa masih sangat sedikit. Dari 180 desa yang ada di Kabupaten Bekasi, KUD yang aktif sebanyak 16 unit. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat desa terhadap koperasi masih sangat rendah.

Tabel 2.39
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

| No. | Kecamatan | Jenis Koperasi | | | | | Jumlah |
|-----|------------------|----------------|------|--------|--------|---------|--------|
| | | KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | |
| 1. | Cikarang Barat | 2 | 4 | 62 | 2 | 139 | 209 |
| 2. | Tambun Selatan | 1 | 5 | 50 | 5 | 137 | 198 |
| 3. | Cikarang Selatan | 1 | - | 39 | 1 | 120 | 161 |
| 4. | Cikarang Utara | 2 | 8 | 24 | 4 | 111 | 149 |
| 5. | Babelan | 1 | 5 | - | 3 | 54 | 63 |
| 6. | Cibitung | - | 2 | - | 3 | 57 | 62 |
| 7. | Cikarang Pusat | - | 10 | 4 | 2 | 37 | 53 |
| 8. | Muaragembong | 1 | 1 | - | - | 45 | 47 |
| 9. | Setu | - | 3 | 2 | - | 35 | 40 |
| 10. | Tambun Utara | - | - | 2 | - | 33 | 35 |
| 11. | Sukatani | 1 | 2 | - | 1 | 31 | 35 |
| 12. | Cikarang Timur | 1 | 1 | 2 | - | 29 | 33 |
| 13. | Cabangbungin | 1 | 1 | - | - | 27 | 29 |
| 14. | Sukawangi | 1 | - | - | 2 | 25 | 28 |
| 15. | Serang Baru | - | 1 | 1 | - | 22 | 24 |
| 16. | Karangbahagia | - | 1 | - | - | 23 | 24 |
| 17. | Tambelang | 1 | 2 | - | - | 21 | 24 |
| 18. | Pebayuran | 1 | 2 | - | - | 21 | 24 |
| 19. | Cibarusah | 1 | 1 | - | 1 | 18 | 21 |
| 20. | Kedungwaringin | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 21 |
| 21. | Sukakarya | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 22. | Tarumajaya | - | 1 | 1 | - | 12 | 14 |
| 23. | Bojongmangu | - | - | - | - | 7 | 7 |
| | Jumlah | 16 | 51 | 190 | 25 | 1.039 | 1.321 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Meski demikian, bila dibandingkan dengan koperasi kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, termasuk koperasi binaan Provinsi Jawa Barat, koperasi di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu koperasi yang pengelolaannya dapat dikatakan berhasil. Bila dilihat dari volume usahanya, koperasi di Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-4 volume usaha terbesar dengan nilai sebesar Rp.1.118.556.437.200,- dengan nilai SHU berada di urutan ke-3 dengan nilai sebesar Rp.67.004.714.194,-. Nilai SHU tersebut mengalahkan Kabupaten Sumedang yang memiliki volume usaha terbesar di



Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp.6.198.212.625.817,- atau 5 kali lipat dari volume usaha koperasi di Kabupaten Bekasi.

Tabel 2.40
Keadaan Keuangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

| NO. | KABUPATEN/ KOTA | MODAL SENDIRI | MODAL LUAR | VOLUME USAHA | SHU |
|-----|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1. | Kota Bandung | 963.781.621.231 | 853.843.606.458 | 1.487.740.262.900 | 88.189.747.513 |
| 2. | Binaan Provinsi | 1.112.048.138.541 | 1.311.166.938.484 | 3.075.812.383.692 | 81.480.355.794 |
| 3. | Bekasi | 586.940.243.635 | 450.900.323.915 | 1.118.556.437.200 | 67.004.714.194 |
| 4. | Sumedang | 1.033.754.022.484 | 2.684.550.632.795 | 6.198.212.625.817 | 58.658.072.669 |
| 5. | Bandung | 490.931.834.637 | 270.663.546.990 | 551.111.552.647 | 39.279.996.809 |
| 6. | Karawang | 267.856.539.263 | 198.815.738.017 | 216.403.767.260 | 28.761.135.065 |
| 7. | Bogor | 306.714.925.978 | 88.332.536.545 | 445.452.619.097 | 24.555.730.533 |
| 8. | Purwakarta | 321.061.224.432 | 211.470.847.669 | 468.454.986.132 | 24.504.145.846 |
| 9. | Kota Cimahi | 106.709.210.371 | 257.332.299.881 | 251.864.503.773 | 22.183.031.170 |
| 10. | Bandung Barat | 223.697.897.678 | 139.180.979.520 | 92.886.002.952 | 22.039.559.102 |
| 11. | Kota Bekasi | 212.146.827.813 | 194.149.261.506 | 498.904.196.940 | 20.878.705.638 |
| 12. | Kuningan | 203.530.171.449 | 187.908.958.588 | 1.047.049.913.729 | 17.686.437.264 |
| 13. | Garut | 351.177.066.678 | 214.736.984.562 | 579.012.838.553 | 16.093.475.990 |
| 14. | Kota Bogor | 158.624.073.452 | 120.384.643.499 | 235.450.111.535 | 15.261.227.696 |
| 15. | Kota Depok | 124.378.764.808 | 82.645.281.279 | 120.754.659.699 | 14.433.326.088 |
| 16. | Indramayu | 269.172.059.768 | 187.361.526.906 | 391.190.441.075 | 11.566.232.032 |
| 17. | Subang | 133.537.533.714 | 59.211.008.948 | 225.636.672.430 | 11.508.348.287 |
| 18. | Sukabumi | 76.506.022.172 | 110.116.880.605 | 197.606.401.861 | 11.076.194.348 |
| 19. | Cianjur | 155.681.261.259 | 1.053.783.189.391 | 149.129.586.525 | 11.012.237.062 |
| 20. | Ciamis | 183.580.332.063 | 199.707.883.751 | 56.282.865.990 | 7.240.425.677 |
| 21. | Cirebon | 87.171.808.632 | 91.870.156.950 | 175.871.041.930 | 6.351.737.087 |
| 22. | Kota Cirebon | 55.978.848.233 | 87.150.381.934 | 120.625.904.679 | 6.165.814.611 |
| 23. | Kota Tasikmalaya | 132.718.037.651 | 85.061.865.750 | 152.485.160.005 | 5.963.359.595 |
| 24. | Majalengka | 81.350.222.790 | 31.742.090.515 | 88.345.147.140 | 5.940.566.622 |
| 25. | Tasikmalaya | 161.729.010.472 | 151.862.549.619 | 177.616.795.459 | 4.796.236.227 |
| 26. | Kota Sukabumi | 39.173.156.149 | 22.374.379.355 | 32.037.477.471 | 3.836.169.886 |
| 27. | Kota Banjar | 39.441.587.605 | 398.292.487 | 15.246.101.102 | 2.498.537.852 |
| 28. | Pangandaran | 44.601.211.530 | 65.230.208.881 | 18.406.453.266 | 1.042.871.914 |
| | JUMLAH | 7.923.993.654.488 | 9.411.952.994.800 | 18.188.146.910.859 | 630.008.392.571 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Sementara terkait dengan penanaman modal daerah, jumlah penanaman modal asing (PMA) yang selama tahun 2018-2020 menurun dari USD2.914.675.000 menjadi USD1.799.475.800 di tahun 2020 meningkat kembali di tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar USD2.156.574.400. Pada penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang menurun di tahun 2020 dari Rp. 15.000.981.300.000,- dan Rp.20.206.857.700.000,- di tahun 2018 dan 2019 menjadi Rp.11.411.416.100.000,-, di tahun 2021 kembali meningkat dengan nilai investasi sebesar Rp.11.777.338.500.000,-.



Meski di tahun 2021 nilai investasi daerah mengalami kenaikan, penyerapan investasi tersebut terhadap tenaga kerja di Kabupaten Bekasi justru menurun dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap hanya sebanyak 20.474 orang. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 dengan nilai investasi yang lebih kecil mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 29.594 dan 24.808 orang.

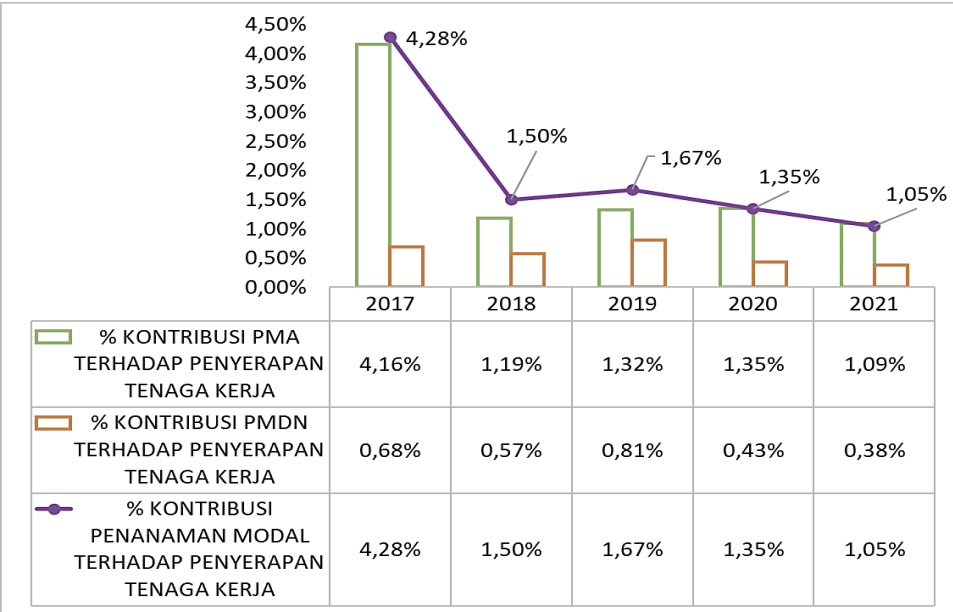
Tabel 2.41
Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri
serta Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

| URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Penanaman Modal Asing/ PMA (US Dollar) | 1.979.447.000 | 2.914.675.000 | 1.810.168.800 | 1.799.475.800 | 2.156.574.400 |
| Penanaman Modal Dalam Negeri/ PMDN (Rupiah) | 6.183.341.166.702 | 15.000.981.300.000 | 20.206.857.700.000 | 11.411.416.100.000 | 11.777.338.500.000 |
| Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang) | 57.759 | 16.485 | 18.351 | 18.790 | 15.141 |
| Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) PMDN | 9.498 | 7.953 | 11.243 | 6.018 | 5.333 |

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Secara keseluruhan, penanaman modal di Kabupaten Bekasi tahun 2021 hanya mampu menyerap angkatan kerja sebanyak 1,05%, menurun dibandingkan penyerapan tahun 2017-2020 dengan tingkat penyerapan masing-masing sebesar 4,28% di tahun 2017, 1,5% di tahun 2018, 1,67% di tahun 2019, dan 1,35% di tahun 2020. Dibandingkan modal dalam negeri, modal asing memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja, meski dengan trend yang juga menurun. Di tahun 2017, jumlah angkatan kerja yang berhasil diserap dengan adanya modal asing adalah sebanyak 4,16%. Sedangkan di tahun berikutnya, angkanya menurun menjadi hanya sebanyak 1,19% meski jumlah investasi meningkat. Di tahun 2019, meski investasi asing yang masuk menurun, namun kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja justru meningkat menjadi 1,32%. Begitu pula di tahun berikutnya dengan kontribusi sebesar 1,35%. Pada investasi dalam negeri, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi tidak mencapai 1%. Selama tahun 2017-2021, kontribusi tertinggi terjadi di tahun 2019 dengan nilai kontribusi sebesar 0,81% untuk kemudian kembali turun di tahun 2020 dan 2021 menjadi sebesar 0,43% dan 0,38%.

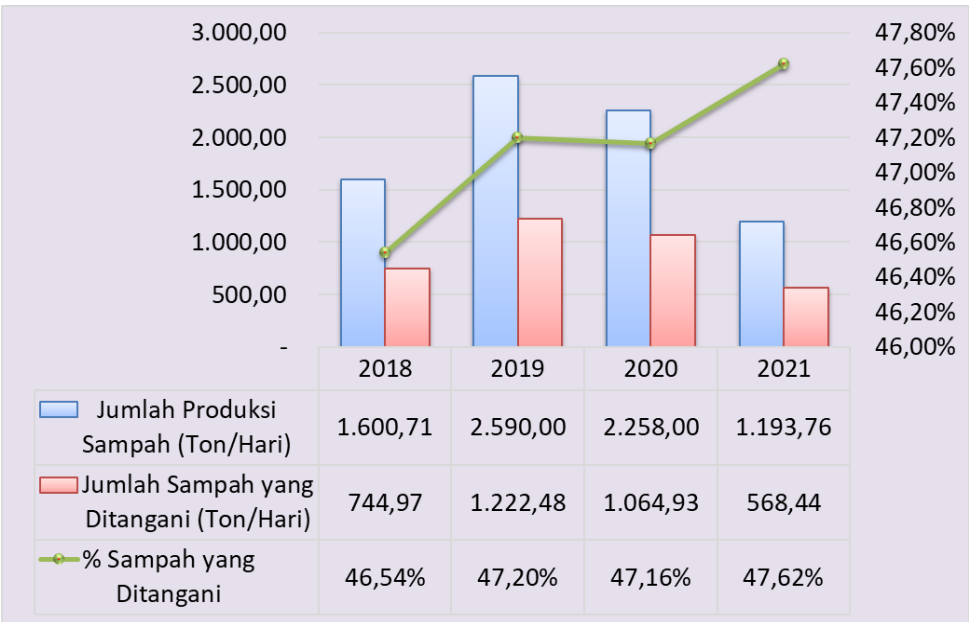
Gambar 2.38
Kontribusi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021



Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Pada urusan lingkungan hidup, salah satu masalah utama di Kabupaten Bekasi adalah terkait masalah pengelolaan sampah. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, jumlah sampah yang dapat ditangani hanya berkisar antara 46-47% dari total produksi sampah per harinya. Pada tahun 2021, jumlah produksi sampah di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 1.193,76 ton/hari, menurun dibandingkan 3 tahun sebelumnya, yakni sebanyak 1600,71 ton/hari di tahun 2018, 2.590 ton/hari di tahun 2019, dan 2.258 ton/hari di tahun 2020.

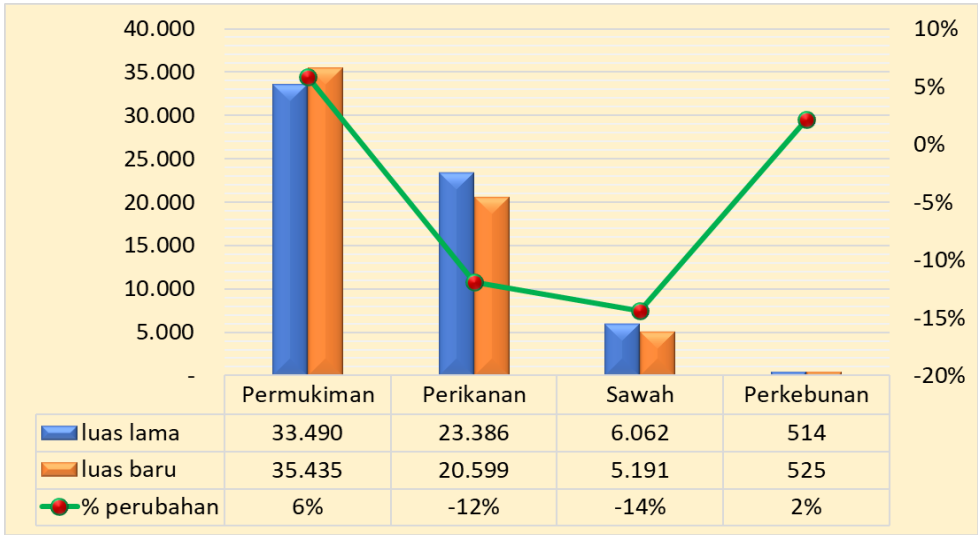
Gambar 2.39
Jumlah produksi sampah dan sampah yang ditangani di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021



Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Di samping itu, masalah lainnya yang dihadapi adalah perubahan lahan, khususnya peralihan fungsi dari lahan sawah dan perikanan menjadi permukiman. Pada tahun 2020, luas lahan sawah berkurang sebesar 14% dari 6.062 Ha menjadi 5.191 Ha. Lahan perikanan berkurang sebesar 12% dari 23.386 Ha menjadi 20.599 Ha. Di sisi lain, lahan perkebunan dan permukiman bertambah sebesar 2% dan 6%. Peralihan penggunaan lahan menjadi perkebunan mungkin justru akan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan, namun perubahan menjadi permukiman akan mengurangi luas lahan untuk penyerapan air yang dikhawatirkan ke depannya akan dapat memicu perluasan titik-titik banjir di Kabupaten Bekasi.

Gambar 2.40
Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020



Sumber: <https://dataalam.menlhk.go.id/>

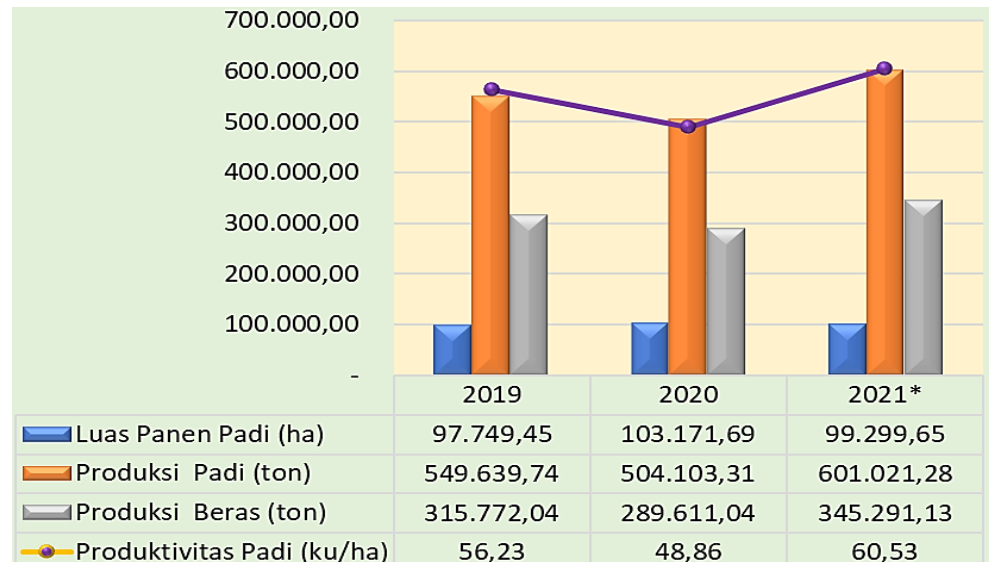
Terakhir terkait dengan kependudukan dan catatan sipil, penduduk yang memiliki KTP mengalami kenaikan selama tahun 2019-2021, yaitu dari 81,15% di tahun 2019 menjadi sebanyak 82,15% di tahun 2020, dan 82,32% di tahun 2021. Sedangkan jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran di tahun 2021 adalah sebanyak 228.276 jiwa.

2.3.2 Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Pada sektor pertanian, luas areal panen padi yang telah meningkat di tahun 2020 kembali mengalami penurunan di tahun 2021, yakni dari seluas 103.171,69 Ha menjadi 99.299,65 Ha atau turun sebesar 3,75%. Meski luas areal panen menurun, namun produktivitas padi mengalami peningkatan sebesar 11,67 Ku/Ha dari sebelumnya sebesar 48,86 Ku/Ha menjadi sebesar

60,53 Ha. Pada tahun 2021, produksi padi dan beras adalah sebanyak 601.021,28 ton dan 345.291,13 ton.

Gambar 2.41
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, serta Produksi Beras di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Selain padi, Kabupaten Bekasi juga menghasilkan sayuran dan buah-buahan semusim. Diantara jenis tanaman sayuran yang di tanam, kangkung merupakan jenis sayuran terbanyak yang ditanam oleh petani, dimana pada tahun 2021 panennya mengalami peningkatan dibandingkan 3 tahun sebelumnya, yakni dari 963 Ha di tahun 2018 menjadi seluas 1.321 Ha di tahun 2021. Dengan peningkatan luas panen tersebut, produksinya pun ikut mengalami peningkatan dari hanya sebanyak 84.384 kuintal di tahun 2018 menjadi sebanyak 100.237 kuintal di tahun 2021. Sedangkan untuk jenis sayuran paling sedikit ditanam adalah bawang merah yang luas panennya hanya sebesar 6 Ha dengan jumlah produksi 548 kuintal di tahun 2021.

Sementara pada buah-buahan semusim, di tahun 2021 kemarin tampaknya minat petani untuk menanam blewah dan semangka menurun drastis. Selama tahun 2018-2020 jumlah produksi blewah dan semangka terus mengalami peningkatan meski luas panen sama atau menurun. Produksi blewah meningkat dari 3.894 kuintal di tahun 2018 menjadi 5.700 kuintal di tahun 2020, sedangkan produksi semangka meningkat dari 1.825 kuintal di tahun 2018 menjadi 4.030 kuintal di tahun 2020. Pada tahun 2021, produksi blewah tercatat sebesar 0 kwintal selaras dengan luas panennya yang menunjukkan bahwa tidak ada petani yang menanam blewah. Adapun pada semangka hasil produksinya turun drastis menjadi hanya sebanyak 527



kuintal akibat luas panennya yang turun 4 kali lipatnya menjadu hanya seluas 8 Ha.

Tabel 2.42
Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–buahan
Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi
Tahun 2018–2021

| Jenis Tanaman | Luas Panen (Ha) | | | | Produksi (Kuintal) | | | |
|----------------|-----------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| Sayuran | | | | | | | | |
| Kangkung | 963 | 1.069 | 1.192 | 1.321 | 84.384 | 80.660 | 86.241 | 100.237 |
| Bayam | 757 | 664 | 741 | 1.022 | 57.435 | 48.512 | 52.476 | 51.376 |
| Cabai Besar | 25 | 19 | 8 | 95 | 629 | 637 | 435 | 14.568 |
| Ketimun | 205 | 153 | 129 | 115 | 24.801 | 15.657 | 13.139 | 13.196 |
| Petsai | 45 | 74 | 83 | 191 | 3.192 | 4.158 | 4.377 | 11.218 |
| Terung | 181 | 84 | 77 | 56 | 4.837 | 5.280 | 3.650 | 7.800 |
| Cabai Rawit | 22 | 27 | 16 | 54 | 938 | 946 | 516 | 5.806 |
| Kacang Panjang | 105 | 120 | 109 | 63 | 9.196 | 9.629 | 8.002 | 5.032 |
| Kembang Kol | 137 | 77 | 82 | 44 | 6.565 | 4.535 | 5.066 | 4.729 |
| Bawang Merah | - | 5 | 2 | 6 | - | 418 | 233 | 548 |
| Buah–buahan | | | | | | | | |
| Blewah | 30 | 15 | 15 | - | 3.894 | 3.900 | 5.700 | - |
| Semangka | 65 | 41 | 32 | 8 | 1.825 | 3.709 | 4.030 | 527 |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022

Berikutnya, selain yang telah disebutkan sebelumnya, Kabupaten Bekasi juga menghasilkan tanaman biofarmaka dan tanaman hias. Untuk tanaman biofarmaka, jenis yang paling banyak ditanam selama 2 tahun terakhir adalah kencur dengan luas panen di tahun 2020 seluas 453.000 m² dan hasil produksi sebanyak 702.700 kg. Luas panennya meningkat di tahun 2021, yaitu seluas 647.500 m² meskipun dengan hasil produksi menurun menjadi hanya sebesar 693.850 kg. sedangkan untuk lengkuas yang di tahun 2019 sempat meningkat pesat dengan panen seluas 574.200 m² dan hasil produksi sebesar 1.456.505 kg, selama 2 tahun berikutnya justru semakin menurun, dimana di tahun 2021 produksinya hanya sebesar 185.600 kg dari panen yang hanya seluas 52.800 m². Seluruh tanaman biofarmaka mengalami trend menurun di tahun 2021, dengan 3 jenis tanaman yang tidak tercatat sama sekali produksinya, antara lain: jahe, lidah buaya, dan mengkudu.

Tabel 2.43
Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis
Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

| Jenis Tanaman | Luas Panen (m ²) | | | | Produksi (Kg) | | | |
|---------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------------|-----------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kencur | 336.000 | 406.500 | 453.000 | 647.500 | 692.000 | 892.640 | 702.700 | 693.850 |
| Lengkuas | 115.225 | 574.200 | 234.735 | 52.800 | 222.985 | 1.456.505 | 550.190 | 185.600 |
| Kunyit | 31.200 | 46.800 | 63.600 | 29.200 | 61.265 | 163.235 | 141.730 | 65.500 |
| Lempuyang | 13.000 | 16.500 | 18.500 | 14.500 | 26.000 | 45.277 | 40.500 | 15.760 |



| Jenis Tanaman | Luas Panen (m ²) | | | | Produksi (Kg) | | | |
|---------------|------------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Temulawak | 10.700 | 19.500 | 19.400 | 10.200 | 19.145 | 66.700 | 38.800 | 10.000 |
| Temukunci | 25.100 | 41.900 | 39.600 | 4.700 | 50.200 | 99.800 | 84.700 | 3.000 |
| Jahe | 6.000 | 6.000 | 7.500 | - | 13.359 | 29.040 | 14.000 | - |
| Lidah Buaya | - | - | 1.000 | - | - | - | 2.000 | - |
| Mengkudu | 1.704 | 1.704 | 704 | - | 1.440 | 1.381 | 3.520 | - |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022

Pada tanaman hias, hampir di semua jenis tanaman hias mengalami penurunan produksi di tahun 2021, kecuali pada jenis pisang-pisangan yang justru mengalami kenaikan dari 90 tangkai menjadi 275 tangkai. Sedangkan 3 jenis tanaman hias dengan produksi terbesar di tahun 2020, yakni melati, mawar, dan philandendron, jumlah produksinya jatuh drastis di tahun 2021. Pada tanaman melati, meski luas panen meningkat hampir 2 kali lipatnya, namun jumlah produksinya justru turun lebih dari 2 kali lipatnya. Sementara pada tanaman adenium yang jumlah produksinya terbesar di tahun 2018 dan 2019, di tahun 2021 justru tidak tercatat produksi dan luas panennya sama sekali.

Tabel 2.44
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

| Tanaman Hias | Luas Panen (m ²) | | | | Produksi (tangkai) | | | |
|--------------------------|------------------------------|------|------|------|--------------------|-------|-------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Melati | - | 3 | 269 | 406 | - | 46 | 1.307 | 514 |
| Mawar | - | 164 | 517 | 384 | - | 164 | 1.783 | 482 |
| Pisang-pisangan | 130 | 55 | 73 | 175 | 130 | 80 | 90 | 275 |
| Philodendron | - | 47 | 113 | 70 | - | 47 | 1.616 | 70 |
| Soka | 169 | 100 | 42 | 16 | 2.145 | 358 | 80 | 16 |
| Anggrek | 16 | 2 | - | - | 124 | 50 | - | - |
| Euphorbia | 50 | 30 | 5 | - | 716 | 120 | 35 | - |
| Adenium (Kamboja Jepang) | 1.410 | 608 | 175 | - | 37.887 | 2.209 | 465 | - |

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022

Pada sektor perikanan, perikanan tangkap yang di tahun 2019 mengalami kenaikan volume dan nilai kembali mengalami penurunan di tahun 2020. Volume perikanan tangkap di laut yang naik dari 6.526 ton menjadi 8.731 ton, turun ke angka 5.422 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.155.777.702.000,-. Sedangkan untuk perikanan perairan umum daratan berhasil mempertahankan volume dan nilai produksinya sebesar 49 ton dan Rp.1.044.632.000,-. Secara keseluruhan, jumlah volume produksi perikanan tangkap di tahun 2020 adalah sebesar 5.471 ton dengan nilai sebesar Rp.156.822.334.000,-.

Tabel 2.45
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020

| Tahun | Uraian | Perikanan Tangkap di laut | Perikanan Perairan Umum Daratan | Jumlah |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| 2018 | Volume (ton) | 6.526 | 10 | 6.536 |
| | Nilai (000 Rp) | 189.863.293 | 159.346 | 190.022.639 |
| 2019 | Volume (ton) | 8.731 | 49 | 8.780 |
| | Nilai (000 Rp) | 248.907.416 | 1.044.632 | 249.952.048 |
| 2020 | Volume (ton) | 5.422 | 49 | 5.472 |
| | Nilai (000 Rp) | 155.777.702 | 1.044.632 | 156.822.334 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020-2022

Pada perikanan budidaya, jenis kegiatan budidaya yang dilakukan di Kabupaten Bekasi terdiri dari pembesaran, pembenihan dan produksi ikan hias. Produksi perikanan budidaya dari kegiatan pembesaran di tahun 2020 adalah sebanyak 62.381 ton. Sedangkan untuk pembenihan dan ikan hias masing-masing sebanyak 16.189 ekor dan 1.876 ekor. Melandanya Covid-19 di tahun 2020 mendorong penurunan jumlah produksi perikanan budidaya, khususnya pada pembesaran dan ikan hias yang di tahun 2019 telah meningkat.

Tabel 2.46
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Kegiatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020

| Tahun | Pembesaran (ton) | Pembenihan (1000 Ekor) | Ikan Hias (1000 Ekor) |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 2018 | 57.607 | 19.639 | 1.882 |
| 2019 | 62.421 | 18.572 | 2.052 |
| 2020 | 62.381 | 16.189 | 1.876 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2019-2022

Sementara berdasarkan jenis budidaya yang dilakukan, tambak sederhana merupakan budidaya yang menghasilkan volume dan nilai terbanyak selama tahun 2018-2020, dengan nilai volume dan produksi di tahun 2020 sebesar 54.879 ton dan Rp.323.442.651.000,-. Sedangkan pada tambak insentif, meski menghasilkan volume paling sedikit, namun nilainya ternyata dapat melebihi jenis budidaya laut lainnya yang memiliki volume lebih besar, yang berarti bahwa tambak insentif lebih menguntungkan dibandingkan budidaya laut lainnya.

Sedangkan bila dilihat dari jenis komoditasnya, hasil perikanan budidaya terbanyak yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi adalah rumput laut dengan volume sebesar 44.134 ton di tahun 2020. Meski demikian, secara ekonomis rumput laut masih kalah menguntungkan bila



dibandingkan jenis komoditas lainnya dengan volume yang lebih kecil, seperti bandeng dan udang yang nilainya lebih besar meski dengan volume produksi yang lebih kecil. Hal serupa juga berlaku pada lele.

Tabel 2.47
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya
Menurut Jenis Budidaya dan Komoditas Utama
di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020

| Uraian | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Volume (ton) | Nilai (000 Rp) | Volume (ton) | Nilai (000 Rp) | Volume (ton) | Nilai (000 Rp) |
| Jenis Budidaya | | | | | | |
| Tambak Sederhana | 50.808 | 548.609.831 | 54.993 | 343.931.679 | 54.879 | 323.442.651 |
| Kolam Air Tenang | 3.778 | 68.105.581 | 4.118 | 69.885.131 | 4.194 | 77.242.653 |
| Tambak Semi Intensif | 1.640 | 29.801.926 | 1.795 | 33.465.758 | 1.792 | 36.999.360 |
| Laut Lainnya | 806 | 6.433.890 | 887 | 887.334 | 889 | 888.754 |
| Jaring Apung Tawar | 545 | 11.429.639 | 594 | 11.734.665 | 594 | 14.998.738 |
| Tambak Intensif | 30 | 1.949.227 | 33 | 1.645.800 | 33 | 1.750.225 |
| Komoditas Utama | | | | | | |
| Rumput Laut | 39.853 | 239.309.495 | 44.210 | 66.314.366 | 44.134 | 22.762.135 |
| Bandeng | 9.538 | 170.307.624 | 9.610 | 172.972.872 | 9.583 | 191.667.640 |
| Lele | 1.770 | 28.802.001 | 2.019 | 34.325.057 | 2.065 | 35.980.966 |
| Udang | 2.030 | 150.273.615 | 2.040 | 122.084.875 | 2.030 | 127.070.215 |
| Nila | 1.324 | 27.514.474 | 1.431 | 28.612.700 | 1.445 | 37.400.555 |
| Patin | 4.057 | 48.682.560 | 899 | 10.793.028 | 901 | 11.078.448 |
| Ikan Lainnya | - | - | 2.037 | 22.425.850 | 196 | 8.819.145 |
| Ikan Mas | 161 | 3.994.791 | 175 | 4.021.619 | 177 | 5.131.394 |
| Gurame | 69 | 2.647.457 | - | - | - | - |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2019-2022

Pada sektor pariwisata, mayoritas wisatawan yang datang ke obyek wisata di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2020 adalah wisatawan nusantara. Sementara wisatawan mancanegara yang pernah datang dan tercatat hanya 3 orang di tahun 2019. Secara keseluruhan, jumlah wisatawan yang datang jumlahnya berfluktuasi, yaitu sebanyak 49.740 orang di tahun 2017, 2.043.000 orang di tahun 2018, 11.682 orang di tahun 2019, 127.500 orang di tahun 2020, dan 1.730.651 orang di tahun 2021.

Tabel 2.48
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

| Tahun | Wisatawan | Jumlah |
|-------|-----------------------|-----------|
| 2017 | Wisatawan Mancanegara | - |
| | Wisatawan Nusantara | 49.740 |
| | Jumlah | 49.740 |
| 2018 | Wisatawan Mancanegara | - |
| | Wisatawan Nusantara | 2.043.000 |
| | Jumlah | 2.043.000 |



| Tahun | Wisatawan | Jumlah |
|-------|-----------------------|-----------|
| 2019 | Wisatawan Mancanegara | 3 |
| | Wisatawan Nusantara | 11.679 |
| | Jumlah | 11.682 |
| 2020 | Wisatawan Mancanegara | - |
| | Wisatawan Nusantara | 127.500 |
| | Jumlah | 127.500 |
| 2021 | Wisatawan Mancanegara | - |
| | Wisatawan Nusantara | 1.730.651 |
| | Jumlah | 1.730.651 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017-2021

Sementara untuk yang mengunjungi akomodasi di Kabupaten Bekasi, jumlahnya selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat, dari hanya sebanyak 250.236 orang wisatawan di tahun 2017 menjadi sebanyak 3.015.231 orang di tahun 2021. Penurunan hanya terjadi di tahun 2020 yang diperkirakan disebabkan oleh Covid-19 dengan jumlah wisatawan yang datang berkunjung sebanyak 1.699.274 orang, turun dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah pengunjung sebanyak 2.083.860 orang.

Tabel 2.49
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Akomodasi
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

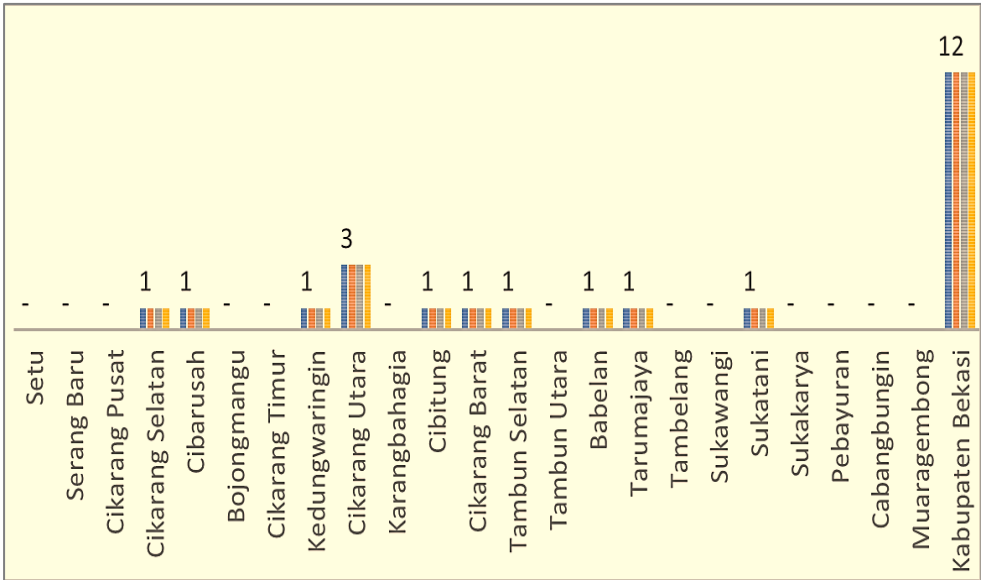
| Tahun | Wisatawan | Jumlah |
|-------|-----------------------|-----------|
| 2017 | Wisatawan Mancanegara | 63.246 |
| | Wisatawan Nusantara | 186.990 |
| | Jumlah | 250.236 |
| 2018 | Wisatawan Mancanegara | 25 |
| | Wisatawan Nusantara | 2.043.000 |
| | Jumlah | 2.043.025 |
| 2019 | Wisatawan Mancanegara | - |
| | Wisatawan Nusantara | 2.083.860 |
| | Jumlah | 2.083.860 |
| 2020 | Wisatawan Mancanegara | - |
| | Wisatawan Nusantara | 1.699.274 |
| | Jumlah | 1.699.274 |
| 2021 | Wisatawan Mancanegara | - |
| | Wisatawan Nusantara | 3.015.231 |
| | Jumlah | 3.015.231 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017-2021

Pada sektor perdagangan, jumlah pasar tradisional yang terdata di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dengan jumlah total sebanyak 12 unit. Kecamatan terbanyak terdapat di Kecamatan Cikarang Utara dengan jumlah sebanyak 3 unit. Kecamatan lain yang memiliki pasar tradisional adalah Kecamatan Cikarang Selatan, Cibarusah, Kedungwaringin, Cibitung, Cikarang Barat,

Tambun Selatan, Babelan, Tarumajaya, dan Sukatani dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 unit. Sisa kecamatan lainnya berdasarkan data BPS belum memiliki pasar tradisional.

Gambar 2.42
Jumlah Pasar Tradisional Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Sementara pada sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian daerah Kabupaten Bekasi, berdasarkan data Kementerian Perindustrian terdapat 10 kawasan industri di Kabupaten Bekasi dengan luas lahan terbesar dimiliki oleh MM2100 Industrial Town BFIE dan Greenland International Industrial Center dengan lahan masing-masing seluas 1.700 Ha. Sedangkan kawasan terkecil adalah Kawasan Industri Gobel yaitu seluas 54 Ha.

Tabel 2.50
Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi

| No. | Kawasan Industri | Pengelola | Luas Lahan |
|-----|--|---|------------|
| 1. | Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | PT. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | 205 Ha |
| 2. | Bekasi International Industrial Estate | PT. Hyundai Inti Development | 200 Ha |
| 3. | MM2100 Industrial Town BFIE | PT. Bekasi Fajar Industrial Estate, PT. Bekasi Mitra IE, PT. Bekasi Surya Pratama | 1.700 Ha |
| 4. | MM2100 Industrial Town MMID | PT. Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | 805 Ha |
| 5. | Kawasan Industri Jababeka | PT. Jababeka Infrastruktur | 2.267 Ha |



| No. | Kawasan Industri | Pengelola | Luas Lahan |
|-----|--|---|------------|
| 6. | East Jakarta Industrial Park | PT. East Jakarta Industrial Park | 320 Ha |
| 7. | Kawasan Industri Gobel | PT. Gobel Dharma Nusantara | 54 Ha |
| 8. | Kawasan Industri Marunda Center | PT. Tegar Primajaya; PT. Multikaryasilprima | 600 Ha |
| 9. | Greenland International Industrial Center (GIIC) | PT. Puradelta Lestari, Tbk ; PT. Pembangunan Deltamas | 1.700 Ha |
| 10. | Kawasan Industri Lippo Cikarang | PT. Lippo Cikarang Tbk | 1.645 Ha |

Sumber: <https://kemenperin.go.id/kawasan>

Pada industri besar dan sedang, jumlah perusahaan yang tercatat di tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2017, dari sebanyak 2.503 perusahaan menjadi 1.930 perusahaan. Menurunnya jumlah perusahaan tersebut ikut menurunkan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh industri tersebut, yakni dari sebanyak 588.010 orang menjadi 496.898 orang. Pada tahun 2019 jumlah pengeluaran yang tercatat pada industri besar dan sedang adalah sebesar Rp.381.518.614.319.000,- dengan pendapatan sebesar Rp.771.235.430.078.000,-.

Sebaliknya pada industri mikro dan kecil, jumlah perusahaan yang ada di tahun 2020 meningkat hampir 2 kali lipatnya dibandingkan tahun 2018, dari hanya sebanyak 10.523 perusahaan menjadi sebanyak 20.315 perusahaan. Perusahaan tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 24.568 orang di tahun 2018 dan 43.283 orang di tahun 2020. Meski jumlahnya meningkat di tahun 2020, namun ternyata pendapatan yang dihasilkan di tahun tersebut justru menurun hampir setengahnya dibandingkan tahun 2018 dan juga hampir setengah dari pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan di tahun 2020, atau dapat dikatakan bahwa perusahaan pada industri mikro dan kecil cenderung merugi di tahun tersebut. Hal ini diperkirakan terjadi akibat Covid-19 yang menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk karyawannya, sementara bisnis tidak dapat berjalan dengan lancar. Bila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut, maka kontribusi industri besar dan sedang dalam penyerapan angkatan kerja yakni sebesar 37% di tahun 2017 dan 27% pada tahun 2019. Sementara industri mikro dan kecil berkontribusi sebesar 2% di tahun 2018 dan 2020.

Tabel 2.51
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran dan Pendapatan
Pada Industri Besar dan Sedang serta Industri Mikro dan Kecil
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

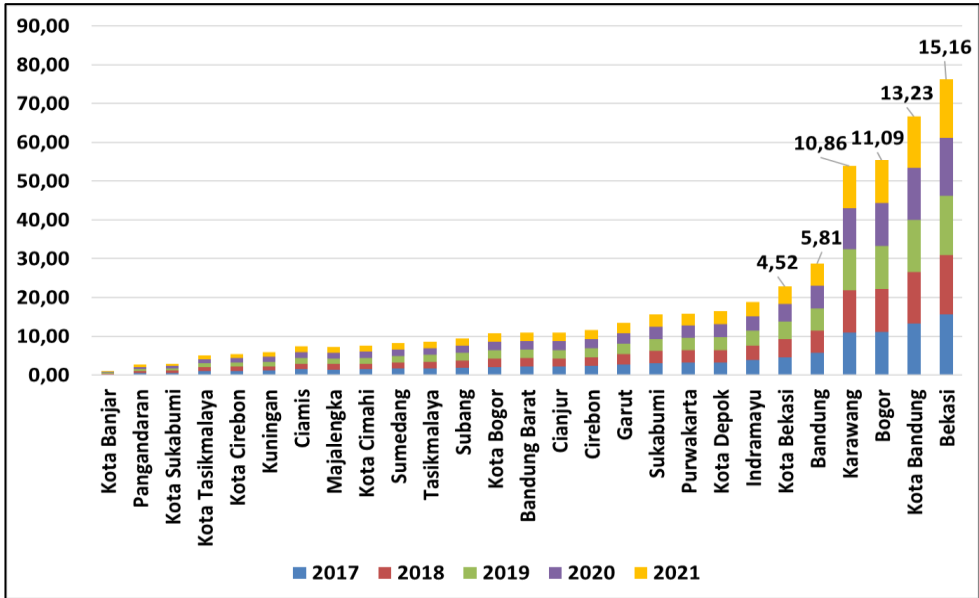
| Tahun | Perusahaan | Tenaga Kerja | Pengeluaran (ribu rupiah) | Pendapatan (ribu rupiah) |
|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| Industri Besar dan Sedang | | | | |
| 2019 | 1.930 | 496.898 | 381.518.614.319 | 771.235.430.078 |
| 2017 | 2.503 | 588.010 | N/A | N/A |
| Industri Mikro dan Kecil | | | | |
| 2020 | 20.315 | 43.283 | 3.673.331.668 | 1.697.866.626 |
| 2018 | 10.523 | 24.568 | 1.297.322.859 | 2.490.622.648 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2020-2022

2.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, PDRB Kabupaten Bekasi selama 5 tahun terakhir merupakan penyumbang kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Jawa Barat dengan nilai distribusi sebesar 15,16% di tahun 2021, sedangkan Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang berada di tingkat selanjutnya dengan nilai distribusinya masing-masing sebesar 13,23% untuk Kota Bandung, 11,09% untuk Kabupaten Bogor, dan 10,86% untuk Kabupaten Karawang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi Kabupaten Bekasi akan memberikan pengaruh paling besar terhadap nilai perekonomian Jawa Barat dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Gambar 2.43
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Seri 2010
Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Selanjutnya, data menunjukkan bahwa rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal Kabupaten Bekasi pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan merupakan kedua terbesar setelah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, serta konstruksi, menduduki peringkat ke-3 terbesar setelah Kota Depok dan Kota Bekasi. Terakhir pada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya, rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal di sektor tersebut adalah sebesar Rp.3.565.577,- atau menduduki peringkat ke-3 besar setelah Kota Depok dan Kota Bekasi.

Tabel 2.52
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal menurut
Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama (Rupiah)
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

| No. | Kabupaten | Lapangan pekerjaan utama | | |
|-----|------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kota Depok | N/A | 4.885.553 | 4.127.605 |
| 2. | Kota Bekasi | N/A | 4.764.836 | 4.477.946 |
| 3. | Bekasi | 2.989.410 | 4.571.126 | 3.565.577 |
| 4. | Karawang | 1.612.477 | 4.511.219 | 2.583.917 |
| 5. | Purwakarta | 3.004.384 | 3.674.118 | 3.003.882 |
| 6. | Kota Bogor | N/A | 3.369.998 | 3.275.752 |
| 7. | Bogor | 2.464.208 | 3.248.959 | 3.267.322 |
| 8. | Kota Cimahi | N/A | 3.103.705 | 3.304.516 |
| 9. | Indramayu | 2.362.542 | 3.015.617 | 2.280.925 |
| 10. | Subang | 1.950.400 | 2.893.867 | 2.520.746 |
| 11. | Sukabumi | 2.461.850 | 2.686.430 | 2.276.545 |
| 12. | Kota Bandung | N/A | 2.607.347 | 3.272.245 |
| 13. | Kota Sukabumi | N/A | 2.572.629 | 2.930.695 |
| 14. | Cianjur | 1.504.958 | 2.492.421 | 2.255.486 |
| 15. | Sumedang | 1.501.908 | 2.463.511 | 2.787.771 |
| 16. | Bandung Barat | 1.458.386 | 2.350.649 | 2.418.916 |
| 17. | Kota Cirebon | 1.373.199 | 2.240.652 | 2.443.006 |
| 18. | Kuningan | 1.743.473 | 2.085.003 | 1.968.604 |
| 19. | Garut | 1.010.322 | 2.068.855 | 1.903.456 |
| 20. | Bandung | 1.169.158 | 2.066.539 | 2.750.779 |
| 21. | Pangandaran | 1.207.490 | 1.980.440 | 2.248.480 |
| 22. | Majalengka | 1.450.239 | 1.854.452 | 2.376.380 |
| 23. | Cirebon | 1.660.283 | 1.749.420 | 1.948.281 |
| 24. | Ciamis | 1.404.946 | 1.709.087 | 1.923.157 |
| 25. | Kota Banjar | 1.249.570 | 1.645.219 | 2.630.569 |
| 26. | Tasikmalaya | 1.417.755 | 1.557.435 | 2.006.840 |
| 27. | Kota Tasikmalaya | 935.135 | 1.261.988 | 2.069.397 |

Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Keterangan: 1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan.
2. Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi.



3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

Pada pekerja informal, rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal di Kabupaten Bekasi pada sektor pertanian menduduki peringkat pertama dengan nilai pendapatan bersih terbesar di antara kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Sedangkan pada sektor industri menduduki posisi ke-5 setelah Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Purwakarta. Pada sektor jasa, Kabupaten Bekasi menduduki peringkat ke-3 terbesar setelah Kota Bekasi dan Kota Depok.

Sedangkan bila dilihat berdasarkan latar belakang pendidikannya, pekerja informal Kabupaten Bekasi dengan latar tidak pernah sekolah/belum tamat SD mendapatkan rata-rata pendapatan bersih terbesar ke-6 setelah Kota Bogor, Kabupaten Indramayu dan Karawang, serta Kota Bekasi dan Depok. Berikutnya pada lulusan SD/MI, pekerja infomal di Kabupaten Bekasi mendapatkan rata-rata pendapatan bersih sebulan terbesar di Jawa Barat, sementara pada lulusan SMP/MTs dan SMA ke atas berada di urutan ke-2, yakni setelah Kota Bekasi pada lulusan SMP/MTs dan Kota Depok untuk lulusan SMA ke atas.

Dengan semakin besarnya rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja formal dan informal di Kabupaten Bekasi, maka daya beli masyarakat Kabupaten Bekasi juga semakin besar. Dan dengan semakin besarnya daya beli masyarakat, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga semakin besar, termasuk permintaan terhadap barang dan jasa yang lebih mahal. Hal tersebut dapat pula berarti bahwa peluang untuk perkembangan bisnis dan usaha di Kabupaten Bekasi lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang rata-rata upah/pendapatan bersih pekerjaanya lebih kecil.

Tabel 2.53
Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal
Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut Lapangan Pekerjaan Utama
dan Pendidikan Tertinggi Tahun 2021

| No. | Kabupaten/ Kota | Lapangan Pekerjaan Utama | | | Pendidikan Tertinggi | | | |
|-----|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-------------|----------------|
| | | Pertanian | Industri | Jasa | Tidak Pernah Sekolah/ Belum Tamat SD | SD/MI | SMP/ MTs | SMA ke Atas |
| 1. | Kota Depok | na | 2.247.269 | 1.977.267 | 1.370.276 | 1.911.941 | 1.822.635 | 2.172.978 |
| 2. | Kota Bekasi | na | 2.091.347 | 2.023.130 | 1.378.553 | 1.934.959 | 2.061.814 | 2.113.563 |

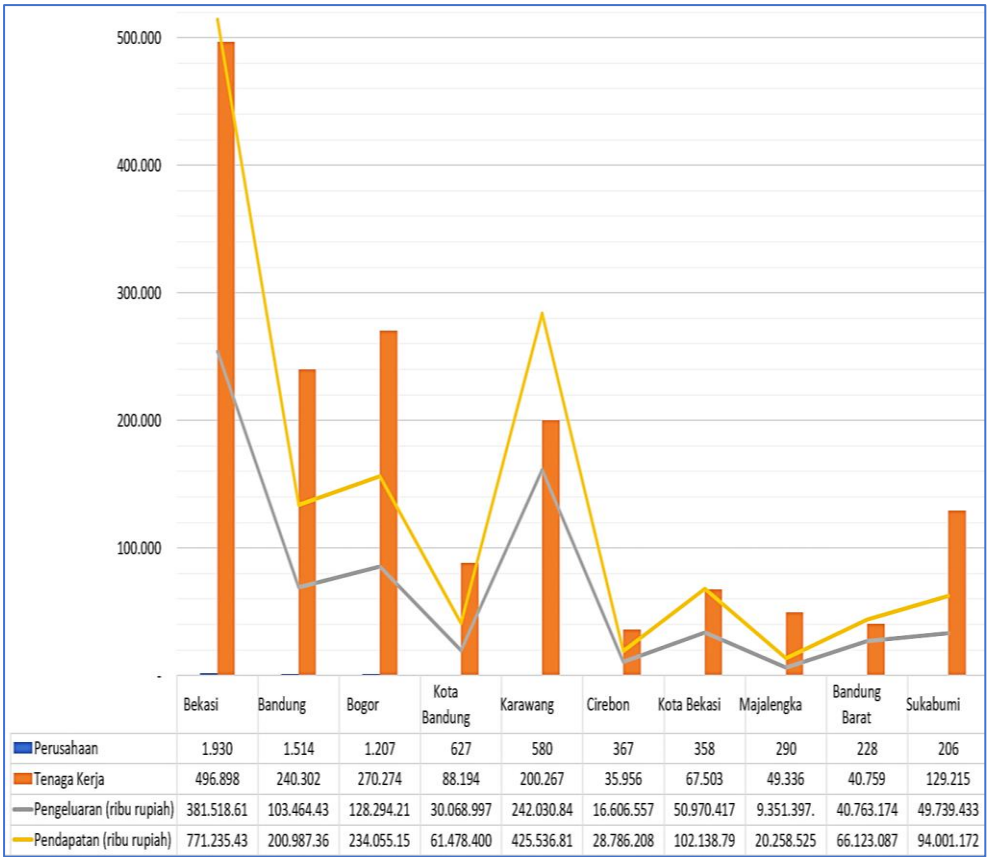


| No. | Kabupaten/ Kota | Lapangan Pekerjaan Utama | | | Pendidikan Tertinggi | | | |
|-----|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-------------|----------------|
| | | Pertanian | Industri | Jasa | Tidak Pernah Sekolah/ Belum Tamat SD | SD/MI | SMP/ MTs | SMA ke Atas |
| 3. | Kota Bogor | na | 2.079.917 | 1.925.041 | 1.821.979 | 1.904.403 | 1.635.693 | 2.152.908 |
| 4. | Purwakarta | 904.228 | 2.050.896 | 1.781.461 | 1.133.558 | 1.692.221 | 1.663.010 | 2.054.289 |
| 5. | Bekasi | 1.742.201 | 2.031.613 | 1.958.627 | 1.302.038 | 2.009.282 | 2.060.349 | 2.171.389 |
| 6. | Sukabumi | 1.021.132 | 1.817.437 | 1.512.367 | 957.680 | 1.351.517 | 1.555.833 | 1.783.809 |
| 7. | Karawang | 1.437.225 | 1.801.754 | 1.892.095 | 1.436.564 | 1.660.899 | 1.948.026 | 2.076.010 |
| 8. | Kota Bandung | na | 1.790.144 | 1.826.983 | 1.257.686 | 1.509.327 | 1.541.049 | 2.101.140 |
| 9. | Bogor | 1.045.510 | 1.753.704 | 1.705.906 | 1.129.061 | 1.490.425 | 1.715.215 | 2.029.587 |
| 10. | Kota Cimahi | 1.099.717 | 1.747.310 | 1.867.576 | 1.067.122 | 1.201.447 | 1.892.051 | 2.052.400 |
| 11. | Cianjur | 780.089 | 1.672.741 | 1.196.233 | 924.464 | 1.131.600 | 1.156.734 | 1.536.791 |
| 12. | Cirebon | 1.177.260 | 1.651.434 | 1.394.461 | 1.089.315 | 1.464.790 | 1.475.264 | 1.832.567 |
| 13. | Sumedang | 957.014 | 1.612.476 | 1.322.428 | 819.697 | 1.276.692 | 1.240.426 | 1.595.400 |
| 14. | Bandung Barat | 1.187.405 | 1.605.743 | 1.562.013 | 844.887 | 1.349.282 | 1.418.880 | 2.122.348 |
| 15. | Indramayu | 1.650.783 | 1.603.135 | 1.377.863 | 1.515.507 | 1.492.451 | 1.551.954 | 1.555.986 |
| 16. | Majalengka | 1.001.666 | 1.600.622 | 1.443.125 | 1.164.734 | 1.340.154 | 1.411.297 | 1.749.027 |
| 17. | Subang | 1.510.568 | 1.589.977 | 1.539.451 | 1.241.494 | 1.489.949 | 1.559.660 | 1.958.166 |
| 18. | Bandung | 1.027.436 | 1.564.807 | 1.519.467 | 901.138 | 1.272.785 | 1.440.827 | 1.787.287 |
| 19. | Kuningan | 864.716 | 1.502.566 | 1.365.661 | 837.635 | 1.189.839 | 1.382.142 | 1.535.200 |
| 20. | Ciamis | 719.115 | 1.497.511 | 1.149.806 | 781.023 | 1.035.694 | 1.357.176 | 1.311.124 |
| 21. | Kota Cirebon | na | 1.392.365 | 1.242.781 | 1.068.468 | 1.388.207 | 1.358.552 | 1.257.472 |
| 22. | Kota Sukabumi | 795.041 | 1.347.051 | 1.592.319 | 790.826 | 1.136.773 | 1.232.019 | 2.016.030 |
| 23. | Garut | 836.033 | 1.334.228 | 1.365.001 | 993.703 | 1.085.934 | 1.320.596 | 1.502.848 |
| 24. | Tasikmalaya | 661.221 | 1.293.702 | 1.193.471 | 825.975 | 983.760 | 1.045.493 | 1.371.629 |
| 25. | Kota Banjar | 706.408 | 1.235.609 | 1.185.041 | 626.961 | 1.106.858 | 1.046.201 | 1.408.602 |
| 26. | Pangandaran | 705.206 | 1.223.465 | 1.151.194 | 567.590 | 1.045.665 | 1.041.384 | 1.364.222 |
| 27. | Kota Tasikmalaya | 718.718 | 970.398 | 1.247.198 | 615.424 | 1.003.790 | 1.239.946 | 1.381.071 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Pada sektor industri besar dan sedang, Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten dengan jumlah perusahaan terbanyak di tahun 2019 dengan jumlah perusahaan sebanyak 1.930 perusahaan, diikuti oleh Kabupaten Bandung dengan 1.514 perusahaan, dan Kabupaten Bogor dengan 1.207 perusahaan. Sejalan dengan jumlahnya yang banyak, perusahaan-perusahaan tersebut mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah terbanyak juga di Jawa Barat dengan laba bersih sebesar Rp.389.716.815.759.000,-. Laba bersih ke-2 terbesar ditempati oleh Kabupaten Karawang dengan total laba sebesar Rp.183.505.973.584.000,-. Meski secara jumlah perusahaan di Kabupaten Karawang lebih sedikit bila dibandingkan dengan Kabupaten Bandung, Bogor, dan Kota Bandung, namun laba bersih perusahaan di Kabupaten Karawang secara keseluruhan di tahun 2019 mampu mengalahkan laba bersih ketiga kabupaten/kota tersebut.

Gambar 2.44
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran dan Pendapatan pada Industri Besar dan Sedang pada 10 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Perusahaan terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Pada sektor pertanian, produktivitas padi Kabupaten Bekasi di tahun 2021 merupakan ke-4 terbesar di Jawa Barat setelah Kota Bandung, Kota Banjar, dan Kabupaten Karawang dengan produktivitas sebesar 60,53%. Meski luas panennya berkurang, namun nilai produktivitas pertanian Kabupaten Bekasi mampu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 48,86%. Dari segi produksi, Kabupaten Bekasi juga menduduki peringkat ke-5 dengan produksi padi dan beras terbesar sebelah Kabupaten Indramayu, Karawang, Subang, dan Cianjur dengan produksi padi sebesar 601.021,28 ton dan produksi beras sebesar 345.291,13 ton.

Tabel 2.54
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, serta Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021

| No. | Kabupaten/Kota | Luas Panen Padi (ha) | | Produktivitas Padi (ku/ha) | | Produksi Padi (ton) | | Produksi Beras (ton) | |
|-----|----------------|----------------------|------------|----------------------------|-------|---------------------|--------------|----------------------|------------|
| | | 2020 | 2021* | 2020 | 2021* | 2020 | 2021* | 2020 | 2021* |
| 1. | Kota Bandung | 1.074,49 | 1.056,36 | 63,28 | 68,85 | 6.799,08 | 7.272,66 | 3.906,11 | 4.178,19 |
| 2. | Kota Banjar | 5.344,06 | 5.573,29 | 53,09 | 62,47 | 28.371,86 | 34.818,49 | 16.299,84 | 20.003,48 |
| 3. | Karawang | 181.915,22 | 202.211,29 | 59,80 | 61,80 | 1.087.873,90 | 1.249.685,50 | 624.991,50 | 717.953,46 |
| 4. | Bekasi | 103.171,69 | 99.299,65 | 48,86 | 60,53 | 504.103,31 | 601.021,28 | 289.611,04 | 345.291,13 |
| 5. | Kota Sukabumi | 2.335,74 | 2.509,27 | 62,22 | 60,51 | 14.532,67 | 15.184,27 | 8.349,12 | 8.723,47 |
| 6. | Indramayu | 226.626,09 | 227.769,90 | 60,16 | 60,00 | 1.363.311,87 | 1.366.705,98 | 783.232,64 | 785.182,60 |
| 7. | Subang | 169.416,08 | 166.782,10 | 57,30 | 59,33 | 970.759,74 | 989.563,83 | 557.708,57 | 568.511,67 |
| 8. | Ciamis | 52.925,20 | 56.042,81 | 53,43 | 59,18 | 282.791,46 | 331.667,49 | 162.465,77 | 190.545,41 |

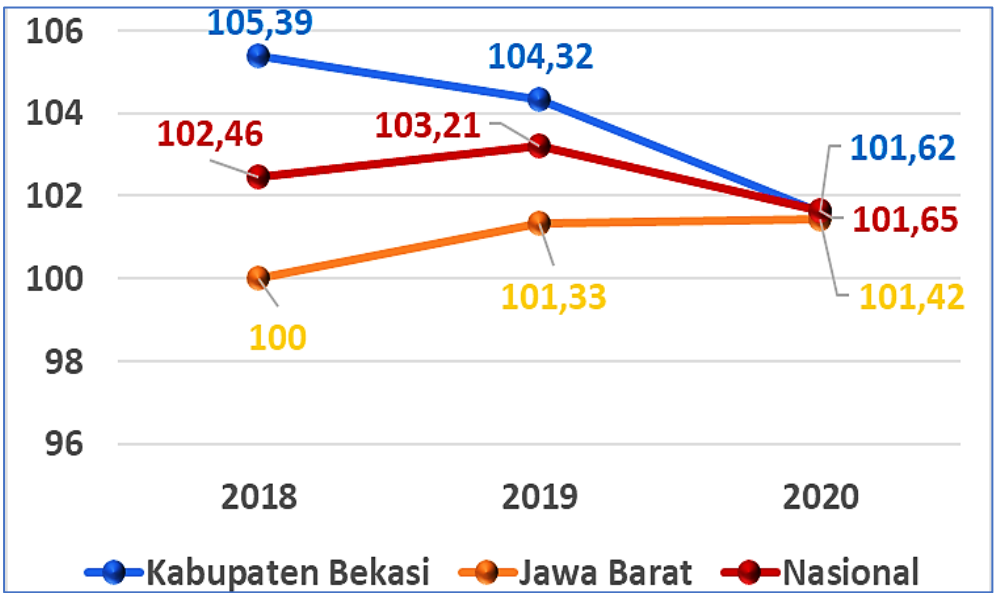


| No. | Kabupaten/Kota | Luas Panen Padi (ha) | | Produktivitas Padi (ku/ha) | | Produksi Padi (ton) | | Produksi Beras (ton) | |
|-----|------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | 2020 | 2021* | 2020 | 2021* | 2020 | 2021* | 2020 | 2021* |
| 9. | Bandung | 50.150,32 | 50.904,46 | 55,27 | 58,58 | 277.156,28 | 298.203,50 | 159.228,31 | 171.320,08 |
| 10. | Kuningan | 45.785,65 | 48.319,04 | 60,57 | 58,28 | 277.317,90 | 281.615,91 | 159.321,16 | 161.790,39 |
| 11. | Tasikmalaya | 72.941,41 | 85.427,52 | 60,92 | 58,27 | 444.358,24 | 497.780,42 | 255.287,06 | 285.978,50 |
| 12. | Garut | 77.873,41 | 78.639,62 | 54,56 | 57,91 | 424.913,90 | 455.365,04 | 244.116,16 | 261.610,54 |
| 13. | Kota Cimahi | 77,49 | 76,63 | 56,45 | 56,81 | 437,44 | 435,30 | 251,30 | 250,08 |
| 14. | Kota Tasikmalaya | 7.569,30 | 9.092,53 | 48,02 | 56,76 | 36.349,80 | 51.605,17 | 20.883,22 | 29.647,55 |
| 15. | Sukabumi | 93.371,47 | 91.072,26 | 55,85 | 56,63 | 521.459,25 | 515.699,54 | 299.582,16 | 296.273,13 |
| 16. | Kota Depok | 30,99 | 45,39 | 61,06 | 56,58 | 189,23 | 256,83 | 108,72 | 147,55 |
| 17. | Cirebon | 83.233,39 | 84.533,39 | 59,72 | 56,16 | 497.080,10 | 474.707,62 | 285.576,14 | 272.723,01 |
| 18. | Majalengka | 98.037,63 | 97.157,25 | 57,77 | 55,27 | 566.334,48 | 536.999,75 | 325.363,32 | 308.510,28 |
| 19. | Bandung Barat | 29.196,89 | 28.089,92 | 56,39 | 54,63 | 164.640,49 | 153.446,70 | 94.587,16 | 88.156,26 |
| 20. | Cianjur | 113.856,46 | 115.660,56 | 54,72 | 52,57 | 622.992,32 | 607.970,44 | 357.913,67 | 349.283,46 |
| 21. | Purwakarta | 30.315,68 | 33.325,83 | 52,76 | 51,51 | 159.957,49 | 171.662,18 | 91.896,76 | 98.621,20 |
| 22. | Kota Cirebon | 225,82 | 231,68 | 45,67 | 51,49 | 1.031,24 | 1.193,01 | 592,46 | 685,41 |
| 23. | Bogor | 55.692,05 | 58.655,21 | 53,68 | 51,36 | 298.974,65 | 301.254,10 | 171.763,14 | 173.072,69 |
| 24. | Pangandaran | 29.313,07 | 27.730,25 | 52,87 | 51,26 | 154.982,57 | 142.158,29 | 89.038,63 | 81.670,97 |
| 25. | Kota Bekasi | 483,64 | 510,45 | 56,30 | 49,92 | 2.723,05 | 2.548,35 | 1.564,41 | 1.464,04 |
| 26. | Sumedang | 55.892,07 | 53.928,20 | 54,96 | 49,21 | 307.178,00 | 265.379,11 | 176.475,99 | 152.462,23 |
| 27. | Kota Bogor | 33,32 | 36,09 | 45,70 | 46,57 | 152,26 | 168,08 | 87,48 | 96,55 |
| | JUMLAH | 1.586.888,63 | 1.624.680,95 | 56,82 | 57,58 | 9.016.772,58 | 9.354.368,84 | 5.180.201,84 | 5.374.153,33 |

Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Pada kesejahteraan petani, selama tahun 2018 dan 2019 nilai tukar petani Kabupaten Bekasi berada di atas nilai tukar petani Jawa Barat dan Nasional dengan nilai sebesar 105,39 dan 104,32 yang menandakan bahwa pendapatan yang diterima petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Walaupun demikian nilai tukar petani di Kabupaten Bekasi terus mengalami penurunan hingga ke angka 101,62 di tahun 2020, lebih rendah dibandingkan nilai petani nasional meski masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai tukar petani Jawa Barat.

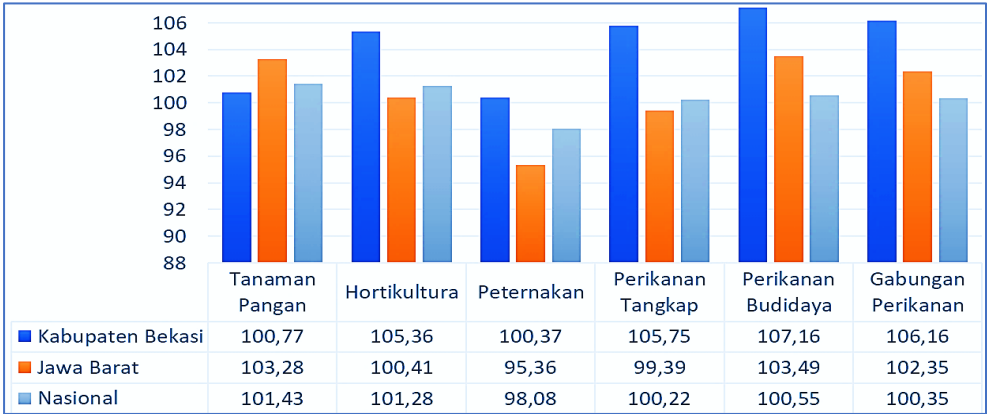
Gambar 2.45
Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2018-2020



Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021, Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Barat 2020, serta Statistik Nasional Tahun 2020 dan 2022

Bila digali lebih dalam ke masing-masing subsektor pertanian dan perikanan, nilai tukar petani dengan nilai terendah di Kabupaten Bekasi di tahun 2020 adalah nilai tukar petani subsektor peternakan dengan nilai sebesar 100,37 untuk selanjutnya diikuti oleh subsektor tanaman pangan dengan nilai sebesar 100,77. Sementara nilai tukar petani tertinggi adalah perikanan budidaya dengan nilai sebesar 107,16. Dibandingkan dengan Jawa Barat dan nasional, nilai tukar petani subsektor perikanan budaya Kabupaten Bekasi jauh lebih tinggi. Begitu pula pada subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan tangkap. Hanya subsektor tanaman pangan yang harus mendapatkan perhatian ekstra mengingat nilainya yang berada di bawah Jawa Barat dan nasional. Meski demikian, subsektor lainnya yang juga harus menjadi perhatian adalah subsektor peternakan karena meskipun nilainya masih di atas 100 dan lebih tinggi dari nilai Jawa Barat dan nasional, namun di antara semua subsektor lainnya nilai tukar petani subsektor peternakan merupakan yang terendah, dimana selisih antara pengeluaran dan pendapatan peternak tidak terpaut terlalu jauh, yang menunjukkan bahwa keuntungan bersih yang diterima oleh petani pada subsektor ini paling rendah di antara petani di subsektor lainnya. Semakin tingginya kesejahteraan petani di subsektor tersebut, maka peluang subsektor tersebut untuk berkembang akan semakin besar pula karena akan memperbesar minat petani maupun pengusaha untuk terjun ke dalam bisnis yang berkaitan dengan subsektor tersebut. Sementara bagi konsumen, dengan majunya subsektor pertanian tersebut berarti pula bahwa ketersediaan hasil produksinya tidak perlu dikhawatirkan, dengan berlimpahnya ketersediaan hasil produksi dapat pula menstabilkan harga produk pertanian tersebut yang tentunya akan menguntungkan konsumen.

Gambar 2.46
Rata-Rata Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional Menurut Sub Sektor Tahun 2020 (2018=100)

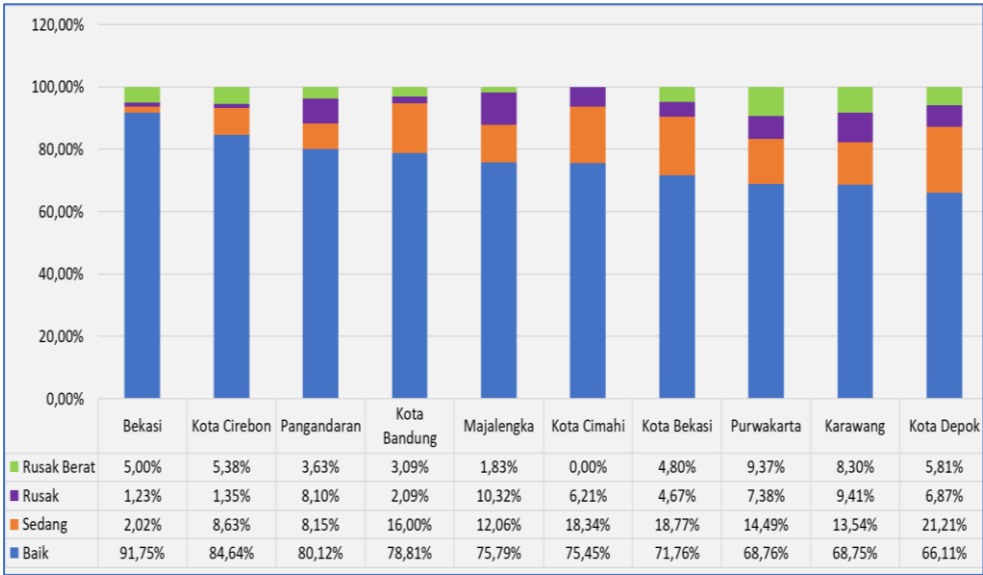


Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Meskipun jarak antara Kabupaten Bekasi dengan Provinsi Jawa Barat cukup jauh, yakni sejauh 77,84 Km, namun lokasinya yang cukup dekat ke ibukota negara, yakni Jakarta yang hanya sejauh 29 Km memberikan keuntungan terhadap akses maupun fasilitas wilayah. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Bekasi terhubung dengan ruas tol Jabodetabek yang juga terhubung dengan ruas tol trans dan nontrans Jawa sehingga memudahkan akses ke dalam dan ke luar Kabupaten Bekasi. Di samping itu, persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, yakni sebesar 91,75%. Sedangkan jalan dalam kondisi sedang, rusak, dan rusak berat masing-masing sebesar 2,02%, 1,23%, dan 5%. Kabupaten/kota lain dengan jalan dalam kondisi baiknya terbesar adalah Kota Cirebon dengan 84,64%, kemudian diikuti dengan Kabupaten Pangandaran dengan 80,12%. Sisanya, seperti Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kota Cimahi, dan seterusnya memiliki kondisi jalan dalam kondisi baik di bawah 80%.

Gambar 2.47
Persentase Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
dengan Kondisi Baik Terbesar Tahun 2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022, diolah

Sementara pada ketersediaan akomodasi, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-5 di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kamar pada hotel berbintang, non berbintang, dan akomodasi lainnya terbanyak setelah Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Bogor dengan total kamar sebanyak 4.977 kamar. Meski bila dibandingkan Kota



Bandung ketersediaan kamar tersebut hanya 21%-nya, namun posisi Kabupaten Bekasi yang berdekatan, khususnya dengan Kota Bekasi, dapat terbantu dengan ketersediaan akomodasi di Kota Bekasi apabila akomodasi di Kabupaten Bekasi tidak dapat menampung seluruh pengunjung yang datang ke Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2021, jumlah hotel bintang di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 33 hotel dengan 3.912 kamar dan 4.773 tempat tidur. Sedangkan untuk hotel non bintang dan akomodasi lainnya adalah sebanyak 24 dengan 1.065 kamar dan 1.085 tempat tidur. Sementara untuk kabupaten/kota dengan jumlah akomodasi dan kamar paling sedikit adalah Kota Banjar dengan total akomodasi sebanyak 9 dan 179 kamar serta 268 tempat tidur.

Tabel 2.55
Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

| No. | Kabupaten/ Kota | Hotel Bintang | | | Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lain | | | Jumlah Akomodasi | Jumlah Kamar | Jumlah Tempat Tidur |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Ako moda si | Kamar | Tempat Tidur | Akomo dasi | Kamar | Tempat Tidur | | | |
| 1. | Kota Bandung | 193 | 18.545 | 29.643 | 192 | 5.179 | 7.528 | 385 | 23.724 | 37.171 |
| 2. | Bogor | 33 | 3.856 | 5.918 | 540 | 8.543 | 13.874 | 573 | 12.399 | 19.792 |
| 3. | Pangandaran | 10 | 371 | 656 | 444 | 5.934 | 9.153 | 454 | 6.305 | 9.809 |
| 4. | Kota Bogor | 43 | 4.888 | 7.798 | 35 | 1.092 | 1.414 | 78 | 5.980 | 9.212 |
| 5. | Bekasi | 33 | 3.912 | 4.773 | 24 | 1.065 | 1.085 | 57 | 4.977 | 5.858 |
| 6. | Cianjur | 19 | 2.051 | 3.890 | 131 | 2.632 | 4.411 | 150 | 4.683 | 8.301 |
| 7. | Kota Bekasi | 26 | 3.087 | 4.201 | 34 | 953 | 1.099 | 60 | 4.040 | 5.300 |
| 8. | Garut | 8 | 535 | 901 | 256 | 2.900 | 3.807 | 264 | 3.435 | 4.708 |
| 9. | Kota Cirebon | 28 | 2.162 | 3.360 | 32 | 892 | 1.329 | 60 | 3.054 | 4.689 |
| 10. | Sukabumi | 7 | 517 | 792 | 208 | 2.478 | 3.660 | 215 | 2.995 | 4.452 |
| 11. | Bandung Barat | 19 | 1.203 | 2.113 | 79 | 1.547 | 2.418 | 98 | 2.750 | 4.531 |
| 12. | Karawang | 18 | 2.298 | 2.913 | 20 | 444 | 560 | 38 | 2.742 | 3.473 |
| 13. | Bandung | 21 | 1.325 | 1.965 | 108 | 1.184 | 2.090 | 129 | 2.509 | 4.055 |
| 14. | Subang | 7 | 497 | 922 | 151 | 1.933 | 2.399 | 158 | 2.430 | 3.321 |
| 15. | Kota Tasikmalaya | 11 | 831 | 1.342 | 25 | 694 | 1.090 | 36 | 1.525 | 2.432 |
| 16. | Cirebon | 7 | 738 | 1.082 | 36 | 752 | 1.047 | 43 | 1.490 | 2.129 |
| 17. | Kuningan | 6 | 454 | 761 | 51 | 949 | 1.361 | 57 | 1.403 | 2.122 |
| 18. | Kota Depok | 5 | 714 | 1.187 | 13 | 517 | 878 | 18 | 1.231 | 2.065 |
| 19. | Sumedang | 9 | 630 | 1.022 | 27 | 580 | 823 | 36 | 1.210 | 1.845 |
| 20. | Kota Sukabumi | 8 | 637 | 1.073 | 29 | 544 | 810 | 37 | 1.181 | 1.883 |
| 21. | Purwakarta | 3 | 377 | 602 | 28 | 674 | 865 | 31 | 1.051 | 1.467 |
| 22. | Indramayu | 4 | 191 | 256 | 23 | 487 | 654 | 27 | 678 | 910 |
| 23. | Majalengka | 1 | 113 | 182 | 16 | 315 | 435 | 17 | 428 | 617 |
| 24. | Tasikmalaya | 1 | 34 | 49 | 35 | 391 | 514 | 36 | 425 | 563 |
| 25. | Ciamis | - | - | - | 13 | 349 | 571 | 13 | 349 | 571 |
| 26. | Kota Cimahi | 1 | 87 | 138 | 8 | 130 | 233 | 9 | 217 | 371 |
| 27. | Kota Banjar | - | - | - | 9 | 179 | 268 | 9 | 179 | 268 |
| | Jumlah | 521 | 50.053 | 77.539 | 2.567 | 43.337 | 64.376 | 3.088 | 93.390 | 141.915 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022



Pada ketersediaan fasilitas pendidikan, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-7 dengan SD negeri dan swasta terbanyak di antara kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, dengan jumlah SD di tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 986 sekolah. Meski demikian, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-3 dengan rombongan belajar SD terbanyak, posisi ke-2 dengan jumlah kepala sekolah dan guru SD terbanyak, serta posisi ke-4 dengan ruang kelas SD terbanyak. Sementara pada tingkat menengah pertama, Kabupaten Bekasi berada di posisi ke-3 dengan SMP negeri dan swasta terbanyak, posisi ke-2 dengan jumlah kepala sekolah dan guru SMP terbanyak, posisi ke-3 dengan rombongan belajar SMP terbanyak, dan posisi ke-4 dengan ruang kelas SMP terbanyak.

Tabel 2.56
Jumlah Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Rombongan Belajar, dan Ruang Kelas pada SD dan SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Ajaran 2019/2020

| No. | Kabupaten/ Kota | SD Negeri + Swasta | | | | SMP Negeri + Swasta | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Sekolah | KS & Guru | Rombel | Ruang Kelas | Sekolah | KS & Guru | Rombel | Ruang Kelas |
| 1. | Kab. Bogor | 1.846 | 8.240 | 17.271 | 14.680 | 729 | 5.947 | 6.316 | 7.005 |
| 2. | Kab. Garut | 1.563 | 2.327 | 10.535 | 9.651 | 401 | 2.075 | 3.486 | 3.863 |
| 3. | Kab. Bandung | 1.418 | 5.203 | 11.736 | 9.864 | 339 | 2.983 | 3.955 | 4.117 |
| 4. | Kab. Cianjur | 1.256 | 2.486 | 9.210 | 8.599 | 330 | 2.139 | 3.066 | 3.689 |
| 5. | Kab. Sukabumi | 1.215 | 1.567 | 8.483 | 8.399 | 346 | 1.423 | 2.864 | 3.189 |
| 6. | Kab. Tasikmalaya | 1.087 | 2.192 | 6.873 | 7.020 | 268 | 1.588 | 2.218 | 2.532 |
| 7. | Kab. Bekasi | 986 | 6.784 | 11.208 | 9.021 | 346 | 3.579 | 3.543 | 3.718 |
| 8. | Kab. Cirebon | 933 | 3.226 | 7.170 | 6.668 | 198 | 1.907 | 2.601 | 2.748 |
| 9. | Kab. Karawang | 915 | 2.421 | 7.844 | 6.984 | 175 | 1.328 | 2.363 | 2.605 |
| 10. | Kab. Indramayu | 899 | 1.846 | 5.931 | 6.101 | 214 | 1.193 | 2.108 | 2.271 |
| 11. | Kab. Subang | 880 | 2.569 | 5.855 | 5.865 | 167 | 1.572 | 2.000 | 2.116 |
| 12. | Kab. Ciamis | 744 | 1.094 | 4.689 | 4.726 | 126 | 742 | 1.326 | 1.437 |
| 13. | Kota Bekasi | 713 | 6.299 | 8.459 | 7.287 | 287 | 3.180 | 2.869 | 3.171 |
| 14. | Kab. Bandung Barat | 713 | 2.513 | 5.558 | 5.074 | 176 | 1.738 | 1.957 | 1.968 |
| 15. | Kab. Majalengka | 673 | 1.442 | 4.784 | 4.702 | 112 | 610 | 1.341 | 1.558 |
| 16. | Kab. Kuningan | 655 | 1.608 | 4.453 | 4.527 | 107 | 779 | 1.356 | 1.491 |
| 17. | Kab. Sumedang | 603 | 2.031 | 4.507 | 4.168 | 121 | 862 | 1.468 | 1.657 |
| 18. | Kota Bandung | 475 | 3.855 | 7.632 | 6.130 | 253 | 2.660 | 3.349 | 3.592 |
| 19. | Kota Depok | 454 | 3.842 | 5.583 | 4.616 | 234 | 1.945 | 2.146 | 2.296 |
| 20. | Kab. Purwakarta | 411 | 1.360 | 3.587 | 3.202 | 108 | 939 | 1.297 | 1.350 |
| 21. | Kab. Pangandaran | 284 | 667 | 1.808 | 1.796 | 53 | 323 | 489 | 525 |
| 22. | Kota Bogor | 272 | 1.704 | 3.630 | 2.842 | 125 | 1.241 | 1.425 | 1.538 |
| 23. | Kota Tasikmalaya | 229 | 722 | 2.392 | 2.052 | 75 | 622 | 975 | 1.029 |
| 24. | Kota Cirebon | 164 | 847 | 1.324 | 1.331 | 46 | 399 | 610 | 675 |
| 25. | Kota Cimahi | 125 | 795 | 1.557 | 1.306 | 40 | 440 | 607 | 628 |
| 26. | Kota Sukabumi | 119 | 639 | 1.163 | 1.176 | 46 | 396 | 486 | 529 |
| 27. | Kota Banjar | 86 | 179 | 694 | 679 | 26 | 213 | 281 | 319 |
| | Jumlah | 19.718 | 68.458 | 163.936 | 148.466 | 5.448 | 42.823 | 56.502 | 61.616 |

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>



Selain itu, Kabupaten Bekasi juga berada di posisi ke-4 dengan SMA negeri dan swasta terbanyak, posisi ke-5 dengan kepala sekolah dan guru SMA terbanyak, posisi ke-4 dengan rombongan belajar SMA terbanyak, serta posisi ke-3 dengan ruang kelas SMA terbanyak. Sebagai tambahan, Kabupaten Bekasi juga berada di urutan ke-2 dengan SMK negeri dan swasta terbanyak, posisi ke-7 dengan kepala sekolah dan guru SMK terbanyak, posisi ke-2 dengan rombongan belajar SMK terbanyak, serta posisi ke-2 dengan ruang kelas SMK terbanyak. Dengan demikian, fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi dapat dikatakan cukup memadai dan tidak kalah dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Bila pun dirasa secara kuantitas dan kualitas masih kurang, maka masyarakat dapat memanfaatkan akses jalan di Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan fasilitas di kota terdekat lainnya, seperti Kota Bekasi, Jakarta, Bogor, atau Karawang.

Tabel 2.57
Jumlah Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Rombongan Belajar, dan Ruang Kelas pada SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Ajaran 2019/2020

| No. | Kabupaten/ Kota | SMA Negeri + Swasta | | | | SMK Negeri + Swasta | | | |
|--------|--------------------|---------------------|-----------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------|-------------|
| | | Sekolah | KS & Guru | Rombel | Ruang Kelas | Sekolah | KS & Guru | Rombel | Ruang Kelas |
| 1. | Kab. Bogor | 189 | 2.644 | 2.186 | 2.341 | 361 | 4.152 | 4.246 | 4.303 |
| 2. | Kota Bandung | 139 | 2.605 | 1.959 | 2.143 | 126 | 2.661 | 2.165 | 2.261 |
| 3. | Kab. Garut | 127 | 1.246 | 1.286 | 1.461 | 181 | 2.104 | 1.966 | 1.995 |
| 4. | Kab. Bekasi | 126 | 1.828 | 1.477 | 1.682 | 189 | 2.077 | 2.289 | 2.359 |
| 5. | Kota Bekasi | 111 | 1.917 | 1.340 | 1.593 | 147 | 2.186 | 2.231 | 2.281 |
| 6. | Kab. Bandung | 109 | 1.859 | 1.614 | 1.611 | 140 | 2.224 | 1.967 | 1.976 |
| 7. | Kab. Cianjur | 94 | 1.212 | 915 | 1.145 | 185 | 2.325 | 2.138 | 2.323 |
| 8. | Kab. Sukabumi | 81 | 1.001 | 998 | 1.142 | 162 | 1.769 | 1.600 | 1.716 |
| 9. | Kab. Tasikmalaya | 68 | 922 | 689 | 764 | 139 | 2.046 | 1.586 | 1.587 |
| 10. | Kota Depok | 66 | 881 | 769 | 933 | 131 | 1.358 | 1.398 | 1.628 |
| 11. | Kab. Bandung Barat | 62 | 1.020 | 803 | 913 | 104 | 1.235 | 1.131 | 1.100 |
| 12. | Kota Bogor | 56 | 872 | 657 | 766 | 102 | 1.175 | 1.331 | 1.386 |
| 13. | Kab. Indramayu | 55 | 824 | 610 | 695 | 138 | 1.808 | 1.673 | 1.792 |
| 14. | Kab. Karawang | 50 | 862 | 871 | 889 | 113 | 2.074 | 1.934 | 1.707 |
| 15. | Kab. Subang | 49 | 897 | 697 | 754 | 108 | 1.570 | 1.349 | 1.286 |
| 16. | Kab. Cirebon | 47 | 740 | 695 | 754 | 109 | 1.951 | 1.717 | 1.864 |
| 17. | Kab. Ciamis | 29 | 643 | 483 | 525 | 72 | 865 | 812 | 849 |
| 18. | Kab. Kuningan | 29 | 335 | 558 | 565 | 45 | 1.179 | 922 | 869 |
| 19. | Kab. Sumedang | 27 | 349 | 503 | 566 | 90 | 1.043 | 979 | 1.025 |
| 20. | Kab. Purwakarta | 27 | 418 | 424 | 492 | 58 | 770 | 752 | 807 |
| 21. | Kota Tasikmalaya | 27 | 462 | 458 | 480 | 52 | 839 | 728 | 711 |
| 22. | Kota Cirebon | 26 | 582 | 360 | 436 | 30 | 459 | 411 | 406 |
| 23. | Kab. Majalengka | 22 | 481 | 470 | 533 | 56 | 1.107 | 963 | 904 |
| 24. | Kota Sukabumi | 19 | 208 | 218 | 289 | 32 | 466 | 447 | 458 |
| 25. | Kota Cimahi | 16 | 479 | 280 | 294 | 24 | 714 | 609 | 670 |
| 26. | Kab. Pangandaran | 7 | 196 | 132 | 131 | 32 | 499 | 327 | 312 |
| 27. | Kota Banjar | 5 | 100 | 100 | 102 | 17 | 391 | 281 | 283 |
| Jumlah | | 1.663 | 25.583 | 21.552 | 23.999 | 2.943 | 41.047 | 37.952 | 38.858 |

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>



Sedangkan terkait dengan urusan kesehatan, fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bekasi tidak kalah dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Pada tahun 2021, jumlah rumah sakit negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 49 unit, merupakan yang terbanyak di Jawa Barat. Di samping itu, juga terdapat 3 rumah sakit khusus, 44 puskesmas yang terdiri dari 11 puskesmas rawat inap dan 33 puskesmas non rawat inap, 386 klinik pratama yang jumlahnya juga terbanyak di Jawa Barat, serta 2.818 posyandu.

Tabel 2.58
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, Posyandu, dan Polindes menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

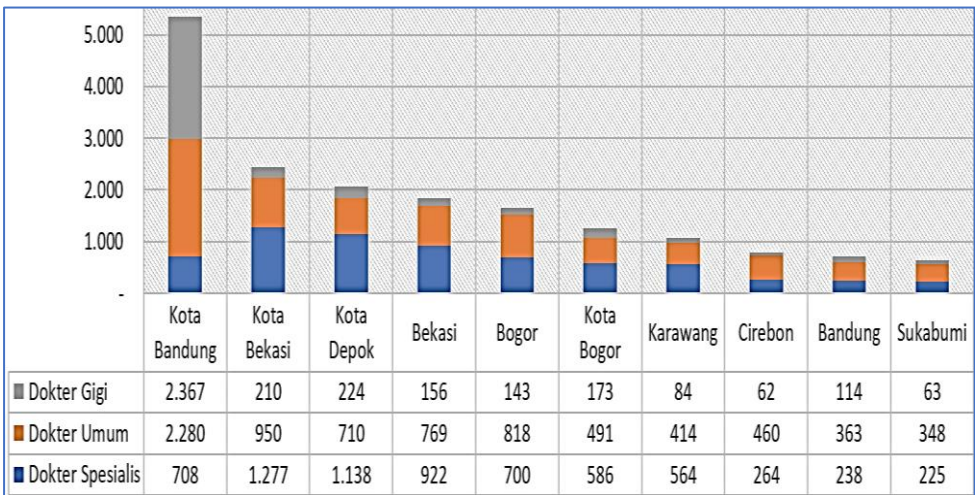
| No. | Kabupaten/ Kota | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Puskesmas | Klinik Pratama | Posyandu | Polindes Village |
|-----|------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1. | Bekasi | 49 | 3 | 44 | 386 | 2.818 | - |
| 2. | Kota Bekasi | 44 | 3 | 47 | 289 | 1.612 | - |
| 3. | Bogor | 24 | 5 | 101 | 257 | 4.314 | 53 |
| 4. | Karawang | 22 | 3 | 50 | 318 | 2.410 | 64 |
| 5. | Kota Bandung | 22 | 15 | 80 | 225 | 1.995 | - |
| 6. | Kota Depok | 20 | 4 | 38 | 202 | 1.040 | - |
| 7. | Kota Bogor | 17 | 5 | 25 | 146 | 980 | - |
| 8. | Kuningan | 11 | 1 | 37 | 22 | 1.435 | - |
| 9. | Purwakarta | 11 | - | 20 | 77 | 1.044 | 5 |
| 10. | Bandung | 10 | - | 62 | 160 | 4.308 | 175 |
| 11. | Indramayu | 10 | 1 | 49 | 47 | 2.340 | 18 |
| 12. | Kota Cirebon | 10 | 1 | 22 | 50 | 339 | - |
| 13. | Sukabumi | 9 | - | 58 | 78 | 3.164 | 15 |
| 14. | Cirebon | 9 | 3 | 60 | 94 | 2.670 | 172 |
| 15. | Subang | 8 | 1 | 40 | 108 | 1.881 | 253 |
| 16. | Garut | 7 | - | 67 | 126 | 4.232 | 30 |
| 17. | Kota Cimahi | 7 | 1 | 13 | 35 | 406 | - |
| 18. | Kota Tasikmalaya | 7 | 5 | 22 | 43 | 890 | 9 |
| 19. | Bandung Barat | 6 | 3 | 32 | 67 | 1.780 | 39 |
| 20. | Kota Sukabumi | 6 | - | 15 | 31 | 453 | - |
| 21. | Cianjur | 5 | - | 47 | 85 | 2.929 | 91 |
| 22. | Ciamis | 5 | 1 | 37 | 10 | 1.607 | - |
| 23. | Kota Banjar | 4 | - | 10 | 17 | 201 | - |
| 24. | Majalengka | 3 | 2 | 32 | 48 | 1.419 | 211 |
| 25. | Sumedang | 3 | - | 35 | 86 | 1.698 | 29 |
| 26. | Tasikmalaya | 1 | 1 | 40 | 63 | 2.395 | 251 |
| 27. | Pangandaran | 1 | - | 15 | 67 | 531 | 1 |
| | Jumlah | 331 | 58 | 1.098 | 3.137 | 50.891 | 1.416 |

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Sementara terkait dengan tenaga kesehatan, meski jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Bekasi merupakan yang terbanyak di Jawa Barat, namun jumlah dokter umum, spesialis dan gigi yang ada berada di urutan ke-4 setelah Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 922 orang, dokter umum sebanyak 769 orang, dan dokter gigi sebanyak 156 orang.

Sebagaimana fasilitas pendidikan, masyarakat di Kabupaten Bekasi juga dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan di kabupaten/kota lainnya yang berdekatan dengan Kabupaten Bekasi, seperti Kota Bekasi, Jakarta, Kabupaten Bogor dan Karawang apabila fasilitas yang tersedia kurang memadai. Dengan akses jalan yang baik dan transportasi online saat ini yang juga tidak kalah banyak, masyarakat di Kabupaten Bekasi dapat keluar dan masuk ke Kabupaten Bekasi dengan mudah.

Gambar 2.48
Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Terakhir terkait dengan komunikasi, sampai dengan tahun 2021 terdapat 17 kantor pos pembantu di Kabupaten Bekasi. Selain itu, dari 187 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi, 176-nya atau sebanyak 94,12% telah terjangkau sinyal 4G/LTE. Sedangkan sisanya sebanyak 10 desa atau 5,35% terjangkau sinyal 3G/H/H+/EVDO, dan 1 desa atau 0,53% terjangkau sinyal 2,5G/E/GPRS. Dengan terjangkaunya seluruh desa/kelurahan dengan sinyal internet walaupun belum seluruhnya 4G/LTE, maka komunikasi masyarakat dengan teman, keluarga, rekan bisnis atau lainnya baik di dalam maupun luar Kabupaten Bekasi menjadi lebih mudah. Pembelajaran maupun bisnis secara online pun dapat dilaksanakan dengan baik.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Selama tahun 2017-2021, Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten dengan nilai investasi penanaman modal asing terbesar di Kabupaten Jawa Barat dengan nilai investasi di tahun 2021 sebesar USD2.156.574.400,- dan



laju pertumbuhan investasi sebesar 20%. Diikuti oleh Kabupaten Karawang dengan nilai investasi sebesar USD1.275.707.300,- dan laju pertumbuhan sebesar 29%. Sedangkan pada investasi penanaman modal dalam negeri, posisi tertinggi yang di tahun 2017 ditempati oleh Kabupaten Karawang berhasil diambil alih oleh Kabupaten Bekasi di tahun 2018 hingga tahun 2021 dengan nilai investasi di tahun 2021 sebesar Rp.11.777.338.500.000,- sedikit meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 3%, setelah mengalami penurunan di tahun 2020, yakni dari Rp.20.206.857.700.000,- di tahun 2019 menjadi sebesar Rp.11.411.416.100.000,- di tahun 2020. Di tahun 2021, laju pertumbuhan investasi penanaman modal dalam negeri diantara 12 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan nilai investasi terbesar ditunjukkan oleh Kabupaten Subang dengan laju sebesar 3.521% dengan meningkatnya penanaman modal dalam negerinya dari Rp.78.271.000.000,- menjadi sebesar Rp.2.833.961.000.000,- .

Tabel 2.59
Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri selama Tahun 2017-2021 berdasarkan 12 Kabupaten/Kota dengan Nilai Investasi Terbesar di Jawa Barat Tahun 2021

| NO. | KABUPATEN/ KOTA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MODAL ASING (US DOLLAR) | | | | | | |
| 1. | Kab. Bekasi | 1.979.447.000 | 2.914.675.000 | 1.810.168.800 | 1.799.475.800 | 2.156.574.400 |
| 2. | Kab. Karawang | 1.547.554.000 | 868.322.200 | 1.421.628.200 | 988.858.300 | 1.275.707.300 |
| 3. | Kab. Cirebon | 342.208.700 | 286.642.900 | 596.251.800 | 324.773.300 | 326.478.400 |
| 4. | Kab. Bogor | 318.954.100 | 369.755.300 | 317.744.400 | 198.576.500 | 318.015.500 |
| 5. | Kota Bekasi | 197.589.600 | 275.948.300 | 210.286.800 | 199.489.700 | 207.476.900 |
| 6. | Kab. Bandung Barat | 61.745.600 | 57.453.400 | 272.171.500 | 204.345.700 | 179.849.100 |
| 7. | Kab. Subang | 75.690.900 | 76.510.700 | 61.830.400 | 289.736.400 | 177.548.100 |
| 8. | Kota Bandung | 81.076.700 | 20.079.100 | 252.840.200 | 139.024.900 | 170.487.100 |
| 9. | Kab. Purwakarta | 157.763.400 | 434.966.000 | 349.082.200 | 256.309.900 | 150.574.800 |
| 10. | Kab. Bandung | 44.688.300 | 28.165.200 | 212.097.100 | 197.891.800 | 79.155.000 |
| 11. | Kab. Garut | 10.246.800 | 12.724.500 | 10.066.200 | 28.038.800 | 57.029.800 |
| 12. | Kab. Majalengka | 70.972.900 | 91.095.600 | 26.986.100 | 13.780.100 | 37.576.300 |
| MODAL DALAM NEGERI (JUTA RUPIAH) | | | | | | |
| 1. | Kab. Bekasi | 6.183.341 | 15.000.981 | 20.206.858 | 11.411.416 | 11.777.339 |
| 2. | Kota Bandung | 994.306 | 2.128.593 | 2.517.683 | 8.623.643 | 8.957.384 |
| 3. | Kab. Karawang | 8.361.857 | 3.199.800 | 2.972.152 | 2.500.161 | 8.007.088 |
| 4. | Kab. Bogor | 2.137.300 | 3.733.241 | 4.414.689 | 6.300.894 | 5.253.904 |
| 5. | Kota Bekasi | 1.192.409 | 2.674.865 | 4.086.282 | 3.788.747 | 5.137.934 |
| 6. | Kab. Sumedang | 3.999.440 | 998.335 | 1.226.609 | 1.142.823 | 4.169.640 |
| 7. | Kota Depok | 62.847 | 1.264.322 | 4.470.035 | 7.175.435 | 3.228.806 |
| 8. | Kab. Subang | 178.301 | 519.040 | 1.534.884 | 78.271 | 2.833.961 |
| 9. | Kab. Purwakarta | 1.967.375 | 344.237 | 990.512 | 3.291.093 | 2.531.784 |
| 10. | Kab. Sukabumi | 79.121 | 351.705 | 218.169 | 1.490.129 | 1.973.183 |
| 11. | Kab. Indramayu | 68.000 | 110.867 | 33.732 | 355.297 | 1.783.530 |
| 12. | Kab. Bandung | 2.561.487 | 2.757.559 | 2.078.078 | 1.096.965 | 1.237.274 |

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Pada keamanan wilayah terhadap bencana, kelas resiko bencana Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2021 telah turun dari kategori tinggi di tahun 2017 ke kategori sedang dengan indeks resiko bencana di tahun 2021 sebesar 130,11. Meski dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dengan kelas resiko sedang nilai indeks resiko bencana Kabupaten Bekasi terbilang cukup tinggi, namun resiko bencana Kabupaten Bekasi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten Karawang dan Subang yang juga sama-sama memiliki potensi di sektor industri, atau lebih rendah dibandingkan dengan indeks resiko Jawa Barat dengan nilai indeks sebesar 134,94.

Bencana utama yang terjadi di Kabupaten Bekasi hingga saat ini adalah banjir. Selama beberapa tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Bekasi telah berupaya untuk mengurangi jumlah dan titik rawan banjir, antara lain dengan melakukan normalisasi sungai, perbaikan dan pembangunan drainase, mendorong pembuatan lubang biopori, dan sebagainya. Untuk ke depannya, banjir masih akan menjadi fokus utama bencana yang akan dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Tabel 2.60
Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota
di Jawa Barat Tahun 2017-2021

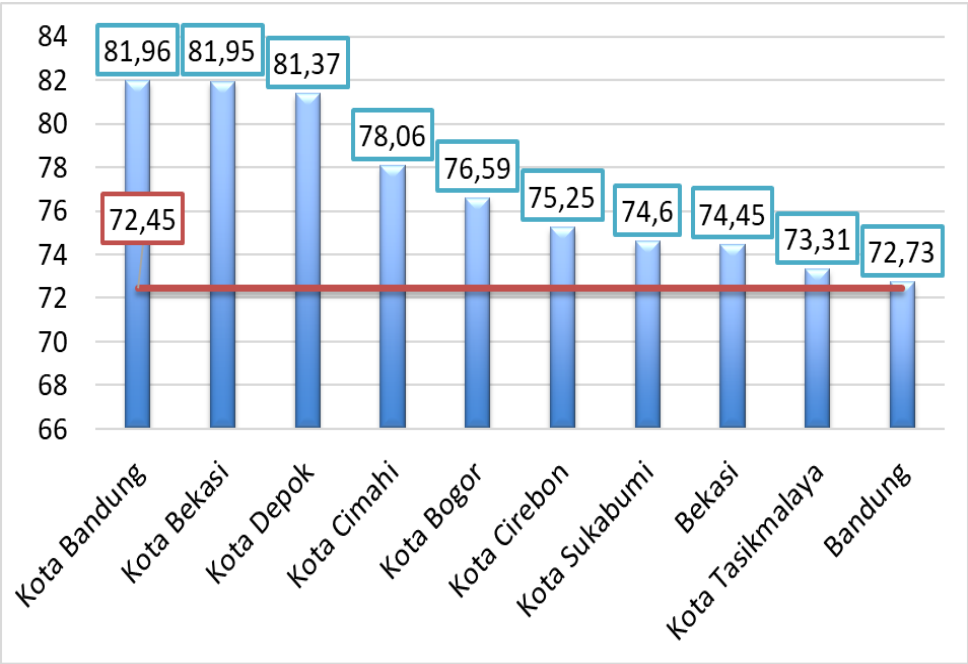
| No. | Kabupaten/ Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Kelas Resiko 2021 |
|-----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 1. | Cianjur | 226,48 | 207,13 | 207,13 | 215,08 | 197,08 | Tinggi |
| 2. | Sukabumi | 213,22 | 190,75 | 190,75 | 190,75 | 192,40 | Tinggi |
| 3. | Tasikmalaya | 224,80 | 203,01 | 203,01 | 203,01 | 186,51 | Tinggi |
| 4. | Garut | 208,63 | 208,63 | 208,63 | 205,52 | 185,00 | Tinggi |
| 5. | Subang | 175,20 | 175,20 | 175,20 | 171,91 | 168,78 | Tinggi |
| 6. | Karawang | 175,20 | 175,20 | 175,20 | 174,43 | 165,58 | Tinggi |
| 7. | Bandung | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 161,89 | Tinggi |
| 8. | Kota Cirebon | 183,18 | 172,76 | 172,76 | 172,76 | 157,19 | Tinggi |
| 9. | Kota Banjar | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | Tinggi |
| 10. | Cirebon | 181,20 | 170,79 | 160,63 | 160,63 | 147,51 | Tinggi |
| 11. | Kuningan | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 131,13 | 131,13 | Sedang |
| 12. | Bekasi | 152,03 | 133,03 | 133,03 | 132,89 | 130,11 | Sedang |
| 13. | Pangandaran | 192,11 | 168,52 | 145,44 | 145,44 | 129,21 | Sedang |
| 14. | Bogor | 152,40 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 125,31 | Sedang |
| 15. | Majalengka | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 143,43 | 124,74 | Sedang |
| 16. | Purwakarta | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 137,31 | 124,53 | Sedang |
| 17. | Sumedang | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 142,15 | 124,39 | Sedang |
| 18. | Kota Bekasi | 131,60 | 131,60 | 131,60 | 131,60 | 123,18 | Sedang |
| 19. | Ciamis | 173,66 | 163,29 | 156,23 | 141,57 | 122,22 | Sedang |
| 20. | Kota Tasikmalaya | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 117,37 | Sedang |
| 21. | Indramayu | 175,20 | 167,22 | 167,22 | 136,79 | 114,59 | Sedang |
| 22. | Kota Bandung | 122,32 | 122,32 | 122,32 | 122,32 | 111,32 | Sedang |
| 23. | Bandung Barat | 119,97 | 115,01 | 110,22 | 110,22 | 108,18 | Sedang |
| 24. | Kota Sukabumi | 114,40 | 114,40 | 114,40 | 114,40 | 102,67 | Sedang |
| 25. | Kota Cimahi | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 105,41 | 91,71 | Sedang |
| 26. | Kota Depok | 89,63 | 89,63 | 89,63 | 89,63 | 82,56 | Sedang |
| 27. | Kota Bogor | 82,35 | 75,75 | 75,75 | 75,75 | 65,38 | Sedang |

Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2021

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Di antara kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten yang masuk ke dalam 10 peringkat IPM tertinggi di Jawa Barat. Pada tahun 2021, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-8 di antara kabupaten/kota dengan nilai IPM tertinggi, yakni setelah Kota Bandung, Bekasi, Depok, Cimahi, Bogor, Cirebon, dan Sukabumi dengan nilai IPM sebesar 74,45 atau berada di atas IPM Jawa Barat yang hanya sebesar 72,45. Sementara di antara kabupaten yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi berada di urutan teratas, diikuti dengan Kabupaten Bandung dengan nilai IPM sebesar 72,73.

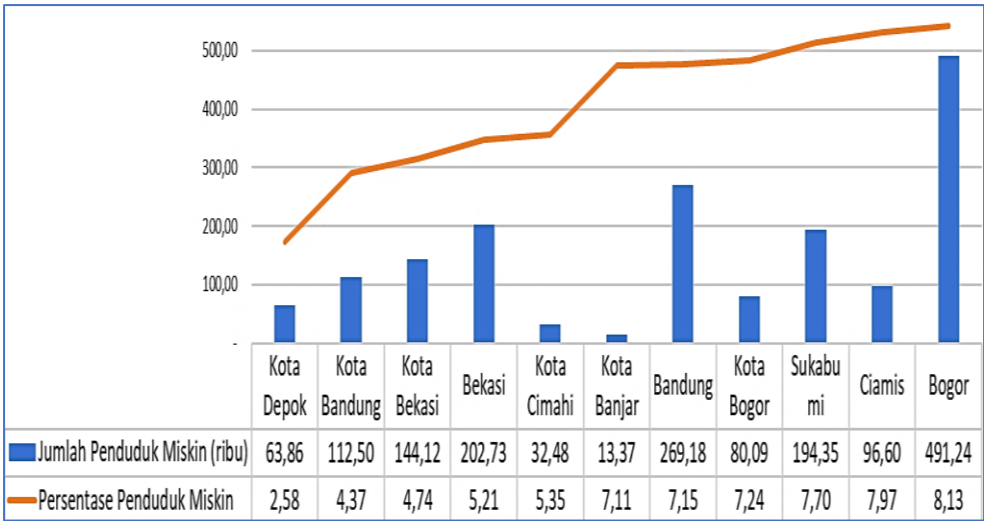
Gambar 2.49
IPM Kabupaten/Kota dengan Peringkat Tertinggi
di Jawa Barat Tahun 2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>

Meskipun Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-8 sebagai salah satu kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor, Garut, Cirebon, Bandung, Cianjur, Indramayu, dan Karawang, namun persentase penduduk miskin Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-4 terkecil bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yakni setelah Kota Depok, Bandung, dan Bekasi. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 202.730 orang dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,21%.

Gambar 2.50
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin pada 11 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Jawa Barat Tahun 2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Pada sektor ketenagakerjaan, Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten dengan jumlah angkatan kerja terbanyak ke-2 di tahun 2021 setelah Kabupaten Bogor dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 1.953.408 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2019 dan 2020 dari sebelumnya yang hanya sebanyak 1.771.709 orang di tahun 2019 dan 1.840.666 orang di tahun 2020. Dengan jumlah angkatan kerja yang banyak, perusahaan atau industri yang membutuhkan banyak pekerja akan mendapatkan pegawai yang dibutuhkannya dengan mudah dan dapat melakukan seleksi untuk mendapatkan pegawai terbaik dengan banyaknya pilihan dan persaingan di antara angkatan kerja.

Gambar 2.51
Jumlah Angkatan Kerja pada 8 Kabupaten/Kota dengan Angkatan Kerja Terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2017-2020

Pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi selama tahun 2017 hingga 2019 secara umum terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sumber pendapatan daerah yang secara konsisten mengalami peningkatan adalah transfer pemerintah pusat dan lain-lain PAD yang sah, khususnya pendapatan yang bersumber dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam pemerintah pusat, dana penyesuaian, bagi hasil pajak pemerintah provinsi, bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya, serta hibah. Namun, meledaknya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia menyebabkan perekonomian daerah dan nasional tidak berjalan dengan baik, yang pada akhirnya ikut mempengaruhi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi di tahun tersebut.

Pada tahun 2020, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 2,01%, sejalan dengan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah ke angka -3,3%. Baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer daerah masing-masing mengalami penurunan di tahun 2020, yakni sebesar 2,26% untuk pendapatan asli daerah, dan 3,3% untuk pendapatan transfer. Hanya lain-lain pendapatan daerah yang sah yang justru mengalami peningkatan sebesar 13,9%.

Pendapatan asli daerah mengalami penurunan akibat menurunnya pendapatan pajak daerah sebesar 1,36%, retribusi daerah sebesar 2,92%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 43,42%, serta lain-lain PAD yang sah sebesar 3,3%. Pada pendapatan transfer pemerintah pusat, sumber pendapatan yang mengalami penurunan adalah dana alokasi umum serta dana alokasi khusus fisik dan non fisik dengan masing-masing penurunan sebesar 9,37%, 74,92%, dan 1,7%. Selain itu, pos pendapatan transfer lainnya yang juga mengalami penurunan adalah pendapatan bagi hasil pajak dengan penurunan sebesar 13,2%. Selain sumber pendapatan tersebut, pos-pos lainnya masih tetap mengalami peningkatan di tahun 2020. Meski secara umum mengalami penurunan di tahun 2020, namun pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun 2017-2020 tumbuh positif dengan rata-rata sebesar 3,75%.



Bila dilihat dari realisasinya selama tahun 2017-2020, persentase rata-rata realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat dikategorikan baik dengan nilai sebesar 101,02%. Persentase realisasi pendapatan daerah di bawah 100% hanya terjadi di tahun 2017 dengan persentase realisasi sebesar 98,47%. Adapun penyebab tidak tercapainya target pendapatan daerah selama tahun 2017-2020 sebagian besar disebabkan oleh pendapatan transfer daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah yang besarnya sulit diprediksi karena bersumber dari dana pemerintah pusat, provinsi, atau pemerintah daerah lainnya. Pada pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan yang berfluktuasi di bawah 100% terjadi pada pendapatan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan persentase rata-rata realisasinya masing-masing sebesar 82,72% dan 74,69%.

Tabel 3.1
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2020

| No. | Uraian | % Realisasi | | | | % Rata-Rata Realisasi |
|-----|--|-------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| I. | PENDAPATAN | 98,47% | 101,16% | 103,17% | 101,27% | 101,02% |
| A. | Pendapatan Asli Daerah | 104,81% | 104,75% | 113,62% | 109,49% | 108,17% |
| 1. | Pajak daerah | 104,18% | 108,62% | 116,49% | 110,96% | 110,06% |
| 2. | Retribusi daerah | 102,37% | 69,81% | 74,80% | 83,89% | 82,72% |
| 3. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 100,00% | 60,34% | 86,04% | 52,39% | 74,69% |
| 4. | Lain-lain PAD yang sah | 107,91% | 118,63% | 126,61% | 121,13% | 118,57% |
| B. | Pendapatan Transfer | 93,56% | 98,82% | 96,18% | 95,40% | 95,99% |
| | Transfer Pemerintah Pusat | | | | | |
| 1. | Bagi hasil pajak | 77,36% | 91,71% | 68,65% | 103,23% | 85,24% |
| 2. | Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam | 103,83% | 123,78% | 85,16% | 164,81% | 119,39% |
| 3. | Dana alokasi umum | 100,00% | 100,00% | 99,89% | 99,66% | 99,89% |
| 4. | Dana alokasi khusus | 77,00% | 87,96% | 86,63% | 87,87% | 84,86% |
| 5. | Dana alokasi khusus non fisik | 85,67% | 94,18% | 105,50% | 102,64% | 97,00% |
| | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | | | | | |
| 6. | Dana penyesuaian | 100,00% | 93,82% | 100,00% | 100,00% | 98,45% |
| | Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | | | | | |
| 7. | Pendapatan bagi hasil pajak | 99,43% | 105,25% | 102,28% | 82,11% | 97,27% |
| | Bantuan Keuangan | | | | | |
| 8. | Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya | 54,18% | 90,72% | 96,98% | 73,63% | 78,88% |
| C. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 104,09% | 99,33% | 99,81% | 100,39% | 100,91% |
| 1. | Hibah | 104,09% | 99,33% | 99,81% | 100,39% | 100,91% |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Di sisi pengeluaran daerah, sebagaimana halnya pendapatan daerah selama tahun 2017-2019, realisasi belanja dan transfer daerah selama kurun waktu tersebut juga mengalami peningkatan. Peningkatan konsisten yang terjadi pada belanja daerah adalah belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Sementara pada transfer daerah, peningkatan terus terjadi pada transfer bagi hasil pajak daerah dan transfer bantuan keuangan ke desa seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Sebaliknya pada pengeluaran pembiayaan khususnya penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, realisasinya justru mengalami penurunan.

Pada tahun 2020, dengan merebaknya wabah Covid-19 dan kebijakan pembatasan, kekhawatiran akan penyebaran Covid-19, serta refocusing yang dilakukan oleh pemerintah telah menyebabkan program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, yang akhirnya berpengaruh pada realisasi belanja daerah tahun 2020, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal. Secara umum, realisasi belanja daerah di tahun 2020 adalah sebesar 81,55%. Pada belanja operasi, realisasi belanja barang dan jasa hanya sebesar 77,42%. Sedangkan pada belanja pegawai, hibah dan bantuan sosial masing-masing realisasinya sebesar 91,5%, 95,86% dan 99,22% sehingga secara keseluruhan realisasi belanja operasi adalah sebesar 84,51%. Pada belanja modal dengan realisasi sebesar 76,91%, pos belanja modal yang paling rendah realisasinya adalah belanja modal tanah dengan realisasi sebesar 58,95%. Selanjutnya adalah belanja modal peralatan dan mesin sebesar 74,26%, serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 75,58%. Belanja modal lainnya, yakni belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal aset tetap lainnya dapat terealisasi di atas 80% dengan masing-masing realisasinya sebesar 85,38% dan 83,83%. Sedangkan belanja tidak terduga hanya terealisasi sebesar 53,66%.

Berdasarkan persentase rata-rata realisasinya selama tahun 2017-2020, pos belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan yang rata-rata realisasinya di bawah 70% adalah belanja modal tanah dengan realisasi sebesar 60,36%, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya sebesar 60%, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebesar 33,33%, serta belanja tidak terduga yang hanya sebesar 13,85%. Pada penyertaan modal, rendahnya rata-rata realisasi tersebut dikarenakan anggaran yang dialokasikan di tahun 2017, 2019, dan 2020 hanya terealisasi di tahun 2017 dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp.10.000.000.000,00 kepada PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.



Tabel 3.2
Persentase Realisasi Pengeluaran Daerah Tahun 2017-2020

| NO. | URAIAN | % Realisasi | | | | % Rata-Rata Realisasi |
|------|--|-------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| I. | BELANJA | 82,04% | 82,08% | 84,50% | 81,55% | 82,54% |
| A. | Belanja Operasi | 84,96% | 84,72% | 87,02% | 84,51% | 85,30% |
| 1. | Belanja Pegawai | 91,26% | 87,65% | 88,80% | 91,50% | 89,80% |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 78,63% | 81,25% | 85,11% | 77,42% | 80,60% |
| 3. | Belanja Bunga | - | - | - | - | - |
| 4. | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| 5. | Belanja Hibah | 97,95% | 95,31% | 96,24% | 95,86% | 96,34% |
| 6. | Belanja Bantuan Sosial | 93,53% | 0,00% | 100,00% | 99,22% | 73,19% |
| B. | Belanja Modal | 80,06% | 73,91% | 78,37% | 76,91% | 77,31% |
| 1. | Belanja Modal Tanah | 38,80% | 76,52% | 67,17% | 58,95% | 60,36% |
| 2. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 71,35% | 72,43% | 73,99% | 74,26% | 73,01% |
| 3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 91,71% | 67,20% | 88,39% | 85,38% | 83,17% |
| 4. | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 83,70% | 78,18% | 78,28% | 75,58% | 78,94% |
| 5. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 98,80% | 92,36% | 79,15% | 83,83% | 88,53% |
| C. | Belanja Tidak Terduga | 0,03% | 0,23% | 1,50% | 53,66% | 13,85% |
| | | | | | | |
| II. | TRANSFER | 93,58% | 99,79% | 99,70% | 100,00% | 98,27% |
| A. | Transfer Bagi Hasil Pendapatan | | | | | |
| 1. | Transfer Bagi hasil Pajak Daerah | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2. | Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| B. | Transfer Bantuan Keuangan | | | | | |
| 1. | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 60,00% | - | - | - | 60,00% |
| 2. | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 99,49% | 99,70% | 99,62% | 100,00% | 99,70% |
| 3. | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 100,00% | 100,00% | 88,35% | 100,00% | 97,09% |
| | | | | | | |
| III. | PEMBIAYAAN | | | | | |
| A. | Pengeluaran Pembiayaan | 100,00% | - | 0,00% | 0,00% | 33,33% |
| 1. | Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah | 100,00% | - | 0,00% | 0,00% | 33,33% |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Walaupun beberapa pos belanja mengalami penurunan di tahun 2020, namun belanja daerah selama tahun 2017-2020 secara umum mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,25%. Belanja daerah yang mengalami pertumbuhan positif adalah belanja operasi dan belanja tidak terduga dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,44% dan 9.507,5%.



Sedangkan belanja modal justru mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan -10,02%. Sementara pada transfer daerah juga mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,46%. Pada belanja transfer, pos yang mengalami rata-rata pertumbuhan positif adalah transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bantuan keuangan ke desa, dan transfer bantuan keuangan lainnya. Pada pembiayaan daerah, sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,19%. Untuk lebih jelasnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

| No. | Uraian | Realisasi Tahun | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| I. | PENDAPATAN | 4.992.469.141.323,00 | 5.194.984.158.385,00 | 5.672.557.868.226,00 | 5.558.320.615.381,00 | 3,75 |
| A. | Pendapatan Asli Daerah | 2.311.805.849.243,00 | 2.094.369.342.687,00 | 2.439.368.558.406,00 | 2.384.139.484.622,00 | 1,60 |
| 1. | Pajak daerah | 1.535.105.690.019,00 | 1.656.040.118.349,74 | 1.974.089.302.900,99 | 1.947.176.150.769,90 | 8,57 |
| 2. | Retribusi daerah | 198.722.834.471,00 | 160.509.553.792,00 | 142.319.843.706,00 | 138.165.874.142,00 | (11,16) |
| 3. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 32.446.456.108,00 | 13.141.610.511,00 | 18.465.103.818,00 | 10.448.020.327,00 | (20,80) |
| 4. | Lain-lain PAD yang sah | 545.530.868.645,00 | 264.678.060.034,26 | 304.494.307.981,01 | 288.349.439.383,10 | (13,91) |
| B. | Pendapatan Transfer | 2.672.335.700.680,00 | 2.830.856.758.608,00 | 2.956.156.189.820,00 | 2.858.640.780.759,00 | 2,35 |
| | Transfer Pemerintah Pusat | | | | | |
| 1. | Bagi Hasil pajak | 354.905.810.546,00 | 382.086.911.056,00 | 291.083.566.213,00 | 366.505.979.510,00 | 3,25 |
| 2. | Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam | 28.567.967.187,00 | 31.877.244.515,00 | 44.968.626.358,00 | 49.789.677.234,00 | 21,12 |
| 3. | Dana alokasi umum | 1.152.893.281.000,00 | 1.152.893.281.000,00 | 1.219.550.987.000,00 | 1.105.266.422.000,00 | (1,20) |
| 4. | Dana alokasi khusus | 37.755.499.000,00 | 21.848.843.841,00 | 36.595.570.839,00 | 9.176.774.870,00 | (16,52) |
| 5. | Dana alokasi khusus non fisik | 274.412.808.392,00 | 314.615.604.754,00 | 300.561.253.166,00 | 295.458.654.086,00 | 2,83 |
| | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | | | | | |
| 6. | Dana penyesuaian | 177.920.113.000,00 | 210.588.680.000,00 | 265.235.826.000,00 | 302.680.682.000,00 | 19,48 |
| | Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | | | | | |
| 7. | Pendapatan bagi hasil pajak | 621.865.741.555,00 | 685.250.393.645,00 | 738.094.679.509,00 | 640.637.963.699,00 | 1,57 |
| | Bantuan Keuangan | | | | | |
| 8. | Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya | 24.014.480.000,00 | 31.695.799.797,00 | 60.065.680.735,00 | 89.124.627.360,00 | 56,62 |
| C. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 8.327.591.400,00 | 269.758.057.090,00 | 277.033.120.000,00 | 315.540.350.000,00 | 1.051,98 |
| 1. | Hibah | 8.327.591.400,00 | 269.758.057.090,00 | 277.033.120.000,00 | 315.540.350.000,00 | 1.051,98 |
| | | | | | | |
| II. | BELANJA | 4.238.252.521.121,00 | 4.435.230.385.026,00 | 4.859.219.628.212,00 | 4.788.228.672.505,00 | 4,25 |
| A. | Belanja Operasi | 3.267.133.001.961,00 | 3.581.559.265.074,00 | 3.903.631.585.467,00 | 3.930.748.299.341,00 | 6,44 |
| 1. | Belanja Pegawai | 1.596.795.641.177,00 | 1.838.786.305.035,00 | 1.914.993.642.754,00 | 1.971.433.588.778,00 | 7,42 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.542.817.532.784,00 | 1.652.582.890.039,00 | 1.936.381.942.713,00 | 1.827.888.146.403,00 | 6,23 |
| 3. | Belanja Bunga | - | - | - | - | - |
| 4. | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |



| No. | Uraian | Realisasi Tahun | | | | Rata-Rata Pertum Buhan (%) |
|------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 5. | Belanja Hibah | 54.001.908.000,00 | 90.190.070.000,00 | 47.256.000.000,00 | 82.679.556.000,00 | 31,46 |
| 6. | Belanja Bantuan Sosial | 73.517.920.000,00 | - | 5.000.000.000,00 | 48.747.008.160,00 | 291,65 |
| B. | Belanja Modal | 971.090.629.160,00 | 853.621.639.952,00 | 954.900.806.872,00 | 670.123.926.245,00 | (10,02) |
| 1. | Belanja Modal Tanah | 52.963.065.025,00 | 101.100.576.140,00 | 108.025.035.159,00 | 33.067.205.391,00 | 9,45 |
| 2. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 179.049.914.686,00 | 182.044.457.690,00 | 203.723.561.303,00 | 234.293.393.370,00 | 9,53 |
| 3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 452.654.527.561,00 | 268.424.256.985,00 | 263.863.992.879,00 | 172.622.388.927,00 | (25,66) |
| 4. | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 230.074.050.613,00 | 229.187.974.673,00 | 329.694.750.204,00 | 176.656.777.702,00 | (0,98) |
| 5. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 56.349.071.275,00 | 72.864.374.464,00 | 49.593.467.327,00 | 53.484.160.855,00 | 1,74 |
| C. | Belanja Tidak Terduga | 28.890.000,00 | 49.480.000,00 | 687.235.873,00 | 187.356.446.919,00 | 9.507,50 |
| III. | TRANSFER | 607.859.833.000,00 | 622.471.211.500,00 | 688.380.030.175,00 | 691.110.221.500,00 | 4,46 |
| A. | Transfer Bagi Hasil Pendapatan | | | | | |
| 1. | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 144.307.400.000,00 | 158.614.000.000,00 | 182.612.097.000,00 | 175.481.767.500,00 | 7,05 |
| 2. | Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 23.438.236.000,00 | 23.454.150.000,00 | 19.027.048.800,00 | 16.469.885.000,00 | (10,75) |
| B. | Transfer Bantuan Keuangan | | | | | |
| 1. | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 59.627.100.000,00 | - | - | - | (33,33) |
| 2. | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 378.959.441.000,00 | 438.345.135.000,00 | 484.891.256.000,00 | 497.015.117.000,00 | 9,60 |
| 3. | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 1.527.656.000,00 | 2.057.926.500,00 | 1.849.628.375,00 | 2.143.452.000,00 | 13,49 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | 146.356.787.202,00 | 137.282.561.859,00 | 124.958.209.839,00 | 78.981.721.376,00 | (17,32) |
| IV. | PEMBIAYAAN | | | | | |
| A. | Penerimaan Pembiayaan | 755.579.815.118,00 | 891.936.602.320,00 | 1.029.219.164.179,00 | 1.154.165.332.192,00 | 15,19 |
| 1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya | 755.579.815.118,00 | 891.936.602.320,00 | 1.029.219.164.179,00 | 1.154.165.332.192,00 | 15,19 |
| B. | Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000.000,00 | - | - | - | (33,33) |
| 2. | Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah | 10.000.000.000,00 | - | - | - | (33,33) |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 745.579.815.118,00 | 891.936.602.320,00 | 1.029.219.164.179,00 | 1.154.165.332.192,00 | 15,72 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, kondisi keuangan daerah dapat diukur melalui 6 (enam) indikator, antara lain:

- 1. Kemandirian keuangan
- 2. Fleksibilitas keuangan
- 3. Solvabilitas operasional
- 4. Solvabilitas jangka pendek
- 5. Solvabilitas jangka panjang
- 6. Solvabilitas layanan

Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Kemandirian

keuangan daerah dapat diukur dengan membagi total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut, hasil perhitungan rasio kemandirian daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi antara tahun 2017-2020 menunjukkan nilai berfluktuasi antara 40%-50% atau masuk ke dalam kategori rendah. Selama kurun waktu tersebut, rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Bekasi antara lain sebesar 46,31% di tahun 2017, 40,32% di tahun 2018, 43% di tahun 2019, dan 42,89% di tahun 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bekasi masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dan hibah dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat.

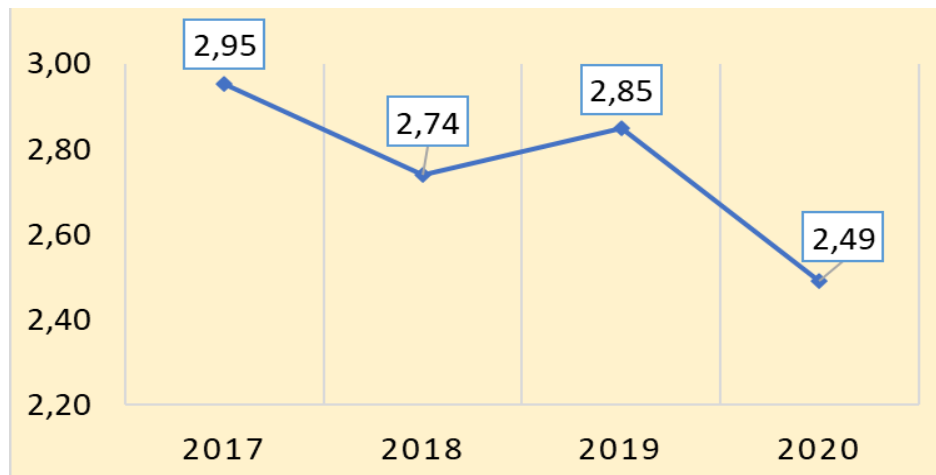
Gambar 3.1
Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2020



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Sementara itu, fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang. Fleksibilitas keuangan diperoleh dengan membagi total pendapatan yang telah dikurangi DAK dengan total kewajiban ditambah belanja pegawai. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh fleksibilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2020 berfluktuasi, yaitu sebesar 2,95 di tahun 2017, kemudian menurun menjadi 2,74 di tahun 2018, naik kembali menjadi 2,85 di tahun 2019, dan jatuh ke angka 2,49 di tahun berikutnya. Meski berfluktuasi, namun nilai fleksibilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang positif menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki kemampuan untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga.

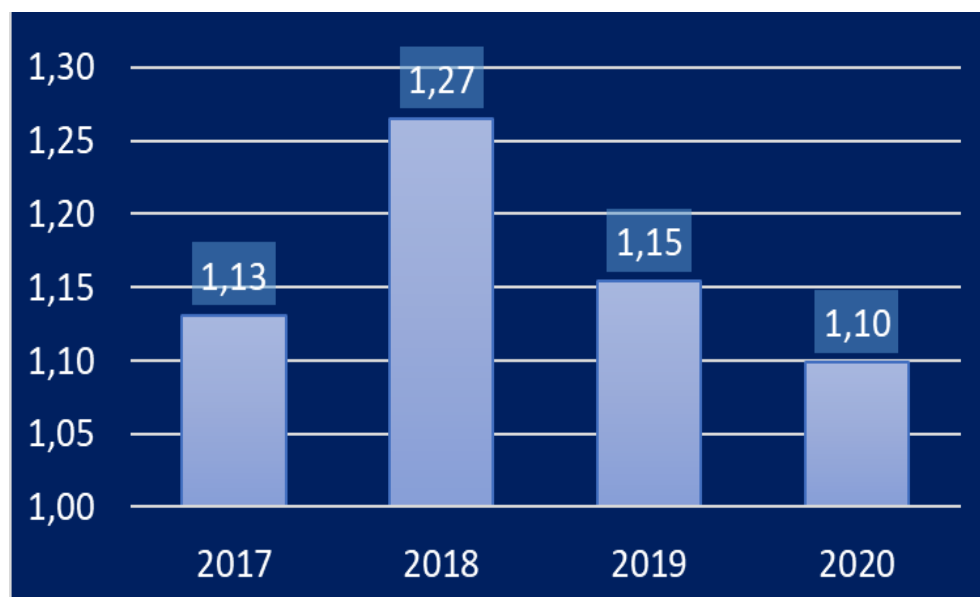
Gambar 3.2
Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2020



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Selanjutnya, solvabilitas operasional adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban pemerintah selama periode anggaran. Nilai solvabilitas operasional diperoleh dengan membagi total pendapatan LO yang telah dikurangi pendapatan DAK LO dengan total beban LO. Selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, nilai solvabilitas operasional Pemerintah Kabupaten Bekasi paling tinggi di tahun 2018 dengan nilai sebesar 1,27 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,13. Nilai solvabilitas operasional Kabupaten Bekasi turun kembali di tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 1,15 dan 1,10.

Gambar 3.3
Solvabilitas Operasional Pemerintah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2020



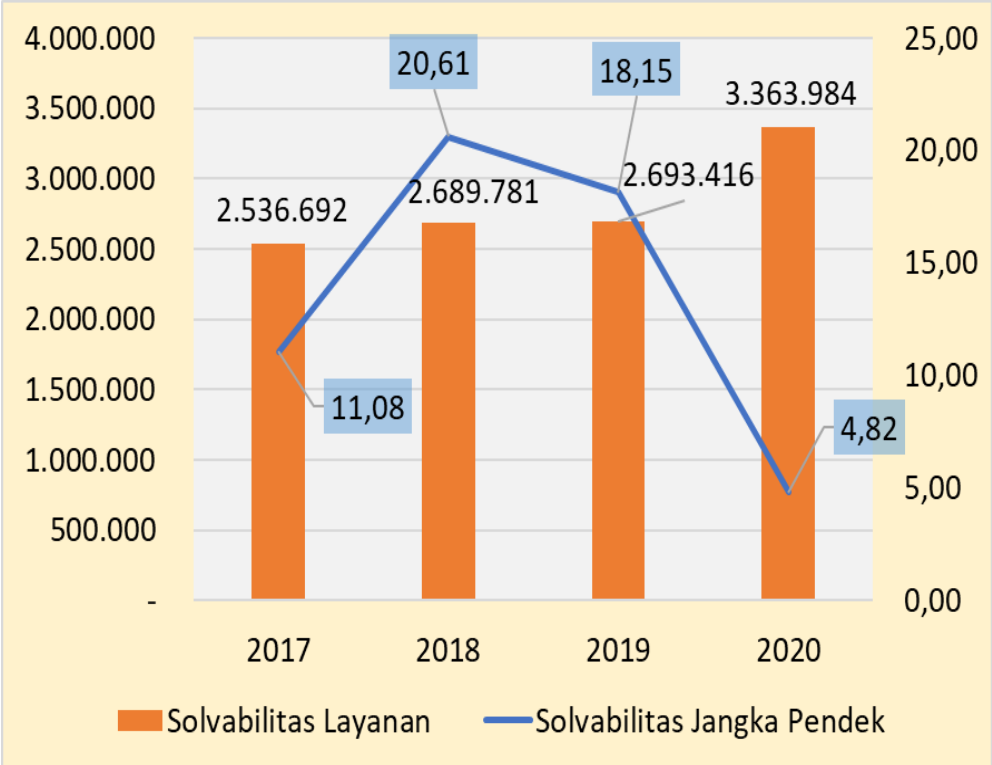
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Indikator lainnya terkait solvabilitas adalah solvabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan layanan. Solvabilitas jangka pendek adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dengan membagi kas dan setara kas yang telah ditambahkan dengan investasi jangka pendek dengan kewajiban lancar. Sedangkan solvabilitas jangka panjang adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang yang diperoleh dengan membagi total aset tetap dengan kewajiban jangka panjang. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memiliki kewajiban jangka panjang sehingga nilai solvabilitas jangka panjang tidak dapat dihitung. Terakhir yaitu solvabilitas layanan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat yang diperoleh dengan membagi total aset tetap dengan jumlah penduduk.

Selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, solvabilitas jangka pendek Pemerintah Kabupaten Bekasi berfluktuasi yaitu sebesar 11,08 di tahun 2017, naik menjadi 20,61 di tahun 2018, turun kembali menjadi 18,15 di tahun 2019, dan turun tajam menjadi 4,82 di tahun 2020. Nilai solvabilitas jangka pendek yang positif menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan uang yang tersedia pada kas dan setara kas serta hasil investasi jangka pendek cukup baik. Meski nilainya menurun jauh di tahun 2020, namun uang yang tersedia pada kas dan setara kas masih 4 kali lipat dari kewajiban jangka pendek yang ada. Walaupun begitu, mengingat uang yang tersedia pada kas saat ini sebagian besar diakibatkan oleh sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) dan bukan hasil investasi atau kelebihan realisasi pendapatan daerah, maka rasio ini harus diperhatikan karena bisa jadi ketika pelaksanaan subkegiatan lebih efektif, nilai SILPA dapat menurun drastis, sehingga rasio solvabilitas jangka pendek Pemerintah Kabupaten Bekasi juga dapat ikut turun lebih jauh terutama bila utang jangka pendeknya tidak berkurang.

Sedangkan solvabilitas layanan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp.2.536.692,- total aset tetap per kapita di tahun 2017 menjadi sebesar Rp.3.363.984,- total aset tetap per kapita di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa nilai aset tetap untuk melayani setiap penduduk semakin besar yang berarti terjadi peningkatan pada pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 3.4
Solvabilitas Jangka Pendek dan Layanan
Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

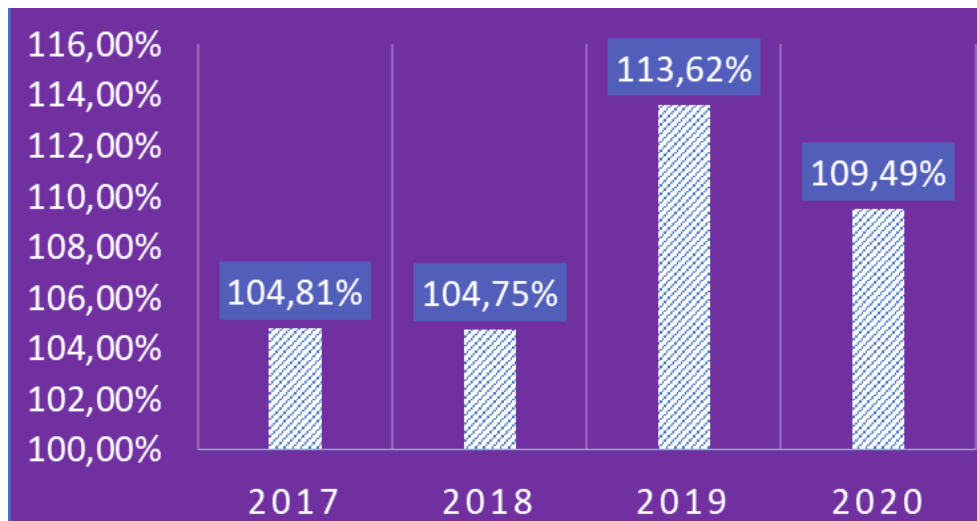


Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Selain 6 (enam) indikator yang telah dijelaskan di atas, juga terdapat indikator lainnya untuk mengukur kondisi keuangan daerah, yakni rasio efektivitas keuangan daerah otonom. Rasio ini merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dengan membagi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah. Nilai kurang dari 100% ($x < 100$) berarti tidak efektif, nilai sama dengan 100% ($x = 100$) berarti efektivitas seimbang, serta nilai lebih dari ($100\% \times x > 100$) berarti efektif.

Berdasarkan hasil realisasi pendapatan asli daerah selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, rasio efektivitas keuangan daerah otonom Kabupaten Bekasi masuk ke dalam kategori efektif karena nilainya selalu lebih dari 100%. Pada tahun 2017, nilainya sebesar 104,81% untuk kemudian turun di tahun berikutnya menjadi sebesar 104,75%. Untuk tahun 2019 rasionya kembali naik menjadi 113,62% dan turun kembali menjadi 109,49%. Rata-rata realisasi pendapatan asli daerah selama tahun 2017-2020 adalah sebesar 108,17%.

Gambar 3.5
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Otonom
Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

3.1.2 Neraca Daerah Tahun 2017-2020

Berdasarkan neraca daerah tahun 2017-2020, jumlah aset Pemerintah Kabupaten Bekasi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dari sebesar Rp.11.567.456.608.776,30 di tahun 2017 menjadi sebesar Rp.13.595.842.526.520,10 di tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,55%. Pos yang secara konsisten mengalami kenaikan adalah aset lancar yang naik dari Rp.1.229.067.154.284,20 di tahun 2017 menjadi Rp.1.787.842.653.899,03 di tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,31%, serta aset tetap yang naik dari Rp.8.878.480.655.131,15 di tahun 2017 menjadi Rp.10.472.138.184.352,50 di tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,7%. Sementara untuk aset lainnya yang selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 naik dari Rp.707.326.985.524,76 menjadi Rp.713.287.712.574,11, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,56% menjadi sebesar Rp.702.194.398.564,11 dengan rata-rata pertumbuhan minus 0,24%. Selain itu, investasi jangka panjang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam bentuk penanaman modal nilainya menurun di tahun 2020 bila dibandingkan pada saldo awal di tahun 2017 dengan nilai sebelumnya sebesar Rp.752.581.813.836,17. Rata-rata pertumbuhan nilai investasi jangka panjang tersebut adalah minus 5,08%. Turunnya nilai investasi jangka panjang ini disebabkan karena beberapa perusahaan milik daerah tempat berinvestasi sudah tidak lagi beroperasi, antara lain: LPK Jati Asih, LPK Babelan, LPK Bantar Gebang, dan LPK



Cikarang, serta dua perusahaan lainnya, yakni PT Bumi Bekasi Jaya dan PT Bekasi Putera Jaya sedang dalam proses pembubaran dan likuidasi.

Sementara pada sisi kewajiban, kewajiban pemerintah daerah yang telah turun dari 80.528.149.229,33 menjadi 49.934.766.029,30 di tahun 2018 terus mengalami peningkatan di tahun 2019 dan 2020, yakni dari 63.605.945.571,35 di tahun 2019 menjadi sebesar 256.106.140.295,41 di tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2017-2020 sebesar 97,34%. Hal ini disebabkan oleh kewajiban jangka pendek, terutama beban utang yang di tahun 2020 meningkat drastis menjadi sebesar Rp.215.058.627.473,64 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 251,05%. Sementara pada kewajiban jangka panjang, tercatat selama kurun waktu tersebut Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2017-2020 dapat dilihat dengan lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2017-2020

| NO. | URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | RATA- RATA PERTUM- BUHAN (%) |
|-----|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| I. | ASET LANCAR | | | | | |
| A. | KAS | 892.168.867.096,00 | 1.029.219.164.179,00 | 1.154.593.937.653,00 | 1.233.409.336.195,00 | 11,46 |
| | Kas di kas daerah | 816.956.181.090,00 | 933.764.850.907,00 | 1.042.219.537.407,00 | 1.124.156.896.022,00 | 11,26 |
| | Kas di bendahara penerimaan | - | - | - | - | |
| | Kas di bendahara pengeluaran | 101.000,00 | 18.156.179,00 | 10,00 | - | 5.892,14 |
| | Kas di BLUD | 2.840.625.329,00 | 6.569.255.128,00 | 76.751.718.392,00 | 87.275.494.704,00 | 404,44 |
| | Kas di bendahara FKTP | 66.471.229.539,00 | 74.690.583.053,00 | - | - | (29,21) |
| | Kas di bendahara BOS | 5.659.349.164,00 | 13.616.273.287,00 | 33.834.988.262,00 | 21.260.398.138,00 | 83,97 |
| | Kas lainnya di bendahara pengeluaran | 239.880.974,00 | 3.169.752,00 | 207.354,00 | 6.958,00 | (96,26) |
| | Kas lainnya di bendahara FKTP | 1.500.000,00 | 3.880.014,00 | - | - | 19,56 |
| | Kas lainnya di BLUD | - | - | 4.003.014,00 | - | (33,33) |
| | Kas lainnya di bendahara dan BOS | - | 552.995.859,00 | 1.783.483.214,00 | 716.540.373,00 | 87,56 |
| | Setara kas | - | - | - | - | |
| B. | INVESTASI JANGKA PENDEK | - | - | - | - | |
| C. | PIUTANG PENDAPATAN | 634.027.797.195,61 | 685.096.854.584,85 | 810.342.286.706,86 | 944.477.970.305,96 | 14,30 |
| | Piutang pajak daerah | 584.273.266.570,61 | 640.465.655.771,85 | 721.514.172.394,86 | 797.142.416.341,96 | 10,92 |
| | Piutang retribusi | 102.096.453,00 | 102.096.453,00 | 2.564.287.713,00 | 5.441.216.617,00 | 841,27 |
| | Piutangsil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | - | 8.638.097.522,00 | 11.500.000.000,00 | 20.926.288.596,00 | 71,70 |
| | Piutang lain-lain pad yang sah | 2.335.602.852,00 | 2.781.494.617,00 | 13.823.161.481,00 | 4.521.684.717,00 | 116,26 |
| | Piutang pendapatan lainnya | - | - | - | 2.159.508.680,00 | 33,33 |
| | Piutang transfer pemerintah pusat | 10.088.143.499,00 | - | 23.014.162.372,00 | 75.613.629.911,00 | 76,18 |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| NO. | URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) |
|------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Piutang transfer pemerintah daerah lainnya | 37.228.687.821,00 | 33.109.510.221,00 | 37.926.502.746,00 | 38.673.225.443,00 | 1,82 |
| D. | PIUTANG LAINNYA | 18.447.162.720,85 | 21.161.115.793,00 | 3.081.365.292,00 | 974.276.600,00 | (46,37) |
| E. | PENYISIHAN PIUTANG | (353.030.366.401,69) | (390.496.125.946,15) | (426.817.572.895,63) | (475.890.129.093,63) | 10,47 |
| F. | BEBAN DIBAYAR DIMUKA | 254.720.547,95 | 316.356.164,39 | 389.050.096,56 | 485.334.699,55 | 23,97 |
| G. | PERSEDIAAN | 37.198.973.125,48 | 51.367.745.325,93 | 59.921.926.604,41 | 84.385.865.192,15 | 31,86 |
| | JUMLAH ASET LANCAR | 1.229.067.154.284,20 | 1.396.665.110.101,02 | 1.601.510.993.457,20 | 1.787.842.653.899,03 | 13,31 |
| | | | | | | |
| II. | INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | | |
| A. | INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN | | | | | |
| | Investasi jangka panjang kepada entitas lainnya | - | - | - | - | - |
| | Investasi dalam obligasi | - | - | - | - | - |
| | Investasi dalam proyek pembangunan | - | - | - | - | - |
| | Dana bergulir | 2.454.941.840,00 | 2.397.316.510,00 | 2.370.651.000,00 | 2.333.609.350,00 | (1,67) |
| | Deposito jangka panjang | - | - | - | - | - |
| | Investasi non permanen lainnya | - | - | - | - | - |
| | Penyisihan dana bergulir | (2.454.941.840,00) | (2.397.316.510,00) | (2.370.651.000,00) | (2.333.609.350,00) | (1,67) |
| | JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NONPERMANEN | - | - | - | - | - |
| B. | INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN | | | | | |
| | Investasi jangka panjang permanen | - | - | - | - | - |
| | Penyertaan modal pemerintah daerah | 752.581.813.836,17 | 614.398.932.043,87 | 619.345.356.023,95 | 633.667.289.704,52 | (5,08) |
| | Investasi permanen lainnya | - | - | - | - | - |
| | Jumlah investasi jangka panjang permanen | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 752.581.813.836,17 | 614.398.932.043,87 | 619.345.356.023,95 | 633.667.289.704,52 | (5,08) |
| | | | | | | |
| III. | ASET TETAP | | | | | |
| | Tanah | 3.009.120.190.257,14 | 3.434.806.745.877,14 | 3.550.191.096.624,14 | 3.586.316.442.470,14 | 6,17 |
| | Peralatan dan mesin | 1.100.515.027.344,58 | 1.268.716.232.857,72 | 1.436.380.357.465,33 | 1.730.045.578.161,30 | 16,31 |
| | Gedung dan bangunan | 3.450.344.025.116,92 | 3.749.212.243.671,74 | 3.976.904.463.925,73 | 4.136.146.149.606,42 | 6,25 |
| | Jalan, irigasi, dan jaringan | 4.691.151.743.302,41 | 4.917.232.806.798,81 | 4.798.313.936.538,23 | 4.989.850.390.585,98 | 2,13 |
| | Aset tetap lainnya | 182.809.074.175,57 | 236.074.301.481,41 | 274.393.661.133,22 | 296.367.747.553,32 | 17,79 |
| | Konstruksi dalam pengerjaan | 119.598.615.992,07 | 72.671.122.238,57 | 39.897.369.916,50 | 37.217.325.067,50 | (30,35) |
| | Akumulasi penyusutan dan | (3.675.058.021.057,55) | (3.912.368.087.804,79) | (3.938.370.207.195,42) | (4.303.805.449.092,17) | 5,47 |
| | JUMLAH ASET TETAP | 8.878.480.655.131,15 | 9.766.345.365.120,61 | 10.137.710.678.407,70 | 10.472.138.184.352,50 | 5,70 |
| | | | | | | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| NO. | URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | RATA- RATA PERTUM- BUHAN (%) |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| IV. | DANA CADANGAN | | | | | |
| | Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH DANA CADANGAN | - | - | - | - | - |
| V. | ASET LAINNYA | | | | | |
| | Tagihan jangka panjang | 1.292.021.074,57 | 137.397.000,00 | 41.864.000,00 | 226.932.300,00 | 94,39 |
| | Kemitraan dengan pihak ketiga | 108.639.760.600,00 | 111.503.487.600,00 | 111.503.487.600,00 | 111.503.487.600,00 | 0,88 |
| | Aset tidak berwujud | 4.347.015.320,00 | 4.926.542.000,00 | 4.646.735.540,00 | 4.781.275.540,00 | 3,52 |
| | Aset lain-lain | 621.893.144.172,36 | 653.909.603.777,35 | 668.498.230.965,35 | 657.591.985.215,35 | 1,92 |
| | Akumulasi amortisasi aset tak berwujud | (2.645.313.905,00) | (3.829.204.085,00) | (3.775.248.560,00) | (4.281.925.120,00) | 18,92 |
| | Akumulasi penyusutan aset lainnya | (26.199.641.737,17) | (57.220.076.903,24) | (67.627.356.971,24) | (67.627.356.971,24) | 45,53 |
| | JUMLAH ASET LAINNYA | 707.326.985.524,76 | 709.427.749.389,11 | 713.287.712.574,11 | 702.194.398.564,11 | (0,24) |
| | JUMLAH ASET | 11.567.456.608.776,30 | 12.486.837.156.654,60 | 13.071.854.740.463,00 | 13.595.842.526.520,10 | 5,55 |
| VI. | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | | |
| | Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) | - | - | 428.605.461,00 | 262.282.627,00 | 20,40 |
| | Utang bunga | - | - | - | - | - |
| | Bagian lancar utang jangka panjang | - | - | - | - | - |
| | Pendapatan diterima dimuka | 32.647.861.040,33 | 26.499.645.925,30 | 24.447.714.689,35 | 24.098.640.944,78 | (9,33) |
| | Utang beban | 7.458.002.054,00 | 20.584.569.404,00 | 35.592.046.874,00 | 215.058.627.473,64 | 251,05 |
| | Utang jangka pendek lainnya | 40.422.286.135,00 | 2.850.550.700,00 | 3.137.578.547,00 | 16.686.589.249,99 | 116,32 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 80.528.149.229,33 | 49.934.766.029,30 | 63.605.945.571,35 | 256.106.140.295,41 | 97,34 |
| VII. | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | |
| | Utang dalam negeri | - | - | - | - | - |
| | Utang jangka panjang lainnya | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 80.528.149.229,33 | 49.934.766.029,30 | 63.605.945.571,35 | 256.106.140.295,41 | 97,34 |
| VIII. | EKUITAS | 11.486.928.459.546,90 | 12.436.902.390.625,30 | 13.008.248.794.891,60 | 13.339.736.386.224,70 | 5,14 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 11.567.456.608.776,30 | 12.486.837.156.654,60 | 13.071.854.740.463,00 | 13.595.842.526.520,10 | 5,55 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020

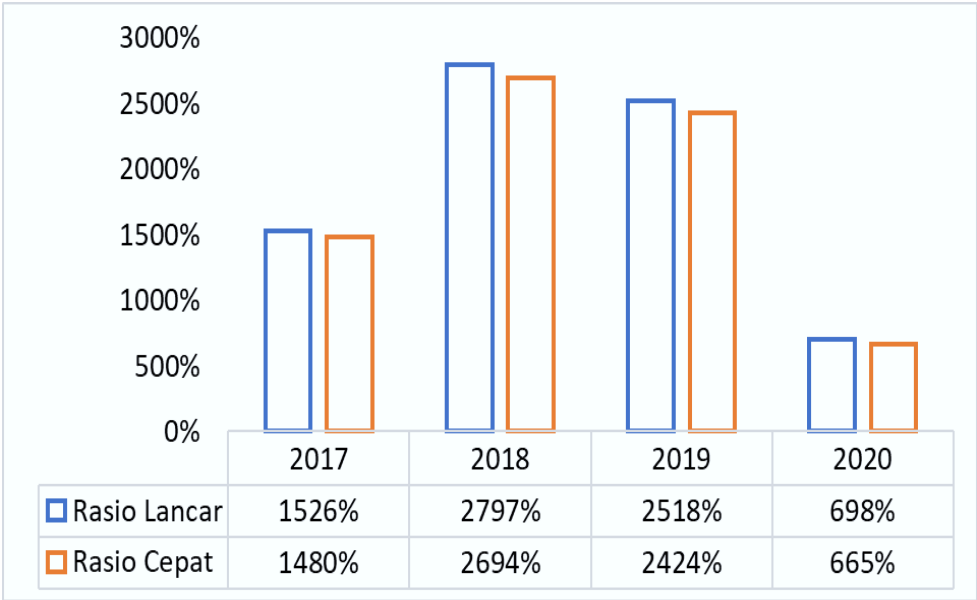
Adapun untuk mengukur likuiditas keuangan daerah tahun 2017-2020, digunakan rasio likuiditas yang dibagi ke dalam dua metode pengukuran, yakni rasio lancar dan rasio cepat. Rasio likuiditas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang atau kewajiban jangka pendeknya

atau yang segera jatuh tempo ketika ditagih seluruhnya. Rasio lancar diperoleh dengan membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar atau kewajiban jangka pendek yang dimiliki perusahaan, sementara rasio cepat diperoleh dengan membandingkan antara aset lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar atau kewajiban jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Standar industri untuk rasio lancar adalah 2 kali atau perusahaan dengan rasio lancar 200% (2:1) sudah dianggap baik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Untuk rasio cepat, standar industrinya adalah 1,5 kali atau perusahaan dengan rasio 150% sudah dianggap baik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh rasio lancar Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2017 sebesar 1.526%, 2.797% untuk tahun 2018, 2.518% untuk tahun 2019, dan menurun menjadi sebesar 698% di tahun 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa likuiditas Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membayar kewajiban jangka pendek sangat baik, dimana di tahun 2020 Rp.1 kewajiban jangka pendek dijamin dengan Rp.69.800,- aset lancar.

Demikian pula pada rasio cepat. Rasio cepat Pemerintah Kabupaten Bekasi selama 4 tahun terakhir juga masuk ke dalam kategori baik karena melebihi standar rasio industri. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, rasio cepat Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebesar 1.480%, 2.694%, 2.424%, dan 665%. Penurunan rasio lancar dan cepat yang terjadi di tahun 2020 terjadi akibat meningkatnya utang beban secara drastis. Selain itu, meski rasio lancar dan cepat Pemerintah Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori baik, namun hal lain yang harus menjadi catatan dan perhatian adalah bahwa besarnya aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi selama 4 tahun terakhir tidak hanya bersumber dari kelebihan realisasi pendapatan asli daerah semata, namun salah satunya juga disebabkan oleh belanja daerah yang tidak direalisasikan sehingga menimbulkan SILPA. Hal ini juga berarti bahwa meski rasio lancar dan cepat bisa dikategorikan sangat baik karena sangat jauh melampaui standar, namun tidak dapat menggambarkan secara riil kemampuan pembayaran utang jangka pendek yang sesungguhnya karena apabila semua belanja yang telah direncanakan direalisasikan seluruhnya, maka nilai aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi akan ikut turun.

Gambar 3.6
Rasio Lancar dan Cepat Pemerintah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2020

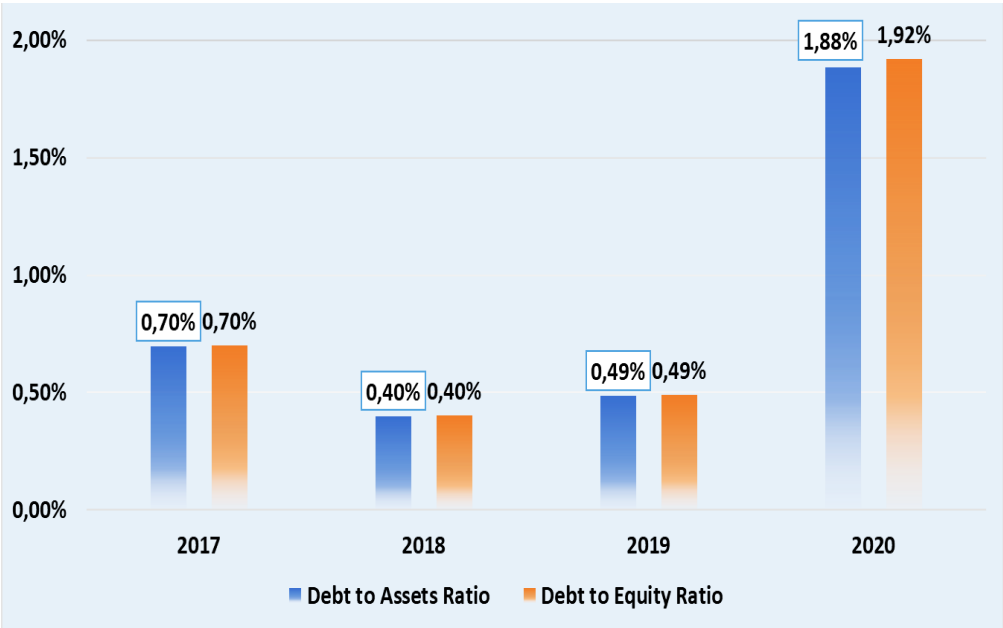


Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Berikutnya disamping rasio solvabilitas yang telah disebutkan sebelumnya, metode pengukuran rasio solvabilitas lainnya yang digunakan adalah rasio utang terhadap aset (*debt to assets ratio*), serta rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*). Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan perusahaan untuk membayar seluruh utangnya dengan aset yang dimilikinya. Standar industri untuk rasio utang terhadap aset adalah sebesar 35%, sementara untuk rasio utang terhadap ekuitas adalah sebesar 80%.

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh data bahwa rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2017-2020 sangat rendah dan berada di bawah standar industri, yakni berkisar antara 0,7% sampai dengan 1,92%. Hal ini masuk ke dalam kategori baik karena menandakan bahwa operasional Pemerintah Kabupaten Bekasi selama 4 tahun terakhir tidak dibiayai oleh dana yang diperoleh dari utang. Meski demikian, rasio yang telah menurun di tahun 2018 kembali meningkat di tahun 2019 untuk kemudian kembali meningkat tajam di tahun berikutnya, dari 0,49% ke 1,88% untuk rasio utang terhadap aset dan dari 0,49% ke 1,92% untuk rasio utang terhadap ekuitas. Hal ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Bekasi di tahun 2020.

Gambar 3.7
Rasio Utang terhadap Aset dan Rasio Utang terhadap Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

3.2 Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2022 terbagi ke dalam 3 (tiga) aspek kebijakan, yakni kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan tersebut sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan Pendapatan adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mengingat bahwa pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD dioptimalkan dengan jalan:

- a. Menentukan potensi PAD, baik pajak, retribusi, pendapatan dari BUMD, dan PAD lainya yang sah. Potensi ini menjadi dasar penentuan target pendapatan.
- b. Penguatan kelembagaan agar pungutan PAD menjadi lebih efisien dan efektif.
- c. Upaya intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

- d. Upaya ekstensifikasi sumber-sumber PAD dengan tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Perbaiki administrasi pendapatan.

2. Belanja

Belanja daerah untuk tahun 2017-2022 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman kepada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal dimaksud, belanja daerah harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah diarahkan pada belanja wajib dan belanja yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara umum, kebijakan belanja untuk tahun 2017-2022 adalah peningkatan belanja langsung, terutama belanja modal secara bertahap.

3. Pembiayaan

Anggaran pembiayaan netto diasumsikan sebesar defisit anggaran berjalan sehingga selisih lebih anggaran tahun berjalan bernilai nihil. Penerimaan pembiayaan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan awal tahun anggaran yang akan disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI dalam penyusunan Perubahan APBD. Adapun pada pengeluaran pembiayaan tidak dialokasikan anggarannya dengan pertimbangan memperhatikan kondisi riil kapasitas keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Apabila proyeksi pendapatan daerah setelah dikurangi pemenuhan kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung masih terdapat kelebihan (surplus), maka dapat dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan daerah sesuai kebijakan daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah dan pembentukan dana cadangan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Tahun 2017-2020

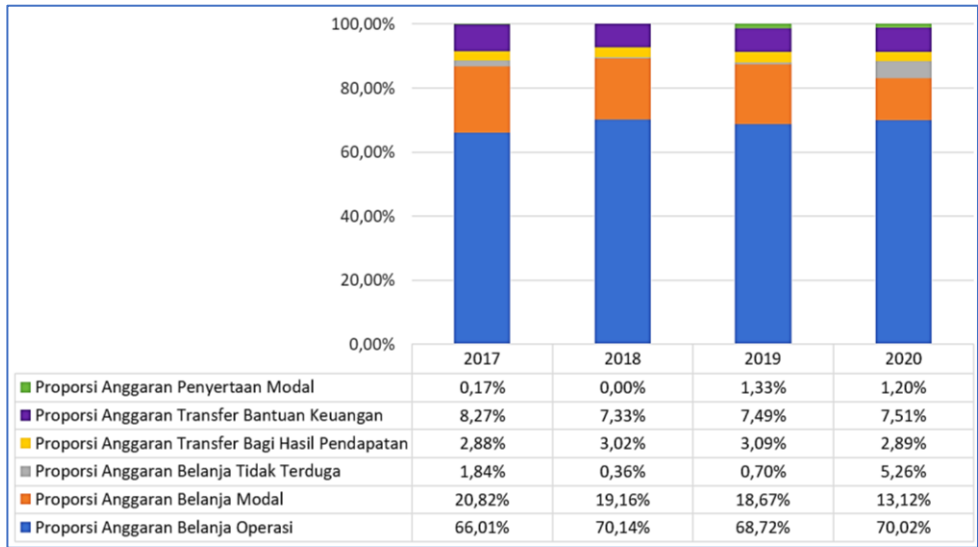
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bekasi selama Tahun 2017-2020 terbagi menjadi 3 jenis pengeluaran, yaitu belanja daerah, transfer daerah, dan pengeluaran pembiayaan. Selama kurun waktu tersebut, proporsi anggaran terbesar dalam pengeluaran daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah untuk membiayai belanja daerah dengan proporsi berkisar antara 88%-89%. Sedangkan belanja transfer, besar jumlahnya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perhitungannya disesuaikan dengan aturan yang ada. Adapun selama kurun waktu yang sama, anggaran untuk transfer daerah berkisar antara 10%-11%. Pengeluaran terakhir, yakni untuk pengeluaran pembiayaan daerah, proporsi anggaran yang diberikan sangat kecil bila dibandingkan anggaran untuk belanja dan transfer daerah, yaitu hanya berkisar antara 0%-1%. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran pembiayaan dialokasikan dengan memperhatikan kondisi riil kapasitas keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Pengeluaran pembiayaan hanya dialokasikan ketika terdapat surplus dalam perkiraan pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran tersebut.

Bila dibagi kembali ke dalam jenis belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan, maka anggaran terbesar dialokasikan untuk belanja operasi dengan proporsi berkisar antara 60%-70%. Alokasi terbesar ke-2 dianggarkan untuk belanja modal dengan besar alokasi yang terus menurun dari 20,82% menjadi 13,12% di tahun 2020 meskipun pada kebijakan sebelumnya diharapkan dapat meningkat secara bertahap setiap tahunnya. Walaupun secara proporsi menurun, namun solvabilitas layanan Pemerintah Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2022 terus meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan nilai aset tetap. Hal ini menunjukkan meski secara proporsi anggaran menurun, namun kemampuan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyediakan dan mempertahankan pelayanan publik untuk masyarakat masih cukup baik dengan adanya peningkatan setiap tahunnya.

Sementara pada transfer daerah, pengeluaran transfer dialokasikan untuk bagi hasil pendapatan dengan besar alokasi berkisar antara 2%-3%, serta bantuan keuangan sebesar 7%-8%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dengan besar alokasi antara 0%-1%. Pada tahun 2018, proporsi anggaran untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah adalah 0% atau tidak dianggarkan sama sekali pada tahun anggaran tersebut. Untuk lebih jelasnya,

proporsi anggaran belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan daerah berdasarkan jenisnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3.8
Proporsi Anggaran Belanja, Transfer, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

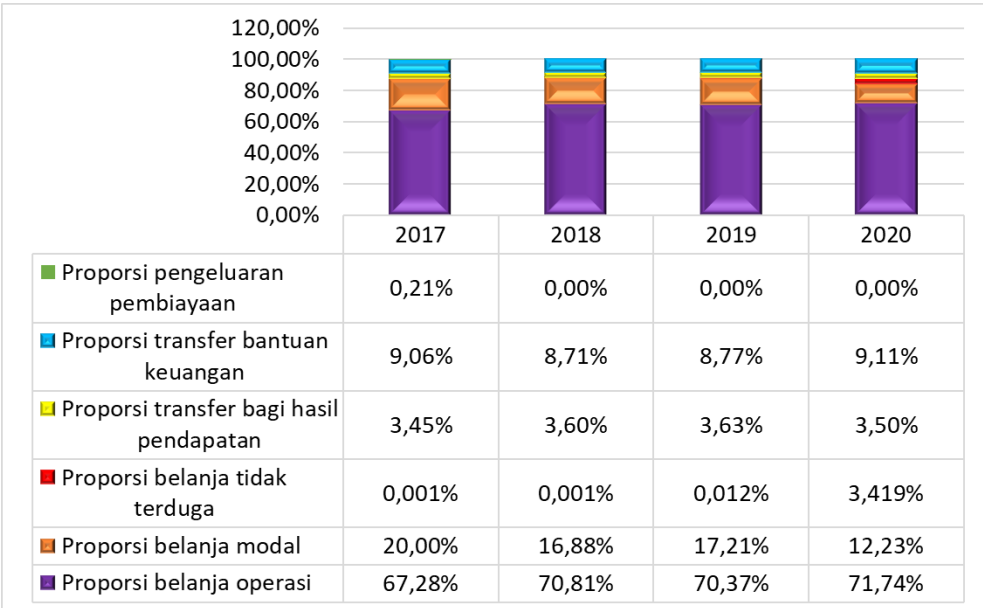


Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Sementara itu, sejalan dengan proporsi anggarannya, proporsi penggunaan anggaran tahun 2017-2020 didominasi oleh belanja operasi dengan proporsi penggunaan berkisar antara 67%-71%. Pada tahun 2017, proporsi belanja operasi terhadap pengeluaran daerah adalah sebesar 67,28% dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 71,74%. Sedangkan distribusi terbesar ke-2 ditempati oleh belanja modal dengan proporsi berkisar antara 12%-20%. Realisasi belanja modal selama 4 tahun terakhir menunjukkan trend menurun dari sebesar 20% di tahun 2017 menjadi hanya sebesar 12,23% di tahun 2020.

Pada belanja tidak terduga, realisasinya selama tahun 2017-2019 berada di bawah 1%. Proporsi realisasi belanja tidak terduga meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 3,4% dengan adanya upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 serta kegiatan bersifat darurat lainnya. Sementara pada transfer bantuan keuangan dan bagi hasil pendapatan, proporsi realisasinya cukup stabil selama 4 tahun ke belakang, yakni berkisar antara 8%-9% untuk transfer bantuan keuangan, dan 3%-3,6% untuk bagi hasil pendapatan. Pada pengeluaran pembiayaan, proporsi realisasinya tercatat sebesar 0,21% di tahun 2017. Sementara untuk 2019 dan 2020, proporsinya 0% akibat tidak jadi dilaksanakannya penyertaan modal yang telah dianggarkan.

Gambar 3.9
Proporsi Realisasi Pengeluaran Daerah
Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Dalam belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebagai penunjang kinerja aparatur, persentasenya dalam total pengeluaran daerah berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017, proporsinya dalam pengeluaran daerah adalah sebesar 61,59% untuk kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi sebesar 63,54% dan kemudian turun kembali di tahun 2019 menjadi sebesar 60,73%, serta naik kembali di tahun 2020 menjadi sebesar 63,94%. Secara umum, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah berkisar antara 60-63%.

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

| No. | Uraian | Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Transfer + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Prosentase |
|-----|--------|---|--|------------------|
| | | (a) | (b) | (a) / (b) x 100% |
| 1. | 2017 | 2.990.666.518.456 | 4.856.112.354.121 | 61,59 |
| 2. | 2018 | 3.213.468.134.926 | 5.057.701.596.526 | 63,54 |
| 3. | 2019 | 3.369.137.748.393 | 5.547.599.658.387 | 60,73 |
| 4. | 2020 | 3.503.524.670.542 | 5.479.338.894.005 | 63,94 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Apabila digali lebih dalam, komposisi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada Pemerintah Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja



modal. Di antara ketiganya, belanja pegawai yang terdiri dari belanja gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan PNS, penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja insentif dan honorarium, serta belanja pegawai BOS dan BLUD memiliki proporsi paling besar dengan persentase rata-rata proporsinya selama tahun 2017-2020 adalah sebesar 56%. Sementara pada belanja barang dan jasa yang terdiri dari belanja jasa kantor, premi asuransi, perawatan, sewa, dan pemeliharaan, serta makan minum, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan, kursus, pelatihan, dan sejenisnya menempati posisi terbesar berikutnya dengan rata-rata proporsi sebesar 15%. Komponen terakhir yakni belanja modal yang terdiri dari peralatan dan mesin, serta bangunan gedung kerja dan tempat tinggal hanya memakan rata-rata proporsi sebesar 15%. Untuk lebih jelasnya, komposisi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada Pemerintah Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
pada Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

| No. | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I. | BELANJA PEGAWAI | 1.596.795.641.177 | 1.838.786.305.035 | 1.914.993.642.754 | 1.971.433.588.778 |
| 1. | Belanja gaji dan tunjangan | 1.010.411.537.478 | 1.018.602.406.753 | 1.045.494.479.956 | 1.034.514.849.553 |
| 2. | Belanja tambahan penghasilan PNS | 415.331.334.874 | 749.422.498.225 | 800.049.273.366 | 798.765.397.680 |
| 3. | Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 7.149.123.739 | 11.550.303.200 | 10.663.970.400 | 12.007.408.860 |
| 4. | Belanja insentif pemungutan pajak daerah | 49.125.120.386 | 52.046.842.993 | 52.582.590.886 | 60.565.411.066 |
| 5. | Belanja insentif pemungutan retribusi daerah | 9.126.400.000 | 6.976.822.364 | 6.018.198.146 | 5.353.656.269 |
| 6. | Belanja honorarium PNS | 92.380.165.700 | 187.431.500 | 23.400.000 | - |
| 7. | Belanja honorarium non PNS | 3.678.462.000 | - | 161.730.000 | 470.630.000 |
| 8. | Belanja pegawai dana BOS | 8.759.225.000 | - | - | 59.756.235.350 |
| 9. | Belanja pegawai BLUD | 834.272.000 | - | - | - |
| II. | BELANJA BARANG DAN JASA | 774.359.122.254 | 925.516.009.716 | 988.686.360.167 | 1.126.183.847.107 |
| 1. | Belanja jasa kantor | 348.314.848.893 | 423.616.998.195 | 475.187.148.852 | 562.037.908.848 |
| 2. | Belanja premi asuransi | 77.298.709.000 | 129.106.490.000 | 120.954.735.474 | 219.961.989.274 |
| 3. | Belanja perawatan kendaraan bermotor | 30.539.093.596 | 24.440.970.652 | 34.095.480.941 | 30.709.917.243 |



| No. | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. | Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir | 26.347.404.900 | 45.901.602.450 | 60.364.947.165 | 27.469.404.700 |
| 5. | Belanja sewa sarana mobilitas | 1.898.948.000 | 2.711.978.200 | 3.778.284.874 | 810.728.000 |
| 6. | Belanja sewa alat berat | 1.002.252.000 | 389.100.000 | 189.500.000 | 166.040.000 |
| 7. | Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor | 7.024.836.425 | 8.326.482.787 | 8.656.874.619 | 4.591.949.695 |
| 8. | Belanja makanan dan minuman | 70.112.816.220 | 90.597.709.962 | 81.174.699.277 | 38.714.844.761 |
| 9. | Belanja pakaian dinas dan atributnya | 2.699.091.700 | 3.387.965.600 | 3.056.974.130 | 1.518.349.450 |
| 10. | Belanja pakaian kerja | 5.036.439.400 | 5.729.141.290 | 6.623.957.979 | 2.502.921.250 |
| 11. | Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 16.888.141.430 | 13.750.034.710 | 12.371.076.892 | 2.365.872.000 |
| 12. | Belanja perjalanan dinas | 72.827.882.235 | 70.059.797.411 | 74.835.620.134 | 62.595.621.085 |
| 13. | Belanja pemeliharaan | 95.601.871.455 | 84.256.034.974 | 82.636.410.832 | 156.411.120.804 |
| 14. | Belanja beasiswa pendidikan PNS | 181.350.000 | 205.622.313 | 104.260.000 | 177.200.000 |
| 15. | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 18.585.437.000 | 23.036.081.172 | 24.656.388.998 | 16.149.979.997 |
| III. | BELANJA MODAL | 619.511.755.025 | 449.165.820.175 | 465.457.745.472 | 405.907.234.657 |
| 1. | Belanja modal peralatan dan mesin | 179.049.914.686 | 182.044.457.690 | 203.723.561.303 | 234.293.393.370 |
| 2. | Belanja modal bangunan gedung tempat kerja | 439.578.170.339 | 266.337.303.485 | 261.734.184.169 | 171.613.841.287 |
| 3. | Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal | 883.670.000 | 784.059.000 | - | - |
| | Jumlah I + II + III | 2.990.666.518.456 | 3.213.468.134.926 | 3.369.137.748.393 | 3.503.524.670.542 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Selain kebutuhan aparatur, pengeluaran wajib dan mengikat atau pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota DPRD dan pengeluaran lainnya terbagi ke dalam kelompok belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Selama tahun 2017-2020, rata-rata proporsi realisasi belanja pegawai yang wajib dan mengikat adalah sebesar 35% dari total realisasi pengeluaran daerah. Sedangkan rata-rata proporsi realisasi belanja barang dan jasa adalah sebesar 18%. Secara keseluruhan, rata-rata proporsi realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebesar 53%. Meski begitu, proporsi tersebut belum



menghitung belanja air, listrik, telepon serta belanja yang telah diarahkan oleh Pemerintah Pusat yang juga tidak dapat diabaikan sehingga proporsi pengeluaran wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat lebih besar dibandingkan nilai yang disajikan.

Tabel 3.7
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Pemerintah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2020

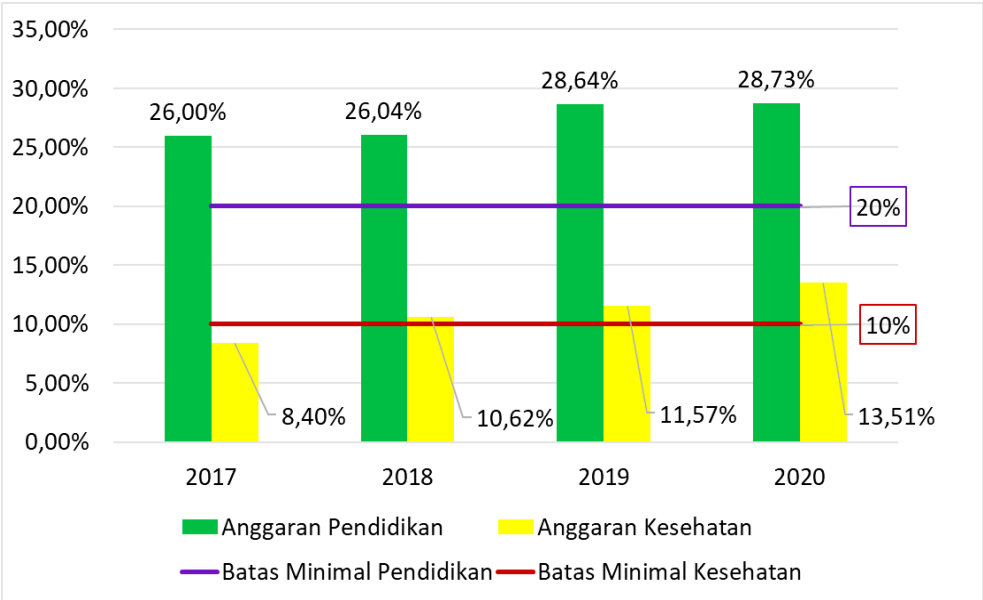
| No. | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-Rata Proporsi dalam Realisasi Pengeluaran Daerah |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| I. | BELANJA PEGAWAI | 1.596.795.641.177 | 1.838.786.305.035 | 1.914.993.642.754 | 1.971.433.588.778 | 35% |
| 1. | Belanja gaji dan tunjangan | 1.010.411.537.478 | 1.018.602.406.753 | 1.045.494.479.956 | 1.034.514.849.553 | |
| 2. | Belanja tambahan penghasilan PNS | 415.331.334.874 | 749.422.498.225 | 800.049.273.366 | 798.765.397.680 | |
| 3. | Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 7.149.123.739 | 11.550.303.200 | 10.663.970.400 | 12.007.408.860 | |
| 4. | Belanja insentif pemungutan pajak daerah | 49.125.120.386 | 52.046.842.993 | 52.582.590.886 | 60.565.411.066 | |
| 5. | Belanja insentif pemungutan retribusi daerah | 9.126.400.000 | 6.976.822.364 | 6.018.198.146 | 5.353.656.269 | |
| 6. | Belanja honorarium PNS | 92.380.165.700 | 187.431.500 | 23.400.000 | - | |
| 7. | Belanja honorarium non PNS | 3.678.462.000 | - | 161.730.000 | 470.630.000 | |
| 8. | Belanja pegawai dana BOS | 8.759.225.000 | - | - | 59.756.235.350 | |
| 9. | Belanja pegawai BLUD | 834.272.000 | - | - | - | |
| II. | BELANJA BARANG DAN JASA | 774.359.122.254 | 925.516.009.716 | 988.686.360.167 | 1.126.183.847.107 | 18% |
| 1. | Belanja jasa kantor | 348.314.848.893 | 423.616.998.195 | 475.187.148.852 | 562.037.908.848 | |
| 2. | Belanja premi asuransi | 77.298.709.000 | 129.106.490.000 | 120.954.735.474 | 219.961.989.274 | |
| | Jumlah I + II | 2.371.154.763.431 | 2.764.302.314.751 | 2.903.680.002.921 | 3.097.617.435.885 | 53% |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Disamping pengeluaran wajib dan mengikat di atas, proporsi anggaran fungsi pendidikan yang harus dianggarkan paling sedikit 20% dari belanja daerah, serta anggaran kesehatan yang juga harus dianggarkan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama tahun 2017-2020 telah dianggarkan dengan rata-rata proporsi terhadap total pengeluaran daerah sebesar 27,35% dan rata-rata realisasi sebesar 91,07%. Sementara rata-rata proporsi anggaran kesehatan tanpa menghitung gaji dan tunjangan pegawai

adalah sebesar 11,03% dengan trend meningkat dan rata-rata realisasinya sebesar 79,88%. Meski demikian, harus juga diketahui bahwa proporsi tersebut hanya memperhitungkan anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah atau belum memperhitungkan belanja modal urusan pendidikan dan kesehatan yang ada pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sehingga proporsi riilnya akan lebih besar dibandingkan dengan proporsi anggaran pendidikan dan kesehatan yang ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 3.10
Proporsi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

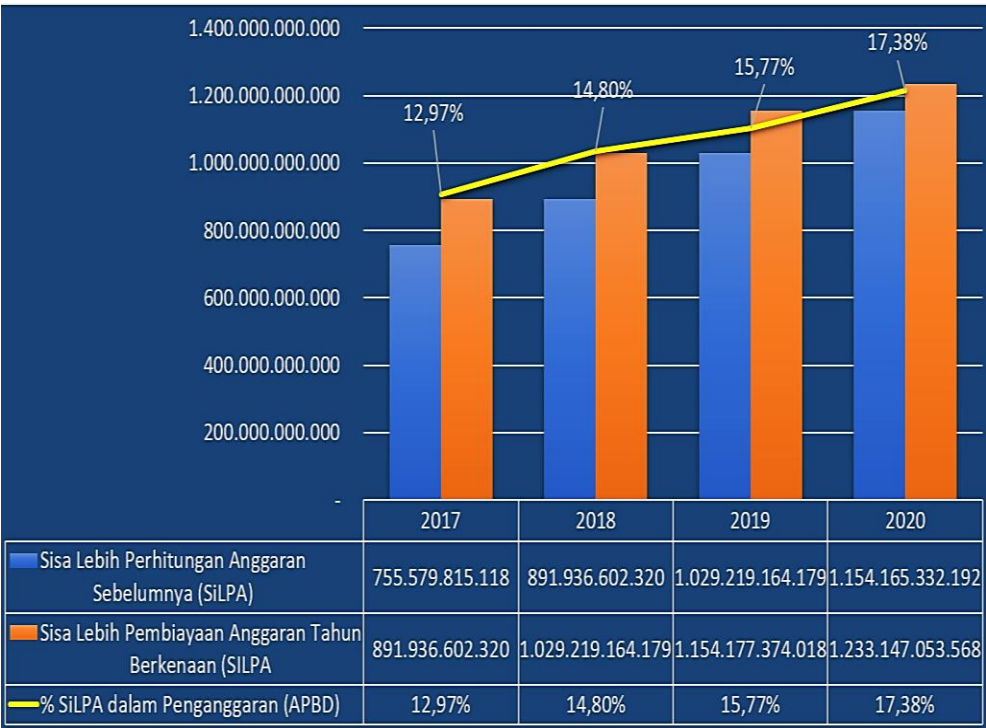


Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

3.2.2 Analisis Pembiayaan Tahun 2017-2020

Selama tahun 2017-2020, Pemerintah Kabupaten Bekasi bergantung pada SILPA untuk menutupi defisit dalam penganggarannya. SILPA Pemerintah Kabupaten Bekasi pada kurun waktu tersebut menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat meski selalu dianggarkan kembali di tahun berikutnya. SILPA tahun 2016 yang dianggarkan kembali di tahun 2017 adalah sebesar Rp.755.579.815.118,- sementara SILPA di tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.233.147.053.568,-. Dalam penganggaran APBD tahun 2017-2020, peran SiLPA dalam menutupi defisit APBD adalah sebesar 12,97% di tahun 2017, 14,8% di tahun 2018, 15,77% di tahun 2019, dan 17,38% di tahun 2020.

Gambar 3.11
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020

Meskipun demikian, dengan surplus yang terjadi setiap tahunnya akibat realisasi pendapatan yang melebihi target dan kurang optimalnya realisasi belanja daerah, peran SiLPA tidak lagi menjadi penutup defisit rill anggaran, melainkan sebagai penambah SILPA di tahun berkenaan dengan akumulasinya di akhir tahun anggaran. Proporsi SiLPA dalam SILPA tahun 2017 adalah sebesar 84,71%, 86,66% di tahun 2018, 89,17% di tahun 2019, dan 93,6% di tahun 2020, menunjukkan trend yang terus meningkat dengan terus bertambahnya SILPA setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya, perhitungan SILPA untuk tahun 2017-2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

| NO. | URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Realisasi Pendapatan Daerah | 4.992.469.141.323 | 5.194.984.158.385 | 5.672.557.868.226 | 5.558.320.615.381 |
| | Dikurangi realisasi: | | | | |
| 2. | Belanja Daerah | 4.238.252.521.121 | 4.435.230.385.026 | 4.859.219.628.212 | 4.788.228.672.505 |
| 3. | Transfer Daerah | 607.859.833.000 | 622.471.211.500 | 688.380.030.175 | 691.110.221.500 |
| 4. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 10.000.000.000 | - | - | - |



| NO. | URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Surplus/(Defisit) riil | 136.356.787.202 | 137.282.561.859 | 124.958.209.839 | 78.981.721.376 |
| 5. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) | 755.579.815.118 | 891.936.602.320 | 1.029.219.164.179 | 1.154.165.332.192 |
| B. | Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah | 755.579.815.118 | 891.936.602.320 | 1.029.219.164.179 | 1.154.165.332.192 |
| A-B | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) | 891.936.602.320 | 1.029.219.164.179 | 1.154.177.374.018 | 1.233.147.053.568 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

Komposisi SiLPA pada tahun 2017-2020 terdiri dari: pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Komponen yang memberikan andil terbesar dalam SiLPA setiap tahunnya adalah sisa penghematan belanja dan atau akibat lainnya. Pada tahun 2017, proporsi sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dalam SiLPA adalah sebesar minus 108,68% dan terus menurun di 3 tahun berikutnya. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020, proporsi sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dalam SiLPA adalah sebesar minus 94,23%, 84,88%, dan 94,33%.

Tabel 3.9
Komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2017-2020

| NO. | URAIAN | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-----|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA |
| 1. | Jumlah SiLPA | 891.936.602.320 | 100 | 1.029.219.164.179 | 100 | 1.154.177.374.018 | 100 | 1.233.159.095.394 | 100 |
| 2. | Pelampauan penerimaan PAD | 106.152.912.463 | 11,90 | 94.989.762.913 | 9,23 | 292.507.741.371 | 25,34 | 206.638.223.076 | 16,76 |
| 3. | Pelampauan penerimaan dana perimbangan | (183.858.766.682) | (20,61) | (33.801.936.080) | (3,28) | (117.493.351.935) | (10,18) | (137.964.192.240) | (11,19) |
| 4. | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | 327.591.400 | 0,04 | (1.827.742.910) | (0,18) | (526.880.000) | (0,05) | 1.234.050.000 | 0,10 |
| 5. | Realisasi penerimaan pembiayaan | - | - | - | - | - | - | (12.041.826) | (0,00) |
| 6. | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | (969.314.865.139) | (108,68) | (969.859.080.256) | (94,23) | (979.689.864.582) | (84,88) | (1.163.251.014.558) | (94,33) |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017-2020, diolah

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2023-2026

Pendapatan Daerah

Dengan semakin membaiknya perekonomian Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan nasional di tahun 2023, pendapatan daerah juga diperkirakan secara optimis akan naik dibandingkan anggaran murni tahun 2022. Perkiraan pendapatan daerah yang pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.5.603.407.169.569,- pada tahun 2023 ditargetkan menjadi sebesar Rp.6.170.316.800.307,- dengan rata-rata pertumbuhan selama 4 tahun ke depan sebesar 4,93%. Peningkatan pertumbuhan pendapatan dengan asumsi faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

1. Berakhirnya pandemi Covid-19 dan Stabilisasi Perekonomian Nasional

Seiring dengan telah ditemukannya vaksin Covid-19 dan vaksinasi secara massif kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, diharapkan tingkat kekebalan masyarakat meningkat sehingga penanganan terhadap Covid-19 bukan lagi sebagai pandemik, akan tetapi sebagai penyakit biasa dengan standar prosedur kesehatan yang telah ditentukan. Pulihnya kegiatan masyarakat sosial dan perekonomian masyarakat khususnya di sektor jasa, perdagangan dan industri mendorong peningkatan produksi dan transaksi jual beli diharapkan turut serta meningkatkan pendapatan daerah

Dengan pulihnya perekonomian nasional dan global yang ditandai pertumbuhan kinerja ekspor nasional, khususnya sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 3,4% pada tahun 2021 dan diyakini akan terus tumbuh pada tahun mendatang, hal tersebut berkorelasi langsung dengan pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Peningkatan produktivitas di sektor industri pengolahan ini yang memberikan kontribusi terbesar sebanyak 70% bagi PDRB Kabupaten Bekasi tentu saja akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah.

2. Diselesaikannya Rencana Detail Tata Ruang

Penyelesaian rencana detail tata ruang diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pemanfaatan pola ruang di Kabupaten Bekasi sehingga dapat mendorong peningkatan investasi, pembangunan, dan transaksi jual beli atas tanah dan bangunan. Kondisi tersebut diharapkan

meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Penyelesaian rencana detail tata ruang juga menjadi acuan dalam penetapan zona nilai tanah yang diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi, khususnya di wilayah perkotaan Kabupaten Bekasi.

3. Perubahan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yang melarang adanya iklan/reklame produk rokok dan sejenisnya menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak daerah di sektor pajak reklame. Hal tersebut disebabkan perusahaan produsen rokok yang selama ini berkontribusi cukup besar dalam pajak reklame tidak dapat memasang reklame produknya. Perubahan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan sebagai upaya penggalan dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame dengan tetap mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4. Penyediaan Kajian Zona Nilai Tanah

Penyediaan kajian zona nilai tanah dengan memperhatikan kondisi terkini wilayah Kabupaten Bekasi berdasarkan pola ruang dan pertumbuhan nilai ekonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan nilai jual objek pajak dan selanjutnya mendorong peningkatan pajak daerah dari sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

5. Percepatan Realisasi Investasi

Tingginya nilai investasi di Kabupaten Bekasi setiap tahunnya perlu didorong berbagai upaya dalam percepatan realisasi investasi. Hal tersebut dimaksudkan agar pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah juga mengalami peningkatan sebagai dampak dari realisasi investasi. Berbagai upaya yang tengah dilakukan pemerintah daerah dimana salah satunya melalui penyederhanaan birokrasi dan deregulasi diharapkan dapat memberikan kepastian layanan dalam mendorong percepatan realisasi investasi di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peningkatan pendapatan daerah terjadi karena pendapatan asli daerah ditargetkan akan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,33%, dengan sumber pendapatan utama yang akan didongkrak pertumbuhannya adalah pos pajak daerah dengan rata-rata pertumbuhan yang ditargetkan sebesar 10,74%. Sementara sumber lainnya, yaitu retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah juga akan didorong untuk tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah,



yakni sebesar 0,98% dan 2,45%. Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Melakukan kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.
4. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 melalui pemberian penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan/desa atas pengelolaan pajak PBB-P2 buku 1, 2, dan 3.
5. Membuat skala prioritas pemutakhiran data hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah sesuai dengan potensi wilayah.
6. Melakukan penilaian atas objek pajak PBB-P2 dan pemutakhiran data baik tekstual maupun spasial serta harga transaksi BPHTB secara berkesinambungan dengan skala prioritas potensi wilayah.

Selanjutnya sebagaimana pendapatan asli daerah, pendapatan transfer juga diperkirakan akan meningkat selama tahun 2023-2026 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,23%. Sumber pendapatan transfer yang diperkirakan akan tumbuh adalah transfer pemerintah pusat, yakni dana perimbangan, serta transfer antar-daerah, yaitu pendapatan bagi hasil pajak.

Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi
Tahun 2023-2026

| NO. | URAIAN | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | PENDAPATAN | 6.170.316.800.307 | 6.441.283.415.835 | 6.763.035.060.019 | 7.129.332.206.714 |
| A. | Pendapatan Asli Daerah | 2.704.281.806.249 | 2.934.145.759.777 | 3.212.889.606.961 | 3.534.178.567.656 |
| 1. | Pajak daerah | 2.246.015.920.949 | 2.468.876.628.280 | 2.738.632.406.490 | 3.049.657.477.062 |
| 2. | Retribusi daerah | 148.362.278.318 | 149.162.092.263 | 150.947.946.275 | 152.775.643.805 |
| 3. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 20.315.323.402 | 20.315.323.402 | 20.315.323.402 | 20.315.323.402 |
| 4. | Lain-lain PAD yang sah | 289.588.283.580 | 295.791.715.832 | 302.993.930.794 | 311.430.123.387 |
| B. | Pendapatan Transfer | 3.466.034.994.058 | 3.507.137.656.058 | 3.550.145.453.058 | 3.595.153.639.058 |
| 1. | Transfer Pemerintah Pusat | 2.698.036.074.058 | 2.701.036.074.058 | 2.704.036.074.058 | 2.707.036.074.058 |
| | Dana Perimbangan | 1.854.386.309.058 | 1.857.386.309.058 | 1.860.386.309.058 | 1.863.386.309.058 |
| | Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam | 377.748.140.000 | 380.748.140.000 | 383.748.140.000 | 386.748.140.000 |
| | Dana Alokasi Umum | 1.476.638.169.058 | 1.476.638.169.058 | 1.476.638.169.058 | 1.476.638.169.058 |
| | Dana Transfer Khusus | 579.296.758.000 | 579.296.758.000 | 579.296.758.000 | 579.296.758.000 |
| | Dana Alokasi Khusus | 579.296.758.000 | 579.296.758.000 | 579.296.758.000 | 579.296.758.000 |
| | Dana Insentif Daerah | - | - | - | - |
| | Dana Desa | 264.353.007.000 | 264.353.007.000 | 264.353.007.000 | 264.353.007.000 |
| 2. | Transfer Antar-Daerah | 767.998.920.000 | 806.101.582.000 | 846.109.379.000 | 888.117.565.000 |
| | Pendapatan bagi hasil pajak | 767.998.920.000 | 806.101.582.000 | 846.109.379.000 | 888.117.565.000 |



| NO. | URAIAN | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|
| | Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya | - | - | - | - |
| C. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | - | - | - | - |

Belanja Daerah

Seiring dengan kenaikan pendapatan daerah, belanja daerah selama tahun 2023-2026 juga diperkirakan akan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,77%. Kebijakan alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya wajib mengikat serta prioritas utama, antara lain: belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja yang telah diarahkan (*earmark*), belanja air, listrik, telepon, BBM kendaraan operasional pengangkut sampah/lainnya, belanja program/kegiatan prioritas/proyek strategis daerah, belanja hibah untuk mendukung pemilihan kepala daerah serentak, serta belanja prioritas lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Untuk tahun 2023-2026, belanja *earmark* yang telah dianggarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, serta Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD. Sedangkan *earmark* lainnya yang juga dianggarkan adalah belanja BLUD FKTP, serta belanja BLUD RSUD Cibitung dan RSUD Cabangbungin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perkiraan alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi
Tahun 2023-2026

| NO. | URAIAN | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| II | BELANJA | 6.504.400.878.317 | 6.779.149.415.835 | 7.106.597.060.019 | 7.479.122.206.714 |
| A | Belanja Operasi | 4.984.952.626.291 | 5.173.472.946.396 | 5.268.666.484.517 | 5.497.035.357.163 |
| 1 | Belanja Pegawai | 2.268.649.017.100 | 2.270.965.382.100 | 2.273.279.432.100 | 2.275.885.079.100 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.706.797.001.191 | 2.708.491.466.466 | 2.978.996.767.417 | 3.221.150.278.063 |
| 3 | Belanja Bunga | - | - | - | - |
| 4 | Belanja Subsidi | - | - | - | - |
| 5 | Belanja Hibah | 9.506.608.000 | 194.016.097.830 | 16.390.285.000 | - |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial | - | - | - | - |
| B | Belanja Modal | 645.995.105.966 | 612.229.805.963 | 759.606.478.996 | 805.930.343.395 |



| NO. | URAIAN | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| C | Belanja Tidak Terduga | 50.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| D | Belanja Transfer | 823.453.146.060 | 893.446.663.476 | 978.324.096.506 | 1.076.156.506.156 |
| 1 | Belanja Bagi hasil | 236.256.117.122 | 256.337.887.078 | 280.689.986.350 | 308.758.984.985 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 587.197.028.938 | 637.108.776.398 | 697.634.110.156 | 767.397.521.171 |

Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah untuk tahun 2023-2026 masih difokuskan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA. Meski selama tahun 2017-2020 SILPA Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mengalami kenaikan hingga realisasinya di tahun 2020 sebesar Rp.1.233.147.053.568,-, namun target penerimaan pembiayaan yang akan dipasang sebagai SiLPA dalam APBD tahun 2023 besarnya akan menurun minus 61,63% dibandingkan tahun 2022 menjadi sebesar Rp.334.084.078.010,-. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022 diperkirakan akan semakin optimal akibat kebijakan pembatasan yang semakin longgar dibandingkan tahun 2020 dan 2021, serta upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk terus mendorong perbaikan kinerja seluruh perangkat daerah di bawahnya melalui monitoring, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan maupun capaian kinerja masing-masing perangkat daerah. Walaupun begitu, berdasarkan hasil realisasi selama tahun 2017-2022 yang terus meningkat, maka SiLPA selama tahun 2023-2026 tetap ditargetkan tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tersebut sebesar 1,54%.

Sementara pada pengeluaran pembiayaan, berdasarkan evaluasi atas penerimaan investasi daerah selama tahun 2017-2022 yang menunjukkan hasil yang kurang optimal, maka pengeluaran daerah tidak menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026. Walaupun demikian, pengeluaran pembiayaan masih dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada tahun berkenaan serta timbal baliknya kepada pemerintah daerah.

Tabel 3.12
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| III | PEMBIAYAAN | | | | |
| A. | Penerimaan Pembiayaan | 334.084.078.010 | 337.866.000.000 | 343.562.000.000 | 349.790.000.000 |
| B. | Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | - |



| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|----|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | PEMBIAYAAN NETTO | 334.084.078.010 | 337.866.000.000 | 343.562.000.000 | 349.790.000.000 |
| IV | SISA LEBIH TAHUN BERJALAN | - | - | - | - |

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Selama tahun 2023-2026, pendapatan daerah Kabupaten Bekasi akan meningkat dari Rp.6.170.316.800.307 menjadi sebesar Rp.7.129.332.206.714,- di tahun 2026. Sementara untuk SiLPA yang diperkirakan akan menurun di tahun 2023 diperkirakan akan kembali meningkat di tahun 2024-2026 menjadi sebesar Rp.349.790.000.000,- di tahun 2026. Peningkatan dari sisi pendapatan maupun penerimaan daerah yang bersumber dari SiLPA menyebabkan total penerimaan daerah juga mengalami peningkatan dari Rp.6.504.400.878.317,- menjadi sebesar Rp.7.479.122.206.714,-. Meski begitu, total belanja wajib dan pengeluaran mengikat yang menjadi prioritas utama juga ikut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp.3.970.493.812.741,- menjadi sebesar Rp.4.292.768.466.643,- di tahun 2026. Penurunan hanya terjadi di tahun 2025 akibat berkurangnya hibah untuk pilkada. Secara keseluruhan, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program/kegiatan hanya sebesar 39%-43%. Namun harus diingat kembali bahwa seluruh komponen belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama belum seluruhnya masuk dalam perhitungan, seperti belanja listrik, air, telepon, dan BBM untuk kendaraan pengangkut sampah misalnya, sehingga kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat lebih kecil dibandingkan yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

| NO. | URAIAN | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Pendapatan | 6.170.316.800.307 | 6.441.283.415.835 | 6.763.035.060.019 | 7.129.332.206.714 |
| II | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | 334.084.078.010 | 337.866.000.000 | 343.562.000.000 | 349.790.000.000 |
| | Total Penerimaan | 6.504.400.878.317 | 6.779.149.415.835 | 7.106.597.060.019 | 7.479.122.206.714 |
| | Dikurangi | | | | |
| III | Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama | 3.970.493.812.741 | 4.283.516.617.238 | 4.200.284.502.400 | 4.292.768.466.643 |
| A. | Belanja Operasi | 2.268.649.017.100 | 2.270.965.382.100 | 2.273.279.432.100 | 2.275.885.079.100 |
| | Belanja Pegawai | 2.268.649.017.100 | 2.270.965.382.100 | 2.273.279.432.100 | 2.275.885.079.100 |
| B. | Belanja Tidak Terduga | 50.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| NO. | URAIAN | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| C. | Transfer | 823.453.146.061 | 893.446.663.476 | 978.324.096.506 | 1.076.156.506.156 |
| | Transfer Bagi Hasil Pendapatan | 236.256.117.122 | 256.337.887.078 | 280.689.986.350 | 308.758.984.985 |
| | Transfer Bantuan Keuangan | 587.197.028.938 | 637.108.776.398 | 697.634.110.156 | 767.397.521.171 |
| D. | Belanja Earmark | 828.391.649.580 | 1.019.104.571.662 | 848.680.973.794 | 840.726.881.387 |
| | Kegiatan Earmark Ditentukan: | 579.296.758.000 | 579.296.758.000 | 579.296.758.000 | 579.296.758.000 |
| | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 579.296.758.000 | 579.296.758.000 | 579.296.758.000 | 579.296.758.000 |
| | - DAK Non Fisik-BOS Reguler | 327.766.880.000 | 327.766.880.000 | 327.766.880.000 | 327.766.880.000 |
| | -DAK Non Fisik-TPG PNSD | 248.850.878.000 | 248.850.878.000 | 248.850.878.000 | 248.850.878.000 |
| | -DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 2.679.000.000 | 2.679.000.000 | 2.679.000.000 | 2.679.000.000 |
| | Kegiatan earmark lainnya: | 239.588.283.580 | 245.791.715.832 | 252.993.930.794 | 261.430.123.387 |
| | -BLUD FKTP (JKN Puskesmas) | 93.088.283.580 | 92.466.715.832 | 92.502.680.794 | 93.414.310.887 |
| | -BLUD RSUD Cibitung | 136.500.000.000 | 143.325.000.000 | 150.491.250.000 | 158.015.812.500 |
| | -BLUD RSUD Cabangbungin | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| | Belanja Hibah Pilkada | 9.506.608.000 | 194.016.097.830 | 16.390.285.000 | - |
| | a. Kesbangpol (Bawaslu) | 932.800.000 | 43.248.391.000 | 3.400.022.000 | - |
| | b. Kesbangpol (KPU) | - | 142.193.898.830 | 4.416.455.000 | - |
| | c. Kesbangpol (Parpol) | 8.573.808.000 | 8.573.808.000 | 8.573.808.000 | - |
| | | | | | |
| | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah | 2.533.907.065.576 | 2.495.632.798.597 | 2.906.312.557.619 | 3.186.353.740.071 |
| | % terhadap penerimaan daerah | 39% | 37% | 41% | 43% |



BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan
4.1.1 Permasalahan Berdasarkan Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Bekasi disusun berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah, ditemukan adanya beberapa kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam aspek-aspek pembangunan di Kabupaten Bekasi selama beberapa tahun terakhir yang merupakan permasalahan atau akan menjadi masalah di masa depan, yang kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan dan isu utama yang harus dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kelemahan dan Ancaman yang Dihadapi oleh Kabupaten Bekasi

| NO. | KELEMAHAN | ANCAMAN | PERTANYAAN | ISU UTAMA |
|-----|---|--|--|------------------|
| I. | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | | | |
| | Luas wilayah didominasi oleh lahan kering yang berpotensi kekeringan dan sulitnya pemenuhan air bersih | Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat | Bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat | Kesehatan |
| | | | Bagaimana mengatasi peningkatan volume sampah | Lingkungan hidup |
| | | | Bagaimana mengendalikan peningkatan jumlah penduduk | Kependudukan |
| | Penyebaran penduduk tidak merata dan cenderung menumpuk di wilayah yang berdekatan dengan industri dan kota lain yang lebih dahulu berkembang | Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dan mengalami penurunan yang cukup besar pada saat Covid-19 atau ketika ekonomi daerah lesu yang menunjukkan bahwa masuknya penduduk dari daerah lain salah satunya didorong oleh faktor ekonomi | Bagaimana mendorong pemerataan penyebaran penduduk | Kependudukan |
| | | | Bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi daerah | Ekonomi daerah |
| | Banyaknya penduduk usia produktif bila tidak termanfaatkan maka akan menjadi beban daerah serta | Kerusakan lingkungan akibat pengembangan wilayah dan alih fungsi lahan | Bagaimana mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif | Ketenagakerjaan |



| NO. | KELEMAHAN | ANCAMAN | PERTANYAAN | ISU UTAMA |
|-----|---|---|---|-------------------------------|
| | meningkatkan pengangguran dan kemiskinan | | Bagaimana mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan | Lingkungan hidup |
| | Resiko bencana masuk ke kategori sedang, didominasi oleh bencana banjir dengan titik wilayah banjir yang semakin meluas | Intensitas hujan yang tinggi, meluapnya daerah aliran sungai, drainase yang tidak berfungsi dengan baik, serta pasang air laut | Bagaimana mengurangi resiko bencana daerah | Bencana |
| | | | Bagaimana mencegah banjir | Bencana |
| II. | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | |
| | 70% ekonomi daerah didorong oleh industri pengolahan yang pengaturannya merupakan kebijakan pusat sehingga tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah | Covid-19 menyebabkan penurunan PDRB dan memperlambat LPE | Bagaimana memulihkan kondisi ekonomi daerah pasca Covid-19 | Ekonomi daerah |
| | | LPE mulai mengalami perlambatan meski sebelum Covid-19 | Intervensi apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah | Ekonomi daerah |
| | | Meningkatnya PDRB per kapita terjadi akibat migrasi ke luar penduduk dengan terhambatnya aktivitas ekonomi daerah dan perusahaan yang gulung tikar akibat Covid-19 sehingga menurunkan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi | | |
| | Inflasi di Kabupaten Bekasi berfluktuasi dimana Pemerintah Daerah tidak dapat mengintervensi secara langsung karena kebijakan moneter dan keuangan diatur oleh pemerintah pusat | Inflasi di tahun 2020 rendah akibat menurunnya permintaan barang dan jasa oleh masyarakat dengan menurunnya pendapatan masyarakat dan terhambatnya proses produksi barang/jasa akibat Covid-19 | Bagaimana mengendalikan inflasi daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat | Kemiskinan dan ekonomi daerah |
| | Ketimpangan pengeluaran masyarakat masuk ke kategori sedang meski masih lebih kecil bila dibandingkan dengan regional dan nasional | Penurunan ekonomi daerah akibat Covid-19 menyebabkan peningkatan ketimpangan pengeluaran masyarakat | Bagaimana menurunkan ketimpangan pengeluaran masyarakat | Kemiskinan |
| | Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi berada di peringkat ke-8 terbesar di Jawa Barat | Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sejak tahun 2020 akibat Covid-19 | Bagaimana menurunkan jumlah penduduk miskin dan mencegah | Kemiskinan |



| NO. | KELEMAHAN | ANCAMAN | PERTANYAAN | ISU UTAMA |
|-----|---|---|--|------------|
| | | Garis kemiskinan, kedalaman, dan keparahan kemiskinan mengalami peningkatan akibat Covid-19 | timbulnya orang miskin baru | |
| | | Penurunan pendapatan masyarakat akibat Covid-19 dapat menyebabkan peningkatan kelompok penduduk miskin | Bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat | Kemiskinan |
| | | Penurunan pendapatan masyarakat akibat Covid-19 mengubah pola konsumsi masyarakat, dimana masyarakat lebih menyukai makanan dan minuman jadi yang lebih murah dan mudah didapat serta rokok dan tembakau yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat | Bagaimana mencegah penurunan derajat kesehatan masyarakat | Kesehatan |
| | Pendapatan yang diterima oleh petani tidak tetap setiap bulannya | | Bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani | Kemiskinan |
| | Pengeluaran petani di tahun 2020 didominasi oleh biaya sewa lahan, pajak dan lainnya yang menunjukkan bahwa banyak petani yang tidak memiliki lahan pertanian | | | |
| | Pembangunan gender berjalan lambat | Pencapaian terhadap target IPM menurun akibat menurunnya pengeluaran per kapita masyarakat dengan adanya Covid-19 | Bagaimana mendorong pengarusutamaan gender di semua sektor | Gender |
| | | | Bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat | Kemiskinan |
| | RLS tidak mencapai target dan capaian HLS terus mengalami penurunan dengan masih adanya siswa yang putus sekolah | Angka melek huruf menurun | Bagaimana meningkatkan kebiasaan masyarakat untuk membaca | Pendidikan |
| | | | Bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah | Pendidikan |
| | | Balita stunting terus meningkat | Bagaimana menurunkan dan mencegah stunting | Kesehatan |



| NO. | KELEMAHAN | ANCAMAN | PERTANYAAN | ISU UTAMA |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------|
| | | Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan terus meningkat | Bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Kesehatan |
| | | Persentase peserta jaminan kesehatan non-PBI dan asuransi swasta menurun | Bagaimana mencegah penurunan derajat kesehatan masyarakat | Kesehatan |
| | | Persentase rumah tangga memiliki akses sanitasi layak yang sebelumnya telah meningkat di tahun 2020 jumlahnya menurun di tahun 2021 | Bagaimana mencegah terjadinya pencemaran akibat limbah domestik | Lingkungan hidup |
| | | Persentase rumah tangga memiliki akses sumber air minum layak yang sebelumnya telah meningkat di tahun 2020 jumlahnya menurun di tahun 2021 | Bagaimana mencegah penurunan derajat kesehatan masyarakat | Kesehatan |
| | Bidang sejarah dan olahraga tidak berkembang dengan baik | | Bagaimana mendorong pembangunan budaya dan olahraga | Budaya dan olahraga |
| III. ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | |
| | Masih ada perangkat daerah yang masuk dalam kategori kurang baik dan perhitungan sampel SKPD belum konsisten | | Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik | Tata kelola pemerintahan |
| | Penerapan SPM belum dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh SKPD pemangku SPM. urusan perumahan rakyat merupakan urusan dengan capaian paling rendah karena tidak pernah mengganggu kebutuhan untuk penerapan standar pelayanan minimal | | Bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPM pada perangkat daerah yang capaiannya masih rendah | Tata kelola pemerintahan |
| | Jumlah sekolah yang tersedia banyak, namun fasilitas yang tersedia belum memenuhi standar pendidikan | | Bagaimana meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan pada sekolah dasar negeri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah | Pendidikan |



| NO. | KELEMAHAN | ANCAMAN | PERTANYAAN | ISU UTAMA |
|-----|--|--|--|--|
| | | Semakin tinggi tingkat pendidikan, angka partisipasi siswa semakin menurun | Bagaimana meningkatkan angka partisipasi siswa pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi | Pendidikan |
| | | Masih ada siswa yang mengulang dan putus sekolah yang disinyalir disebabkan oleh faktor kemiskinan, penyebaran narkoba, dan pergaulan bebas | Bagaimana mencegah dan menurunkan angka putus sekolah | Pendidikan |
| | Jumlah PPKS mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir sementara sarana sosial jumlahnya tetap | | Bagaimana mengoptimalkan peran sarana sosial dalam penanganan PPKS | Kemiskinan dan sosial |
| | Masih ada jalan dalam kondisi rusak berat dan sedang | | Bagaimana meningkatkan kualitas dan tingkat keamanan jalan kabupaten | Infrastruktur dan konektivitas wilayah |
| | Meski mengalami penurunan di tahun 2021, namun tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bekasi masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Nasional | Peningkatan pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan yang dikhawatirkan pada akhirnya dapat mempengaruhi kondusivitas wilayah | Bagaimana menurunkan angka pengangguran | Ketenagakerjaan |
| | Selama tahun 2017-2021, target menurunkan tingkat pengangguran terbuka tidak pernah tercapai dengan capaian rendah | | | |
| | Angkatan kerja dan pengangguran didominasi oleh latar belakang pendidikan SMA sementara standar yang ditetapkan oleh perusahaan semakin tinggi | Persaingan dunia kerja semakin tinggi dengan semakin kemudahan akses informasi dan transportasi serta masuknya angkatan kerja dari daerah lain untuk mencari pekerjaan | | |
| | 57% pekerja di Kabupaten Bekasi bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sedangkan yang berusaha sendiri hanya sebanyak 24,6% yang menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja lebih memilih untuk bekerja untuk perusahaan/orang lain | | Bagaimana menurunkan ketergantungan angkatan kerja terhadap lapangan kerja formal | Ketenagakerjaan |



| NO. | KELEMAHAN | ANCAMAN | PERTANYAAN | ISU UTAMA |
|-----|---|--|---|--------------------------------|
| | dibandingkan berwirausaha yang menunjukkan tingginya ketergantungan angkatan kerja terhadap lapangan kerja formal | | | |
| | Jumlah koperasi unit desa masih sedikit dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Bekasi | | Bagaimana mengoptimalkan peran koperasi untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesempatan kerja | Ketenagakerjaan dan kemiskinan |
| | Nilai investasi daerah mengalami kenaikan, namun penyerapan investasi tersebut terhadap tenaga kerja di Kabupaten Bekasi sangat kecil dan semakin menurun | | Bagaimana mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui investasi daerah | Ketenagakerjaan |
| | Jumlah sampah yang dapat ditangani hanya berkisar antara 46-47% dari total produksi sampah per harinya | | Bagaimana meningkatkan volume sampah yang dapat ditangani | Lingkungan hidup |
| | | Peralihan fungsi dari lahan sawah dan perikanan menjadi permukiman semakin meningkat | Bagaimana mencegah terjadinya alih fungsi lahan dan mendorong pembangunan yang sesuai dengan RTRW | Lingkungan hidup |
| | Belum seluruh penduduk memiliki KTP | | Bagaimana agar seluruh penduduk Kabupaten Bekasi dapat memiliki dokumen kependudukan | Kependudukan |
| | | Produktivitas tanaman padi mengalami penurunan dengan adanya Covid-19 | Bagaimana mendorong peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan | Pertanian dan perikanan |
| | | Produksi perikanan mengalami penurunan pada tahun 2020 (saat Covid-19) | | |
| | Jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata setiap tahunnya jumlahnya berfluktuasi | | Bagaimana mendorong pertumbuhan sektor pariwisata untuk menyerap tenaga kerja | Ketenagakerjaan |



| NO. | KELEMAHAN | ANCAMAN | PERTANYAAN | ISU UTAMA |
|-----------------------------|---|--|---|-------------------------------|
| | | Jumlah wisatawan yang berkunjung ke akomodasi mengalami penurunan akibat Covid-19 | | |
| | Belum semua kecamatan memiliki pasar tradisional | | Bagaimana mewujudkan iklim perdagangan yang kondusif untuk menjaga stabilitas harga | Kemiskinan dan ekonomi daerah |
| | | Berkurangnya jumlah perusahaan pada industri besar dan sedang menurunkan penyerapan tenaga kerja | Bagaimana mengoptimalkan peran industri kecil dan menengah untuk mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesempatan kerja | Ketenagakerjaan |
| IV. ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | |
| | | Nilai Tukar Petani terus mengalami penurunan | Bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani | Kemiskinan |
| | Meski jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Bekasi merupakan yang terbanyak di Jawa Barat, namun jumlah dokter umum, spesialis dan gigi yang ada berada di urutan ke-4 setelah Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok | | Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit | Kesehatan |
| | Meski kelas resiko bencana Kabupaten Bekasi telah turun dari kategori tinggi di tahun 2017, namun masih masuk ke dalam kelas kategori sedang | | Bagaimana mengurangi resiko bencana daerah | Bencana |
| | | Bencana utama yang terjadi di Kabupaten Bekasi hingga saat ini adalah banjir | Bagaimana mencegah banjir | Bencana |
| | Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-8 sebagai salah satu kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat | | Bagaimana menurunkan jumlah penduduk miskin dan mencegah timbulnya orang miskin baru | Kemiskinan |



Dari 14 (empat belas) isu utama yang dihadapi oleh Kabupaten Bekasi di atas, teridentifikasi 2 (dua) isu utama dengan pengaruh paling besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, dampaknya terhadap daerah dan masyarakat, dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah yaitu: kemiskinan dan ekonomi daerah.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah lingkaran, dimana kemiskinan cenderung untuk diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini dikarenakan seseorang yang dilahirkan di keluarga miskin biasanya tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas dirinya sehingga tidak dapat bersaing dengan individu lainnya. Pada akhirnya orang tersebut tidak mampu memperoleh pekerjaan atau berakhir dengan pekerjaan dengan pendapatan rendah serta gagal lari dari kemiskinan, kemudian membentuk keluarga baru, dan siklus yang sama kembali terulang.

Di Kabupaten Bekasi, meskipun persentase penduduk miskin yang ada tergolong rendah bila dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, namun jumlah penduduk miskin yang cukup besar dan meningkat pada 2 tahun terakhir tidak dapat diabaikan. Jumlah penduduk miskin yang besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah karena dapat menurunkan kondusivitas wilayah dan minat untuk berinvestasi atau membuka usaha baru di Kabupaten Bekasi. Oleh karenanya, kemiskinan merupakan salah satu isu besar yang menjadi perhatian dan harus diselesaikan. Adapun rumusan permasalahan terkait kemiskinan adalah sebagai berikut:

| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|---------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Kemiskinan | Rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak memiliki daya saing dan memiliki kemampuan untuk mandiri | Rendahnya tingkat pendidikan |
| | | Rendahnya kesehatan masyarakat akibat tidak terpenuhinya kebutuhan gizi, air minum yang bersih, gaya hidup tidak sehat, dan kondisi lingkungan yang buruk |
| | | Belum meratanya pembangunan sampai ke tingkat desa |
| | | Terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh perempuan, anak, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya |



| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|---------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | Rentannya pemuda terhadap pengaruh buruk lingkungan eksternal |
| | Kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan | Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sementara tidak semua pencari kerja memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memenuhi standar perusahaan |

Ekonomi Daerah

Terkait dengan ekonomi daerah, masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Bekasi adalah pertumbuhannya yang mengalami perlambatan sejak tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Meski telah tumbuh positif di tahun 2021 sebelum sempat memburuk di tahun 2020 akibat Covid-19, namun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat atau berada pada kisaran 5-6% per tahunnya. Kesulitan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Bekasi adalah bahwa 70% ekonomi daerah didorong oleh industri pengolahan yang dikuasai oleh industri besar, dimana pengaturannya merupakan kebijakan pusat sehingga tidak dapat diintervensi secara langsung oleh pemerintah daerah. Sementara pertumbuhan pada usaha kecil dan menengah tidak mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan mengingat kontribusinya yang kecil terhadap PDRB. Ada 3 (tiga) pertanyaan yang harus dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait dengan ekonomi daerah, yaitu:

- 1. Bagaimana memulihkan kondisi ekonomi daerah pasca Covid-19?
- 2. Bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi daerah?
- 3. Intervensi apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah?

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah terkait dengan ekonomi daerah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan | Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah | Lemahnya perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan atas program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah |



| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|---------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | Kualitas ASN yang tersedia belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan |
| | | Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum berjalan optimal dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat |
| | | Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh program pembangunan |
| | | Sarana dan prasarana penunjang kinerja ASN yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan |
| | Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi | Kondisi jalan kabupaten dan jalan penghubung antarpermukiman dan perumahan belum seluruhnya berada dalam kondisi baik atau sesuai dengan kapasitas jalan yang diperlukan |
| | | Sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas belum sepenuhnya tersedia secara optimal |
| | Kondisi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi masih kerap terjadi | Kerentanan daerah terhadap bencana masih cukup tinggi |
| | | Penduduk Kabupaten Bekasi yang plural menyebabkan tingkat kerentanan terjadinya konflik suku, ras, agama, dan golongan menjadi lebih tinggi |
| | Kualitas lingkungan hidup yang merupakan salah satu penunjang kehidupan dan aktivitas masyarakat masih rendah | Kinerja pengelolaan persampahan belum mampu menangani seluruh sampah yang dihasilkan |
| | | Pencemaran terhadap air, udara, dan tanah belum dapat dikendalikan sepenuhnya |
| | | Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya selaras dengan rencana tata ruang |

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diidentifikasi berdasarkan 2 masalah pokok di atas, yakni kemiskinan dan

pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami perlambatan, antara lain sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Terkait dengan masalah kemiskinan, ditemukan 20 bidang urusan yang berhubungan dengan kemiskinan di Kabupaten Bekasi dengan permasalahan sebagai berikut:

a. Pendidikan

- Partisipasi dan kualitas pembelajaran siswa pada jenjang pendidikan dasar belum optimal
- Rentannya anak usia sekolah terhadap pengaruh buruk lingkungan eksternal
- Kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan yang tersedia belum memenuhi standar nasional pendidikan

b. Perpustakaan

- Rendahnya minat masyarakat untuk membaca

c. Kesehatan

- Belum optimalnya layanan kesehatan kepada masyarakat dan gaya hidup sehat belum diterapkan secara maksimal oleh masyarakat
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan
- Belum optimalnya layanan rumah sakit umum daerah
- Sarana prasarana kesehatan khususnya pada satuan kesehatan belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan fasilitas kesehatan

d. Pertanahan

- Lahan yang tersedia untuk fasilitas umum belum semuanya memenuhi standar layanan atau sesuai dengan kebutuhan

e. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum optimalnya layanan air minum perpipaan bagi masyarakat

f. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Kesehatan lingkungan khususnya pada lingkungan masyarakat miskin belum terjaga secara optimal yang dapat dilihat melalui masih ditemukannya lingkungan kumuh atau lingkungan yang berpotensi menjadi kumuh

g. Kepemudaan dan Olahraga

- Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berolahraga

- Pengaruh pergaulan yang buruk dapat menyebabkan pemuda terjerumus dalam aktivitas sosial yang negatif
- h. Pertanian
 - Rendahnya daya beli petani akibat rendahnya pendapatan yang diterima petani dengan belum optimalnya produksi pertanian
- i. Kelautan dan Perikanan
 - Rendahnya daya beli petani ikan dan nelayan akibat rendahnya pendapatan yang diterima dengan belum optimalnya produksi perikanan
- j. Perdagangan
 - Terus meningkatnya harga bahan pangan
 - Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan UMKM
- k. Pangan
 - Pangan segar yang beredar di masyarakat seringkali tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan
 - Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya akibat terus meningkatnya harga bahan pangan
- l. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Keluarga besar menyebabkan beban pengeluaran keluarga menjadi besar sehingga pemenuhan terhadap gizi anggota keluarga menjadi tidak maksimal
- m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Belum adanya kerjasama antardesa yang mendukung kegiatan ekonomi
 - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi hampir di seluruh lingkungan sosial
 - Hak dan suara anak seringkali diabaikan
- o. Sosial
 - Terbatasnya sumber daya dan kemampuan yang dimiliki pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya
- p. Kebudayaan

- Kemudahan akses informasi menyebabkan budaya lokal mulai tergerus oleh budaya asing yang belum tentu positif
- q. Pariwisata
 - Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru
- r. Perindustrian
 - Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri
- s. Tenaga Kerja
 - Terbatasnya informasi dan network yang dimiliki pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan
 - Terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh pencari kerja untuk mengembangkan keterampilannya
- t. Transmigrasi
 - Belum optimalnya peran program transmigrasi dalam penyerapan tenaga kerja
- u. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - Belum optimalnya pengembangan koperasi dan UMKM untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru
- v. Penanaman Modal
 - Belum optimalnya pengembangan penanaman modal untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru

b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sebagaimana halnya dengan masalah kemiskinan, juga ditemukan 20 bidang urusan yang berhubungan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bekasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Perencanaan
 - Integrasi dan sinkronisasi antara program nasional, provinsi, daerah, dan perangkat daerah belum terwujud seluruhnya
 - Kinerja pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan belum optimal
- b. Sekretariat Daerah
 - Laporan capaian kinerja yang tersusun belum seluruhnya sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan
 - Rekomendasi perbaikan program dan kegiatan belum seluruhnya ditindaklanjuti

- Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum diterapkan sepenuhnya sesuai ketentuan
 - Kebijakan yang dikeluarkan belum seluruhnya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - Rendahnya kualitas deregulasi kebijakan, tata laksana, manajemen perubahan, pelayanan publik, dan penguatan organisasi
- c. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Data dan informasi kependudukan yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan belum tersedia seluruhnya dan ter-update secara berkala
- d. Inspektorat Daerah
- Rendahnya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah
 - Pengendalian intern pemerintah daerah belum sepenuhnya diterapkan sampai ke tingkat perangkat daerah
- e. Kepegawaian
- Sistem pengadaan ASN belum sepenuhnya efektif, transparan dan akuntabel
 - Manajemen kinerja serta *reward and punishment* bagi ASN belum berjalan sehingga motivasi kerja ASN menjadi rendah
- f. Pendidikan dan Pelatihan
- Kurangnya motivasi ASN untuk mengembangkan kompetensinya
- g. Penelitian dan Pengembangan
- Preferensi untuk terus berada di zona aman dengan melaksanakan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya
 - Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan belum seluruhnya ditindaklanjuti
- h. Komunikasi dan Informatika
- Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik belum maksimal
 - Data dan informasi capaian pembangunan belum dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan mudah
- i. Statistik
- Data dan informasi capaian pembangunan belum tersedia seluruhnya dan ter-update secara berkala
- j. Persandian
- Keamanan informasi masih rentan untuk diretas oleh pihak luar

k. Penanaman Modal

- Kinerja layanan penanaman modal belum optimal

l. Kearsipan

- Masih rendahnya kualitas pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah

m. Kecamatan

- Belum optimalnya layanan perizinan dan non perizinan di kecamatan
- Rendahnya kualitas administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- Belum optimalnya penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

n. Keuangan

- Tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
- Pendapatan asli daerah belum tergali dengan optimal

o. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih ada gedung pemerintah yang belum memiliki sertifikat laik fungsi
- Kebutuhan sarana prasarana penunjang kinerja sesuai standar belum semuanya terpenuhi
- Masih ada jalan dan jembatan kabupaten yang rusak atau kapasitasnya tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang melintas
- Masih ada jalan dan jembatan desa yang rusak atau terputus
- Lahan yang tersedia tidak cukup untuk peningkatan kapasitas jalan/jembatan atau pembangunan jalan/jembatan baru untuk menambah aksesibilitas jalan
- Upaya pengendalian dan penanganan banjir dan kekeringan belum optimal
- Pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga belum dapat dicegah atau dikendalikan sepenuhnya
- Belum optimalnya perencanaan, pengendalian pemanfaatan, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang

p. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Masih ada jalan dan jembatan pada perumahan yang rusak atau terputus dan tidak memiliki perlengkapan jalan

- SPM bidang perumahan rakyat dan permukiman yang berkaitan dengan pasca bencana belum ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan
- q. Perhubungan
 - Masih ditemukan adanya kendaraan bermotor yang tidak laik jalan berkendara di jalan umum
 - Kurang optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas
- r. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - Ketahanan daerah terhadap bencana belum optimal
 - Kinerja petugas dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan korban bencana belum optimal
 - Masih terjadinya kejahatan dan konflik yang mengganggu ketertiban di masyarakat
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Belum optimalnya pemenuhan hak masyarakat dalam demokrasi
 - Perbedaan agama dan egosentris keagamaan di masyarakat seringkali menyebabkan konflik agama
 - Tidak semua masyarakat memahami tentang wawasan kebangsaan
- t. Sekretariat DPRD
 - Belum optimalnya peran DPRD dalam mewujudkan demokrasi dan pencegahan konflik di masyarakat
- u. Lingkungan Hidup
 - Layanan pengelolaan persampahan belum optimal
 - Belum optimalnya upaya pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Nasional

Berdasarkan misi dan arahan presiden, pemerintah pusat menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari masing-masing agenda pembangunan tersebut, beberapa isu strategis yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

- 1) Keberlanjutan sumber daya alam

Dalam keberlanjutan sumber daya alam, isu strategis yang dihadapi antara lain:

- a. Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang karena adanya peningkatan pemanfaatan SDA sebagai sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, sekaligus juga menjadi sumber devisa, seperti cadangan minyak dan gas.
- b. Diperlukan adanya pemanfaatan perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum lestari (*maximum sustainable yield/MSY*) dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan.
- c. Degradasi dan deplesi SDA lainnya seperti hutan, sumber daya air dan keanekaragaman hayati, serta kelangkaan air baku akibat deforestasi dan dampak perubahan iklim.

- 2) Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi

Dalam tata kelola sumber daya ekonomi, isu strategis yang dihadapi antara lain:

- a. Semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perumahan.
- b. Peningkatan populasi penduduk menyebabkan kebutuhan pangan ikut meningkat sementara ketidakpastian produksi menyebabkan fluktuasi harga pangan.

- c. Produktivitas yang rendah serta fluktuasi harga menyebabkan daya tawar petani rendah.
 - d. Perlunya penguatan manajemen dan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
 - e. Belum optimalnya produktivitas perikanan, dan perlunya peningkatan harmonisasi tata ruang laut dan darat berupa penyelarasan antara RTRW dengan RZWP3K dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (RZKSN/KSNT).
 - f. Pengelolaan dan pemanfaatan energi yang kurang efisien, kecukupan pasokan energi terutama gas, dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil, pemanfaatan sumber daya energi secara maksimal untuk bahan baku industri, kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa.
 - g. Pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas.
 - h. Penghematan energi di sektor industri, transportasi, bangunan dan sarana komersial perlu terus ditingkatkan.
 - i. Belum adanya fasilitas cadangan penyangga energi nasional untuk mengantisipasi kondisi krisis dan darurat energi.
- 3) Transformasi Struktural Berjalan Lambat
- Isu strategis terkait dengan transformasi struktural antara lain:
- a. Sektor industri pengolahan yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja formal masih terkendala dengan kenaikan upah tenaga kerja yang belum diikuti dengan peningkatan produktivitas yang setara akibat kualitas SDM yang rendah.
 - b. Kualitas investasi juga masih rendah dimana investasi belum sepenuhnya berorientasi ekspor, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Sebagian besar investasi masih menyasar pasar dalam negeri yang besar.
 - c. Transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya PMA yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sepenuhnya terwujud.
 - d. Investasi bergeser dari sektor sekunder ke sektor tersier dalam dua tahun terakhir.
 - e. Peningkatan skala usaha UMKM saat ini belum menunjukkan hasil.
- 4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Isu strategis terkait dengan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital yaitu bahwa kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat masih kurang.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Permasalahan terkait dengan agenda pembangunan ini adalah ketimpangan antar wilayah yang terjadi akibat isu-isu sebagai berikut:

- 1) Belum tercapainya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- 2) Belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.
- 3) Masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan.
- 4) Terbatasnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas nasional.
- 5) Tingginya dinamika politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Sementara khusus untuk wilayah Jawa-Bali, isu yang dihadapi antara lain:

- 1) Tingginya eksploitasi kegiatan ekonomi di kawasan budidaya dan kawasan lindung seperti kawasan karst yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
 - 2) Semakin berkurangnya ketersediaan dan pasokan air yang tidak sebanding dengan permintaan.
 - 3) Tingginya perubahan konversi lahan pertanian pangan beririgasi teknis yang mengancam peran Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional.
 - 4) Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan tingginya potensi ancaman bencana.
 - 5) Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
Isu terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, antara lain:

- a. Pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk.
- b. Keserasian pendataan penduduk, statistik hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia.
- c. Pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan penduduk kelompok khusus.
- d. Administrasi kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor.

b. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

Terkait dengan perlindungan sosial, isu yang dihadapi antara lain:

- a. Permasalahan pada akurasi dan kelengkapan data serta prosedur administrasi yang lama menyebabkan program-program bantuan sosial belum dapat terintegrasi secara optimal.
- b. Perlindungan sosial yang adaptif belum sepenuhnya berkembang.
- c. Perlindungan sosial masih belum memihak sepenuhnya terhadap kelompok khusus antara lain penyandang disabilitas maupun penduduk lansia yang rentan miskin.

c. Pemenuhan layanan dasar

Dalam pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat, isu strategis yang ditemui antara lain:

- a. Meski derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh penduduk.
- b. Kematian ibu dan bayi masih tinggi.
- c. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal.
- d. Penggunaan kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/CPR*) cara modern menurun.
- e. Angka kelahiran (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) umur 15-19 tahun masih tinggi akibat rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak serta penyiapan kehidupan berkeluarga yang masih belum optimal.
- f. Pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup juga masih rendah sehingga prevalensi stunting masih tinggi.

- g. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman *emerging diseases* akibat tingginya mobilitas penduduk.
- h. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat.
- i. Kondisi lingkungan diperburuk dengan polusi udara, air dan sanitasi dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang belum terkelola dengan baik.
- j. Proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni, dengan akses terhadap air minum layak, dan sanitasi layak masih kurang.
- k. Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien.
- l. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai *gate keeper*. Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal.
- m. Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi, misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur.
- n. Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan tenaga kesehatan masih menumpuk di daerah perkotaan.
- o. Masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.
- p. Partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah.
- q. Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan.

- r. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah.
- s. Kesenjangan mutu antarsatuan pendidikan tinggi
- d. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
Dalam peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, isu strategis yang dihadapi antara lain:
 - a. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal.
 - b. Pengasuhan anak juga belum optimal.
 - c. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif.
 - d. Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat dengan spektrum yang semakin beragam
 - e. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan juga belum optimal.
- e. Pengentasan kemiskinan
Dalam pengentasan kemiskinan, isu strategis yang dihadapi antara lain:
 - a. Laju penurunan kemiskinan cenderung melambat
 - b. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi bukan merupakan sektor andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan.
 - c. Kelompok miskin dan rentan masih sulit bersaing dalam usaha produktif karena daya saing yang rendah, akses terhadap pasar dari produk yang dihasilkan serta kolaborasi usaha yang rendah dan kolaborasi keperantaraan usaha belum optimal.
- f. Peningkatan produktivitas dan daya saing
Dalam hal peningkatan produktivitas dan daya saing, isu strategis yang dihadapi antara lain:
 - a. Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.
 - b. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja.
 - c. Program studi yang dikembangkan pada jenjang pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjawab potensi dan kebutuhan pasar kerja.
 - d. Kapasitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi Indonesia masih rendah.

- e. Perguruan tinggi belum terlalu fokus dalam mengembangkan bidang ilmu yang menjadi keunggulan dan masih kurang terhubung dengan jejaring kerjasama riset, baik antara perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian di dalam dan luar negeri.
 - f. Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional mengalami peningkatan, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan
 - g. Capaian prestasi olahraga Indonesia masih tertinggal dan belum didukung oleh budaya olahraga yang baik.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Isu strategis terkait agenda pembangunan ini terbagi kembali ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:

- 1) Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa
Terkait dengan ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa, isu-isu yang dihadapi antara lain:
 - a. Melemahnya ideologi Pancasila.
 - b. Pertukaran budaya global yang tidak disertai dengan ketahanan budaya yang tangguh dapat menggerus nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- 2) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
Terkait dengan pemajuan kebudayaan Indonesia, isu-isu yang dihadapi antara lain:
 - a. Ekosistem kebudayaan belum berjalan dengan optimal.
 - b. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya.
- 3) Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti
Terkait dengan pendidikan karakter dan budi pekerti, isu yang dihadapi adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan karakter dan budi pekerti belum sepenuhnya dapat terwujud dalam lingkungan sekolah dan budaya belajar yang mampu tumbuh sebagai kebiasaan yang baik.
 - b. Kekerasan fisik di kalangan pelajar juga masih marak terjadi.
- 4) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
Isu yang dihadapi terkait hal ini adalah belum terwujudnya moralitas keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama. Selain itu, pelayanan terkait keagamaan, pengumpulan zakat, dan jaminan produk halal masing belum optimal.

- 5) Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan

Isu yang dihadapi antara lain:

- a. Gejala intoleransi yang mulai mengemuka perlu mendapat perhatian serius agar tidak merusak semangat persatuan dalam kemajemukan.
- b. Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak disertai dengan kearifan dan pengetahuan dapat memicu perselisihan yang berpotensi mengganggu kerukunan dan harmoni sosial.

- 6) Belum optimalnya peran keluarga, khususnya dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan keluarga, antara lain:

- a. Masih tingginya angka perkawinan anak.
- b. Meningkatnya angka perceraian.
- c. Masih tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan

- 7) Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Isu strategis yang dihadapi adalah rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas masyarakat sementara tantangan zaman yang terus berkembang dan berubah membutuhkan kemampuan literasi untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh untuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

- 1) Infrastruktur pelayanan dasar

Agenda pembangunan yang akan menjadi fokus dalam infrastruktur pelayanan dasar yaitu:

- a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, dengan isu yang dihadapi antara lain: keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, serta keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani perumahan dan kawasan permukiman di tingkat daerah belum diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Peran pemerintah daerah perlu diperkuat untuk menciptakan iklim kondusif bagi industri perumahan seperti perizinan dan pemenuhan standar keandalan bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan dilayani ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.

- b. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan isu yang dihadapi yaitu belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman akibat masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari sistem penyediaan air minum (SPAM); belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman, dimana persentase perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi; operasionalisasi instalasi pengolahan air limbah skala kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 persen kapasitas IPAL yang masih dapat dimanfaatkan; rendahnya jumlah instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal; masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah; kurangnya armada pengangkutan dan adanya tantangan geografis, fungsi kelembagaan regulator dan operator layanan dasar di daerah masih terbatas baik dalam jumlah maupun kapasitas; belum terintegrasinya perencanaan antar sektor seperti strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK) dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang; serta implementasi perencanaan yang belum maksimal.
- c. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, dengan isu strategis yaitu tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: too much, too little, too dirty), serta permasalahan dalam pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.
- d. Keselamatan dan keamanan transportasi, dengan isu strategis antara lain: tingginya jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh berbagai aspek, seperti kelaikan kendaraan, kondisi prasarana jalan, perilaku pengguna jalan, maupun kecepatan penanganan bagi korban kecelakaan; kurangnya kelaikan kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian yang meliputi sarana kereta, prasarana rel, sistem persinyalan, telekomunikasi dan listrik kereta api; belum efektifnya peran syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran, yaitu belum optimalnya kelaikan prasarana dan sarana, belum terbangun atau berjalannya sistem informasi dan

tiket, serta masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia pada otoritas dan operator layanan angkutan; serta masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan dalam aspek pencarian dan pertolongan korban pada kejadian kecelakaan transportasi dan bencana.

- e. Ketahanan kebencanaan infrastruktur, dengan isu strategis yaitu: kerawanan bencana yang semakin tinggi akibat perkembangan kota dan posisinya yang berada pada zona rawan bencana; tingkat keamanan infrastruktur vital perkotaan seperti transportasi, energi, dan sumber daya air masih belum memadai dalam menghadapi risiko bencana; proses pemulihan kondisi lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada pemulihan kondisi daerah tangkapan air; serta penurunan risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi: kemampuan mengadopsi teknologi tahan bencana masih terbatas dan infrastruktur terbangun belum memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana.
- f. Waduk multiguna dan modernisasi irigasi, dengan isu strategis antara lain: kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya; fungsi multiguna bendungan belum optimal; serta pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi.

2) Infrastruktur ekonomi

- a. Konektivitas jalan, dengan isu strategis yang dihadapi adalah ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah serta kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air; serta belum memadainya kualitas prasarana jalan dan masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan.
- b. Konektivitas kereta api, dengan isu strategis antara lain: masih rendahnya peran kereta api dalam mendukung angkutan barang dan pergerakan penumpang antarkota secara lebih cepat dan efisien;

porsi angkutan barang yang diangkut oleh kereta api baru mencapai 2% dari jumlah barang yang diangkut oleh seluruh moda transportasi; masih terbatasnya peran kereta api dalam mendukung angkutan penumpang aglomerasi perkotaan dan koridor konurbasi kota-kota utama yang memiliki tingkat permintaan perjalanan antarkota yang tinggi; serta waktu tempuh tidak kompetitif dengan angkutan udara maupun jalan tol.

- c. Konektivitas laut, dengan isu strategis yaitu: belum terwujudnya efisiensi kinerja angkutan logistik yang disebabkan oleh kinerja pelabuhan belum memenuhi standar (panjang dermaga, kedalaman kolam, dan alur pelayaran), jaringan pelayaran masih menggunakan ukuran kapal yang belum optimal dengan rute yang belum membentuk jaringan saling terhubung (*loop*), belum berkembangnya kawasan pendukung pelabuhan (*hinterland*), masih terbatasnya konektivitas multimoda dan antarmoda pada pelabuhan dan hinterland, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi logistik kemaritiman. Di samping itu, armada kapal niaga dalam negeri masih didominasi oleh kapal berumur di atas 25 tahun. Isu strategis lainnya adalah kebutuhan peran angkutan laut yang lebih besar dalam menjangkau daerah kepulauan dan 3T dalam rangka mengurangi disparitas harga barang antarwilayah. Moda angkutan laut yang melayani wilayah 3T masih belum mengoptimalkan keterpaduan antarmoda transportasi termasuk moda jalan, angkutan perintis darat, dan udara. Keterbatasan moda angkutan laut dalam melayani wilayah 3T juga disebabkan oleh belum memadainya fasilitas pelabuhan termasuk ketersediaan peralatan bongkar muat.
- d. Konektivitas udara, dengan isu strategis antara lain: belum memadainya kapasitas bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya pada bandara-bandara utama; peran angkutan udara perintis belum optimal dalam mendukung pergerakan penumpang dan distribusi barang yang dapat menjangkau daerah 3T; prasarana lapangan terbang kecil (*airstrip*) untuk mendukung angkutan di wilayah 3T kondisinya kurang memadai, belum dikelola dengan baik, serta belum memenuhi standar keselamatan; peran angkutan udara, kualitas pelayanan bandara, serta rute angkutan udara untuk mendukung sektor pariwisata masih terbatas; serta pengembangan bandara perairan

(*waterbased airport*) dalam mendukung peningkatan destinasi pariwisata perairan belum berkembang.

3) Infrastruktur perkotaan

Isu strategis terkait infrastruktur perkotaan adalah sebagai berikut:

a. Transportasi perkotaan

Isu strategis transportasi perkotaan adalah belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum masal perkotaan di kota-kota besar sehingga pangsa angkutan umum di kota-kota besar di Indonesia menjadi rendah. Rendahnya pangsa angkutan umum berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas. Upaya pengembangan angkutan umum masal masih dibatasi oleh batas administratif pemerintahan, sehingga sulit untuk mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi dan berdaya jangkau di luar batas administrasi kota/daerah. Di samping itu, kemampuan fiskal pemerintah daerah belum memadai untuk membangun sistem angkutan umum masal perkotaan yang modern.

b. Energi dan ketenagalistrikan perkotaan

Isu yang dihadapi terkait dengan energi dan ketenagalistrikan perkotaan adalah peningkatan kebutuhan listrik perkotaan masih didominasi dengan pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil sehingga berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan, serta belum optimalnya diversifikasi sumber penyediaan listrik.

c. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan

Pengembangan kota cerdas belum didukung pemanfaatan TIK yang handal dalam berbagai layanan perkotaan. Pemanfaatan TIK di berbagai kota di tanah air saat ini masih rendah akibat penetrasi akses infrastruktur TIK juga belum optimal dan pemanfaatan akses nirkabel oleh masyarakat lebih banyak dipergunakan untuk interaksi dan media sosial dibanding untuk mengakses layanan pemerintah atau kegiatan yang produktif.

d. Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan

Isu yang dihadapi terkait akses air minum dan sanitasi adalah masih lemahnya penyediaan infrastruktur layanan air minum dan sanitasi di perkotaan. Selain itu, masih terdapat rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka dan rumah tangga yang memiliki toilet namun tidak

memiliki tangki septik (pembuangan langsung ke kolam/sawah/sungai/danau/laut dan/atau pantai/tanah lapang/kebun) sehingga menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman, penurunan kualitas air, dan penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan stunting, serta pemanfaatan instalasi pengolahan air limbah skala kota dan penyediaan layanan pengolahan lumpur tinja (*Fecal Sludge Management*) belum optimal.

- e. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan

Isu yang dihadapi adalah belum optimalnya sistem penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah telah menyebabkan berkembangnya perumahan dan permukiman yang tidak layak, tidak teratur, bahkan ilegal.

4) Energi dan Ketenagalistrikan

Isu strategis terkait energi dan kelistrikan adalah sebagai berikut:

- a. Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan

Isu yang dihadapi terkait hal ini adalah sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil (minyak, batubara, dan gas bumi) sementara ketersediaan energi fosil dari waktu ke waktu semakin terbatas. Selain itu, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) masih jauh dari target bauran EBT sesuai dengan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Susut energi pada transmisi dan distribusi ketenagalistrikan juga masih besar akibat belum berkembangnya pengelolaan kualitas bahan bakar, penggantian mesin dan perangkat lunak untuk perangkat kontrol, serta belum berkembangnya pembangkit listrik yang menggunakan teknologi batubara yang lebih bersih.

- b. Akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan

Terkait akses, isu yang dihadapi adalah masih rendahnya keandalan akses listrik di Indonesia yang ditunjukkan oleh tingginya rasio gangguan tahunan, masih ada penduduk menggunakan kayu bakar karena pertimbangan harga dan keterjangkauan pelayanan, serta kebijakan subsidi energi untuk menjamin keterjangkauan energi bagi masyarakat kecil belum tepat sasaran sehingga konsumsi energi cenderung belum efisien.

- c. Kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan

Penggunaan listrik per kapita di Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik per kapita di negara berpendapatan menengah lain akibat pengembangan kegiatan produktif masyarakat yang masih terbatas. Selain itu, tata kelola industri ketenagalistrikan masih belum optimal dimana kebijakan harga dan tarif listrik belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat dan keberlanjutan industri penyediaan listrik. Pengembangan kelembagaan untuk mendorong industri ketenagalistrikan masih perlu ditingkatkan agar industri dan distribusi penyediaan listrik berjalan dengan lebih efisien dan berkembang. Juga pemenuhan kebutuhan domestik akan bahan bakar minyak dan gas bumi masih menjadi tantangan.

5) Transformasi digital

Isu strategis dalam transformasi digital terbagi ke dalam 3 aspek, yaitu:

a. Penuntasan infrastruktur TIK

Pembangunan infrastruktur TIK perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta infrastruktur TIK perlu diperluas agar dapat menjangkau seluruh daerah dan seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*) dan jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*). Tingkat kecepatan jaringan tetap dan jaringan bergerak pitalebar di Indonesia masih rendah serta jangkauannya masih terbatas. migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan kualitas penyiaran, khususnya televisi. Digitalisasi penyiaran akan memberikan ruang pemanfaatan spektrum frekuensi untuk kebutuhan penggunaan lain (*digital dividend*).

b. Pemanfaatan infrastruktur TIK

Dalam hal pemanfaatan, isu yang dihadapi yaitu masih banyak instansi yang membangun aplikasi umum dan masih banyak data yang belum terintegrasi sehingga membuat pemanfaatan TIK menjadi tidak optimal. Penerapan pembelajaran jarak jauh pada dunia pendidikan khususnya di perdesaan masih belum maksimal sehingga pemerataan kualitas pendidikan melalui TIK masih belum efektif. Pemanfaatan TIK di bidang kesehatan juga masih belum optimal,

dimana data kesehatan belum terintegrasi. Selain itu, beberapa pemanfaatan platform digital seperti telemedicine, tediagnosis dan teknologi kesehatan lainnya juga belum efektif. Pemanfaatan TIK di sektor pertanian dan perikanan masih sangat minim. Pemanfaatan TIK di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif juga masih perlu dikembangkan serta dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

c. Fasilitas pendukung transformasi digital

Dalam hal fasilitas pendukung dan transformasi digital, hal yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan literasi digital masyarakat dalam memahami dan menggunakan informasi. Sebagai tambahan, juga perlu adanya pengembangan SDM TIK, peningkatan keamanan teknologi informasi, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan literasi masyarakat.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Dalam aspek kualitas lingkungan hidup, isu yang dihadapi antara lain:

- a. Deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup, seperti berkurangnya tutupan hutan.
- b. Kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan akan meningkat hingga 2030 akibat ketidakseimbangan neraca air, kondisi daerah hulu tangkapan air yang semakin kritis, serta eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perkotaan.
- c. Luas habitat ideal satwa langka terancam punah.
- d. Daya tampung lingkungan hidup juga semakin merosot akibat tingginya pencemaran dan upaya penanganannya yang belum optimal.
- e. Meningkatnya tindak pelanggaran hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup serta upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus SDA dan lingkungan hidup terkendala akibat beragamnya tipologi kejahatan, skala kejahatan yang masif dan lokasi kejahatan yang tersebar bahkan lintas batas wilayah administrasi, besarnya dampak dan nilai kerugian yang ditimbulkan, serta modus kejahatan yang semakin dinamis dan terorganisir.

2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim

Isu yang dihadapi berkenaan dengan ketahanan bencana dan iklim antara lain: tingginya risiko bencana di Indonesia akibat karakteristik geologi Indonesia yang terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif, kurang optimalnya pemahaman masyarakat terhadap informasi bencana, jangkauan pelayanan informasi bencana belum dapat menjangkau seluruh daerah yang rawan bencana, peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim dan variabilitas iklim ekstrem jangka pendek, serta masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah.

3) Pembangunan rendah karbon

Penurunan emisi dan intensitas emisi GRK melalui pembangunan rendah karbon memerlukan transisi penanganan perubahan iklim dari semula hanya fokus pada upaya penurunan emisi GRK menjadi penanganan yang lebih holistik dengan tetap menjaga keberkelanjutan dan keselarasan antara pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan perbaikan lingkungan hidup melalui platform pembangunan rendah karbon. Selain itu, juga diperlukan adanya dukungan terhadap pembangunan rendah karbon, yaitu komitmen untuk menerapkan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat secara nasional maupun internasional, bukan hanya untuk membentuk motivasi melainkan juga untuk memperkuat modal dan kapasitas para pihak dan keterlibatan aktor non-pemerintah seperti sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan. Kondusivitas dan stabilitas politik nasional juga perlu menjadi perhatian. Transisi pembangunan rendah karbon perlu diselaraskan dengan dukungan pengembangan teknologi dan inovasi. Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

1) Konsolidasi demokrasi

Isu yang dihadapi terkait konsolidasi demokrasi yaitu:

- a. Kualitas representasi, seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
- b. Biaya politik tinggi mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

- c. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, serta rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.
- 2) Optimalisasi kebijakan luar negeri
- a. Aspek keamanan seiring dengan semakin mudahnya pergerakan warga antarnegara di tengah arus globalisasi meningkatkan kompleksitas permasalahan WNI yang melakukan migrasi. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki batas-batas wilayah yang masih dirundingkan, baik penetapan batas laut dan penegasan batas darat, untuk menjaga kedaulatan wilayahnya sebagai negara kepulauan. Selain itu, Pemerintah juga masih menghadapi ancaman transnasional, seperti terorisme, penyelundupan narkoba hingga IUUF.
 - b. belum optimalnya penanganan pasar nontradisional yang sebagian besar negara Selatan–Selatan. Untuk itu, perlu penguatan kerja sama pembangunan internasional dengan mengoptimalkan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) untuk mendukung perdagangan dan investasi. Kelembagaan pelaksana pemberian bantuan dan kerja sama pembangunan internasional diperkuat, serta sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru harus dikembangkan. Partisipasi aktor non pemerintah, terutama pihak swasta juga perlu ditingkatkan, dalam upaya memperkenalkan produk dan teknologi yang dikembangkan perusahaan swasta, serta meningkatkan citra dan pengakuan produk nasional secara global.
 - c. Perlunya sinergi diplomasi publik yang lebih mengaktualisasi kekayaan sosial budaya, seperti: kuliner, kebhinekaan, dan toleransi, guna meningkatkan citra positif Indonesia di pergaulan internasional. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia yang akan ditampilkan kepada publik internasional.
 - d. Perlunya penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalam merespons perkembangan dinamika global dengan pendekatan

diplomasi total. Penataan peran dan fungsi K/L diperlukan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan luar negeri.

3) Penegakan hukum nasional

Indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan meski pembangunan hukum telah dilakukan. Hal tersebut akibat masih lemahnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi. Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (*overcrowding*) hingga 103 persen. Sementara itu, pada sistem peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi perlu dibenahi. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

4) Reformasi birokrasi dan tata kelola

a. Instansi pemerintah yang menerapkan sistem merit dengan sangat baik masih sangat sedikit. Hirarki eselonisasi membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien. Jumlah tenaga spesialis di lingkungan ASN masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN, terutama di luar Jawa. Selain itu, persebaran ASN dengan keahlian tertentu/fungsional belum berbasiskan sektor unggulan kewilayahan. Masih terdapat intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian. Juga diperlukan perbaikan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN. Terakhir dari aspek regulasi, perlu percepatan penerbitan peraturan pelaksana UU No.5/2014 tentang ASN.

b. Masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat dan Lembaga Non Struktural. Tumpang tindih tersebut disebabkan oleh belum adanya penataan tugas dan fungsi

dari lembaga-lembaga tersebut. Fragmentasi tugas dan fungsi mempersulit pola koordinasi antarlembaga sehingga tata kelola menjadi tidak efektif. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tumpang tindih tersebut adalah dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan satu data indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan.

- c. Jumlah pengaduan masyarakat meningkat signifikan, dimana mayoritas pengaduan terkait penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. Terkait pelayanan terpadu, perlu adanya pelimpahan/pendelegasian kewenangan pelayanan kepada mal pelayanan publik dan unit pelayanan publik (UPP) di desa, kelurahan, dan kecamatan. Persoalan lain adalah belum adanya integrasi proses bisnis dan pemanfaatan data terpadu dalam penyediaan layanan. Selain itu, penerapan inovasi pelayanan publik secara elektronik (*e-service*) masih belum terintegrasi antar jenis layanan dengan tingkat kematangan (*maturitas*) yang beragam.
 - d. Masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi. Untuk itu, perlu percepatan keterpaduan sistem dan melanjutkan *money follow program* sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Juga perlu adanya sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.
- 5) Menjaga stabilitas keamanan nasional dinamika ancaman pertahanan
Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional diperlukan pembangunan pertahanan yang mampu mengatasi semua bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun terdapat upaya proliferasi senjata pemusnah massal, trend pengadaan persenjataan di regional Asia masih tinggi. Pada lingkup nasional pertahanan negara masih dihadapkan pada gangguan kedaulatan di wilayah tertentu.
 - 6) Dukungan industri pertahanan belum optimal

- Beberapa kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan. Namun, alutsista strategis seperti: pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV), dan radar masih mengandalkan produksi luar negeri. Untuk itu, perlu adanya penguasaan teknologi kunci, kemampuan integrasi sistem, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam industri pertahanan.
- 7) **Dinamika ancaman siber**
- Penguasaan teknologi dan akses terhadap internet yang signifikan berimplikasi pada potensi ancaman siber yang dapat meningkatkan ancaman keamanan nasional. Ancaman tersebut semakin serius karena regulasi, infrastruktur, dan SDM.
- 8) **Indonesia menjadi negara tujuan peredaran gelap narkoba**
- Pasar narkoba di Indonesia menarik sindikat internasional karena jumlah penduduk yang besar dan harga jual yang tinggi. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan menyebabkan banyaknya pintu masuk penyelundupan narkoba. Penyelundupan paling rentan terjadi di laut karena terbatasnya pengawasan di wilayah perbatasan.
- 9) **Pelanggaran wilayah dan angka kejahatan di perbatasan**
- Terbatasnya infrastruktur dan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan menjadi penyebab tingginya kasus kejahatan. Di samping itu, pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna juga menjadi salah satu ancaman nyata bagi hak berdaulat Indonesia untuk mengeksplorasi SDA. Ancaman lainnya adalah konflik di negara lain yang memaksa terjadinya migrasi yang melewati wilayah Indonesia.
- 10) **Rendahnya rasa aman di lingkungan masyarakat**
- Kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan perdagangan manusia masih relatif tinggi. Di samping itu, perempuan dan anak korban kekerasan juga memerlukan penanganan khusus.
- 11) **Tingginya angka kejahatan dan pelanggaran hukum di laut**
- Penegakan hukum yang belum optimal berdampak pada tingginya perompakan dan penyelundupan. Selain itu, tindak pidana terkait sumber daya alam juga masih tinggi berupa IUUF dan pembuangan sampah atau limbah ke laut. Untuk merespon permasalahan di atas diperlukan penguatan regulasi, infrastruktur, dan kelembagaan yang

mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan pemangku kepentingan terkait keamanan laut.

12) Sarana penyebaran paham radikal semakin beragam

Meluasnya penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga pemasyarakatan. Segmen perekrutan semakin beragam, tidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak.

Selain itu, target pembangunan untuk wilayah Jawa Barat untuk tahun 2020-2024 adalah peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ke angka 6%, menurunnya tingkat kemiskinan ke angka 4,75%, serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka ke angka 6,7%.

4.2.2 Isu Strategis Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat menetapkan 5 (lima) isu strategis untuk tahun 2018-2023, antara lain:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia (SDM)

a. Pendidikan

Terkait dengan urusan pendidikan, isu yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat yaitu: rendahnya pelayanan pendidikan yang ditandai dengan rendahnya capaian APK dan APM untuk pendidikan menengah yang belum mencapai 100%, belum meratanya distribusi guru dan sekolah antar daerah, banyaknya sekolah yang masih terakreditasi C dan bahkan sama sekali belum terakreditasi, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolahan yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

b. Kesehatan

Pada isu kesehatan, permasalahan yang dihadapi antara lain: masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup sehat dan bersih, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, permasalahan

masyarakat kurang gizi yang ditandai dengan 1 dari 4 anak usia 0 sampai 59 bulan mengalami stunting.

c. Pemberdayaan perempuan

Pada pemberdayaan perempuan, isu yang dihadapi adalah rendahnya peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan; indikator ketenagakerjaan perempuan belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan; serta belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan.

2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

a. Kemiskinan dan pengangguran

Terkait dengan kemiskinan dan pengangguran, isu yang dihadapi oleh Jawa Barat antara lain: angka kemiskinan dan jumlah pengangguran mengalami peningkatan yang cukup tinggi, keterbatasan kesempatan kerja baru, tidak *adanya link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri.

b. Masalah sosial lainnya

Masalah sosial lainnya yang masih menjadi isu di Jawa Barat, yaitu: belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan *human trafficking*, belum optimalnya penanganan PPKS, serta ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan umat beragama

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan

a. Masalah pembangunan

Isu strategis terkait pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi sehingga berkembang tanpa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Juga belum adanya dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan

prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri.

b. Bencana alam

Terkait dengan bencana alam, isu strategis yang dihadapi Jawa Barat adalah perubahan iklim yang tidak menentu.

c. Pengelolaan lingkungan hidup

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, isu yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi individual/terpusat, serta pelayanan air minum, air bersih dan air baku.

4. Produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan

a. Perekonomian

Terkait perekonomian, isu yang dihadapi yaitu: belum berkembangnya KUKM, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim; belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi; belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil; belum optimalnya kapasitas *digital literacy* bagi para pelaku UKM dalam memasarkan produknya; realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata; ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata; dinamika sosial yang dikhawatirkan akan menghambat kepastian dan keamanan berusaha; belum optimalnya sarapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN; serta dinamika ekonomi yang cukup tinggi sehingga meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha yang menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi.

b. Pariwisata

Terkait pariwisata, isu yang dihadapi antara lain: belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif yang disebabkan belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenities pariwisata; belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dengan kabupaten/kota; serta kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungutan liar di destinasi wisata.

c. Pertanian

Dalam sektor pertanian, isu yang dihadapi antara lain: masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian,

menurunnya luas lahan pertanian, intensitas pembangunan non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya generasi petani dan akses permodalan, kesulitan petani dalam akses pasar, SDM petani yang masih terbatas, regenerasi petani masih rendah dan usia petani berada di atas usia produktif, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian, belum tersedianya pusat distribusi daerah produk pertanian, serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi.

d. Perikanan dan kelautan

Pada perikanan dan kelautan, isu yang dihadapi antara lain: rendahnya nilai tukar nelayan, eksploitasi ruang laut yang berlebihan, tingginya tingkat pencemaran yang mengakibatkan penurunan laju tangkapan dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal, masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap, pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir, serta masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan.

e. Pangan

Pada ketahanan pangan daerah, isu yang dihadapi adalah ketersediaan stok pangan yang belum mencukupi sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan.

f. Kehutanan

Terkait dengan urusan kehutanan, isu yang dihadapi adalah degradasi lahan yang masih tinggi di DAS, pengelolaan hutan kayu belum optimal, rendahnya produksi hutan kayu dan bukan kayu, tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, serta rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan.

g. Perdagangan

Pada perdagangan, isu yang dihadapi yaitu: rendahnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB karena adanya dominasi impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, kurangnya promosi produk industri lokal, serta belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

h. Industri

Pada sektor industri, isu yang dihadapi yaitu: rendahnya pertumbuhan sektor industri, rendahnya daya saing produksi industri akibat biaya ekonomi tinggi yang menyebabkan bahan baku industri mayoritas impor, infrastruktur pendukung kawasan industri belum terintegrasi yang menyebabkan tingginya biaya logistik, serta ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikat belum memadai.

5. Reformasi birokrasi

Pada reformasi birokrasi, isu yang dihadapi adalah terkait dengan pelayanan publik, yaitu: rendahnya tingkat sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan PAD.

4.2.3 Isu Strategis Kabupaten Bekasi

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan daerah serta telaahan terhadap isu strategis di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan isu strategis daerah sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Isu utama pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bekasi adalah bagaimana menurunkan jumlah penduduk miskin dan mencegah timbulnya orang miskin baru. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan adalah sebuah lingkaran yang terus berulang akibat ketidakmampuan seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya serta terbatasnya kesempatan yang dimilikinya untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya sehingga terus terjebak dalam kemiskinan, maka isu terkait pengentasan kemiskinan yang akan diangkat untuk pembangunan selama 4 (tahun) ke depan adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Isu yang dihadapi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesehatan masyarakat akibat tidak terpenuhinya kebutuhan gizi, air minum yang bersih, gaya hidup tidak sehat, dan kondisi lingkungan yang buruk,

belum meratanya pembangunan sampai ke tingkat desa, terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh perempuan, anak, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya, serta rentannya pemuda terhadap pengaruh buruk lingkungan eksternal.

b. Pengangguran dan Kesempatan Kerja

Isu yang dihadapi terkait dengan pengangguran dan kesempatan kerja adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sementara tidak semua pencari kerja memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memenuhi standar perusahaan.

2. Pertumbuhan Ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu perhatian utama lainnya setelah kemiskinan dikarenakan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah akan berpengaruh luas ke banyak sektor. Sebagaimana terjadi di tahun 2020, dengan jatuh bebasnya laju pertumbuhan ekonomi daerah ke -3,3% akibat Covid-19 telah menjadikan pengeluaran per kapita penduduk ikut menurun, meningkatkan rasio gini dan jumlah pengangguran, meningkatkan jumlah penduduk miskin serta kedalaman dan keparahan kemiskinan, dan lainnya.

Namun, PDRB Kabupaten Bekasi yang didominasi oleh industri pengolahan yang dikuasai oleh industri besar menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan kebijakan secara langsung untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah karena kebijakan ekonomi dan moneter serta pengaturan industri besar diatur oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi mengangkat isu lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, antara lain:

a. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan isu yang dihadapi antara lain:

- Lemahnya perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan atas program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- Kualitas ASN yang tersedia belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
- Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum berjalan optimal dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.



- Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh program pembangunan.
 - Sarana dan prasarana penunjang kinerja ASN yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi, dengan isu yang dihadapi antara lain:
- Kerentanan daerah terhadap bencana masih cukup tinggi.
 - Penduduk Kabupaten Bekasi yang plural menyebabkan tingkat kerentanan terjadinya konflik suku, ras, agama, dan golongan menjadi lebih tinggi.
- c. Kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, dengan isu yang dihadapi antara lain:
- Kinerja pengelolaan persampahan belum mampu menangani seluruh sampah yang dihasilkan.
 - Pencemaran terhadap air, udara, dan tanah belum dapat dikendalikan sepenuhnya.
 - Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya selaras dengan rencana tata ruang.
- d. Infrastruktur dan konektivitas wilayah, dengan isu yang dihadapi yaitu:
- Kondisi jalan kabupaten dan jalan penghubung antarpermukiman dan perumahan belum seluruhnya berada dalam kondisi baik atau sesuai dengan kapasitas jalan yang diperlukan.
 - Sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas belum sepenuhnya tersedia secara optimal.

Tabel 4.2
Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional
dengan Isu Strategis Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi

| No. | Agenda Pembangunan Nasional | Isu Strategis Provinsi Jawa Barat | Isu Strategis Kabupaten Bekasi |
|-----|---|--|--------------------------------|
| 1. | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan | Pertumbuhan Ekonomi daerah |
| 2. | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | | |



| No. | Agenda Pembangunan Nasional | Isu Strategis Provinsi Jawa Barat | Isu Strategis Kabupaten Bekasi |
|-----|---|---|--------------------------------|
| 3. | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | |
| 4. | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan | |
| 5. | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | | |
| 6. | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial | Kemiskinan |
| 7. | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Kualitas nilai kehidupan dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) | |

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 dijelaskan sasaran pembangunan daerah untuk RPJMD tahap ke lima (tahun 2022-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang agamis dan unggul melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pembangunan sektor ekonomi yang berdaya saing di seluruh wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya. Berdasarkan hal tersebut, sektor ekonomi menjadi fokus utama pembangunan daerah dengan berorientasi pada peningkatan daya saing daerah yang bersifat komparatif baik dalam skala regional maupun nasional. Memperhatikan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Bekasi baik secara geografis, sosial maupun infrastruktur yang memadai untuk terus tumbuh dan berkembang secara perekonomian, sektor ekonomi didorong sebagai penopang utama pembangunan daerah dengan didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten Bekasi juga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan hasil analisa isu-isu strategis serta evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya, sektor utama pembangunan yang terdampak dan memberikan pengaruh cukup luas yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi kemudian menetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi, yaitu:

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

Adapun indikator dan target kedua tujuan di atas untuk tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan target nasional untuk Jawa Barat untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Indikator dan Target Tujuan Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

| No. | Tujuan Daerah | Indikator | Kondisi Awal | Target | | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|--------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan | Persentase Penduduk Miskin (%) | 5,21 | 4,69 | 4,66 | 4,63 | 4,60 | 4,6 |
| 2. | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,65 | 4,7-5,3 | 4,7-5,3 | 4,7-5,3 | 4,7-5,3 | 4,7-5,3 |

5.2 Sasaran

Berdasarkan isu strategis dan tujuan yang telah ditetapkan di atas, kemudian ditetapkan 5 (lima) sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari siklus kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut telah menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu bersaing dalam upaya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga pada akhirnya masyarakat miskin tidak dapat keluar dari siklus kemiskinan. Oleh sebab itu, dalam rangka menurunkan kemiskinan dan mencegah timbulnya masyarakat miskin baru, maka intervensi utama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan manusia.

2. Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja

Besarnya angkatan kerja di Kabupaten Bekasi dimana tidak semua pencari kerja memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memenuhi standar perusahaan sementara lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi. Dengan kemudahan akses transportasi dan komunikasi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya angkatan kerja di Kabupaten Bekasi tidak hanya bersaing dengan angkatan kerja dari daerah lain saja, melainkan juga akan bersaing dengan angkatan kerja yang berasal dari luar negeri, terutama pada sektor-sektor yang pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah. Oleh

karenanya, diperlukan adanya intervensi untuk mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru serta penyiapan angkatan kerja agar dapat berdaya saing dalam pencarian kerja.

3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam mendorong perekonomian daerah diperlukan mengingat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun. Peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta kepada pemerintah yang pada akhirnya dapat mendorong masuknya investasi serta pembukaan bisnis baru dan usaha di Kabupaten Bekasi.

4. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah

Faktor lainnya yang dapat diintervensi oleh pemerintah daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur dan konektivitas wilayah. Pengeluaran pemerintah yang besar di infrastruktur pelayanan publik dapat meningkatkan nilai PDRB kabupaten. Sementara konektivitas antarwilayah yang baik akan memudahkan akses barang dan jasa, yang dapat menurunkan biaya transportasi serta menurunkan biaya operasional keseluruhan sehingga akan menarik investasi dan bisnis untuk masuk dan berkembang.

5. Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi

Kondisi lainnya yang diperlukan untuk mendorong perkembangan bisnis dan usaha adalah kondusivitas wilayah. Bencana atau kerusakan yang terjadi tiap hari tentunya akan menghalangi jalannya bisnis dan usaha masyarakat. Kebijakan pembatasan yang ketat selama 2 tahun terakhir telah membuktikan bagaimana banyak perusahaan dan bisnis yang gulung tikar akibat omset yang diterima perusahaan tidak dapat menutupi biaya operasional yang besar dengan menurunnya produktivitas serta permintaan konsumen. Oleh karenanya, kondusivitas wilayah sangat diperlukan untuk menciptakan stabilisasi ekonomi agar dapat mendorong perekonomian untuk tumbuh lebih cepat.

6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Dalam menunjang perekonomian daerah, faktor penunjang lain yang tidak kalah penting adalah kualitas lingkungan hidup. Dengan semakin padatnya penduduk serta banyaknya aktivitas, kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Apalagi orientasi yang cenderung kepada profit seringkali melupakan dampaknya terhadap lingkungan sehingga diperlukan adanya



intervensi pemerintah agar kualitas lingkungan hidup tidak semakin merosot di masa yang akan datang. Degradasi kualitas lingkungan hidup pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya bencana baru yang akan mempengaruhi kondusivitas wilayah. Selain itu dengan kualitas lingkungan hidup yang baik, masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonominya dengan nyaman yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan. Daya dukung lingkungan juga dibutuhkan untuk usaha dalam skala besar. Untuk itu, kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendukung upaya mewujudkan kondusivitas wilayah.

Indikator dan target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2023-2026 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5.2
Indikator dan Target Sasaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

| No. | Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Indikator | Kondisi Awal | Target | | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|---|---|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) | 74,45 | 75,21 | 75,59 | 75,96 | 76,34 | 76,34 |
| | | Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 10,09 | 9,4 | 9,02 | 8,64 | 8,26 | 8,26 |
| 2. | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Indeks Reformasi Birokrasi (Poin) | 58,33 | 71,95 | 73,99 | 75,55 | 76,61 | 76,61 |
| | | Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah | Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (%) | N/A | 55,24 | 63,36 | 68,74 | 74,32 | 74,32 |
| | | Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi | Indeks Resiko Bencana (Poin) | 130,11 | 120,56 | 113,46 | 107,16 | 101,52 | 101,52 |
| | | | Indeks Demokrasi (Poin) | N/A | 70,28 | 71,88 | 72,07 | 72,09 | 72,09 |
| | | | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin) | N/A | 79,84 | 82,09 | 84,03 | 84,48 | 84,48 |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | 48,025 | 43,19 | 43,28 | 43,36 | 43,45 | 43,45 |



Adapun keterkaitan antara sasaran daerah Kabupaten Bekasi dengan sasaran RPJMN dan RPJMD Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Keterkaitan antara Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi
dengan Sasaran RPJMN dan RPJMD Jawa Barat

| Sasaran RPJMN | | Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat | | Sasaran RPD Kab. Bekasi | |
|---------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------|---|
| S1 | Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan | S17 | Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif | S2 | Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja |
| | | S18 | Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat | | |
| S2 | Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian | S19 | Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi | S2 | Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja |
| | | S10 | Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian | | |
| S3 | Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera. | S16 | Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri | S1 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia |
| | | S11 | Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa | | |
| | | S12 | Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan | | |
| S4 | Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tatakelola kependudukan | S4 | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak | S1 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia |
| | | S20 | Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel | S3 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik |
| S5 | Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk | S2 | Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat | S1 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia |
| S6 | Terpenuhinya layanan dasar | S3 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan | | |
| | | S5 | Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan | | |
| S7 | Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda | S4 | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak | | |



| Sasaran RPJMN | | Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat | | Sasaran RPD Kab. Bekasi | |
|---------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|---|
| | | S6 | Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional | | |
| S8 | Terwujudnya pengentasan kemiskinan | S2 | Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat | | |
| | | S16 | Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri | | |
| S9 | Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing | S5 | Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan | | |
| S10 | Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya | S7 | Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal | | |
| S11 | Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan | S7 | Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal | | |
| S12 | Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial | S1 | Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi | S5 | Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi |
| S13 | Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat | S1 | Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi | | |
| S14 | Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa | S1 | Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi | | |
| | | S4 | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak | S1 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia |
| S15 | Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif | S5 | Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan | S1 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia |
| S16 | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar | S14 | Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik | S1 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia |
| | | S13 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat | S5 | Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi |



| Sasaran RPJMN | | Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat | | Sasaran RPD Kab. Bekasi | |
|---------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|---|
| S17 | Meningkatnya konektivitas wilayah | S10 | Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian | S4 | Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah |
| S18 | Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan | S10 | Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian | | |
| S19 | Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien | S9 | Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok | | |
| S20 | Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi | S20 | Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel | S3 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik |
| S21 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | S13 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat | S6 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |
| S22 | Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim | S15 | Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana | S5 | Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi |
| | | S13 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat | | |
| S23 | Pembangunan Rendah Karbon | S13 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat | S6 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |
| S24 | Menguatnya Stabilitas Polhukhankam danTerlaksananya Transformasi Pelayanan Publik | S8 | Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial | S5 | Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi |
| | | S20 | Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel | S3 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik |
| | | S21 | Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif. | | |



BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|---|
| TUJUAN 1 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MENURUNNYA KEMISKINAN | |
| SASARAN 1.1 : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | |
| Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar Mendorong peningkatan pendidikan masyarakat melalui pendidikan non formal dan kesetaraan Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa pada jenjang pendidikan dasar Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan dasar negeri Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan Mendorong sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar untuk menerapkan kurikulum berbasis muatan lokal |
| Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan | Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar nasional pendidikan |
| Meningkatkan budaya literasi masyarakat agar mampu mengembangkan dirinya secara mandiri | Mendorong peningkatan minat masyarakat untuk membaca melalui peningkatan kualitas perpustakaan Melestarikan koleksi nasional dan naskah kuno |
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pada satuan kesehatan Meningkatkan pengawasan atas usaha kefarmasian, alat kesehatan, produk makanan, dan usaha pengelolaan makanan agar memenuhi standar kesehatan Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup bersih dan sehat Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin |



| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|--|
| | Meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada satuan kesehatan |
| | Mengoptimalkan peran desa, kecamatan, dan posyandu dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan |
| Meningkatkan standar mutu rumah sakit umum daerah sesuai dengan standar nasional | Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit |
| | Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pada rumah sakit umum daerah |
| Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan sesuai dengan standar layanan fasilitas kesehatan | Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan pada satuan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan fasilitas kesehatan |
| Meningkatkan pemenuhan penyediaan lahan untuk fasilitas umum | Menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perluasan fasilitas umum |
| | Mengoptimalkan pemanfaatan tanah kosong untuk memenuhi kebutuhan TPU |
| | Melakukan mediasi atas sengketa tanah milik pemerintah daerah |
| | Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan |
| Meningkatkan akses air minum yang bersih kepada masyarakat | Meningkatkan cakupan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan bagi masyarakat |
| | Meningkatkan pengawasan dan pengendalian layanan air minum perpipaan |
| Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh atau lingkungan yang berpotensi menjadi kumuh | Menyelesaikan penanganan kawasan kumuh pada wilayah yang belum tertangani |
| | Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pada daerah yang berpotensi menjadi kumuh |
| Meningkatkan kualitas pembangunan olahraga | Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga |
| | Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka olahraga |
| | Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas SDM keolahragaan |
| Mendorong peningkatan pendapatan petani dan nelayan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan | Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pertanian yang digunakan oleh petani untuk mendorong peningkatan produksi pertanian |
| | Meningkatkan pengawasan terhadap usaha obat hewan |
| | Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan teknologi pertanian yang digunakan oleh petani |
| | Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner |
| | Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian |
| | Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertanian |
| | Meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian |
| | Mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan, pengelolaan TPI, serta pengendalian dan pengawasan perizinan kapal perikanan |
| | Mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya melalui bantuan sarana prasarana perikanan budidaya, pengembangan kapasitas petani ikan, serta pengendalian dan pengawasan perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan |
| | Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan |
| Mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan mengendalikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan yang beredar | Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk tertib ukur |



| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|
| | Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang ekspor |
| | Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan |
| | Melakukan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting |
| | Mendorong diversifikasi pangan dan meningkatkan ketersediaan cadangan pangan pokok daerah |
| | Mendistribusikan cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan |
| | Meningkatkan ketersediaan serta kualitas infrastruktur dan pendukung ketersediaan pangan daerah |
| Memastikan pangan segar, khususnya pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan keamanan pangan | Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan |
| Menekan angka kelahiran untuk mengurangi beban penduduk | Mengoptimalkan pengendalian penduduk melalui sinkronisasi kebijakan dan penguatan data kependudukan |
| | Mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga |
| | Mendorong peningkatan peserta KB aktif dan baru melalui optimalisasi pelayanan KB |
| Meningkatkan kemandirian desa | Mendorong peningkatan kepatuhan dan ketertiban desa dalam pengelolaan keuangan desa |
| | Mendorong peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa |
| | Mendorong peningkatan kompetensi aparatur desa dalam administrasi pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset desa |
| | Membantu desa dalam melakukan penataan desa |
| | Mendorong pembentukan kawasan perdesaan |
| | Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum ada |
| | |
| Mendorong peningkatan pembangunan gender | Mendorong pencapaian target indikator PUG |
| | Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan |
| | Mendorong peningkatan kualitas ketahanan keluarga |
| | Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan data |
| Mendorong perwujudan kabupaten layak anak | Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak |
| | Meningkatkan kualitas perlindungan khusus anak |
| Meningkatkan cakupan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial, keluarga pahlawan, dan janda PKRI melalui pemberdayaan sosial dan pemberian santunan |
| | Meningkatkan cakupan bantuan dan kualitas layanan sosial bagi warga negara migran korban kekerasan |
| | Meningkatkan kualitas dan cakupan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial |
| | Meningkatkan kualitas dan cakupan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan data fakir miskin |
| | |



| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|--|
| | Mendorong peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat melalui pembinaan |
| | Meningkatkan cakupan bantuan bagi korban bencana |
| Mendorong pemuda untuk aktif dalam aktivitas positif dan berprestasi | Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi dan kegiatan kewirausahaan |
| | Mendorong peningkatan pemuda berprestasi |
| | Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepramukaan |
| Menanamkan nilai-nilai budaya lokal yang positif melalui pembangunan kebudayaan daerah | Mengembangkan budaya daerah dan kesenian tradisional |
| | Meningkatkan kompetensi SDM sejarah lokal |
| | Melestarikan cagar budaya daerah |
| | Meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum untuk meningkatkan wawasan masyarakat terhadap sejarah daerah |
| SASARAN 2.1 : MENURUNNYA PENGANGGURAN DENGAN PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | |
| Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, koperasi dan UMKM, industri, serta penanaman modal untuk mendorong kemandirian dan pembukaan lapangan pekerjaan baru | Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM pariwisata |
| | Meningkatkan kinerja promosi pariwisata untuk menarik wisatawan |
| | Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual |
| | Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata |
| | Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi simpan pinjam |
| | Mendorong pertumbuhan koperasi sehat melalui penilaian kesehatan, pengawasan, dan pemeriksaan koperasi |
| | Meningkatkan kompetensi SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian |
| | Mendorong pertumbuhan volume usaha koperasi melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi |
| | Mendorong pengembangan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan daya saing UMKM |
| | Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif melalui kebijakan yang jelas dan terarah |
| | Meningkatkan kinerja promosi penanaman modal untuk mendorong masuknya investasi |
| | Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi, perencanaan, pembangunan dan pengembangan industri yang menjadi kewenangan kabupaten |
| | Meningkatkan pengawasan dan pengendalian izin usaha industri |
| | Mendorong peningkatan ekspor produk UMKM lokal |
| | Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan dan pendaftaran perusahaan perdagangan |
| | Meningkatkan layanan administrasi penunjang ekspor |
| Mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja dengan mengoptimalkan peran pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja bagi para pencari kerja | Membantu penempatan pencari kerja terdaftar |
| | Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penyampaian informasi kesempatan kerja kepada masyarakat |
| | Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan membantu mewujudkan iklim kerja yang kondusif bagi perusahaan dan tenaga kerja |



| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|
| | Meningkatkan kompetensi pencari kerja agar dapat memenuhi standar perusahaan melalui pelatihan |
| | Meningkatkan kerjasama di bidang transmigrasi |
| TUJUAN 2 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH | |
| SASARAN 2.1 : MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| Meningkatkan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah | Meningkatkan kualitas integrasi dan sinkronisasi antara program nasional, provinsi, daerah, dan perangkat daerah |
| Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan | Meningkatkan kinerja pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah |
| Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan | Meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah |
| | Mendorong tindak lanjut rekomendasi perbaikan program dan kegiatan |
| | Mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan | Mendorong peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan |
| Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian intern pemerintah daerah | Meningkatkan kapabilitas APIP |
| | Mendorong penerapan SPIP sampai ke tingkat perangkat daerah |
| Mendorong pelaksanaan sistem merit | Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan dan mendorong pengadaan ASN yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel |
| | Meningkatkan kinerja pengelolaan data dan sistem informasi ASN |
| | Meningkatkan kualitas manajemen kinerja serta <i>reward and punishment</i> bagi ASN |
| Meningkatkan kompetensi ASN | Mendorong pejabat struktural, fungsional dan PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi |
| Meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah | Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat |
| | Mendorong peningkatan kerjasama dalam penyelesaian permasalahan pembangunan |
| | Meningkatkan kualitas kebijakan bidang ekonomi |
| Meningkatkan kualitas deregulasi kebijakan, tata laksana, manajemen perubahan, pelayanan publik, dan penguatan organisasi | Meningkatkan kualitas deregulasi kebijakan |
| | Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa |
| | Meningkatkan kualitas layanan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah |
| | Meningkatkan kualitas penguatan organisasi, pelayanan publik, ketatalaksanaan, dan manajemen perubahan pada perangkat daerah |
| Mendorong peningkatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Mendorong pelaksanaan dan pengembangan rencana inovasi yang telah disusun |
| | Mendorong tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan |
| Mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi | Meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah daerah |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik | Meningkatkan kinerja layanan media informasi dan komunikasi publik |
| | Meningkatkan kinerja pengelolaan, pengolahan, dan analisa data statistik sektoral |
| Meningkatkan keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah | Meningkatkan keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sampai ke tingkat perangkat daerah |



| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|
| Meningkatkan kinerja layanan penanaman modal | Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal |
| Meningkatkan pengawasan pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah | Mendorong peningkatan tertib arsip pada perangkat daerah |
| Mengoptimalkan peran kecamatan dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik ke masyarakat | Menindaklanjuti permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh masyarakat |
| | Meningkatkan tertib administrasi pada pemerintah desa dan kelurahan |
| | Meningkatkan kualitas dan cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan |
| | Mencegah timbulnya konflik sosial ekonomi melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum |
| Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah | Meningkatkan kualitas penyusunan penganggaran belanja daerah |
| | Mendorong optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan laporan barang milik daerah |
| Mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah untuk membiayai program pembangunan daerah | Menyusun rencana optimalisasi potensi pendapatan asli daerah |
| | Meningkatkan kinerja penagihan pajak daerah |
| | Meningkatkan pengendalian dan evaluasi wajib pajak daerah |
| Meningkatkan jumlah bangunan gedung pemerintah daerah yang laik fungsi | Mendorong sertifikasi laik fungsi bagi gedung milik pemerintah |
| | Meningkatkan layanan persetujuan bangunan gedung |
| | Melakukan pembinaan terhadap perusahaan jasa konstruksi |
| Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja ASN sesuai standar | Meningkatkan kondisi bangunan negara lainnya melalui penataan bangunan dan lingkungan |
| SASARAN 2.2 : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS ANTARWILAYAH | |
| Meningkatkan konektivitas jalan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas jalan kabupaten dan jalan penghubung antarpermukiman dan perumahan | Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten |
| | Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan desa |
| | Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan desa untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan |
| | Mendorong pengalihan aset prasarana dan sarana utilitas umum perumahan ke pemerintah daerah |
| | Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan perumahan |
| | Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan perumahan untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan |
| | Meningkatkan pemenuhan perlengkapan jalan penghubung antarpermukiman dan jalan perumahan serta fasilitas penunjang lainnya |
| | Menyediakan kebutuhan lahan untuk meningkatkan kapasitas jalan |
| Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas | Meningkatkan kinerja layanan pengujian berkala kendaraan bermotor |
| | Meningkatkan ketersediaan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan |
| | Menurunkan derajat kejenuhan jalan |



| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|---|
| SASARAN 2.3 : TERWUJUDNYA KONDUSIVITAS WILAYAH DALAM RANGKA STABILISASI EKONOMI | |
| Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana | Meningkatkan kualitas pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana |
| Meningkatkan <i>response time</i> petugas pada kejadian bencana | Meningkatkan kualitas kinerja petugas dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan korban bencana |
| | Meningkatkan pemenuhan ketersediaan sarana prasarana pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan penyelamatan bencana kebakaran |
| Mengoptimalkan upaya pengendalian dan penanganan bencana banjir dan kekeringan | Meningkatkan kinerja penanganan banjir dan kekeringan |
| | Membangun dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai |
| Meningkatkan capaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman | Meningkatkan cakupan penanganan rumah korban bencana atau yang terkena relokasi program pemerintah daerah |
| Mendorong pemenuhan hak masyarakat dalam demokrasi, khususnya hak kebebasan sipil dan hak-hak politik masyarakat | Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pencegahan konflik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik |
| Mengoptimalkan peran DPRD dalam mewujudkan demokrasi dan pencegahan konflik di masyarakat | Mengoptimalkan peran DPRD melalui dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD |
| Meningkatkan ketertiban di masyarakat | Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah |
| | Meningkatkan kinerja pengamanan lingkungan |
| Meningkatkan kerukunan antarumat beragama | Meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam pencegahan konflik melalui pemberdayaan dan pengawasan |
| | Melakukan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya bagi tokoh agama dan/atau penghayat kepercayaan |
| | Meningkatkan kerjasama antarinstansi di daerah untuk mencegah terjadinya konflik agama dan sosial |
| | |
| Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat | Meningkatkan pemahaman mengenai ideologi pancasila dan karakter kebangsaan |
| SASARAN 2.4 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah | Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan |
| | Meningkatkan kinerja pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan standar ketentuan teknis |
| Meningkatkan kinerja pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan | Menyusun perencanaan pengelolaan lingkungan hidup |
| | Melakukan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup |
| | Meningkatkan dan menjaga luasan ruang terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara dan melestarikan habitat keanekaragaman hayati |
| | Meningkatkan kinerja pengendalian pengelolaan limbah B3 |
| | Mendorong peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan melalui pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH |
| | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pengendalian, dan pengelolaan persampahan secara mandiri melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan bagi masyarakat |
| | Menindaklanjuti pengaduan kasus lingkungan |



| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|---|
| Mencegah terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga | Meningkatkan kinerja layanan air limbah domestik kepada masyarakat |
| | Membantu penyediaan infrastruktur sanitasi bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk buang air besar sembarangan |
| Meningkatkan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib ruang | Meningkatkan kualitas rencana umum dan rinci tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan |
| | Meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah |

6.2 Program Prioritas

Program prioritas adalah program pembangunan daerah atau program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Untuk tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan 141 program prioritas yang terdiri dari 1 program non urusan/unsur dan 140 program urusan/unsur berdasarkan arah kebijakan daerah. Penetapan program non urusan/unsur sebagai salah satu program prioritas dikarenakan beberapa subkegiatan yang berkorelasi dengan sasaran daerah yang sebelumnya berada pada program urusan/unsur pindah ke dalam program non urusan/unsur dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian, sebagian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggap prioritas; sementara sisanya yang bersifat rutin, dilaksanakan oleh perangkat daerah, dan manfaatnya lebih dirasakan oleh perangkat daerah atau bukan masyarakat luas dengan indikator indeks reformasi birokrasi dianggap kurang prioritas. Untuk lebih jelasnya, program prioritas beserta indikator, target, dan anggaran untuk tahun 2023-2026 dapat dilihat melalui tabel berikut:



Tabel 6.2
Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--|--|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | |
| Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas sumber daya manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase anak 5-6 yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | 52.52 % | 52.52 % | 699.878.436.000 | 62.52 % | 695.078.436.000 | 72.52 % | 751.878.436.000 | 82.52 % | 789.878.436.000 | 82.52 % | Pendidikan | Dinas Pendidikan | | |
| | | | Persentase anak 7-12 yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | 99.16 % | 100% | | | | 100% | | | | 100% | | 100% | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | | Persentase anak 13-15 yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | N/A | 100% | | | | 100% | | | | 100% | | 100% | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | Mendorong peningkatan pendidikan masyarakat melalui pendidikan non formal dan kesetaraan | | Persentase kelulusan pendidikan non formal/kesetaraan | 66,70% | 65,70% | | | | 64,70% | | | | 63,70% | | 62,70% | Pendidikan | Dinas Pendidikan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa pada jenjang pendidikan dasar | | Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan hasil asssestment nasional | N/A | 1,91 poin | | 2,01 poin | | 2,11 poin | | 2,21 poin | | 2,21 poin | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | | Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan hasil asssestment nasional | N/A | 1,90 poin | | 2,00 poin | | 2,10 poin | | 2,20 poin | | 2,20 poin | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | | Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan hasil asssestment nasional | N/A | 1,92 poin | | 2,01 poin | | 2,11 poin | | 2,21 poin | | 2,21 poin | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | | Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan hasil asssestment nasional | N/A | 1,90 poin | | 2,00 poin | | 2,10 poin | | 2,20 poin | | 2,20 poin | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan dasar negeri | | Cakupan guru yang berkualitas | N/A | 50% | | 60% | | 70% | | 80% | | 90% | Pendidikan | Dinas Pendidikan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase pemenuhan pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan | N/A | 50% | 300.000.000 | 60% | 300.000.000 | 70% | 300.000.000 | 80% | 300.000.000 | 80% | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | Mendorong sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar untuk menerapkan kurikulum berbasis muatan lokal | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Cakupan Kurikulum Satuan Pendidikan Yang Relevan | 100% | 100% | 1.400.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | 100% | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan | Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar nasional pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase peningkatan sarana prasarana bangunan pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan ruang sesuai standar nasional | N/A | 15% | 206.447.560.429 | 30% | 215.554.006.983 | 45% | 204.552.204.637 | 60% | 242.983.714.484 | 60% | Pendidikan | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| Meningkatkan budaya literasi masyarakat agar mampu mengembangkan dirinya secara mandiri | Mendorong peningkatan minat masyarakat untuk membaca melalui peningkatan kualitas perpustakaan | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Tingkat kegemaran membaca masyarakat | N/A | 40,31 poin | 1.013.813.084 | 40,61 poin | 1.053.813.084 | 40,91 poin | 1.379.813.084 | 41,21 poin | 1.543.313.710 | 41,21 poin | Perpustakaan | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| | | | Persentase peningkatan kualitas kunjungan | N/A | 31% | | 36% | | 42% | | 48% | | 48% | Perpustakaan | Dinas Arsip dan Perpustakaan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Melestarikan koleksi nasional dan naskah kuno | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan | N/A | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 45.000.000 | 100% | Perpustakaan | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pada satuan kesehatan | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat uji kompetensi | 90% | 100% | 454.480.000 | 100% | 444.480.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 950.000.000 | 100% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | Meningkatkan pengawasan atas usaha kefarmasian, alat kesehatan, produk makanan, dan usaha pengelolaan makanan agar memenuhi standar kesehatan | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase usaha kefarmasian, alat kesehatan dan produk makanan yang memenuhi standar | 63,58% | 100% | 455.000.000 | 100% | 425.000.000 | 100% | 845.000.000 | 100% | 845.000.000 | 100% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase usaha pengelolaan makanan berizin yang sesuai standar | 90% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Kesehatan | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup bersih dan sehat | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prevalensi stunting | 18% | 16% | 289.887.892.343 | 14% | 287.980.473.316 | 12% | 324.577.478.958 | 9% | 351.296.795.094 | 9% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Kabupaten/ Kota Sehat | 1 Kabupaten | 1 Kabupaten | | 1 Kabupaten | | 1 Kabupat en | | 1 Kabupat en | | 1 Kabupaten | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 70% | 70% | | 80% | | 90% | | 100% | | 100% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Jumlah Angka Kematian Ibu | 33 Kasus | 15 Kasus | | 14 Kasus | | 9 Kasus | | 4 Kasus | | 4 Kasus | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Jumlah Angka Kematian Bayi | 0 Kasus | 0 Kasus | | 0 Kasus | | 0 Kasus | | 0 Kasus | | 0 Kasus | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin | | Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan primer dan sekunder sesuai standar | 85% | 85% | | 85% | | 85% | | 85% | | 85% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | Meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada satuan kesehatan | | Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi kebutuhan alkes sesuai standar | 50% | 50% | | 60% | | 70% | | 80% | | 80% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan rumah sakit dan FKTP sesuai standar | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase warga negara usia 60 tahun Ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular yang berhasil tertangani | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan UPTD | 80 poin | 80 poin | | 81 poin | | 82 poin | | 84 poin | | 84 poin | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | Mengoptimalkan peran desa, kecamatan, dan posyandu dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase desa siaga aktif dengan predikat purnama dan mandiri | 43% | 43% | 940.000.000 | 44% | 770.000.000 | 45% | 1.040.000.000 | 55% | 1.050.000.000 | 55% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase posyandu aktif dengan predikat purnama dan mandiri | 58,96% | 60% | | 65% | | 70% | | 75% | | 75% | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan standar mutu rumah sakit umum daerah sesuai dengan standar nasional | Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 83,33% | 83,33% | 39.258.968.225 | 83,33% | 39.543.793.015 | 83,33% | 46.894.752.693 | 83,33% | 52.881.620.442 | 83.33% | Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pada rumah sakit umum daerah | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 83,33% | 83,33% | 150.000.000 | 83,33% | 150.000.000 | 83,33% | 150.000.000 | 83,33% | 150.000.000 | 83,33% | Kesehatan | Rumah Sakit Umum Daerah |
| Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan sesuai dengan standar layanan fasilitas kesehatan | Meningkatkan kuantitas dan kualitas bangunan pada satuan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan fasilitas kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase peningkatan sarana prasarana bangunan kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan ruang sesuai standar mutu layanan fasilitas kesehatan | N/A | 15% | 40.000.000.000 | 30% | 19.400.000.000 | 45% | 89.400.000.000 | 60% | 87.000.000.000 | 60% | Kesehatan | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| Meningkatkan pemenuhan penyediaan lahan untuk fasilitas umum | Menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perluasan fasilitas umum | PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH | persentase pemenuhan target tahunan penyediaan lahan untuk kepentingan umum | 17% | 40,00% | 146.300.000.000 | 40,50% | 109.300.000.000 | 41,00% | 146.150.000.000 | 41,50% | 146.150.000.000 | 41,50% | Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | Mengoptimalkan pemanfaatan tanah kosong untuk memenuhi kebutuhan TPU | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | persentase pengelolaan tanah kosong untuk TPU | N/A | 24,76% | 3.250.000.000 | 25,92% | 3.250.000.000 | 27,08% | 3.250.000.000 | 28,25% | 3.250.000.000 | 28,25% | Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBLIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Melakukan mediasi atas sengketa tanah milik pemerintah daerah | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | persentase Penyelesaian Potensi Sengketa Tanah milik pemerintah Daerah | N/A | 14% | 460.640.000 | 29% | 460.640.000 | 43% | 460.640.000 | 57% | 460.640.000 | 57% | Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | Menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNA N | persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kot a | N/A | 0% | 100.000.000 | 0% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | | | persentase pemenuhan data masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kot a | N/A | 26% | | 52% | | 78% | | 100% | | 100% | Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Meningkatkan akses air minum yang bersih kepada masyarakat | Meningkatkan cakupan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan bagi masyarakat | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | persentase peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan | N/A | 0,59% | 55.458.000.000 | 0,64% | 11.660.000.000 | 0,70% | 12.800.000.000 | 0,77% | 13.850.000.000 | 0,77% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| | Meningkatkan pengawasan dan pengendalian layanan air minum perpipaan | | persentase pengawasan dan pengendalian layanan air minum perpipaan | N/A | 100,00% | | 100,00% | | 100,00 % | | 100,00 % | 100,00% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | |
| Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh atau lingkungan yang berpotensi menjadi kumuh | Menyelesaikan penanganan kawasan kumuh pada wilayah yang belum tertangani | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | persentase penanganan kawasan kumuh yang belum terselesaikan | N/A | 4,88% | 20.000.000.000 | 6,36% | 25.000.000.000 | 7,84% | 26.936.111.694 | 9,31% | 36.936.111.694 | 9,31% | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pada daerah yang berpotensi menjadi kumuh | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 3,43% | 3,90% | 30.000.000.000 | 4,30% | 25.000.000.000 | 4,80% | 30.000.000.000 | 5,17% | 45.068.265.599 | 5,17% | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBLIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Meningkatkan kualitas pembangunan olahraga | Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N | indeks partisipasi masyarakat berolahraga | N/A | 0,01 Poin | 68.700.000.000 | 0,02 Poin | 68.400.000.000 | 0,03 Poin | 75.160.387.717 | 0,04 Poin | 79.574.294.275 | 0,04 Poin | Kepemudaa n dan Olahraga | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka olahraga | | indeks ruang terbuka olahraga | N/A | 0,01 Poin | | 0,02 Poin | | 0,03 Poin | | 0,04 Poin | | 0,04 Poin | Kepemudaa n dan Olahraga | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas SDM keolahragaan | | indeks SDM Keolahragaan | N/A | 0,01 Poin | | 0,02 Poin | | 0,03 Poin | | 0,04 Poin | | 0,04 Poin | Kepemudaa n dan Olahraga | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| Mendorong peningkatan pendapatan petani dan nelayan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan | Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pertanian yang digunakan oleh petani untuk mendorong peningkatan produksi pertanian | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase pemenuhan sarana pertanian untuk mendukung pertumbuhan produksi pertanian dalam 1 tahun | N/A | 1,5% | 3.984.214.797 | 1,5% | 3.984.214.797 | 1,5% | 4.244.810.000 | 1,5% | 4.659.291.000 | 6% | Pertanian | Dinas Pertanian |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|-------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Tani yang dibina dalam Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Holtikultura dan Perkebunan | N/A | 25% | | 20% | | 17% | | 14% | | 100% | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Peternakan (Daging, Telur) | N/A | 0,90% | | 0,94% | | 0,96% | | 0,98% | | 3,84% | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan | N/A | 4% | | 4,50% | | 5% | | 5,50% | | 20,39% | Pertanian | Dinas Pertanian |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Utama Tanaman Holtikultura dan Perkebunan per tahun | N/A | 2,1% | | 2,2% | | 2,3% | | 2,4% | | 9,31% | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | Meningkatkan pengawasan terhadap usaha obat hewan | | Persentase peningkatan unit usaha obat hewan yang diawasi | N/A | 16,3% | | 15% | | 28% | | 20% | | 103,70% | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan teknologi pertanian yang digunakan oleh petani | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase pemenuhan prasarana pertanian untuk mendukung pertumbuhan produksi pertanian dalam 1 tahun | N/A | 1,5% | 3.133.479.891 | 1,5% | 3.233.479.891 | 1,5% | 3.910.800.000 | 1,5% | 4.301.880.000 | 6% | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | Persentase penerapan teknologi inseminasi buatan pada sapi potong | N/A | 75,00% | | 77,50% | | 80,00% | | 82,50% | | 82,50% | Pertanian | Dinas Pertanian |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--|--|-----------------------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ternak/Hewan Pemeliharaan | N/A | 17% | 1.317.500.000 | 14% | 1.317.500.000 | 13% | 1.396.550.000 | 11% | 1.516.205.000 | 45,29% | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | PROGRAM PENGENDALIA N DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN | Persentase penurunan serangan OPT tanaman pangan | N/A | 3,0% | 1.067.300.000 | 3,0% | 1.067.300.000 | 3,0% | 1.131.338.000 | 3,0% | 1.204.472.000 | 11,52% | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | Persentase penurunan luas lahan tanaman pangan terdampak perubahan iklim | N/A | 1,0% | | 1,0% | | 1,0% | | 3,93% | Pertanian | Dinas Pertanian | | |
| | | | Persentase penurunan serangan OPT tanaman holtikultura dan perkebunan | N/A | 1,4% | | 2,8% | | 2,9% | | 1,5% | | 8,57% | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertanian | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase peningkatan kelompok tani terdaftar yang dibina dan diawasi usahanya | N/A | 5% | 464.200.000 | 20% | 464.200.000 | 25% | 492.052.000 | 27% | 541.257.000 | 100% |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Persentase permohonan rekomendasi praktik dokter hewan yang ditindaklanjuti | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | Meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan jenis metode dan informasi penyuluhan pertanian | N/A | 50% | 2.074.900.000 | 33% | 2.074.900.000 | 25% | 2.199.394.000 | 20% | 2.425.367.621 | 200% | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | Peningkatan kelompok tani yang naik kelas dalam setahun | N/A | 40 kelompok tani | | 45 kelompok tani | | 50 kelompok tani | | 55 kelompok tani | | 190 kelompok tani | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | Persentase jumlah penyuluh pertanian yang meningkat nilai evaluasi mandiri | N/A | 17% | | 23% | | 29% | | 34% | | 34% | Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan, pengelolaan TPI, serta pengendalian dan pengawasan perizinan kapal perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap | 10% | 5% | 900.000.000 | 5% | 900.000.000 | 5% | 980.000.000 | 5% | 1.087.358.000 | 20% | Kelautan dan Perikanan | Dinas Perikanan |
| | | | Persentase Pertumbuhan Kelompok Nelayan | 10% | 5% | | 5% | | 5% | | 5% | | 20% | Kelautan dan Perikanan | Dinas Perikanan |
| | Mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya melalui bantuan sarana prasarana perikanan budidaya, pengembangan kapasitas petani ikan, serta pengendalian dan pengawasan perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya | 10% | 5% | 1.836.750.000 | 5% | 1.836.750.000 | 5% | 2.100.000.000 | 5% | 2.350.000.000 | 20% | Kelautan dan Perikanan | Dinas Perikanan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil olahan perikanan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Cakupan unit pengolahan ikan yang dibina | 2% | 5% | 650.000.000 | 5% | 650.000.000 | 5% | 830.000.000 | 5% | 870.000.000 | 20% | Kelautan dan Perikanan | Dinas Perikanan |
| | | | Persentase Produksi hasil olahan perikanan | 3% | 5% | | 5% | | 5% | | 5% | | 20% | Kelautan dan Perikanan | Dinas Perikanan |
| Mendorong peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan mengendalikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan yang beredar | Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk tertib ukur | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Tertib Ukur | N/A | 25% | 2.173.000.000 | 25% | 2.144.483.887 | 25% | 2.465.067.787 | 25% | 2.683.672.899 | 25% | Perdagangan | Dinas Perdagangan |
| | Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang ekspor | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase peningkatan produk dalam negeri | N/A | 10% | 421.000.000 | 10% | 415.475.249 | 10% | 477.585.614 | 10% | 519.938.468 | 10% | Perdagangan | Dinas Perdagangan |
| | Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase sarana distribusi perdagangan yang bersih dan tertata | N/A | 25% | 2.203.000.000 | 25% | 2.174.090.199 | 25% | 2.499.100.016 | 25% | 2.720.723.146 | 25% | Perdagangan | Dinas Perdagangan |
| | Melakukan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Peningkatan Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | N/A | 5% | 2.355.000.000 | 6% | 2.324.095.515 | 7% | 2.671.529.977 | 8% | 2.908.444.398 | 8% | Perdagangan | Dinas Perdagangan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Cakupan Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting | N/A | 127% | | 130% | | 135% | | 140% | | 140% | Perdagangan | Dinas Perdagangan |
| | Mendorong diversifikasi pangan dan meningkatkan ketersediaan cadangan pangan pokok daerah | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pokok Daerah | N/A | 99,46 % per tahun | 3.275.000.000 | 99,86 % per tahun | 3.244.715.905 | 98,05 % per tahun | 3.768.009.166 | 98,05 % per tahun | 4.098.387.315 | 98,05 % per tahun | Pangan | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi | N/A | 86,8 | | 86,9 | | 87 | | 87,1 | | 87,1 | Pangan | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Mendistribusikan cadangan pangan pada daerah rentan pangan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan | N/A | 86% | 1.446.927.200 | 71% | 1.366.927.200 | 57% | 1.576.620.000 | 43% | 1.719.282.000 | 43% | Pangan | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Meningkatkan ketersediaan serta kualitas infrastruktur dan pendukung ketersediaan pangan daerah | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Ketersediaan Pangan yang Berfungsi Baik | N/A | 47% | 1.100.000.000 | 48% | 1.100.000.000 | 49% | 1.210.850.000 | 50% | 1.332.000.000 | 50% | Pangan | Dinas Ketahanan Pangan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Memastikan pangan segar, khususnya pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan keamanan pangan | Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Cakupan pengawasan keamanan PSAT | N/A | 4 tahap per tahun | 1.325.000.000 | 4 tahap per tahun | 1.325.000.000 | 4 tahap per tahun | 1.457.500.000 | 4 tahap per tahun | 1.604.000.000 | 4 tahap per tahun | Pangan | Dinas Ketahanan Pangan |
| Menekan angka kelahiran untuk mengurangi beban penduduk | Mengoptimalkan pengendalian penduduk melalui sinkronisasi kebijakan dan penguatan data kependudukan | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk | 100% | 100% | 450.000.000 | 100% | 827.000.000 | 100% | 954.000.000 | 100% | 1.025.000.000 | 100% | Pengendalian dan Keluarga Berencana | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga | 100% | 100% | 432.291.000 | 100% | 439.760.000 | 100% | 637.343.931 | 100% | 809.247.000 | 100% | Pengendalian dan Keluarga Berencana | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Mendorong peningkatan peserta KB aktif dan baru melalui optimalisasi pelayanan KB | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Meningkatkan Pelayanan KB | 118 Faskes | 118 Faskes | 7.950.980.600 | 118 Faskes | 7.455.000.000 | 118 Faskes | 8.386.059.000 | 118 Faskes | 9.016.282.135 | 118 Faskes | Pengendalian dan Keluarga Berencana | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Meningkatkan kemandirian desa | Mendorong peningkatan kepatuhan dan ketertiban desa dalam pengelolaan keuangan desa | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Desa yang tertib pengelolaan aset desa | N/A | 90% | 2.632.200.000 | 90% | 3.245.033.256 | 90% | 3.012.869.299 | 90% | 3.297.790.329 | 90% | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Tingkat Kepatuhan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa Terhadap Peraturan Perundang undangan | N/A | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | Tingkat kelengkapan sarana dan parasana administrasi keuangan desa | N/A | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | Mendorong peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mendorong peningkatan kompetensi aparatur desa dalam administrasi pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Membantu desa dalam melakukan penataan desa | | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan desa | N/A | | 90% | | 1.340.000.000 | | 90% | | 1.222.415.282 | 90% | 1.520.106.229 |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Mendorong pembentukan kawasan perdesaan | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Persentase desa yang difasilitasi dalam penyusunan kawasan perdesaan | N/A | 90% | 4.887.395.200 | 90% | 4.823.258.286 | 90% | 5.544.298.422 | 90% | 6.035.973.329 | 90% | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum ada | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase desa yang difasilitasi dalam pemberdayaan kelembagaan | N/A | 90% | 1.720.000.000 | 90% | 1.400.053.156 | 90% | 1.924.299.603 | 90% | 2.077.212.520 | 90% | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Persentase desa yang difasilitasi dalam pemberdayaan ekonomi | N/A | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | Persentase desa yang difasilitasi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna | N/A | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | Persentase kelembagaan desa yang memenuhi standar kompetensi | N/A | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa | N/A | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Mendorong peningkatan pembangunan gender | Mendorong pencapaian target indikator PUG | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Presentase Indikator PUG dalam pemberdayaan perempuan | 87,50% | 87,70% | 632.716.500 | 87,90% | 646.148.500 | 88,10% | 590.000.000 | 88,30% | 640.000.000 | 88,30% | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Presentase peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan | 86% | 87% | 178.400.000 | 88% | 178.400.000 | 89% | 100.000.000 | 90% | 550.000.000 | 90% | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Mendorong peningkatan kualitas ketahanan keluarga | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Presentase peningkatan kualitas Ketahanan Keluarga | 100% | 100% | 1.711.939.100 | 100% | 1.681.588.450 | 100% | 1.625.843.500 | 100% | 1.750.000.000 | 100% | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan data | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Meningkatnya Kualitas data gender dan anak | N/A | 100% | 242.300.000 | 100% | 237.800.000 | 100% | 260.000.000 | 100% | 260.000.000 | 100% | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Mendorong perwujudan kabupaten layak anak | Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | presentase peningkatan kualitas Pemenuhan Hak Anak | 100% | 100% | 550.000.000 | 100% | 465.059.000 | 100% | 420.059.000 | 100% | 580.000.000 | 100% | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan kualitas perlindungan khusus anak | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Meningkatnya Kualitas Perlindungan Khusus Anak | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Meningkatkan cakupan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial | Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial, keluarga pahlawan, dan janda PKRI melalui pemberdayaan sosial dan pemberian santunan | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Cakupan peningkatan Kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (psks) | N/A | 100% | 2.157.400.000 | 100% | 2.127.400.000 | 100% | 2.237.400.000 | 100% | 2.427.700.000 | 100% | Sosial | Dinas Sosial |
| | | | presentase keluarga pahlawan dan janda PKRI yang diberikan santunan | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan cakupan bantuan dan kualitas layanan sosial bagi warga negara migran korban kekerasan | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Cakupan Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang diberikan bantuan serta pelayanan sosial untuk peningkatan fungsi serta kesejahteraan sosial | N/A | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | 50.000.000 | 100% | Sosial | Dinas Sosial |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBLIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan kualitas dan cakupan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberikan bimbingan Sosial dan bantuan sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | N/A | 20% | 2.000.000.000 | 20% | 1.960.000.000 | 20% | 2.040.000.000 | 20% | 2.230.000.000 | 20% | Sosial | Dinas Sosial |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan kualitas dan cakupan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Data Fakir Miskin yang telah didata | N/A | 74.90% | 1.361.660.000 | 74.90% | 1.361.660.000 | 74.90% | 1.402.858.079 | 74.90% | 1.617.358.079 | 74.90% | Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Cakupan KPM yang Mendapatkan Bantuan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat | N/A | 9.90% | | 9.90% | | 9.90% | | 9.90% | | Sosial | Dinas Sosial | |
| | | | Cakupan jumlah pendamping sosial yang dibutuhkan untuk pendampingan kepada KPM PKH di Kabupaten Bekasi | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Sosial | Dinas Sosial | |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan data fakir miskin | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mendorong peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat melalui pembinaan | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Cakupan Pembinaan nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial bagi Masyarakat | 100% | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | Sosial | Dinas Sosial |
| | Meningkatkan cakupan bantuan bagi korban bencana | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban dampak Bencana yang ditangani | N/A | 100% | 1.664.000.000 | 100% | 1.604.000.000 | 100% | 1.724.000.000 | 100% | 1.841.500.000 | 100% | Sosial | Dinas Sosial |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Mendorong pemuda untuk aktif dalam aktivitas positif dan berprestasi | Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi dan kegiatan kewirausahaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi | N/A | 25% | 5.554.866.000 | 35% | 5.554.866.000 | 45% | 4.828.167.600 | 0,55 | 6.328.167.600 | 0,55 | Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | Persentase Pemuda yang berwiusaha | | N/A | 25% | | 35% | | 45% | | 0,55 | | 0,55 | Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | |
| | Persentase Pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi | | N/A | 25% | | 35% | | 45% | | 0,55 | | 0,55 | Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | |
| | Mendorong peningkatan pemuda berprestasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepramukaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan | N/A | 10% | 1.200.000.000 | 15% | 1.200.000.000 | 20% | 2.600.000.000 | 25% | 2.600.000.000 | 25% | Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| Menanamkan nilai-nilai budaya lokal yang positif melalui pembangunan kebudayaan daerah | Mengembangkan budaya daerah dan kesenian tradisional | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Nilai dimensi ekspresi budaya | N/A | 31 Poin | 2.634.918.000 | 35 Poin | 2.634.918.000 | 37 Poin | 3.424.325.800 | 40 Poin | 3.424.325.800 | 40 Poin | Kebudayaan | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Nilai dimensi ekonomi budaya | 25 Poin | 31 Poin | 1.335.320.325 | 35 Poin | 835.320.325 | 37 Poin | 924.296.300 | 40 Poin | 924.296.300 | 40 Poin | Kebudayaan | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | Meningkatkan kompetensi SDM sejarah lokal | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase SDM Sejarah lokal | N/A | 30% | 100.000.000 | 35% | 100.000.000 | 40% | 100.000.000 | 45% | 100.000.000 | 45% | Kebudayaan | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Melestarikan cagar budaya daerah | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | indeks dimensi warisan budaya | 25 Poin | 31 Poin | 1.000.000.000 | 35 Poin | 1.000.000.000 | 37 Poin | 4.000.000.000 | 40 Poin | 5.000.000.000 | 40 Poin | Kebudayaan | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | Meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum untuk meningkatkan wawasan masyarakat terhadap sejarah daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Persentase penduduk bekasi yang mengunjungi museum dalam satu tahun | N/A | 35% | 4.028.680.000 | 35% | 4.028.680.000 | 38% | 5.093.159.880 | 40% | 6.093.159.880 | 40% | Kebudayaan | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, koperasi dan UMKM, industri, serta penanaman modal untuk mendorong kemandirian dan pembukaan lapangan pekerjaan baru | Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase pengembangan lembaga pariwisata terhadap kualitas destinasi wisata | N/A | 25% | 650.000.000 | 50% | 650.000.000 | 75% | 650.000.000 | 100% | 650.000.000 | 100% | Pariwisata | Dinas Pariwisata |
| | | | Persentase pengembangan sdm pariwisata terhadap kualitas destinasi wisata | N/A | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | Pariwisata | Dinas Pariwisata |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan kinerja promosi pariwisata untuk menarik wisatawan | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | N/A | 25% | 695.235.000 | 50% | 695.235.000 | 75% | 695.235.000 | 100% | 695.235.000 | 100% | Pariwisata | Dinas Pariwisata |
| | Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif | N/A | 25% | 793.696.000 | 50% | 793.696.000 | 75% | 793.696.000 | 100% | 793.696.000 | 100% | Pariwisata | Dinas Pariwisata |
| | Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Terlaksana Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | N/A | 15 Destinasi | 1.702.361.000 | 17 Destinasi | 1.702.361.000 | 19 Destinasi | 2.698.750.592 | 20 Destinasi | 3.144.522.182 | 20 Destinasi | Pariwisata | Dinas Pariwisata |
| | Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi simpan pinjam | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase rekomendasi koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam yang terfasilitasi | 100% | 100% | 530.000.000 | 100% | 530.000.000 | 100% | 583.000.000 | 100% | 641.300.000 | 100% | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBLIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | persentase Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang terfasilitasi | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Mendorong pertumbuhan koperasi sehat melalui penilaian kesehatan, pengawasan, dan pemeriksaan koperasi | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase kepatuhan koperasi | 38% | 48% | 850.000.000 | 58% | 850.000.000 | 68% | 935.000.000 | 78% | 1.028.500.000 | 78% | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | persentase sertifikat kesehatan KSP/USP Koperasi | 100% | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 375.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Meningkatkan kompetensi SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Cakupan Peningkatan kompetensi SDM Koperasi | 1,30% | 2,60% | 600.000.000 | 3,90% | 600.000.000 | 5,20% | 660.000.000 | 6,50% | 726.000.000 | 6,50% | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Mendorong pertumbuhan volume usaha koperasi melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Laju pertumbuhan volume usaha koperasi | 3,56% | 5,56% | 1.070.000.000 | 7,56% | 1.070.000.000 | 9,56% | 1.177.000.000 | 11,56% | 1.294.700.000 | 11,56% | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Mendorong pengembangan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan daya saing UMKM | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase kelembagaan Usaha Mikro | 10% | 12% | 2.648.000.000 | 15% | 2.628.000.000 | 19% | 2.890.800.000 | 24% | 3.426.000.000 | 24% | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan | N/A | 0,63% | 610.000.000 | 0,93% | 610.000.000 | 1,33% | 671.000.000 | 1,83% | 738.100.000 | 1,83% | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif melalui kebijakan yang jelas dan terarah | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal | N/A | 3 Dokumen | 540.000.000 | 1 Dokumen | 283.500.000 | 1 Dokumen | 300.000.000 | 1 Dokumen | 340.000.000 | 3 Dokumen | Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan kinerja promosi penanaman modal untuk mendorong masuknya investasi | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah dokumen dalam penyusunan strategi promosi penanaman modal dan dokumen hasil pelaksanaan promosi penanaman modal | N/A | 2 Dokumen | 420.000.000 | 2 Dokumen | 441.000.000 | 2 Dokume n | 467.000.000 | 2 Dokume n | 525.000.000 | 2 Dokumen | Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal | PROGRAM PENGENDALIA N PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal | N/A | 1 Laporan | 300.000.000 | 1 Laporan | 315.000.000 | 1 Laporan | 347.000.000 | 1 Laporan | 380.000.000 | 1 Laporan | Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi, perencanaan, pembangunan dan pengembangan industri yang menjadi kewenangan kabupaten | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI | Cakupan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten | N/A | 100% | 1.999.854.000 | 100% | 1.995.000.000 | 100% | 2.302.000.000 | 100% | 2.720.702.251 | 100% | Perindustria n | Dinas Perindustrian |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Jumlah Laporan Data Industri | N/A | 2 Laporan | 1.050.000.000 | 2 Laporan | 1.050.000.000 | 2 Laporan | 1.050.000.000 | 2 Laporan | 1.050.000.000 | 8 laporan | Perindustria n | Dinas Perindustrian |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan pengawasan dan pengendalian izin usaha industri | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Jumlah Laporan Pengawasan IUI Perusahaan Industri | N/A | 90 Dokumen | 950.000.000 | 120 Dokumen | 850.000.000 | 90 Dokumen | 950.000.000 | 90 Dokumen | 950.000.000 | 390 dokumen | Perindustrian | Dinas Perindustrian |
| | Mendorong peningkatan ekspor produk UMKM lokal | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase Peningkatan Produk Unggulan berorientasi ekspor | N/A | 2,64% | 300.000.000 | 2,68% | 296.063.123 | 2,72% | 340.322.290 | 2,75% | 370.502.471 | 2,75% | Perdagangan | Dinas Perdagangan |
| | Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan dan pendaftaran perusahaan perdagangan | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Distribusi | N/A | 20% | 695.000.000 | 20% | 685.879.568 | 20% | 788.413.305 | 20% | 858.330.725 | 20% | Perdagangan | Dinas Perdagangan |
| | | | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol | N/A | 20% | | 20% | | 20% | | 20% | | 20% | Perdagangan | Dinas Perdagangan |
| | | | Persentase peningkatan PA-B2 yang diawasi | N/A | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | Perdagangan | Dinas Perdagangan |
| | | | Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang Mendapatkan Pelayanan | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Perdagangan | Dinas Perdagangan |
| | Meningkatkan layanan administrasi penunjang ekspor | | | | | | | | | | | | | | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja dengan mengoptimalkan peran pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja bagi para pencari kerja | Membantu penempatan pencari kerja terdaftar | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase penempatan pencari kerja terdaftar | N/A | 40 Persen | 2.420.000.000 | 40 Persen | 2.575.000.000 | 40 Persen | 3.095.000.000 | 40 Persen | 3.280.000.000 | 40 Persen | Tenaga Kerja | Dinas Ketenagakerjaan |
| | | | Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja | N/A | 5 Persen | | 5 Persen | | 5 Persen | | 5 Persen | | 5 Persen | Tenaga Kerja | Dinas Ketenagakerjaan |
| | Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penyampaian informasi kesempatan kerja kepada masyarakat | | Persentase lowongan kerja yang terinformasikan | N/A | 50 Lowongan | | 55 Lowongan | | 60 Lowongan | | 65 Lowongan | | 65 Lowongan | Tenaga Kerja | Dinas Ketenagakerjaan |
| | Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan membantu mewujudkan iklim kerja yang kondusif bagi perusahaan dan tenaga kerja | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja | N/A | 2 Persen | 2.380.000.000 | 2 Persen | 2.360.000.000 | 2 Persen | 2.850.000.000 | 2 Persen | 3.310.000.000 | 2 Persen | Tenaga Kerja | Dinas Ketenagakerjaan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan kompetensi pencari kerja agar dapat memenuhi standar perusahaan melalui pelatihan | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan | N/A | 100 Persen | 6.181.690.000 | 100 Persen | 5.795.690.000 | 100 Persen | 6.500.000.000 | 100 Persen | 6.600.000.000 | 100 Persen | Tenaga Kerja | Dinas Ketenagakerjaan |
| | | | Persentase pelatihan angkatan kerja berbasis kompetensi | N/A | 10 Persen | | 20 Persen | | 30 Persen | | 40 Persen | | 40 Persen | Tenaga Kerja | Dinas Ketenagakerjaan |
| | Meningkatkan kerjasama di bidang transmigrasi | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang transmigrasi | N/A | 100 Persen | 660.000.000 | 100 Persen | 665.000.000 | 100 Persen | 745.000.000 | 100 Persen | 855.000.000 | 100 Persen | Transmigrasi | Dinas Ketenagakerjaan |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah | Meningkatkan kualitas integrasi dan sinkronisasi antara program nasional, provinsi, daerah, dan perangkat daerah | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100% | 100% | 1.785.000.000 | 100% | 1.835.000.000 | 100% | 1.734.550.000 | 100% | 1.942.696.000 | 100% | Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Propinsi dan Nasional dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah | 68% | 68% | | 73% | | 78% | | 83% | | 83% | Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100% | 100% | 2.421.833.941 | 100% | 2.871.833.941 | 100% | 2.736.672.353 | 100% | 3.065.073.036 | 100% | Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 68% | 68% | | 73% | | 78% | | 83% | | 83% | Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBLAJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | 68% | 68% | | 73% | | 78% | | 83% | | 83% | Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 68% | 68% | | 73% | | 78% | | 83% | | 83% | Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan | Meningkatkan kinerja pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah | 65% | 65% | 1.460.285.000 | 70% | 1.427.839.623 | 75% | 1.613.458.774 | 80% | 1.807.073.827 | 80% | Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 65% | 65% | 1.246.638.140 | 70% | 1.246.638.140 | 75% | 1.408.701.098 | 80% | 1.577.745.230 | 80% | Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | 65% | 65% | | 70% | | 75% | | 80% | | 80% | Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 65% | 65% | | 70% | | 75% | | 80% | | 80% | Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan | Meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai LPPD | N/A | 3,41 poin | 440.000.000 | 3,42 poin | 420.109.000 | 3,43 poin | 455.000.000 | 3,44 poin | 516.168.145 | 3,44 poin | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| | Mendorong tindak lanjut rekomedasi perbaikan program dan kegiatan | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Rekomendasi Perbaikan program dan kegiatan yang ditindaklanjuti | N/A | 100% | 560.501.000 | 100% | 597.896.441 | 100% | 652.697.610 | 100% | 726.226.647 | 100% | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase SAKIP sesuai dengan ketentuan | N/A | 100% | 250.000.000 | 100% | 244.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 270.000.000 | 100% | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan | Mendorong peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan | 80% | 80% | 12.651.000.000 | 80% | 12.651.000.000 | 80% | 14.986.201.363 | 80% | 16.734.038.601 | 80% | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil | N/A | 80% | 1.460.000.000 | 80% | 1.460.000.000 | 80% | 1.460.000.000 | 80% | 1.460.000.000 | 80% | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola | N/A | 80% | 1.227.018.000 | 80% | 1.227.018.000 | 80% | 1.227.018.000 | 80% | 1.227.018.000 | 80% | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian intern pemerintah daerah | Meningkatkan kapabilitas APIP | PROGRAM PENYELENGGAAN PENGAWASAN | Cakupan Peningkatan Kapabilitas APIP Elemen Pengelolaan SDM dan Struktur dan Tata Kelola | N/A | 25% | 7.022.520.000 | 20% | 6.930.364.005 | 2% | 7.966.400.293 | 2% | 8.672.870.044 | 2% | Inspektorat Daerah | Inspektorat |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Cakupan Peningkatan Kapabilitas APIP Elemen Praktik Profesional | N/A | 25% | | 20% | | 2% | | 2% | | 2% | Inspektorat Daerah | Inspektorat |
| | | | Cakupan Peningkatan Kapabilitas APIP Elemen Budaya dan Hubungan Kerja | N/A | 25% | | 20% | | 2% | | 2% | | 2% | Inspektorat Daerah | Inspektorat |
| | | | Cakupan Peningkatan Kapabilitas APIP Elemen Peran dan Layanan | N/A | 25% | | 20% | | 2% | | 2% | | 2% | Inspektorat Daerah | Inspektorat |
| | Mendorong penerapan SPIP sampai ke tingkat perangkat daerah | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP | N/A | 100% | 1.883.115.000 | 100% | 1.858.403.026 | 100% | 2.136.220.030 | 100% | 2.325.662.536 | 100% | Inspektorat Daerah | Inspektorat |
| | | | Persentase Peningkatan Kualitas SPIP Perangkat Daerah sesuai dengan Unsur SPIP | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Inspektorat Daerah | Inspektorat |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Mendorong pelaksanaan sistem merit | Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan dan mendorong pengadaan ASN yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Nilai Sistem Merit Dimensi Perencanaan Kebutuhan | 32,5 | 35 | 7.501.522.000 | 35 | 7.403.080.100 | 35 | 8.509.783.819 | 37,5 | 9.264.441.460 | 37,5 | Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | Nilai Sistem Merit Dimensi Pengadaan | 32 | 32 | | 34 | | 36 | | 36 | | | | |
| | Meningkatkan kinerja pengelolaan data dan sistem informasi ASN | | Nilai Sistem Merit Dimensi Sistem Informasi | 20 | 21 | | 21 | | 22 | | | | | | |
| | Meningkatkan kualitas manajemen kinerja serta <i>reward and punishment</i> bagi ASN | | Nilai Sistem Merit Dimensi Pengembangan Karir | 55 | 57,5 | | 60 | | 62,5 | | 65 | | | | |
| | | | Nilai Sistem Merit Dimensi Promosi dan Rotasi | 25 | 27,5 | | 27,5 | | 30 | | 30 | | | | |
| | | | Nilai Sistem Merit Dimensi Manajemen Kinerja | 60 | 62,5 | | 62,5 | | 65 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|--------------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Nilai Sistem Merit Dimensi Penggajian, penghargaan dan disiplin | 27,5 | 27,5 | | 30 | | 30 | | 32,5 | | 32,5 | Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | Nilai Sistem Merit Dimensi perlindungan dan pelayanan kepada pegawai | 10 | 10 | | 12 | | 14 | | 14 | | 14 | Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Meningkatkan kompetensi ASN | Mendorong pejabat struktural, fungsional dan PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase pejabat struktural yang memiliki riwayat Diklat Pim | 71,74% | 73% | 5.100.000.000 | 74% | 5.033.073.089 | 75% | 5.785.478.930 | 77% | 6.198.542.008 | 77% | Pendidikan dan Pelatihan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | Persentase pejabat Fungsional yang memiliki riwayat Diklat Fungsional | 73% | 75% | | 76% | | 78% | | 80% | | 80% | Pendidikan dan Pelatihan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | Persentase PNS yang memiliki riwayat diklat teknis | 20% | 20% | | 20% | | 20% | | 20% | | 20% | Pendidikan dan Pelatihan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|--|---|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Persentase PNS yang memiliki riwayat seminar/workshop/magang/kursus dan sejenisnya | 16% | 16% | | 16% | | 16% | | 16% | | 16% | Pendidikan dan Pelatihan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah | Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan | N/A | 73 poin | 45.540.871.750 | 75 poin | 44.968.817.362 | 77 poin | 51.722.331.072 | 78 poin | 56.304.026.237 | 78 poin | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| | | | Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat | N/A | 73 poin | | 75 poin | | 77 poin | | 78 poin | | 78 poin | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| | Mendorong peningkatan kerjasama dalam penyelesaian permasalahan pembangunan | | Persentase kerjasama yang menyelesaikan permasalahan pembangunan yang signifikan | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| | Meningkatkan kualitas kebijakan bidang ekonomi | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi | N/A | 73 poin | 1.005.000.000 | 75 poin | 940.000.000 | 77 poin | 1.096.902.024 | 78 poin | 1.179.000.000 | 78 poin | Sekretariat Daerah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Meningkatkan kualitas deregulasi kebijakan, tata laksana, manajemen perubahan, pelayanan publik, dan penguatan organisasi | Meningkatkan kualitas deregulasi kebijakan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai Deregulasi Kebijakan | N/A | 50 poin | 858.579.000 | 58 poin | 846.655.809 | 66 poin | 980.698.923 | 74 poin | 1.065.926.923 | 74 poin | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| | Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Nilai Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa | N/A | Level 7 | 2.738.776.000 | Level 8 | 2.702.835.316 | Level 9 | 3.106.888.309 | Level 9 | 3.382.410.818 | Level 9 | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| | Meningkatkan kualitas layanan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Sekretariat Daerah | 100% | 100% | 8.723.328.040 | 100% | 8.641.247.000 | 100% | 9.208.589.000 | 100% | 10.012.377.000 | 100% | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| | Meningkatkan kualitas penguatan organisasi, pelayanan publik, ketatalaksanaan, dan manajemen perubahan pada perangkat daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai penguatan organisasi | N/A | 3 poin | 965.655.000 | 2,75 poin | 935.200.000 | 3,12 poin | 1.100.000.000 | 3,63 poin | 1.195.750.000 | 3,63 poin | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| | | | Nilai pelayanan publik | N/A | 2,25 poin | | 2,50 poin | | 2,75 poin | | 3,13 poin | | 3,13 poin | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| | | | Nilai penataan ketatalaksanaan | N/A | 2,46 poin | | 2,62 poin | | 2,79 poin | | 2,96 poin | | 2,96 poin | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |
| | | | Nilai Manajemen Perubahan | N/A | 2,38 poin | | 2,54 poin | | 2,71 poin | | 2,88 poin | | 2,88 poin | Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Mendorong peningkatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Mendorong pelaksanaan dan pengembangan rencana inovasi yang telah disusun | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Cakupan rekomendasi kebijakan daerah dan inovasi daerah yang dilaksanakan | N/A | 55% | 5.369.200.000 | 55% | 5.298.740.398 | 60% | 6.090.861.465 | 60% | 6.631.006.224 | 60% | Penelitian dan Pengembangan | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | Mendorong tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kebijakan | | | | | | | | | | | | | Penelitian dan Pengembangan | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi | Meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah daerah | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Instansi Pemerintah Daerah yang Mendapat Layanan Aksesibilitas TIK | N/A | 100% | 16.951.343.000 | 100% | 16.851.343.000 | 100% | 18.296.688.964 | 100% | 20.015.573.491 | 100% | Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik | Meningkatkan kinerja layanan media informasi dan komunikasi publik | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Layanan Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola | N/A | 100% | 8.750.000.000 | 100% | 8.425.296.405 | 100% | 10.349.700.000 | 100% | 10.555.000.000 | 100% | Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| | Meningkatkan kinerja pengelolaan, pengolahan, dan analisa data statistik sektoral | PROGRAM PENYELENGGAAN STATISTIK SEKTORAL | Tersedianya Hasil Pengolahan dan Analisa Data Statistik Sektoral | N/A | 2 Laporan | 1.107.000.000 | 2 Laporan | 1.107.000.000 | 2 Laporan | 1.142.000.000 | 2 Laporan | 1.385.000.000 | 2 Laporan | Statistik | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Meningkatkan keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah | Meningkatkan keamanan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sampai ke tingkat perangkat daerah | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat Daerah yang telah dilayani Persandian dan Keamanan Informasi | N/A | 75% | 700.146.000 | 80% | 700.146.000 | 85% | 900.000.000 | 90% | 1.220.000.000 | 90% | Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| Meningkatkan kinerja layanan penanaman modal | Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi bagi pelaku usaha | N/A | 1.600 Pelaku usaha | 1.000.000.000 | 1.600 Pelaku usaha | 1.050.000.000 | 1.600 Pelaku usaha | 1.160.000.000 | 1.600 Pelaku usaha | 1.200.000.000 | 1.600 Pelaku usaha | Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Jumlah dokumen hasil pengolahan, pengkajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | N/A | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 210.000.000 | 1 Dokumen | 223.000.000 | 1 Dokumen | 250.000.000 | 1 Dokumen | Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Meningkatkan pengawasan pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah | Mendorong peningkatan tertib arsip pada perangkat daerah | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik | N/A | 10% | 916.400.000 | 20% | 916.400.000 | 30% | 1.052.400.000 | 40% | 1.182.400.000 | 40% | Kearsipan | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| | | | Persentase arsip dinamis di PD yang telah dibuatkan daftar arsip | N/A | 5% | | 10% | | 15% | | 20% | | 20% | Kearsipan | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| Mengoptimalkan peran kecamatan dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik ke masyarakat | Menindaklanjuti permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh masyarakat | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 190.277.056 | 100% | 190.277.056 | 100% | 300.000.000 | 100% | 325.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cibitung |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 207.590.448 | 100% | 204.866.254 | 100% | 235.492.189 | 100% | 256.375.913 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cabangbungin |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 225.000.000 | 100% | 297.047.342 | 100% | 255.241.718 | 100% | 277.876.853 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Bojongmangu |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 185.000.000 | 100% | 182.572.259 | 100% | 209.865.412 | 100% | 228.476.524 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Babelan |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 260.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 225.000.000 | 100% | 240.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Kedungwaringin |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 105.000.000 | 100% | 105.000.000 | 100% | 116.000.000 | 100% | 121.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Setu |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 258.094.080 | 100% | 258.094.080 | 100% | 401.094.080 | 100% | 573.784.080 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Pebayuran |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 195.000.000 | 100% | 245.000.000 | 100% | 323.460.000 | 100% | 328.460.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tarumajaya |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 183.000.000 | 100% | 180.598.505 | 100% | 207.596.597 | 100% | 226.006.507 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Karangbahagia |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 290.000.000 | 100% | 345.000.000 | 100% | 355.000.000 | 100% | 375.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Muaragembong |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 196.040.000 | 100% | 173.467.382 | 100% | 222.389.272 | 100% | 242.111.015 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tambun Utara |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 221.073.084 | 100% | 218.171.959 | 100% | 250.786.994 | 100% | 273.027.080 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cibarusah |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 271.040.000 | 100% | 267.483.163 | 100% | 342.469.845 | 100% | 449.546.532 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Selatan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 441.836.936 | 100% | 436.038.744 | 100% | 501.223.193 | 100% | 545.672.255 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tambelang |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 150.000.000 | 100% | 148.031.561 | 100% | 170.161.145 | 100% | 185.251.236 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Utara |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 180.000.000 | 100% | 175.275.748 | 100% | 204.193.374 | 100% | 222.301.483 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Pusat |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 185.000.000 | 100% | 182.572.259 | 100% | 209.865.412 | 100% | 278.476.524 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Barat |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 234.990.448 | 100% | 231.906.686 | 100% | 266.574.958 | 100% | 290.215.139 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Serang Baru |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 130.000.000 | 100% | 128.294.020 | 100% | 147.472.992 | 100% | 160.551.071 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Sukatani |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 235.200.000 | 100% | 276.610.000 | 100% | 266.812.000 | 100% | 290.473.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tambun Selatan |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 166.200.000 | 100% | 164.018.970 | 100% | 205.800.000 | 100% | 369.200.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Timur |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 180.000.000 | 100% | 177.637.874 | 100% | 204.193.374 | 100% | 222.301.483 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Sukakarya |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yg ditindaklanjuti | N/A | 100% | 427.204.000 | 100% | 396.127.588 | 100% | 451.263.288 | 100% | 506.725.253 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Sukawangi |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan tertib administrasi pada pemerintah desa dan kelurahan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 396.000.000 | 100% | 386.705.502 | 100% | 456.491.344 | 100% | 548.402.082 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cibitung |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 249.196.816 | 100% | 245.926.625 | 100% | 282.690.770 | 100% | 307.760.120 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cabangbungin |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 264.000.000 | 100% | 260.535.548 | 100% | 299.483.615 | 100% | 326.042.174 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Bojongmangu |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 485.840.000 | 100% | 479.464.359 | 100% | 551.140.605 | 100% | 600.016.402 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Babelan |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 247.000.000 | 100% | 279.000.000 | 100% | 210.000.000 | 100% | 225.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Kedungwaringin |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 240.000.000 | 100% | 220.000.000 | 100% | 290.000.000 | 100% | 340.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Setu |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 673.638.800 | 100% | 673.638.800 | 100% | 803.638.800 | 100% | 838.278.800 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Pebayuran |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | - | 100% | 335.000.000 | 100% | 434.693.403 | 100% | 289.733.946 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tarumajaya |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 317.200.000 | 100% | 310.031.761 | 100% | 359.834.101 | 100% | 391.744.613 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Karangbahagia |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 505.000.000 | 100% | 489.567.276 | 100% | 507.460.208 | 100% | 620.679.160 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Muaragembong |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 370.040.000 | 100% | 365.183.993 | 100% | 419.776.201 | 100% | 457.002.448 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tambun Utara |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 174.180.000 | 100% | 171.894.249 | 100% | 197.591.121 | 100% | 215.113.734 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cibusah |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 225.000.000 | 100% | 222.047.343 | 100% | 255.241.717 | 100% | 277.876.853 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Selatan |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 249.846.000 | 100% | 246.567.290 | 100% | 283.427.210 | 100% | 308.561.868 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tambelang |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 380.000.000 | 100% | 375.013.290 | 100% | 431.074.900 | 100% | 469.303.130 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Utara |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 150.000.000 | 100% | 168.031.561 | 100% | 190.161.145 | 100% | 205.251.236 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Pusat |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 270.000.000 | 100% | 266.456.811 | 100% | 326.290.061 | 100% | 333.452.224 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Barat |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 229.976.816 | 100% | 226.958.848 | 100% | 260.887.456 | 100% | 284.023.262 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Serang Baru |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 240.000.000 | 100% | 236.850.498 | 100% | 272.257.832 | 100% | 296.401.978 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Sukatani |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 138.000.000 | 100% | 136.362.129 | 100% | 156.780.475 | 100% | 170.672.543 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tambun Selatan |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 295.000.000 | 100% | 291.120.738 | 100% | 295.000.000 | 100% | 345.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Timur |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 215.000.000 | 100% | 212.178.571 | 100% | 243.897.640 | 100% | 265.526.771 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Sukakarya |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | N/A | 100% | 396.975.000 | 100% | 417.487.288 | 100% | 517.939.050 | 100% | 527.341.941 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Sukawangi |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan kualitas dan cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 942.000.000 | 100% | 929.900.664 | 100% | 1.065.923.838 | 100% | 1.158.677.594 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cibitung |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 497.436.816 | 100% | 490.908.991 | 100% | 564.296.121 | 100% | 614.338.565 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cabangbungin |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 545.000.000 | 100% | 497.848.007 | 100% | 618.252.160 | 100% | 673.079.489 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Bojongmangu |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 1.365.170.000 | 100% | 1.347.254.978 | 100% | 1.548.659.269 | 100% | 1.685.996.194 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Babelan |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 560.000.000 | 100% | 560.000.000 | 100% | 565.000.000 | 100% | 610.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Kedungwaringin |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan / Kelurahan | N/A | 100% | 740.000.000 | 100% | 720.000.000 | 100% | 770.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Setu |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan / Kelurahan | N/A | 100% | 1.349.035.424 | 100% | 1.347.036.370 | 100% | 1.353.151.430 | 100% | 1.372.127.874 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Pebayuran |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 456.543.000 | 100% | 469.712.950 | 100% | 756.800.000 | 100% | 570.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tarumajaya |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 720.000.000 | 100% | 710.551.495 | 100% | 816.773.496 | 100% | 889.205.931 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Karangbahagia |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 530.000.000 | 100% | 523.044.850 | 100% | 645.000.000 | 100% | 662.054.366 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Muaragembong |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 650.000.000 | 100% | 641.470.100 | 100% | 737.364.962 | 100% | 802.755.354 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tambun Utara |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 605.037.264 | 100% | 597.097.406 | 100% | 686.358.891 | 100% | 747.226.005 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cibarusah |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 807.568.000 | 100% | 796.970.347 | 100% | 916.111.304 | 100% | 976.500.480 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Selatan |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 608.500.000 | 100% | 600.514.701 | 100% | 690.287.045 | 100% | 751.502.512 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tambelang |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 921.500.000 | 100% | 909.407.226 | 100% | 1.045.356.634 | 100% | 1.138.060.090 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Utara |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 475.000.000 | 100% | 468.766.611 | 100% | 538.843.626 | 100% | 586.628.913 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Pusat |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 1.183.610.000 | 100% | 1.168.077.576 | 100% | 1.342.696.219 | 100% | 1.461.768.099 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Barat |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 779.774.528 | 100% | 769.541.606 | 100% | 884.582.177 | 100% | 963.027.965 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Serang Baru |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 756.000.000 | 100% | 746.079.070 | 100% | 857.612.171 | 100% | 933.666.227 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Sukatani |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBLIAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|-------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 1.095.080.000 | 100% | 1.080.600.000 | 100% | 1.242.180.000 | 100% | 1.352.380.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tambun Selatan |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 685.000.000 | 100% | 676.010.797 | 100% | 777.069.229 | 100% | 807.069.229 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Timur |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 680.000.000 | 100% | 671.076.412 | 100% | 771.397.191 | 100% | 839.805.601 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Sukakarya |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | N/A | 100% | 602.318.000 | 100% | 584.676.285 | 100% | 652.944.269 | 100% | 719.167.527 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Sukawangi |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Mencegah timbulnya konflik sosial ekonomi melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 963.000.000 | 100% | 956.569.767 | 100% | 1.106.466.785 | 100% | 1.266.209.143 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cibitung |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 185.000.000 | 100% | 162.572.259 | 100% | 189.865.412 | 100% | 188.476.523 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cabangbungin |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 323.000.000 | 100% | 318.761.296 | 100% | 366.413.666 | 100% | 398.907.661 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Bojongmangu |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 11.070.354.944 | 100% | 10.925.079.521 | 100% | 12.558.295.152 | 100% | 13.671.979.542 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Babelan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 160.000.000 | 100% | 160.000.000 | 100% | 158.000.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Kedungwaringin |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 230.000.000 | 100% | 210.000.000 | 100% | 255.000.000 | 100% | 270.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Setu |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 607.191.264 | 100% | 596.746.264 | 100% | 693.191.264 | 100% | 742.191.264 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Pebayuran |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 535.000.000 | 100% | 230.000.000 | 100% | 153.360.000 | 100% | 153.360.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tarumajaya |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 290.000.000 | 100% | 289.200.000 | 100% | 328.978.214 | 100% | 358.152.389 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Karangbahagia |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 375.000.000 | 100% | 390.078.904 | 100% | 475.000.000 | 100% | 505.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Muaragembong |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 420.680.000 | 100% | 415.159.448 | 100% | 477.222.603 | 100% | 519.543.265 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tambun Utara |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 528.393.632 | 100% | 521.459.563 | 100% | 599.413.770 | 100% | 652.570.488 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cibusah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 471.160.000 | 100% | 464.977.003 | 100% | 534.487.501 | 100% | 559.487.501 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Selatan |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 226.983.000 | 100% | 224.004.319 | 100% | 257.491.248 | 100% | 280.325.875 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tambelang |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 655.000.000 | 100% | 646.404.485 | 100% | 743.037.000 | 100% | 808.930.395 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Utara |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 520.000.000 | 100% | 513.176.080 | 100% | 589.891.969 | 100% | 642.204.283 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Pusat |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 1.666.300.000 | 100% | 1.644.433.272 | 100% | 1.880.263.439 | 100% | 2.057.894.226 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Barat |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 484.990.448 | 100% | 478.625.955 | 100% | 550.176.866 | 100% | 598.967.198 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Serang Baru |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 433.509.013 | 100% | 427.820.107 | 100% | 491.775.933 | 100% | 535.387.202 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Sukatani |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 3.092.420.000 | 100% | 2.956.824.000 | 100% | 3.413.000.000 | 100% | 3.724.100.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Tambun Selatan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 1.593.200.000 | 100% | 1.572.292.558 | 100% | 1.807.338.242 | 100% | 1.858.800.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Timur |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 410.000.000 | 100% | 404.619.601 | 100% | 465.107.130 | 100% | 506.353.377 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Sukakarya |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan | N/A | 100% | 324.521.680 | 100% | 338.481.249 | 100% | 400.395.059 | 100% | 435.000.000 | 100% | Kecamatan | Kecamatan Sukawangi |
| | | PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1% | 5.020.000.000 | 2% | 4.954.122.923 | 3% | 5.615.578.059 | 4% | 6.094.889.118 | 4% | Kecamatan | Kecamatan Cibitung |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1,36% | 491.936.816 | 2,41% | 485.481.167 | 3,77% | 558.056.879 | 5,12% | 607.546.020 | 5,12% | Kecamatan | KECAMATAN Cabangbungin |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 11,29% | 535.000.000 | 22,58% | 492.979.236 | 33,87% | 606.908.084 | 45,15% | 660.729.407 | 45,15% | Kecamatan | Kecamatan Bojongmangu |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1,46% | 832.450.400 | 2,95% | 821.526.217 | 4,44% | 944.338.088 | 5,93% | 1.028.083.101 | 5,93% | Kecamatan | Kecamatan Babelan |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1,40% | 305.000.000 | 2,80% | 305.000.000 | 3,20% | 345.000.000 | 4,60% | 360.000.000 | 4,60% | Kecamatan | Kecamatan Kedungwaringin |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1,04% | 671.600.000 | 1,50% | 624.443.953 | 1,80% | 716.612.943 | 2,10% | 770.448.088 | 2,10% | Kecamatan | Kecamatan Setu |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBLIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|-----------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1,54% | 615.540.000 | 3,08% | 563.540.000 | 4,61% | 613.540.000 | 6,15% | 659.090.000 | 6,15% | Kecamatan | Kecamatan Pebayuran |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 0,7% | 80.000.000 | 0,8% | 340.000.000 | 0,9% | 255.450.400 | 0,10% | 892.450.400 | 0,10% | Kecamatan | Kecamatan Tarumajaya |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1% | 475.000.000 | 2% | 468.766.611 | 3% | 538.843.626 | 4% | 586.628.912 | 4% | Kecamatan | Kecamatan Karangbahagia |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1% | 528.000.000 | 2% | 481.071.096 | 3% | 620.000.000 | 4% | 655.864.826 | 4% | Kecamatan | Kecamatan Muaragembong |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 2,2% | 691.000.000 | 4,5% | 671.932.060 | 6,8% | 783.875.675 | 9,1% | 853.390.692 | 9,1% | Kecamatan | Kecamatan Tambun Utara |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 6% | 598.400.000 | 12% | 570.547.242 | 17% | 658.829.528 | 23% | 719.028.929 | 23% | Kecamatan | Kecamatan Cibarusah |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1,3% | 615.120.000 | 1,4% | 607.047.827 | 1,5% | 662.796.823 | 1,6% | 688.120.000 | 1,6% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Selatan |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 2% | 316.920.000 | 4% | 312.761.083 | 6% | 359.516.467 | 8% | 391.398.810 | 8% | Kecamatan | Kecamatan Tambelang |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 2,04% | 702.800.000 | 4,08% | 693.577.209 | 6,12% | 797.261.685 | 8,16% | 867.963.789 | 8,16% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Utara |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 4,5% | 533.600.000 | 9,06% | 508.959.734 | 13,59% | 605.319.913 | 18,12% | 659.000.395 | 18.12 % | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Pusat |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|----------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 0,68% | 811.700.000 | 1,37% | 821.048.123 | 1,96% | 920.798.676 | 2,74% | 972.456.186 | 2,74% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Barat |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 0,86% | 567.200.000 | 1,29% | 559.756.678 | 1,93% | 643.436.010 | 2,58% | 700.496.672 | 2.58 % | Kecamatan | Kecamatan Serang Baru |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 0,93% | 776.800.000 | 1,87% | 766.606.113 | 2,80% | 881.207.850 | 3,73% | 959.354.398 | 3.37 % | Kecamatan | Kecamatan Sukatani |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1,2% | 838.080.000 | 1,5% | 827.080.000 | 1,8% | 950.720.000 | 2,0% | 1.035.000.000 | 2,0% | Kecamatan | Kecamatan Tambun Selatan |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1% | 628.300.000 | 2% | 620.054.867 | 3% | 712.748.316 | 3% | 792.748.316 | 3% | Kecamatan | Kecamatan Cikarang Timur |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1,50% | 600.000.000 | 3% | 592.126.246 | 5% | 680.644.580 | 7% | 741.004.942 | 7% | Kecamatan | Kecamatan Sukakarya |
| | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Tingkat partisipasi penduduk usia produktif pada kegiatan pemerintahan umum | N/A | 1% | 530.340.256 | 2% | 538.979.146 | 3% | 620.340.257 | 4% | 694.709.676 | 4% | Kecamatan | Kecamatan Sukawangi |
| Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah | Meningkatkan kualitas penyusunan penganggaran belanja daerah | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Dimensi pengalokasian belanja dalam APBD | N/A | 15 poin | 875.935.146.060 | 15 poin | 995.896.092.379 | 20 poin | 1.081.139.696.251 | 20 poin | 1.179.221.796.600 | 20 poin | Kuangan | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | Mendorong optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah | | Dimensi penyerapan anggaran | N/A | 14,28 poin | | 14,28 poin | | 14,28 poin | | 17,14 poin | | 17,14 poin | Kuangan | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan laporan barang milik daerah | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD dan berkualitas baik | N/A | 100% | 2.446.418.700 | 100% | 2.414.314.533 | 100% | 2.775.236.048 | 100% | 3.021.347.245 | 100% | Kuangan | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah untuk membiayai program pembangunan daerah | Menyusun rencana optimalisasi potensi pendapatan asli daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase dokumen perencanaan dan pengembangan PAD yang disediakan | N/A | 100% | 5.305.589.000 | 100% | 5.724.156.138 | 100% | 6.303.282.000 | 100% | 6.748.928.113 | 100% | Keuangan | Badan Pendapatan Daerah |
| | Meningkatkan kinerja penagihan pajak daerah | | Persentase Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | |
| | Meningkatkan pengendalian dan evaluasi wajib pajak daerah | | Peningkatan pengendalian dan evaluasi Wajib Pajak Daerah | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | |
| Meningkatkan jumlah bangunan gedung pemerintah daerah yang laik fungsi | Mendorong sertifikasi laik fungsi bagi gedung milik pemerintah | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase SLF yang diterbitkan | N/A | 30% | 4.400.000.000 | 32% | 4.400.000.000 | 34% | 4.400.000.000 | 36% | 4.400.000.000 | 36% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | Meningkatkan layanan persetujuan bangunan gedung | | Persentase rekomendasi teknis PBG yang diterbitkan | N/A | 40% | | 42% | | 44% | | 46% | | 46% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | Melakukan pembinaan terhadap perusahaan jasa konstruksi | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Cakupan perusahaan jasa konstruksi yang dibina | N/A | 10% | 535.730.000 | 15% | 965.730.000 | 20% | 965.730.000 | 25% | 965.730.000 | 25% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja ASN sesuai standar | Meningkatkan kondisi bangunan negara lainnya melalui penataan bangunan dan lingkungan | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANN YA | Persentase peningkatan bangunan negara lainnya dalam kondisi baik | N/A | 32,8% | 83.000.000.000 | 44,8% | 82.000.000.000 | 52,2% | 82.000.000.000 | 60% | 82.000.000.000 | 60% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan konektivitas jalan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas jalan kabupaten dan jalan penghubung antarpermukima n dan perumahan | Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten | PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 76,11% | 81,38% | 303.462.393.000 | 87,71% | 331.916.264.829 | 92,88% | 311.742.409.062 | 97,53% | 331.609.304.925 | 97,53% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| | | | Persentase jembatan dalam kondisi layak | N/A | 40,01% | | 43,77% | | 48,26% | | 53,26% | | 53,26% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| | | | Persentase pengawasan jalan dan jembatan | N/A | 100,00% | | 100,00% | 100,00 % | | 100,00 % | | 100,00% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | |
| | Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan desa | PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN | Persentase panjang jalan desa yang terbangun | N/A | 0% | - | 76,49% | 31.500.000.000 | 80,12% | 59.436.111.694 | 83,86% | 61.372.223.388 | 83,86% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGA N PERMUKIMAN | Persentase pembangunan infrastruktur permukiman | 73,74 % | 76% | 43.000.000.000 | 79% | 1.500.000.000 | 82% | 1.500.000.000 | 86,36% | 2.500.000.000 | 86,36% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan desa untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase panjang drainase desa yang terbangun | N/A | 0 | - | 16,23% | 10.000.000.000 | 17,41% | 20.000.000.000 | 18,60% | 20.000.000.000 | 18,60% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | Mendorong pengalihan aset prasarana dan sarana utilitas umum perumahan ke pemerintah daerah | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | persentase PSU yang diserahterimakan | N/A | 14,21% | 59.116.500.000 | 15,50% | 52.832.325.784 | 16,80% | 74.052.611.694 | 18,09% | 83.116.500.000 | 18,09% | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan perumahan | | persentase pemenuhan jalan perumahan | N/A | 15,48% | | 16,50% | | 17,67% | | 19,13% | | 19,13% | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | Membangun dan meningkatkan kualitas drainase pada jalan perumahan untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak jalan | | persentase pemenuhan drainase di perumahan | N/A | 14,54% | | 14,85% | | 15,20% | | 15,65% | | 15,65% | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan pemenuhan perlengkapan jalan penghubung antarpermukiman dan jalan perumahan serta fasilitas penunjang lainnya | | persentase PJUL yang dibangun | N/A | 19,31% | | 38,61% | | 57,92% | | 77,23% | | 77,23% | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | | | Persentase taman yang dibangun | N/A | 16,00% | | 28,00% | | 42,00% | | 58,00% | | 58,00% | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | Menyediakan kebutuhan lahan untuk meningkatkan kapasitas jalan | PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN | Persentase kebutuhan lahan untuk jalan yang terpenuhi | N/A | 57,50% | 93.300.000.000 | 58,3% | 93.300.000.000 | 59,00% | 93.300.000.000 | 59,75% | 93.300.000.000 | 59,75% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas | Meningkatkan kinerja layanan pengujian berkala kendaraan bermotor | PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Kendaraan bermotor wajib uji Yang Laik Jalan | 85% | 88% | 42.270.200.000 | 91% | 41.670.200.000 | 94% | 47.884.608.000 | 98% | 52.477.968.482 | 98% | Perhubunga n | Dinas Perhubungan |
| | Meningkatkan ketersediaan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan | | Persentase ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan | 40% | 45% | | 50% | | 55% | | 60% | | 60% | Perhubunga n | Dinas Perhubungan |
| | Menurunkan derajat kejenuhan jalan | | Tingkat v/c ratio di wilayah Kabupaten Bekasi | 20% | 30% | | 40% | | 50% | | 60% | | 60% | Perhubunga n | Dinas Perhubungan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana | Meningkatkan kualitas pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Nilai Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan sesuai kewenangannya | 0,15 | 0,18 | 75.000.000 | 0,20 | 51.000.000 | 0,21 | 251.000.000 | 0,23 | 581.000.000 | 0,23 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Nilai Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik sesuai kewenangannya | 0,29 | 0,37 | 4.739.000.000 | 0,43 | 4.548.202.491 | 0,48 | 5.203.966.415 | 0,50 | 5.382.521.991 | 0,50 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Nilai Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana sesuai kewenangannya | 0,15 | 0,25 | 775.000.000 | 0,30 | 775.000.000 | 0,35 | 850.000.000 | 0,40 | 950.000.000 | 0,40 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|--|-------------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Nilai Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana sesuai kewenangannya | 0,25 | 0,31 | 830.000.000 | 0,34 | 500.000.000 | 0,36 | 500.000.000 | 0,38 | 500.000.000 | 0,38 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Nilai Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sesuai kewenangannya | 0,10 | 0,26 | 500.000.000 | 0,30 | 954.000.000 | 0,36 | 1.044.000.000 | 0,41 | 1.131.500.000 | 0,41 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Meningkatkan <i>response time</i> petugas pada kejadian bencana | Meningkatkan kualitas kinerja petugas dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan korban bencana | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Meningkatnya Waktu tanggap penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran | 80% | 81% | 10.217.921.000 | 82% | 10.121.748.264 | 83% | 10.202.921.000 | 84% | 10.510.000.000 | 84% | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Dinas Pemadam Kebakaran |
| | | | Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan dan Penyelamatan | N/A | 81% | 82% | 83% | 84% | 84% | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Dinas Pemadam Kebakaran | | | | |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan pemenuhan ketersediaan sarana prasarana pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan penyelamatan bencana kebakaran | | Meningkatnya jumlah bangunan yang terproteksi terhadap bahaya kebakaran | N/A | 81% | | 82% | | 83% | | 84% | | 84% | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Dinas Pemadam Kebakaran |
| Mengoptimalkan upaya pengendalian dan penanganan bencana banjir dan kekeringan | Meningkatkan kinerja penanganan banjir dan kekeringan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase penanganan banjir | N/A | 18,12% | 63.857.000.000 | 19,51% | 103.740.000.000 | 29,44% | 143.257.717.940 | 32,93% | 166.018.941.721 | 32,93% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| | | | persentase penanganan kekeringan | N/A | 12,06% | | 20,59% | | 30,88% | | 36,47% | | 36,47% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| | Membangun dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota | N/A | 8,23% | 7.062.000.000 | 27,73% | 14.400.000.000 | 30,50% | 15.661.248.606 | 33,55% | 16.101.523.661 | 33,55% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| Meningkatkan capaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman | Meningkatkan cakupan penanganan rumah korban bencana atau yang terkena relokasi program pemerintah daerah | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | persentase rumah korban bencana yang ditangani | N/A | 100% | 33.800.000.000 | 100% | 33.800.000.000 | 100% | 33.800.000.000 | 100% | 37.800.000.000 | 100% | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | persentase rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang ditangani | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | | | persentase penerbitan dokumen pertelaan rumah susun | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Mendorong pemenuhan hak masyarakat dalam demokrasi, khususnya hak kebebasan sipil dan hak-hak politik masyarakat | Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pencegahan konflik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri | 91,38% | 91,38% | 10.992.424.000 | 91,67% | 195.482.415.580 | 92,78% | 18.075.806.012 | 93,75% | 1.834.994.999 | 93,75% | Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Mengoptimalkan peran DPRD dalam mewujudkan demokrasi dan pencegahan konflik di masyarakat | Mengoptimalkan peran DPRD melalui dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Pemahaman Anggota DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD | 100% | 100% | 25.545.915.350 | 100% | 24.971.784.218 | 100% | 30.790.754.000 | 100% | 33.910.754.000 | 100% | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD |
| | | | Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD |
| | | | Presentase capaian fasilitasi layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | N/A | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD |
| Meningkatkan ketertiban di masyarakat | Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penyelesaian pelanggaran Perda | N/A | 30% | 15.455.039.760 | 30% | 15.253.536.745 | 30% | 17.418.874.314 | 30% | 18.383.600.582 | 30% | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Meningkatkan kinerja pengamanan lingkungan | | Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | N/A | 21,00% | | 22,50% | | 24,00% | | 24,00% | | 24,00% | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Persentase rasio Linmas per RT | N/A | 6,40% | | 7,90% | | 9,30% | | 9,30% | | 9,30% | Ketenterama n dan Ketertiban Umum Serta Perlindunga n Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Satpol PP | N/A | 21,00% | | 22,50% | | 23,10% | | 23,40% | | 23,40% | Ketenterama n dan Ketertiban Umum Serta Perlindunga n Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Meningkatkan kerukunan antarumat beragama | Meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam pencegahan konflik melalui pemberdayaan dan pengawasan | PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAK ATAN | Tingkat Pembinaan dan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakat an | 90,91% | 90,91% | 207.600.000 | 91,20% | 204.875.681 | 95,71% | 235.503.025 | 96,25% | 256.387.710 | 96,25% | Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Melakukan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya bagi tokoh agama dan/atau penghayat kepercayaan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Tingkat Pembinaan dan Pengembanga n Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 90,59% | 90,59% | 717.296.000 | 92,38% | 707.882.979 | 93,60% | 813.706.058 | 94,48% | 885.866.468 | 94,48% | Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan kerjasama antarinstansi di daerah untuk mencegah terjadinya konflik agama dan sosial | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 66,87% | 66,87% | 1.908.096.000 | 68,96% | 1.883.056.202 | 71,7% | 2.164.558.668 | 74,70% | 2.356.514.277 | 74,70% | Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat | Meningkatkan pemahaman mengenai ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Bangsa | 61% | 61% | 1.106.296.000 | 62% | 1.091.778.162 | 63% | 1.254.990.627 | 64% | 1.366.284.672 | 64% | Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah | Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase penanganan sampah terhadap cakupan layanan pengelolaan persampahan | 51,30% | 53,50% | 86.092.990.483 | 54% | 84.585.234.257 | 54,5% | 97.611.708.151 | 55% | 106.650.183.851 | 55% | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan kinerja pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan standar ketentuan teknis | | Persentase pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan standar ketentuan teknis | 100% | 28% | | 30% | | 32% | | 34% | | 34% | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| Meningkatkan kinerja pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan | Menyusun perencanaan pengelolaan lingkungan hidup | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup | 100% | 100% | 2.894.078.010 | 100% | 1.730.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.050.000.000 | 100% | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Melakukan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Pencemaran Air | N/A | 10 - 14,5 | 5.913.772.000 | 10 - 14 | 6.059.980.000 | 10 - 13,5 | 6.995.978.000 | 10 - 13 | 7.556.575.800 | 10 - 12,5 | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Indeks Equivalen Udara (IE _u) | N/A | 0.99 - 0.98 | | 0.98 - 0.97 | | 0.97 - 0.96 | | 0.96 - 0.95 | | 0.95 - 0.94 | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Persentase Ketersediaan Inventarisasi dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | N/A | 12,50% | | 15% | | 17,50% | | 20% | | 20% | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Parameter Terakreditasi | N/A | 50% | | 62,50% | | 87,50% | | 100% | | 100% | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan dan menjaga luasan ruang terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara dan melestarikan habitat keanekaragaman hayati | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Taman Keanekaragaman Hayati | N/A | 10% | 300.000.000 | 20% | 300.000.000 | 30% | 500.000.000 | 40% | 500.000.000 | 40% | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Meningkatkan kinerja pengendalian pengelolaan limbah B3 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Pengelolaan Limbah B3 | 100% | 100% | 175.000.000 | 100% | 175.000.000 | 100% | 210.000.000 | 100% | 227.500.000 | 100% | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Mendorong peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan melalui pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban dalam izin lingkungan dan izin PPLH | N/A | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 660.000.000 | 100% | 726.000.000 | 100% | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, pengendalian, dan pengelolaan persampahan secara mandiri melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan bagi masyarakat | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 100% | 100% | 120.000.000 | 100% | 120.000.000 | 100% | 132.000.000 | 100% | 145.200.000 | 100% | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase sekolah penerima penghargaan lingkungan hidup | N/A | 21,43% | 200.000.000 | 42,86% | 200.000.000 | 64,29% | 220.000.000 | 85,71% | 242.000.000 | 85,71% | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Menindaklanjuti pengaduan kasus lingkungan | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang tertangani | 100% | 100% | 75.000.000 | 100% | 82.500.000 | 100% | 90.750.000 | 100% | 99.825.000 | 100% | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| Mencegah terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga | Meningkatkan kinerja layanan air limbah domestik kepada masyarakat | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase layanan air limbah domestik | N/A | 5% | 7.421.840.000 | 7% | 14.189.298.471 | 9% | 7.321.840.000 | 11% | 6.821.840.000 | 11% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL (2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR | BIDANG URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | Membantu penyediaan infrastruktur sanitasi bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk buang air besar sembarangan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase peningkatan jumlah penduduk bebas BABS | 85,35% | 85,92% | 12.600.000.000 | 86,48% | 12.600.000.000 | 87,05% | 12.600.000.000 | 87,61% | 16.600.000.000 | 87,61% | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| Meningkatkan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib ruang | Meningkatkan kualitas rencana umum dan rinci tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Indeks Perencanaan Ruang | N/A | 0,19 | 5.016.642.151 | 0,38 | 5.662.062.151 | 0,57 | 5.757.140.151 | 0,78 | 5.838.243.971 | 0,78 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | Meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah | | Indeks Pemanfaatan Ruang | N/A | 0,71 | | 0,74 | | 0,77 | | 0,8 | | 0,8 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | | Indeks Kepatuhan Ruang | N/A | 0,885 | | 0,915 | | 0,945 | | 0,975 | | 0,975 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| JUMLAH | | | | | | 3.733.113.088.048 | | 4.007.803.289.060 | | 4.277.786.093.557 | | 4.614.458.364.723 | | | |



Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran daerah yang krusial, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menetapkan 28 program penunjang proyek strategis daerah yang diambil dari 141 program prioritas di atas untuk mendukung 17 proyek strategis daerah tahun 2023-2026. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Program Penunjang Proyek Strategis Daerah Tahun 2023-2026

| PROGRAM | PROYEK STRATEGIS | |
|---|------------------------------------|--|
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Proyek Strategis SPAM | Peningkatan akses air minum kepada masyarakat. |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Proyek strategis ketahanan pangan | Peningkatan ketersediaan cadangan pangan masyarakat melalui pembangunan lumbung pangan masyarakat. |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan | | |
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Proyek strategis jalan | Pembangunan jalan tanggul sebagai jalan alternatif, penataan jalan strategis kabupaten, serta melanjutkan pembangunan jalan strategis lainnya yang belum selesai. |
| | Proyek strategis jembatan | Pembangunan jembatan penghubung ke akses wisata daerah. |
| Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Proyek strategis koperasi dan UMKM | Upaya untuk mendorong UMKM naik kelas melalui fasilitasi kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar lainnya, peningkatan wirausaha baru/pemula (Start Up menjadi Scale Up), serta fasilitasi pelaku usaha mikro dalam pengembangan produktivitas dan peningkatan mutu serta sertifikasi, label dan merk produk. |
| Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | | |
| Program Pengembangan UMKM | | |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | | |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Proyek strategis sentra IKM | Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah. |
| Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Proyek strategis pariwisata | Pengembangan destinasi wisata dan promosi wisata melalui festival pariwisata. |
| Program Pemasaran Pariwisata | | |
| Program Pengelolaan Persampahan | Proyek strategis TPST dan TPS3R | Pembangunan TPST dan TPS3R untuk membantu pengelolaan persampahan yang sudah overload di Kabupaten Bekasi. |



| PROGRAM | PROYEK STRATEGIS | |
|---|----------------------------------|--|
| Program Pengelolaan Pendidikan | Proyek strategis pendidikan | Mendorong peningkatan partisipasi siswa melalui program sekolah penggerak |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Proyek strategis olahraga | Pembangunan dan revitalisasi sarana olahraga di kecamatan. |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Proyek strategis pertanian | Upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi; peningkatan kualitas dan populasi hewan ternak melalui inseminasi buatan; pengembangan budidaya tanaman pangan padi khusus dan non padi, pengendalian organisme pengganggu, penguatan data strategis pertanian, serta pembangunan sentra agro. |
| Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Proyek strategis perikanan | Pembangunan sarana dan prasarana perikanan dan budidaya, serta marketplace ikan hias di Kabupaten Bekasi. |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | | |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | |
| Program Penatagunaan Tanah | Proyek strategis pengadaan tanah | Pengadaan tanah untuk memenuhi proyek strategis pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik lainnya |
| Program Penyelenggaraan Jalan | | Pengadaan tanah untuk memenuhi proyek strategis jalan |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Proyek strategis sumber daya air | Pembangunan dan perbaikan drainase yang terhubung ke sungai, normalisasi sungai, serta infrastruktur penunjang yang dapat mencegah banjir. |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Proyek strategis ODF | Membangun sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas tersebut. |
| Program Kawasan Permukiman | Proyek strategis rutilahu | Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi fakir miskin. |
| Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | | |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Proyek strategis kesehatan | Pengadaan obat dan vaksin bagi satuan kesehatan serta meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. |

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023-2026 telah disusun perkiraan belanja daerah untuk kurun waktu tahun tersebut. Adapun alokasi pendanaan daerah diprioritaskan untuk membiaya pengeluaran sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang sifatnya wajib mengikat, antara lain: belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja yang telah diarahkan (*earmark*), dukungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, belanja air, listrik, telepon, BBM kendaraan operasional pengangkut sampah dan kendaraan operasional penunjang prioritas daerah lainnya.
2. Belanja program/kegiatan prioritas/proyek strategis daerah yang mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran daerah
3. Belanja prioritas lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti alokasi minimum belanja pendidikan sebesar 20%, alokasi minimum belanja kesehatan sebesar 10%, dan lainnya.

Rata-rata proporsi pendanaan untuk membiayai program prioritas daerah untuk tahun 2023-2026 sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya adalah sebesar 59,6%. Sementara untuk program rutin yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah adalah sebesar 40,4%. Proporsi pendanaan yang tidak terlalu besar antara program prioritas dan rutin tersebut disebabkan oleh belanja rutin yang sifatnya wajib mengikat yang cukup besar sebagaimana tersebut di atas. Adapun proporsi belanja program prioritas dan program rutin sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Proporsi Pendanaan Program Proritas dan Rutin Tahun 2023-2026

| PROGRAM | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| Prioritas | 3.733.113.088.048 | 57,4% | 4.007.803.289.060 | 59,1% | 4.277.786.093.557 | 60,2% | 4.614.458.364.723 | 61,7% |
| Rutin | 2.771.287.790.269 | 42,6% | 2.771.346.126.775 | 40,9% | 2.828.810.966.462 | 39,8% | 2.864.663.841.991 | 38,3% |
| JUMLAH | 6.504.400.878.317 | | 6.779.149.415.835 | | 7.106.597.060.019 | | 7.479.122.206.714 | |

Selama tahun 2023-2026, *earmark* yang dianggarkan terdiri belanja dana alokasi khusus non fisik, yaitu BOS Reguler, tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD, serta belanja BLUD. Selain itu, juga



dianggarkan belanja hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang rencananya akan dilaksanakan serentak di tahun 2024. Secara umum, kerangka pendanaan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026

| NO. | URAIAN | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| II | BELANJA | 6.504.400.878.317 | 6.779.149.415.835 | 7.106.597.060.019 | 7.479.122.206.714 |
| A | Belanja Operasi | 4.984.952.626.291 | 5.173.472.946.396 | 5.268.666.484.517 | 5.497.035.357.163 |
| 1 | Belanja Pegawai | 2.268.649.017.100 | 2.270.965.382.100 | 2.273.279.432.100 | 2.275.885.079.100 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.706.797.001.191 | 2.708.491.466.466 | 2.978.996.767.417 | 3.221.150.278.063 |
| 3 | Belanja Bunga | - | - | - | - |
| 4 | Belanja Subsidi | - | - | - | - |
| 5 | Belanja Hibah | 9.506.608.000 | 194.016.097.830 | 16.390.285.000 | - |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial | - | - | - | - |
| B | Belanja Modal | 645.995.105.966 | 612.229.805.963 | 759.606.478.996 | 805.930.343.395 |
| C | Belanja Tidak Terduga | 50.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| D | Belanja Transfer | 823.453.146.060 | 893.446.663.476 | 978.324.096.506 | 1.076.156.506.156 |
| 1 | Belanja Bagi hasil | 236.256.117.122 | 256.337.887.078 | 280.689.986.350 | 308.758.984.985 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 587.197.028.938 | 637.108.776.398 | 697.634.110.156 | 767.397.521.171 |

7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kabupaten Bekasi dengan memperhatikan hasil telaahan RPJMD dinas/badan provinsi dan kementerian di atasnya. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diseragamkan berdasarkan peraturan dimaksud. Adapun jumlah urusan/unsur/bidang urusan/program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama tahun 2023-2026 adalah sebanyak 8 urusan/unsur, 40 bidang urusan/unsur, 140 program urusan/unsur, dan 1 program non urusan/unsur/rutin. Urusan, bidang, dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Sosial

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Penanganan Bencana

- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Program Rehabilitasi Sosial
- 2) Perumahan dan Kawasan Permukiman**
- Program Kawasan Permukiman
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 3) Pendidikan**
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pengembangan Kurikulum
- 4) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - Program Penataan Bangunan Gedung
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - Program Pengembangan Permukiman
 - Program Penyelenggaraan Jalan
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Program Penanggulangan Bencana
 - Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 6) Kesehatan**
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Pertanian

- Program Penatagunaan Tanah
- Program Pengelolaan Tanah Kosong
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

2) Tenaga Kerja

- Program Hubungan Industrial
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja

3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Perlindungan Khusus Anak
- Program Perlindungan Perempuan

4) Pangan

- Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Program Pengawasan Keamanan Pangan
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

5) Lingkungan Hidup

- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - Program Pengelolaan Persampahan
 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- Program Pencatatan Sipil
 - Program Pendaftaran Penduduk
 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - Program Penataan Desa
 - Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Program Pengendalian Penduduk
- 9) Perhubungan**
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 10) Komunikasi dan Informatika**
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

11) Persandian

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

12) Statistik

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

13) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Pengembangan UMKM
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

14) Penanaman Modal

- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal

15) Kebudayaan

- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Program Pembinaan Sejarah
- Program Pengelolaan Permuseuman
- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional

16) Kepemudaan dan Olahraga

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

17) Perpustakaan

- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- Program Pembinaan Perpustakaan



18) Kearsipan

- Program Pengelolaan Arsip

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1) Transmigrasi

- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

2) Kelautan dan Perikanan

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3) Pariwisata

- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

4) Pertanian

- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Perizinan Usaha Pertanian

5) Perdagangan

- Program Pengembangan Ekspor
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

6) Perindustrian

- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

4. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**1) Perencanaan**

- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2) Keuangan

- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3) Kepegawaian

- Program Kepegawaian Daerah

4) Pendidikan dan Pelatihan

- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5) Penelitian dan Pengembangan

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

5. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**1) Inspektorat Daerah**

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

6. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**1) Sekretariat Daerah**

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Perekonomian dan Pembangunan

2) Sekretariat DPRD

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

7. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**1) Kesatuan Bangsa dan Politik**

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

8. UNSUR KEWILAYAHAN

1) Kecamatan

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

9. NON URUSAN/UNSUR

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program urusan/unsur/non urusan/non unsur dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya. Perangkat daerah yang tidak memiliki tupoksi untuk melaksanakan suatu urusan/unsur tertentu tidak diperbolehkan untuk menggunakan judul program yang ada pada urusan/unsur tersebut karena tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan/unsur tersebut. Sementara untuk program non urusan/unsur dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan. Rencana program perangkat daerah disertai indikator kinerja target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2023-2026 dapat dilihat pada lampiran.

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Makro Daerah Tahun 2017-2021

Mewujudkan pemerintahan yang baik adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu untuk diukur sehingga dapat dievaluasi setiap tahunnya dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya. Adapun pengukuran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan menetapkan indikator-indikator pembangunan yang dianggap dapat mewakili kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan rencana pembangunan yang telah disusun. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, disusunlah indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, dengan jumlah indikator sebanyak 14 indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama daerah, secara umum rata-rata capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi selama tahun 2019-2021 telah cukup baik dengan rata-rata capaian sebesar 91,92%, 94,61%, dan 88,32%. Rata-rata capaian yang rendah hanya terjadi di tahun 2018 akibat tidak tercapainya indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Sampai dengan tahun 2021, dari 11 indikator tersebut hanya 2 indikator yang capaiannya masih rendah, yakni indikator predikat kabupaten/kota layak anak yang selama tahun 2019-2021 targetnya tidak tercapai karena kategorinya tidak mengalami peningkatan, serta indikator tingkat pengangguran terbuka dimana tingkat capaiannya selama dua tahun terakhir sangat rendah. Selain itu, 1 indikator, yakni predikat LPPD juga selama 3 tahun terakhir tidak dapat diukur karena tidak keluarnya penetapan peringkat dari Kementerian Dalam Negeri. Terakhir, 1 indikator yakni indikator opini BPK untuk tahun 2021 juga belum dapat diukur akibat belum keluarnya opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Target dan capaian indikator tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut:



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

Tabel 8.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Data Capaian Awal (2017) | Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|---------|-------------------------|--|--------|-------------------------|--|--------|-------------------------|--|--------|-------------------------|
| | | | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 |
| | | | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target |
| Penunjang Urusan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mewujudkan sinergi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan serta menjamin kepastian batas wilayah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kredibel | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik | Poin | 76,15 | 80 | 76,7 | 95,875 | 82 | 79,78 | 97,29 | 85 | 80,03 | 94,15 | 87 | 82,72 | 95,08 | 90,00 |
| | | Peringkat LPPD Tingkat Provinsi dan Nasional | Ranking | 36 | 36 Nasional (Kabupaten) | 27 | 133,3 | 30 Nasional (Kabupaten) | tidak keluar penetapan peringkat se-nasional | - | 25 Nasional (Kabupaten) | tidak keluar penetapan peringkat se-nasional | - | 20 nasional (kabupaten) | belum keluar penetapan peringkat se-nasional | - | 10 nasional (kabupaten) |
| Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Integritas dan Profesionalitas ASN | Indeks Profesionalisme ASN | Poin | 72,47 | 80 | 80,1 | 100,125 | 81 | 55,63 | 68,68 | 83 | 83,21 | 100,25 | 85 | 89,07 | 104,79 | 86,00 |
| Urusan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Optimalnya penggalan sumber pendapatan daerah serta pengelolaan asset daerah | Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah | Persen | 4,81% | 0,18% | -9,42% | (5.233) | 6,57% | 13,57% | 206,54 | 6,62% | 2,28% | 34,46 | 6,67% | 6,72% | 100,75 | 6,71% |
| | | Opini BPK | Predikat | WTP | WTP | WTP | 100 | WTP | WTP | 100 | WTP | WTP | 100 | WTP | dalam proses pemeriksaan BPK | - | WTP |
| Urusan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 10,03% | 8,11% | 9,69% | 83,69 | 7,47% | 8,84% | 84,50 | 6,83% | 12% | 31,04 | 6,19% | 10,09% | 61,35 | 5,55% |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Data Capaian Awal (2017) | Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--------------------------|-----------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | | | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 |
| | | | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target |
| Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender | Poin | 86,55 | 88,85 | 88,28 | 99,36 | 89,34 | 88,68 | 99,26 | 89,83 | 88,58 | 98,6 | 90,32 | 88,88 | 98,41 | 90,81 |
| 6 | Terwujudnya Kabupaten Bekasi Sebagai Kabupaten/kota layak anak | Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak | Predikat | Pratama | Pratama | Pratama | 100 | Madya | Pratama | - | Nindya | Tidak ada penilaian | - | Utama | Pratama | - | KLA |
| Urusan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Meningkatkan PDRB dari sektor pariwisata | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan | Persen | - | 20% | 12,90% | 64,50 | 40% | 16% | 40 | 60% | 48% | 79,59 | 80% | 84,75% | 105,94 | 100% |
| Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Wirausaha Baru | Persentase Pertumbuhan UMKM baru | Persen | 8,00% | 20% | 20,00% | 100,00 | 40% | 32% | 80 | 60% | 73% | 121,67 | 80% | 113% | 141,25 | 100% |
| | | Persentase Pertumbuhan wirausaha IKM Baru | Persen | 8,00% | 20% | 28,80% | 144,00 | 40% | 35,60% | 89 | 60% | 89% | 148 | 80% | 120,4% | 150,50 | 100% |
| Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan | Indeks Pendidikan | Poin | - | 66,22 | 65,72 | 99,24 | 67,66 | 65,8 | 97,25 | 69,07 | 66,76 | 96,66 | 70,52 | 67,39 | 95,56 | 71,93 |
| Urusan Kesehatan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | UHH | Poin | 73,3 | 73,34 | 73,34 | 100,00 | 73,39 | 73,56 | 100,23 | 73,44 | 73,68 | 100,32 | 73,49 | 73,81 | 100,44 | 73,54 |
| Urusan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Meningkatnya kualitas air dan udara | Indeks kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 34,6 | 13 | 39,16 | 301,23 | 25 | 33,06 | 132,24 | 38 | 49,63 | 130,6 | 51 | 48,025 | 94,17 | 63,00 |
| Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi | | | | | (265) | | | 91,92 | | | 94,61 | | | 88,32 | | | |

Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama, ditemukan faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan ke depannya sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
 - a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
 - 1) Penyelenggaraan penyusunan IKM dapat terlaksana dengan baik, didukung peran aktif dan kerjasama dari Perangkat Daerah yang terlibat dan dijadikan sampel
 - 2) Dilaksanakannya pelayanan langsung mendatangi masyarakat
 - 3) Adanya pembaharuan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan catatan sipil melalui aplikasi berbasis web Sitepak (Sistem Terpadu Pendaftaran)
 - b. Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja
 - 1) Adanya lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi termasuk pegawai pemerintah pemberi layanan, sehingga pelayanan terhambat
 - 2) Sarana dan prasarana di beberapa instansi pemberi layanan kurang memadai
 - 3) Pemberlakuan aturan WFH bagi pegawai sehingga sistem pelayanan tidak berjalan maksimal
 - c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
 - 2) Peningkatan kompetensi SDM pelayanan
 - 3) Optimalisasi sistem teknologi informatika dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Terbangunnya *link and match* lulusan yang siap pakai khususnya pada bursa kerja khusus
 - 2) Tersedianya akses informasi lowongan pekerjaan
 - 3) Terselenggaranya peningkatan kompetensi dan ketrampilan pencari kerja
 - 4) Tersedianya sarana dan prasarana balai latihan kerja
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Tingginya tingkat urbanisasi dari daerah lain
 - 2) kurangnya *skill* dan kompetensi pada masyarakat angkatan kerja di Kabupaten Bekasi

- 3) Kurangnya informasi pasar kerja
 - 4) Tingginya upah minimum menyebabkan tenaga kerja di luar daerah untuk bekerja di Kabupaten Bekasi dan mendorong tingkat persaingan kerja semakin tinggi
 - 5) Pandemi Corona yang masih menjadi isu utama sehingga banyak perusahaan hanya bertahan, tidak ekspansi dan rekrut tenaga kerja baru
 - 6) Kurangnya ketaatan perusahaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja bagi Penduduk Asli Bekasi/Lokal
- c. Tindakan lanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
- 1) Peningkatan layanan informasi pasar kerja melalui pengimplementasian sistem informasi pasar kerja untuk *forecasting demand* yang tepat sehingga dapat mempersiapkan *supply* atau ketersediaan tenaga kerja lebih dini
 - 2) Peningkatan pemantauan data informasi pasar kerja dalam rangka penyusunan bahan data informasi pasar kerja untuk mengefektifkan pelayanan informasi pasar kerja
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan media sosial dalam rangka peningkatan pelayanan informasi pasar kerja
 - 4) Peningkatan produktivitas wirausaha melalui pembinaan peningkatan produktivitas terhadap perusahaan kecil dan menengah
 - 5) Peningkatan pemantauan data produktivitas di perusahaan
 - 6) Pengefektifan sosialisasi tentang pengukuran dan analisa produktivitas pada perusahaan
 - 7) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan kualitas calon tenaga kerja dari pelatihan dasar-dasar K3 dan etos kerja calon tenaga kerja agar dapat bersaing di dunia industri, sertifikasi calon tenaga kerja supaya dapat bersaing di dunia kerja, pelaksanaan program pemagangan yang pembiayaannya dibantu oleh perusahaan agar meminimalisir pengeluaran APBD, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi
 - 8) Pelaksanaan monitoring lembaga pelatihan kerja agar terakreditasi dan sesuai prosedur perundangan
 - 9) Pelaksanaan sinergitas *link and match* kepada industri/dunia usaha

- 10) Peningkatan keterampilan untuk wirausaha
 - 11) Pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis melalui pembinaan dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan persyaratan kerja di perusahaan
 - 12) Peningkatan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja
 - 13) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja
 - 14) Penetapan upah minimum dan pengembangan sistem pengupahan
 - 15) Pelaksanaan deteksi dini permasalahan ketenagakerjaan melalui LKS Tripartit, peningkatan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 - 16) Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan melalui *skill* bagi calon pencari kerja baik soft skill maupun hard *skill*, *re-skilling* bagi pekerja yang ter-PHK, *up grading skill* bagi pekerja yang masih bekerja, peningkatan pelatihan dan perluasan kesempatan kerja.
 - 17) Peningkatan sarana HIP, simplifikasi persyaratan kerja dan harmonisasi antara pekerja dan pengusaha
 - 18) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja di perusahaan
3. Peringkat LPPD Tingkat Provinsi dan Nasional/ Indeks Capaian LPPD
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Sinkronisasi program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja kunci
 - 2) Pemanfaatan teknologi informatika dalam penyusunan dan pelaporan LPPD
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Pemberlakuan aturan WFH bagi pegawai sehingga menghambat koordinasi penyusunan LPPD
 - 2) Jumlah dan kompetensi SDM penyusun laporan yang belum memadai
 - c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Peningkatan kompetensi SDM penyusunan LPPD dan tata kelola manajemen ASN yang menerapkan merit sistem
 - 2) Perkuatan daya dukung anggaran dan penyelarasan program dan kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja Kunci
 4. Indeks Pembangunan Gender

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program P2WKSS
 - 2) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana fasilitas pelayanan pengaduan korban perempuan dan anak
 - 3) Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga
 - 4) Adanya dukungan peran serta dari perangkat daerah lain
 - 5) Adanya dukungan pendanaan dari non APBD/CSR
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Kondisi masih dalam pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
 - 2) Belum adanya rumah aman/rumah singgah sebagai fasilitas untuk pelayanan
 - 3) Masih kurangnya koordinasi dengan Satgas PPA
 - 4) Dalam melaksanakan kegiatan Sekoper Cinta, masih kurangnya SDM para kader/peserta Sekoper Cinta, adanya perbedaan mencolok antara kader/peserta Sekoci pada indikator ketahanan keluarganya baik dari ekonomi, pendidikan, sosial budaya
- c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur/mediator/konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
 - 2) Melaksanakan sosialisasi SOP Pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak kepada Masyarakat
 - 3) Meningkatkan sinergitas dan kesadaran masing-masing OPD serta seluruh masyarakat mengenai pentingnya pencapaian P2WKSS pada suatu wilayah sebagai strategi untuk meningkatkan pembangunan daerah
 - 4) Merumuskan peraturan daerah perlindungan khusus anak
- 5. Predikat Kabupaten Layak Anak
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Koordinasi program lintas sektor antar perangkat daerah terhadap dukungan capaian Kabupaten Layak Anak
 - 2) Peningkatan ruang publik ramah anak

- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Dalam mencapai Kabupaten Layak Anak, DP3A menghadapi kesulitan untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif dari masing-masing OPD terkait
 - 2) Masih kurangnya SDM tenaga ahli psikologi dalam pelayanan korban kekerasan
 - 3) Belum adanya Perda Perlindungan Khusus Anak
 - c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Mengoptimalisasikan koordinasi dan komitmen antar lintas sektor untuk meraih kategori Kabupaten Layak Anak
 - 2) Menjalin komitmen yang kuat antar lintas sektor untuk memenuhi data Kabupaten Layak Anak yang dibutuhkan
 - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan tenaga ahli psikolog, dan hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi
 - 4) Peningkatan pelayanan administrasi pengaduan korban kekerasan
6. Indeks Pendidikan
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Tersedianya sumber daya manusia yang memadai, serta didukung fasilitas yang terus ditingkatkan
 - 2) Ketersediaan anggaran yang memadai
 - 3) Potensi pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal Kabupaten Bekasi sangat baik untuk di kembangkan
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Bekasi merupakan daerah urban, banyak penduduk yang datang dari luar sementara kependudukannya masih di kampung halaman dan banyak juga usia sekolah yang bersekolah ke luar Bekasi dan tidak terdata
 - 2) Masih kurangnya kualifikasi guru yang linear
 - 3) Rendahnya APK PAUD dan kesetaraan
 - 4) Kurangnya peningkatan kualitas guru dengan berbagai pelatihan
 - 5) Pendidikan menengah dan tinggi bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah
 - c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Meningkatkan aksebilitas, mutu dan tata kelola pendidikan
 - 2) Melakukan peningkatan kualifikasi guru pada jenjang sekolah dasar

- 3) Potensi pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal Kabupaten Bekasi sangat baik untuk dikembangkan
 - 4) Meningkatkan kualitas guru dengan melakukan pelatihan yang dibutuhkan pada satuan pendidikan
 - 5) Mempertegas komitmen penerapan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Bekasi yang sudah digagas sebelumnya
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Terlaksananya kegiatan yang mendukung program dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 2) Pelaksanaan koordinasi terkait pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup dengan instansi terkait
 - 3) Upaya pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Tidak melaksanakan pemantauan kualitas air dan udara secara manual dikarenakan kondisi pandemi
 - 2) Kondisi tutupan lahan yang mempengaruhi penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum ada ketentuan baku, dan baru dikeluarkan ketentuan bakunya pada tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan Permenlhk No. 27 tahun 2021
 - 3) Semakin meningkatnya jumlah industri dan non industri yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bekasi
 - 4) Sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar sudah melampaui daya tampung beban pencemaran dikarenakan kondisi fisiologis Kabupaten Bekasi yang berada di hilir terhadap aliran-aliran sungai/sub-DAS
 - c. Tindakan lanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara secara manual
 - 2) Pelaksanaan program-program strategis yang mendukung upaya peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
 - 3) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaboratif terhadap pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
 - 4) Perlu adanya upaya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja daerah yang sifatnya

makro karena intervensi program Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak bisa secara langsung meningkatkan capaian Indikator Kinerja Daerah

- 5) Upaya peningkatan remediasi terhadap media lingkungan hidup
8. Indeks Profesionalitas ASN
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Adanya program dan kegiatan peningkatan kompetensi ASN melalui penyelenggaraan diklat struktural, fungsional, tugas belajar dan izin belajar
 - 2) Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait kepegawaian
 - 3) Adanya beberapa inovasi pengelolaan kepegawaian pada BKPSDM seperti aplikasi Bisma, Lentera, Bang Komar dan Sikawan
 - 4) Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur pada BKPSDM
 - 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kompetensi kepegawaian melalui webinar
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja,
 - 1) Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah dan komposisi pegawai sesuai dengan formasi yang ditetapkan
 - 2) Sistem *database* kepegawaian yang belum terintegrasi secara optimal
 - 3) Belum optimalnya pemanfaatan media dan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan administrasi kepegawaian yang prima
 - 4) Belum terintegrasinya aplikasi e-kinerja berbasis web dengan SKP
 - c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Peningkatan tata kelola manajemen ASN
 - 2) Memperkuat regulasi dan ketentuan teknis pemenuhan hak dan kesempatan pengembangan kompetensi ASN 20 jam pelajaran
 - 3) Peningkatan karier ASN yang memenuhi target kinerjanya
9. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) *Strong comitment and leadership* (kemampuan dalam mengatur dan mengarahkan organisasi)

- 2) Lingkungan organisasi yang mendukung optimalisasi kinerja yang akuntabel
 - 3) Penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 973/Kep.275-Bapenda tanggal 24 September 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bekasi Tahun 2021
 - 4) Kerjasama dengan beberapa *e-commerce merchant* yang dilakukan secara non tunai melalui Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Buka Lapak, Link aja, BumDes dan PT. Pos Indonesia sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
 - 5) Pengembangan dan perluasan kawasan berupa: 1) Industri dan Pergudangan; 2) Permukiman dan Properti; 3) Jalan Tol; 4) Perdagangan dan Jasa
 - 6) Dengan adanya pengembangan dan perluasan wilayah berdampak pada pengenaan PBB-P2 yang ditentukan oleh luas objek pajak dan NJOP per m² serta pengenaan BPHTB yang ditentukan dengan harga transaksi
 - 7) Pemberian dana hibah kepada BPN berupa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mendapatkan peta bidang tanah yang dapat meningkatkan potensi dari sektor PBB dan BPHTB
 - 8) Pelayanan keliling pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh UPTD Pajak Daerah didampingi unsur dari BJB sebagai bentuk layanan langsung kepada wajib pajak untuk menjaring dan meningkatkan pendapatan dari sektor PBB-P2
 - 9) Inovasi *dashboard* pemantauan capaian realisasi penerimaan pajak daerah untuk memantau capaian realisasi penerimaan pajak daerah
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
- 1) Kurangnya kegiatan bimbingan teknis dan webinar/seminar mengenai perpajakan bagi ASN
 - 2) Kurangnya sarana dan prasarana

- 3) Dampak dari pandemi Covid-19 dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga penerimaan pajak dari sektor pajak hotel, restoran dan hiburan tidak optimal
 - 4) Masih terbatasnya tenaga fungsional penilai objek pajak PBB-P2 dan teknologi informasi serta komunikasi petugas lapangan
 - 5) Belum adanya integrasi/akses data pelayanan dari:
 - a) DPMTSP terkait perizinan IMB dan *catering*.
 - b) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait data Fasos Fasum dan rencana tata ruang di Kabupaten Bekasi.
 - c) Dinas Kesehatan terkait izin higienis terhadap *catering*.
 - d) Dinas Ketenagakerjaan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan jasa *catering* di perusahaan.
 - 6) Masih terbatasnya tenaga fungsional penilai objek pajak PBB-P2 dan teknologi
 - 7) Masih terbatasnya tenaga fungsional pemetaan objek pajak PBB-P2, teknologi informasi dan komunikasi petugas lapangan
 - c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
 - 2) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
 - 3) Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
 - 4) Meningkatkan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 melalui pemberian penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan/desa atas pengelolaan pajak PBB-P2 buku 1, 2, dan 3
 - 5) Membuat skala prioritas pemutakhiran data hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah sesuai dengan potensi wilayah
 - 6) Melakukan penilaian atas objek pajak PBB-P2 dan pemutakhiran data baik tekstual maupun spasial serta harga transaksi BPHTB secara berkesinambungan dengan skala prioritas potensi wilayah
10. Opini BPK
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Laporan keuangan seluruhnya tersaji secara lengkap
 - 2) Penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)
 - 3) Pengungkapan dalam laporan keuangan sudah memadai

- 4) Tidak terdapat adanya kondisi yang dikecualikan dalam laporan keuangan
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Kompetensi SDM yang masih kurang mampu melakukan analisis atas transaksi dan menjadi problem solver sehingga sering terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan perangkat daerah
 - 2) Perangkat daerah yang diwajibkan menindaklanjuti masalah yang direkomendasi BPK belum dilakukan secara efektif dan optimal
 - c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Melaksanakan percepatan penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021
 - 2) Melaksanakan sistem pengendalian internal dari perangkat daerah
 - 3) Menyelenggarakan monitoring pelaporan anggaran setiap triwulanan
11. Persentase Pertumbuhan UMKM baru
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Adanya kebijakan aturan perbup/perda tentang pemberdayaan usaha mikro No. 73 tahun 2020 (pola kemitraan usaha mikro dengan usaha besar)
 - 2) Adanya kebijakan aturan perbup/perda tentang pemberdayaan usaha mikro No. 73 tahun 2020 (pola kemitraan usaha mikro dengan usaha besar)
 - 3) Tersedianya anggaran Dinas Koperasi UKM yang memadai
 - 4) Peluang kemitraan usaha mikro dengan usaha besar terbuka luas Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri
 - 5) Adanya bantuan CSR dari perusahaan bagi pelaku usaha mikro dan dukungan dan *support* dari perbankan, BUMN dan stakeholder lainnya
 - 6) Dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi bagi pelaku usaha mikro
 - 7) dukungan teknologi *marketplace* memudahkan pemasaran produk usaha mikro
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) SDM wirausaha masih banyak yang belum memahami teknologi
 - 2) Kurangnya kemampuan manajemen bagi UMKM
 - 3) Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar wirausaha yang pada umumnya merupakan unit usaha perorangan

- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan
 - 5) Kondisi pandemi Covid-19 ini telah menghambat daya beli masyarakat berkurang terhadap UMKM
 - c. Tindaklanjutan yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Meningkatkan kelas wirausaha baru dari *Star Up* menjadi *Scale Up*
 - 2) Meningkatkan jumlah kerjasama kemitraan usaha mikro dengan usaha besar
 - 3) Melakukan perluasan strategi pemberdayaan dan pemasaran melalui lembaga atau instansi lainnya
12. Persentase Pertumbuhan wirausaha IKM Baru
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Adanya dukungan bantuan alat dan sarana prasana pengembangan usaha IKM
 - 2) Tingginya permintaan produk IKM cukup tinggi
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Berdasarkan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 bahwa kewenangan Dinas Industri meliputi penyusunan perencanaan dan pengembangan kawasan industri dan pengelolaan data industri nasional, adapun kegiatan pembentukan dan pembinaan wirausaha baru di bidang industri kecil menengah tidak terdapat didalam Kepmen dimaksud
 - 2) Kurangnya SDM pembina industri
 - c. Tindaklanjutan yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Sinergi data dan pembinaan pelaku UKM
 - 2) Jejaring usaha industri besar dan industry kecil
13. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARDA)
 - 2) Terdapat potensi pengembangan pengembangan destinasi wisata Rawa Binong dan Situ Cibeurem

- 3) Sudah berkembangnya destinasi baik dikelola dan dibangun masyarakat ataupun oleh Dinas Pariwisata. Baik itu destinasi wisata alam, buatan maupun wisata bahari
 - 4) Usaha kepariwisataan yang maju dan berkembang (hotel, restoran, cafe, travel, dan lainnya)
 - 5) Adanya usulan dari masyarakat, tersedianya pendamping/instruktur untuk mengasah keterampilan pelaku ekraf, sudah ada pelaku ekraf yang memiliki hak kekayaan intelektual walaupun belum seluruhnya, harus ditingkatkan lagi sistem pemasaran baik *offline* maupun *online*
 - 6) Mengedepankan perencanaan yang tepat dan kolaborasi secara pentahelik, maka kualitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif semakin profesional
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
- 1) Status lahan beberapa objek wisata belum seluruhnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, namun masih banyak dimiliki oleh masyarakat (tanah adat)
 - 2) Belum maksimalnya promosi baik dari dalam maupun luar daerah, bahkan Internasional
 - 3) Promosi pariwisata yang dilakukan masih secara *offline*, dan perlu pengembangan promosi secara online
 - 4) Masa pandemi mengakibatkan promosi tidak maksimal karena berpengaruh terhadap pembatasan kunjungan pada suatu *event/acara*
 - 5) Keterbatasan dalam penguasaan sistem pasar dalam rangka pengembangan pariwisata
- c. Tindakan lanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
- 1) Peningkatan pendataan di sektor pariwisata
 - 2) Meningkatkan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
 - 3) Memberikan pelatihan keterampilan bagi pelaku ekonomi kreatif, memberikan sosialisasi tentang HKI, memfasilitasi pelaku ekraf untuk mengembangkan dan memasarkan produk melalui pameran ekonomi kreatif
 - 4) Penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan kepariwisataan
14. Usia Harapan Hidup
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- 1) Posyandu di seluruh wilayah puskesmas sudah mulai aktif kembali
 - 2) Melakukan penjaringan berbarengan dengan pelaksanaan vaksinasi
 - 3) Mengadakan pelayanan kesehatan pada lansia di posyandu lansia
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
- 1) Sekolah masih melaksanakan tatap muka terbatas sehingga petugas sulit untuk melakukan pemeriksaan, banyak orang tua yang melarang anaknya diperiksa karena khawatir akan tertular
 - 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan *medical check up* secara mandiri, sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan luar gedung belum terkoordinasi dengan baik, data yang diperoleh belum mencakup dari semua fasilitas kesehatan yang ada, berkurangnya kunjungan sehubungan dengan masa pandemi Covid-19
 - 3) Stigma masyarakat tentang ODGJ yang masih buruk, menganggap ODGJ adalah aib keluarga, kurangnya SDM petugas pengelola, kurangnya peran serta masyarakat
 - 4) Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC di Kabupaten Bekasi, belum optimalnya pencatatan pelaporan kasus TBC di Klinik swasta
 - 5) Jumlah layanan PDP di Kabupaten masih sedikit (1 Rumah sakit, 3 Puskesmas), Puskesmas layanan PDP yang saat ini ada belum berjalan secara optimal
- c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
- 1) Meningkatkan promosi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan pelayanan balita di posyandu dan melibatkan peran serta aktif masyarakat, puskesmas membuat inovasi untuk pelayanan terhadap ibu bersalin (kunjungan rumah)
 - 2) Meningkatkan sosialisasi skrining kesehatan pada semua instansi/perusahaan, meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan skrining kesehatan, meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, peningkatan kualitas data terutama di tingkat Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta, kompetensi/kemampuan petugas dalam deteksi dini.

- 3) Pelayanan PDP di puskesmas mulai dioptimalkan kembali, bekerjasama dengan LSM untuk memberikan pendampingan dan pelatihan pencatatan dan pelaporan terhadap layanan PDP
- 4) Penyusunan RAD TBC di Kabupaten Bekasi, sosialisasi ke fasyankes mengenai TBC, membuat surat edaran penekanan MOU klinik dan puskesmas wilayah setempat
- 5) Melakukan kunjungan dengan menggunakan pro kesehatan, penyuluhan ODGJ kepada masyarakat, meningkatkan kerjasama dan pendekatan dengan keluarga, melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk tenaga kesehatan

Selain indikator kinerja utama daerah, indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah adalah indikator makro daerah. Selama 5 tahun terakhir, capaian indikator makro daerah Kabupaten Bekasi terus mengalami penurunan, yakni dari rata-rata capaian sebesar 95,73% di tahun 2017 menurun menjadi sebesar 85,01% di tahun 2021. Selama kurun waktu tersebut, capaian terendah terjadi di tahun 2020 yakni dengan rata-rata capaian sebesar 79,12% akibat laju pertumbuhan ekonomi yang terjun bebas ke angka -3,4%.

Dari 14 indikator makro daerah, indikator tingkat pengangguran, inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi merupakan kontributor terbesar rendahnya capaian kinerja indikator makro daerah. Adapun kesulitan yang dialami dalam rangka pencapaian target kinerja inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi adalah dikarenakan pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan kebijakan ekonomi dan moneter dimana kedua kebijakan tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan penggerak ekonomi daerah Kabupaten Bekasi merupakan industri pengolahan yang didominasi oleh industri besar yang mana kebijakannya juga diatur oleh pemerintah pusat. Pada tingkat pengangguran, kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menurunkan pengangguran adalah keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia, kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, juga banyaknya penduduk dari luar yang datang untuk mencari pekerjaan dan tidak semuanya mampu mendapatkan pekerjaan sehingga pada akhirnya meningkatkan beban daerah dan semakin meningkatkan persaingan di antara pencari kerja. Untuk lebih jelasnya, capaian indikator makro daerah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2017-2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:



Tabel 8.2
Target dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

| NO | INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|--|---|---------|----------------|-------------|--------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | |
| 1. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | indeks | 72,5 | 72,63 | 100,18 | 73,14 | 73,49 | 100,48 | 73,78 | 73,99 | 100,28 | 74,4 | 74,07 | 99,56 | 75,03 | 74,45 | 99,23 |
| 2. | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 9,01 | 8,82 | 97,89 | 9,2 | 8,84 | 96,09 | 9,39 | 8,84 | 94,14 | 9,58 | 9,12 | 95,20 | 9,78 | 9,3 | 95,09 |
| 3. | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 12,52 | 12,63 | 100,88 | 12,8 | 13,05 | 101,95 | 13,09 | 13,08 | 99,92 | 13,93 | 13,09 | 93,97 | 13,65 | 13,1 | 95,97 |
| 4. | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 73,29 | 73,30 | 100,01 | 73,34 | 73,43 | 100,12 | 73,39 | 73,56 | 100,23 | 73,54 | 73,68 | 100,19 | 73,49 | 73,81 | 100,44 |
| 5. | PDRB atas dasar Harga Berlaku (dalam juta) | Juta Rp | 282.930.058,17 | 281.821.530 | 99,61 | 301.387.145 | 305.559.640 | 101,38 | 319.844.231 | 326.083.640 | 101,95 | 338.301.317 | 317.779.740 | 93,93 | 356.758.404 | 340.431.180 | 95,42 |
| 6. | PDRB atas dasar Harga Riil (dalam juta) | Juta Rp | 239.506.401,30 | 228.203.600 | 95,28 | 251.328.179 | 241.949.380 | 96,27 | 263.146.559,5 | 251.502.790 | 95,58 | 274.537.727 | 242.959.090 | 88,50 | 286.169.581 | 251.828.570 | 88,00 |
| 7. | PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (dalam rupiah) | Rupiah | 81.231.363,70 | 80.520.000 | 99,12 | 83.662.590,13 | 84.155.000 | 100,59 | 85.937.827 | 88.370.000 | 102,83 | 88.071.620 | 102.466.000 | 116,34 | 90.076.762 | 107.801.000 | 119,68 |
| 8. | PDRB per Kapita atas dasar Harga Riil (dalam rupiah) | Rupiah | 68.764.102,75 | 65.201.000 | 94,82 | 69.766.633 | 66.636.000 | 95,51 | 70.703.928 | 68.158.000 | 96,40 | 71.471.736 | 78.341.000 | 109,61 | 72.254.021 | 79.744.000 | 110,37 |
| 9. | Rasio Gini | indeks | 0,34 | 0,34 | 100,00 | 0,34 | 0,356 | 95,51 | 0,34 | 0,354 | 96,05 | 0,33 | 0,372 | 88,71 | 0,33 | 0,34 | 97,06 |
| 10. | Persentase (%) Penduduk Miskin | % | 4,77 | 4,73 | 100,85 | 4,62 | 4,37 | 105,72 | 4,46 | 4,01 | 111,22 | 4,31 | 4,82 | 89,42 | 4,15 | 5,21 | 79,65 |
| 11. | Tingkat Pengangguran (dalam persen) | % | 7,01 | 10,97 | 63,90 | 6,43 | 9,74 | 66,02 | 5,85 | 9 | 65,00 | 5,26 | 11,54 | 45,58 | 4,68 | 10,09 | 46,38 |
| 12. | Pengeluaran per Kapita per Tahun (dalam ribu rupiah) | Rupiah | 10.532,76 | 10.790,00 | 102,44 | 10.790 | 11.155 | 103,38 | 10.719 | 11.610 | 108,31 | 10.812,09 | 11.241 | 103,97 | 10.905 | 11.341 | 104,00 |
| 13. | Inflasi (dalam persen) | % | 4,96 | 3,80 | 76,61 | 4,82 | 3,21 | 66,60 | 4,69 | 3,89 | 82,94 | 4,55 | 1,79 | 39,34 | 4,42 | N/A | 0,00 |
| 14. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen) | % | 5,23 | 5,68 | 108,60 | 5,57 | 6,02 | 108,14 | 5,88 | 3,95 | 67,15 | 6 | -3,4 | -56,62 | 6,2 | 3,65 | 58,88 |
| Rata-Rata Capaian Indikator Makro Daerah | | | | | 95,73 | 95,55 | | | 94,43 | | | 79,12 | | | 85,01 | | |



8.2 Indikator Kinerja Tahun 2023-2026

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Untuk tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator makro daerah yang diambil dari indikator kinerja daerah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah untuk tahun 2023-2026.

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan akan menjadi indikator keberhasilan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk tahun 2023-2026, indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

| NO. | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN KE | | | |
|-----|---|---|-----------------|---------|---------|---------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I. | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan | Persentase Penduduk Miskin (%) | 4,69 | 4,66 | 4,63 | 4,60 |
| 1. | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) | 75,21 | 75,59 | 75,96 | 76,34 |
| 2. | Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 9,4 | 9,02 | 8,64 | 8,26 |
| II. | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,7-5,3 | 4,7-5,3 | 4,7-5,3 | 4,7-5,3 |
| 1. | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Indeks Reformasi Birokrasi (Poin) | 71,95 | 73,99 | 75,55 | 76,61 |
| 2. | Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah | Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (%) | 55,24 | 63,36 | 68,74 | 74,32 |
| 3. | Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi | Indeks Resiko Bencana (Poin) | 120,56 | 113,46 | 107,16 | 101,52 |
| | | Indeks Demokrasi (Poin) | 70,28 | 71,88 | 72,07 | 72,09 |
| | | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin) | 79,84 | 82,09 | 84,03 | 84,48 |
| 4. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | 43,19 | 43,28 | 43,36 | 43,45 |



Indikator kinerja kunci atau IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator kinerja kunci ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama dan akan menjadi indikator kinerja utama kepala perangkat daerah. Adapun untuk tahun 2023-2026 telah ditetapkan IKK sebagai berikut:

Tabel 8.4
Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

| NO. | INDIKATOR | SATU AN | TARGET TAHUN KE | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|------------|-----------------|--------|--------|--------|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | | | | |
| 1. | Indeks pendidikan | Poin | 0,7 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | Dinas Pendidikan |
| 2. | Tingkat pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar nasional | Persen | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 3. | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Poin | 7,41 | 7,71 | 8,01 | 8,31 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 4. | Indeks kesehatan | Poin | 83,18 | 83,38 | 83,58 | 83,78 | Dinas Kesehatan |
| 5. | Capaian standar mutu nasional rumah sakit | Persen | 74,33 | 87,00 | 94,00 | 99,96 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 6. | Tingkat pemenuhan prasarana kesehatan sesuai standar mutu layanan fasilitas kesehatan | Persen | 10 | 14 | 20 | 25 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 7. | Persentase kebutuhan lahan untuk kepentingan umum yang terpenuhi | Persen | 35 | 40 | 50 | 65 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| 8. | Cakupan layanan air minum | Persen | 44,09 | 49,09 | 54,09 | 59,09 | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 9. | Persentase kawasan kumuh yang tertangani | Persen | 44,08 | 44,95 | 45,82 | 46,69 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| 10. | Indeks pembangunan olahraga berdasarkan dimensi angka partisipasi masyarakat berolahraga, ruang terbuka olahraga dan SDM keolahragaan | Poin | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| 11. | Tingkat pertumbuhan produksi pertanian | Persen | 2,33 | 2,55 | 2,75 | 2,96 | Dinas Pertanian |
| 12. | Tingkat pertumbuhan produksi perikanan | Persen | 5 | 5 | 5 | 5 | Dinas Perikanan |
| 13. | Indeks harga konsumen | Poin | 118,96 | 122,96 | 126,96 | 130,96 | Dinas Perdagangan |
| 14. | Ketersediaan pangan pokok | Persen | 97,96 | 97,97 | 97,98 | 97,99 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 15. | Skor pola pangan harapan (PPH) | Poin | 86,8 | 86,9 | 87 | 87,1 | Dinas Ketahanan Pangan |



| NO. | INDIKATOR | SATU AN | TARGET TAHUN KE | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|--|------------|-----------------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 16. | Cakupan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan keamanan pangan | Persen | 40 | 50 | 55 | 60 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 17. | Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i>) | Anak | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 18. | Tingkat desa mandiri | Persen | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 19. | Indeks pembangunan gender | Poin | 88,96 | 89,04 | 89,12 | 89,2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 20. | Skor capaian kabupaten layak anak (KLA) | Poin | 602 | 612 | 622 | 632 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 21. | Tingkat cakupan PPKS yang ditangani | Persen | 21,16 | 23,28 | 25,6 | 28,16 | Dinas Sosial |
| 22. | Indeks pembangunan pemuda (IPP) berdasarkan dimensi pemuda yang aktif, pemuda berprestasi dan wirausaha muda | Poin | 30,25 | 30,50 | 30,75 | 31,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| 23. | Indeks pembangunan kebudayaan berdasarkan dimensi ekonomi budaya, warisan budaya dan ekspresi budaya | Poin | 31 | 35 | 37 | 40 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| II. | Tingkat Pengangguran Terbuka | | | | | | |
| 1. | Pengembangan destinasi wisata | Destinasi | 3 | 4 | 5 | 6 | Dinas Pariwisata |
| 2. | Tingkat pertumbuhan koperasi berkualitas | Persen | 22 | 27 | 32 | 37 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 3. | Tingkat pertumbuhan UMKM naik kelas | Persen | 6 | 9 | 12 | 15 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 4. | Nilai realisasi penanaman modal | Rp triliun | 44,12 | 45,00 | 45,90 | 46,82 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 5. | Pengembangan sentra industri | Sentra | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Perindustrian |
| 6. | Pertumbuhan nilai ekspor | Persen | 2 | 4 | 6 | 8 | Dinas Perdagangan |
| 7. | Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) | Persen | 66,00 | 66,10 | 66,20 | 66,30 | Dinas Ketenagakerjaan |
| III. | Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | | |
| 1. | Indeks perencanaan | Poin | 84,17 | 86,67 | 89,17 | 91,67 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2. | Indeks kinerja pengendalian pembangunan daerah | Poin | 65 | 70 | 75 | 80 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 3. | Nilai Sakip Pemda | Poin | 68,59 | 69,76 | 70,93 | 72,1 | Sekretariat Daerah |
| 4. | Indeks kependudukan | poin | 75 | 80 | 85 | 100 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |



| NO. | INDIKATOR | SATU AN | TARGET TAHUN KE | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 5. | Indeks kapabilitas APIP | poin | 2 | 3 | 3 | 3 | Inspektorat |
| 6. | Indeks maturitas SPIP | poin | 2 | 3 | 3 | 3 | Inspektorat |
| 7. | Indeks sistem merit | Poin | 273 | 282 | 291 | 302 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 8. | Indeks profesionalisme ASN dimensi kompetensi | Poin | 15 | 16,5 | 17 | 17,5 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 9. | Nilai kualitas kebijakan | Poin | 73 | 75 | 77 | 78 | Sekretariat Daerah |
| 10. | Cakupan nilai reformasi birokrasi dimensi deregulasi kebijakan, pelaksanaan tata laksana, manajemen perubahan, pelayanan publik dan penguatan organisasi | Persen | 62,57 | 67,53 | 70,47 | 72,7 | Sekretariat Daerah |
| 11. | Indeks inovasi | Poin | 30 | 33 | 36 | 39 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 12. | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | Poin | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| 13. | Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) | Poin | 65 | 70 | 75 | 80 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| 14. | Indeks keamanan informasi (KAMI) | Poin | 175 | 185 | 195 | 205 | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| 15. | Nilai kinerja pelayanan publik | Poin | 80,32 | 81,92 | 83,55 | 85,55 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 16. | Nilai pengawasan kearsipan | Poin | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| 17. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Cibitung |
| 18. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Cabangbungin |
| 19. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | Kecamatan Bojongmangu |
| 20. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Babelan |
| 21. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Kedungwaringin |
| 22. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 88,20 | 88,70 | 89,00 | 90,10 | Kecamatan Setu |
| 23. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 85,50 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | Kecamatan Pebayuran |
| 24. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Tarumajaya |
| 25. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Karangbahagia |



| NO. | INDIKATOR | SATU AN | TARGET TAHUN KE | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|------------|-----------------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 26. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Muaragembong |
| 27. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Tambun Utara |
| 28. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | Kecamatan Cibarusah |
| 29. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Cikarang Selatan |
| 30. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | Kecamatan Tambelang |
| 31. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Cikarang Utara |
| 32. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Cikarang Pusat |
| 33. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Cikarang Barat |
| 34. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 85,50 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | Kecamatan Serang Baru |
| 35. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 88,00 | 88,50 | 89,00 | 89,50 | Kecamatan Sukatani |
| 36. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Tambun Selatan |
| 37. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Cikarang Timur |
| 38. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Sukakarya |
| 39. | Indeks kepuasan masyarakat | Poin | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | Kecamatan Sukawangi |
| 40. | Indeks pengelolaan keuangan daerah | Poin | 30,28 | 30,28 | 35,28 | 38,14 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 41. | Tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah | Persen | 7,5 | 8 | 9 | 10 | Badan Pendapatan Daerah |
| 42. | Tingkat bangunan gedung pemerintah daerah yang laik fungsi | Persen | 5 | 6 | 7 | 8 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 43. | Persentase pemenuhan standar sarana prasarana kerja pemerintah daerah | Persen | 82,4 | 82,9 | 83,4 | 83,9 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| IV. | Tingkat Konektivitas Antar Wilayah | | | | | | |
| 1. | Tingkat konektivitas antar jalan kabupaten | Persen | 81,38 | 87,71 | 92,88 | 97,53 | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 2. | Tingkat konektivitas antar permukiman dan perumahan | Persen | 30,33 | 42,37 | 47,35 | 52,44 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| 3. | Persentase kebutuhan lahan untuk jalan yang terpenuhi | Persen | 35 | 40 | 50 | 65 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| 4. | Tingkat keselamatan lalu lintas dimensi perlengkapan jalan, kendaraan laik jalan, manajemen rekayasa lalu lintas | Persen | 54 | 60 | 66 | 73 | Dinas Perhubungan |



| NO. | INDIKATOR | SATU AN | TARGET TAHUN KE | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------|--|------------|-----------------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| V. | Indeks Resiko Bencana | | | | | | |
| 1. | Indeks ketahanan daerah (IKD) | Poin | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2. | Pencapaian ketepatan waktu tanggap (respon time) petugas pada setiap kejadian | Persen | 81 | 82 | 83 | 84 | Dinas Pemadam Kebakaran |
| 3. | Tingkat efektifitas mitigasi pengendalian banjir dan kekeringan | Persen | 18,12 | 19,51 | 29,44 | 33,93 | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| 4. | Pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| VI. | Indeks Demokrasi | | | | | | |
| 1. | Indeks demokrasi komponen kebebasan sipil dan hak-hak politik | Poin | 70,28 | 71,88 | 72,07 | 72,09 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2. | Tingkat fasilitasi kapasitas, hubungan kelembagaan DPRD dan pembahasan Perda dan penjangkaran aspirasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| 3. | Tingkat fasilitasi Perda inisiatif dewan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| 4. | Tingkat fasilitasi rekomendasi DPRD terhadap eksekutif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| VII. | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban | | | | | | |
| 1. | Indeks ketertiban masyarakat | poin | 31,36 | 33,16 | 34,56 | 34,68 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2. | Indeks kerukunan umat beragama | Poin | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,45 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3. | Indeks wawasan kebangsaan | Poin | 24,78 | 24,93 | 25,17 | 25,35 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| VIII. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| 1. | Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) | Poin | 21,00 | 21,25 | 21,75 | 22,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2. | Indeks kualitas udara (IKU) | Poin | 57,60 | 57,70 | 57,80 | 57,90 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3. | Indeks kualitas air (IKA) | Poin | 39,75 | 39,85 | 39,95 | 40,05 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4. | Indeks kualitas lahan (IKL) | Poin | 22,43 | 22,48 | 22,53 | 22,58 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 5. | Cakupan akses sanitasi aman komponen pelayanan | Persen | 5 | 7 | 9 | 11 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 6. | Tingkat akses sanitasi layak dan aman | Persen | 85,38 | 85,56 | 85,74 | 85,92 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |



| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN KE | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|--------|-----------------|------|------|------|-----------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 7. | Indeks perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang | Poin | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,85 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |

Indikator makro adalah indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Penetapan indikator makro dilakukan untuk mengukur dampak pembangunan yang telah dilaksanakan terhadap indikator pembangunan lainnya yang tidak menjadi indikator utama atau indikator kinerja kunci daerah. Untuk tahun 2023-2026, indikator makro Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 8.5
Indikator Makro Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

| NO | INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | TARGET | | | |
|-----|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 9,45 | 9,56 | 9,67 | 9,78 |
| 2. | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 13,86 | 14,09 | 14,32 | 14,54 |
| 3. | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 74,07 | 74,20 | 74,33 | 74,46 |
| 4. | PDRB atas dasar Harga Berlaku | Juta Rp | 371.188.046 | 386.579.354 | 401.970.661 | 417.361.969 |
| 5. | PDRB atas dasar Harga Konstan | Juta Rp | 273.065.994 | 285.900.096 | 299.337.400 | 313.406.258 |
| 6. | PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku | Rupiah | 113.449.396 | 118.153.574 | 122.857.752 | 127.561.930 |
| 7. | PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan | Rupiah | 83.459.509 | 87.382.106 | 91.489.065 | 95.789.051 |
| 8. | Rasio Gini | Indeks | 0,329 | 0,324 | 0,318 | 0,313 |
| 9. | Pengeluaran per Kapita | Ribu Rp/Orang/Tahun | 11.541 | 11.641 | 11.741 | 11.841 |
| 10. | Inflasi | % | 3,55 | 3,44 | 3,33 | 3,22 |
| 11. | Jumlah Penduduk Miskin | jiwa | 153.449 | 152.468 | 151.486 | 150.505 |

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk mengisi kekosongan RPJMD Kabupaten yang telah habis masa berlakunya sampai dengan dipilihnya kepala daerah yang baru. Penyusunan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2017-2021 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hal yang harus menjadi perhatian antara lain:

1. RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026.
2. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026.
3. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
4. Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan efektif dan efisien serta dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, instansi vertikal, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder terkait lainnya.
5. Dalam hal terjadi kondisi yang tidak diperkirakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kondisi darurat lainnya, dapat dilakukan perubahan atas RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026.
6. Perangkat Daerah yang melakukan perubahan program dan kegiatan, wajib menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun berkenaan.
7. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap triwulan.



RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahun 2026 atau sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru. Selanjutnya, agar RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 ini dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab.


Pj. BUPATI BEKASI

DANI RAMDAN